"Menarik dan mencerahkan". Buku ini menghadirkan pergeseran baru dalam diskusi tentang kebijakan yang sebelumnya *state oriented*, dan seolah-olah negara adalah ruang yang otonom. Didasarkan pada isu aktual terkait polemik pembangunan pabrik semen di Rembang, buku ini mengajak kita memahami bahwa diskursus kebijakan adalah ruang kosong yang harus direbut. Saya kira buku ini cukup progresif secara teoritis dan sangat menarik. Sebuah sumbangan penting dalam menghadirkan optimisme bagi gerakan rakyat dan perubahan kebijakan, serta memiliki arti penting bagi pembangunan berbasis hak asasi manusia yang sesungguhnya.

Muhammad Nurkhoiron, Komisioner *Komnas HAM*

Bekerja sebagai jurnalis lingkungan membuat saya mengenal banyak janji kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tambang. Namun, saya jarang menemukan janji tersebut terpenuhi. Melalui buku ini sebuah jawaban yang lebih lengkap disajikan, bahwa kesejahteraan bagi rakyat atas hadirnya industri pertambangan adalah omong kosong. Bacaan ini merupakan ulasan penting agar tahu bagaimana culasnya pengusaha dan penguasa mengobral janji kesejahteraan yang jauh dari kenyataan.

Tommy Apriando, jurnalis lingkungan *mongabay.co.id*

Buku ini berisi tentang cara korporasi tambang beroperasi di rezim otonomi daerah, bersama dengan akademisi, ulama, jajaran pemerintah bahkan "keintiman" dengan warga sekitar. Dianalisis secara kritis dalam teori, wacana dan praktik, pada skala global hingga lokal. Ini buku penting yang jarang ditulis, dan harus menjadi bacaan wajib warga Indonesia, yang percaya tambang akan membawa kesejahteraan, atau pun sebaliknya.

Siti Maemunah, aktivis *Jaringan Advokasi Tambang* (JATAM)

Setiap konflik sumber daya alam tersimpan detail-detail kisah yang memikat bak film-film fiksi: ada sutradara, aktor utama, figuran, dan tentu saja alur cerita. Buku ini secara tekun merekam dan menghadirkan kembali detail tersebut. Apabila Anda mengikuti konflik petani di Pegunungan Kendeng dengan industri semen melalui media atau baru mulai tertarik setelah Dian Sastro mengunjungi tenda petani di Rembang, buku ini akan menghadirkan konteksnya secara utuh dan semua cerita di balik panggung utama. Bonusnya adalah sebuah narasi ilmiah yang mengguncang kepercayaan kita terhadap tafsir "kesejahteraan", "faktor produksi", "pertumbuhan ekonomi", "penciptaan lapangan kerja" bahkan "kemiskinan".

Dandhy Laksono, *filmmaker*, co-founder *Watchdoc*

HENDRA TRY ARDIANTO

MITOS TAMBANG UNTUK KESEJAHTERAAN

Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan

PolGov
RESEARCH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT
Department of Politics & Government - FISIPOL UGM

Mitos Tambang untuk Kesejahteraan:
Pertarungan Wacana Kesejahteraan
dalam Kebijakan Pertambangan

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2016
All rights reserved

Penulis: **Hendra Try Ardianto**
Editor: **Dwicipta**
Pemeriksa Aksara: **Umi Nurun Ni'mah**
Desain Sampul: **Damar N. Sosodoro**
Lukisan Sampul: **Moh. Dzikri Hendika**
Tata Letak Isi: **M. Baihaqi Lathif**

Cetakan I, November 2016

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov

Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre for Politics and Government (PolGov)*.

Research Centre for Politics and Government (PolGov) adalah lembaga riset dan publikasi dari Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam empat tema kunci sesuai dengan kurikulum JPP, yaitu: 1) politik lokal dan otonomi daerah, 2) partai politik, pemilu, dan parlemen, 3) HAM dan demokrasi, 4) reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan sistem integritas.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
http://jpp.fisipol.ugm.ac.id
Telp./Fax: (0274) 552212S
Surel: polgov.ugm@gmail.com

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Ardianto, Hendra Try
Mitos Tambang untuk Kesejahteraan:
Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan
Penulis: Hendra Try Ardianto; Editor: Dwicipta
Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, November 2016
xxxvi + 264 hlm 14,5 x 21cm
ISBN: 978-602-71962-8-5
1. Kebijakan/Pertambangan/Politik I. Judul

DARI PENULIS

Selama menempuh studi politik dari sarjana hingga pascasarjana, saya paling tidak menyukai mata kuliah kebijakan. Buku-buku bertema analisis kebijakan adalah pilihan bacaan paling membosankan. Tanpa mengetahui pemicu awalnya, bagi saya buku-buku analisis kebijakan tampak seperti pengulangan-pengulangan semata, hanya model kerjanya yang berbeda-beda. Tidak ada yang benar-benar menarik di sana.

Belakangan, ketika mulai masuk kelas persiapan tesis, baru saya menemukan alasan mengapa analisis-analisis kebijakan hanya berputar pada persoalan itu-itu saja. Maksud dengan "itu-itu saja" adalah: ada alur kerja yang hendak diuji, dilanjutkan penggalian data yang dipakai untuk menjustifikasi kerangka kerja, dan diakhiri dengan kesimpulan bahwa beberapa kekurangan sebaiknya begini-begitu. Semua itu terjadi akibat cara pandang rasional (yang cenderung positivistik) dalam analisis kebijakan telah menggurita di negeri ini, mulai dari perguruan tinggi hingga jajaran birokrasi pemerintahan. Tidak percaya, silahkan masuk perpustakaan kampus, lalu pelajari karya

akhir mahasiswa bertema kebijakan, pasti ceritanya seperti itu semua.

Yang paling menggelikan, ketika membaca buku analisis kebijakan, di akhir bukunya si penulis mengajukan saran bahwa pemerintah sebaiknya begini, warga sebaiknya begitu, pihak-pihak lain sebaiknya begini-begitu. Hasrat menyenangkan semua pihak dalam suatu analisis menjadikan rangkaian argumentasi tersebut terbang ke langit, nyaris tidak jelas di bumi mana argumen itu berpijak. Studi akademik tentang analisis kebijakan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa argumen itu hanya pengulangan turun-temurun yang diwariskan antar generasi (akademik). Tetapi, mungkinkah saran semacam itu bisa diaplikasikan secara nyata? Bagi saya, tidak akan pernah bisa! Layaknya seorang montir, seorang analis kebijakan mengandaikan bahwa polemik kebijakan adalah mesin yang setiap komponennya bisa dipahami secara pasti. Apabila telah diketahui penyebab kerusakan, sang montir dianggap "pasti" dapat memperbaiki komponen yang bermasalah. Padahal, bukankah sang montir (pemerintah) belum tentu mau memperbaiki kerusakan tersebut? Atau, bisa saja si montir sengaja merusak mesin karena ada kepentingan tertentu?

Ya, analisis bernalar rasional selalu membayangkan pemerintah bersikap netral, apolitis, dan nir-kepentingan dalam suatu polemik kebijakan. Jika ditemukan ketidak-cocokan di bagian tertentu dalam aturan main, si penulis mengatakan sebaiknya pemerintah memperbaiki bagian-bagian tersebut agar bisa cocok kembali dengan aturan main yang ada. Tetapi, bagaimana mungkin itu terjadi jika

ketidakcocokan tersebut sengaja dibuat pemerintah demi kepentingan tertentu? Pertanyaan semacam ini tidak akan mampu dijawab oleh analisis kebijakan berwatak rasional.

Kegelisahan-kegelisahan di atas membuat saya berpikir ulang. Mungkinkah sebuah analisis kebijakan diakhiri dengan saran, misalnya, memperkuat daya tawar politik warga melalui gerakan sosial. Hal ini tentu akan dianggap tidak lumrah. Beberapa orang akan mengatakannya sebagai analisis yang menyalahi kelaziman studi kebijakan. Namun, bagi saya ini penting sebab sampai sekarang, warga yang dalam teori-teori kebijakan disebut penerima manfaat (*benefeciaries*) dalam kenyataan sehari-hari justru menjadi korban (*victim)*. Agar tidak terus menerus menjadi korban mereka harus menggalang kekuatan untuk merombak kebijakan yang selama ini hanya dibuat dari sisi kepentingan negara atau korporasi. Berharap pemerintah akan memperbaiki kebijakan tanpa ada perimbangan kekuatan (antara warga negara dengan pemerintah) adalah perbuatan menggantang asap. Di era para legislator semakin sulit dipercaya, warga tidak punya pilihan lebih baik selain keharusan membangun kekuatannya sendiri. Sebab, mengikuti saran-saran penulis yang terobsesi dengan *win-win solution* sesungguhnya tetap saja mengorbankan salah satu pihak, dan biasanya korban itu adalah pihak yang lemah.

Dalam buku ini saya tidak akan mengupas bagaimana warga membangun kekuatan dan kemudian terlibat aktif dalam perbaikan kebijakan. Saya lebih memilih untuk mengambil langkah di bagian depannya, yakni apa yang mendasari warga sehingga perlu membangun kekuatan.

Di titik inilah saya menulis buku yang sekarang berada di tangan Anda. Buku ini adalah elaborasi tentang bagaimana berlangsungnya suatu kebijakan yang dibentuk dari pertarungan berbagai kepentingan. Tidak seperti buku-buku kebijakan lain yang selalu menempatkan negara sebagai aktor yang tidak memiliki kepentingan apa pun selain penegakan prosedur, buku ini justru melihat negara sebagai aktor yang kerap kali memaksakan kepentingannya sendiri. Karenanya, tidaklah mengherankan kalau kemudian saya menempatkan negara bukan sebagai pihak yang netral. Saya lebih menempatkan negara sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam bermacam-macam permainan untuk memenangkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Mungkin cara pandang saya dalam mengerjakan analisis kebijakan akan memunculkan banyak gugatan. Bagaimana mungkin analisis kebijakan dilakukan dengan memosisikan negara secara tidak netral? Bukankah domain kebijakan itu adalah milik negara? Barangkali akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang akan memberi penilaian bahwa buku ini tidak layak disebut sebagai sebuah analisis kebijakan. Untuk sementara, prasangka-prasangka semacam itu harap disimpan, silahkan pembaca memberikan penilaian sendiri setelah menuntaskan buku ini hingga bagian terakhir.

Buku ini tentunya tidak lahir dari duduk merenung menunggu wangsit yang jatuh secara utuh dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun rapi. Ada banyak tangan yang membantu saya merangkai kalimat hingga menjadi buku. Selama pengerjaan, banyak kota saya kunjungi, banyak keluarga saya singgahi, banyak organisasi saya masuki, dan banyak kawan perjuangan saya repotkan.

Uluran dan bantuan tangan merekalah yang menjadikan buku ini seutuh seperti sekarang.

Sebagai penghormatan intelektual, saya haturkan rasa terima kasih kepada profesor saya, Bapak Purwo Santoso. Berdiskusi dengan beliau, saya banyak belajar tentang pertanyaan-pertanyaan sederhana yang begitu pelik untuk dipikirkan (jawabannya). Tradisi menulis akademik dalam banyak hal saya timba dari beliau. Tidak lupa juga kepada Mas Hasrul Hanif dan Mbak Amalinda, dua sosok yang sempat menguliti karya ini dengan komentar-komentar menukik. Tanpa komentar mereka, wajah karya ini tidak akan seperti sekarang.

Di luar kampus, sebenarnya naskah ini jauh lebih rumit dalam olah gagasan. Banyak pikiran dan celetukan yang sempat menimbuninya. Di sini saya hendak sampaikan terima kasih yang tinggi sekaligus permohonan maaf yang dalam, mungkin karya ini akhirnya tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Kang Dwicipta, Bang Bosman Batubara, dan sahabat saya, Lubabun Ni'am, tiga orang yang sempat terlibat diskusi panjang saat hendak mengawali penelitian. Entah di bagian mana, yang jelas pikiran, gagasan, dan perdebatan dengan mereka juga ikut membentuk karya ini.

Saya juga perlu sampaikan terima kasih pada banyak sejawat lain yang menjadi teman diskusi dan belajar. Terutama untuk mengenal "Laclau & Mouffe", sosok yang sempat membuat saya mual berbulan-bulan hanya untuk mengenal pemikirannya. Diskusi tentang pemikiran Laclau & Mouffe tidak akan pernah bermakna tanpa kehadiran Mas Joas Tapiheru, Mas Vicky Djalong, sahabat saya,

Ignasius Juru, serta, Bang Dimpos Manalu. Diskusi hangat dengan mereka membuat saya banyak belajar tentang konsep Hegemoni.

Tidak lengkap rasanya jika saya hanya berterima kasih kepada mereka yang terlibat dalam olah pemikiran saja. Sebab, yang tidak kalah perannya adalah orang-orang yang entah dengan imajinasi apa suka rela membantu saya dalam penelitian. Ada dua keluarga yang saya anggap istimewa di sini, yaitu keluarga Mbah Manaf dan keluarga Pak Javar-Bu Sukinah. Selama penelitian, merekalah yang menjadi orang tua saya, hingga sekarang pun saya anggap demikian.

Di luar kedua keluarga itu, masih banyak orang yang membantu saya. Apalagi, kala itu, setidaknya ada empat daerah yang saya kunjungi berulang kali. Rembang, Pati, Semarang, dan Jogja adalah empat daerah yang selalu membikin saya hilir mudik selama lebih dari satu tahun. Di Rembang, ada kawan-kawan yang penuh semangat dan keberanian: Mas Pop, Mas Prin, Mas Water, Mas Supiyon, Mas Wandi, Mas Ngatiban, Mas Kundono, dan para ibu-ibu Rembang. Mereka adalah teman-teman terbaik di sana. Sedang di Pati, Mas Aan dan Mas Nopet yang menemani saya hilir mudik. Tidak lupa, Kang Gunretno dan keluarga, yang bukan saja memberi jalan masuk belantara Pati, tetapi juga mengajarkan banyak hal tentang perjuangan dan gerakan.

Adapun di Semarang, selama mengikuti hiruk-pikuk PTUN, banyak sekali kawan yang telah saya buat susah. Mereka adalah kawan-kawan *LBH Semarang* (Mas Zaenal, Mbak Maya, Mas Kastoni, Mas Atma), kawan-kawan *Satjipto Rahardjo Institu*te (Mas Unu, Mas Ryan, Mas Indra),

kawan-kawan *Simpul Semarang* (Kang Putu, Mas Exan, Mas Sholekan), juga kawan-kawan *GMNI* (Mas Otnil, Mas Ompong). Di tempat merekalah saya berpindah-pindah menginap. Sambutan hangat melalui cara mereka masing-masing yang membuat saya tidak bisa melupakannya.

Di Jogja, perlu sekiranya saya mengucapkan terima kasih pada beberapa kawan. Terutama kepada para pegiat *Gerakan Literasi Indonesia*, yang dengan medianya *literasi.co* pasang badan menyerukan persoalan-persoalan akar rumput. Juga tidak lupa kawan-kawan mahasiswa pergerakan dari UAD (Bagas, Jek, Elki, Yasir, Imam, Angga), UIN (Muslih, Odent, Baim), UMY (Hilmy, TJ, Fajrin, Hasan, Suyoto, Nanda), UGM (Natia, Dewi, Laras, Dzikri, Faizal), UII (Irwan, Ari, Okta), UNY (Pras, Agil) dan masih banyak lagi. Mohon maaf jika tidak bisa saya sebutkan semua.

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih pada kawan diskusi saya, Tommy Apriando, jurnalis di *Mongabay* yang sangat konsen terhadap isu lingkungan. Secara khusus juga saya haturkan terima kasih pada sahabat karib saya, Yoga Putra Prameswari, yang entah dengan bayangan apa bisa rela hati mau diajak berkeliling Semarang, Pati, Rembang, Jogja dengan sepeda motor miliknya untuk beberapa kesempatan.

Di luar itu, saya juga mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan *Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam* (FN-KSDA). Di FN-KSDA, saya menggali berbagai gagasan, pemikiran, bahkan menukil banyak informasi. Beberapa di antaranya adalah Mas Lutfy, Mas Heru, Mas Salim (Jogja), Gus Fayyadl (Probolinggo), Gus Roy (Jombang), Gus Syatori, Gus Faiz, Mas Royyan (Cirebon),

Cak Sobirin (Jakarta), Mas Eko Cahyono (Bogor), dan Mbak Ming-Ming (Jember).

Terima kasih terakhir saya sampaikan pada obor penerang sekaligus bara semangat saya selama ini, yakni kedua orang tua, Ayahanda Herwanto dan Ibunda Mudjiati. Juga kedua kakak saya, Mas Gustom dan Mbak Rika sekeluarga. Secara spesial, kepada terkasih, Nattaya Jasmine, yang dengan cara uniknya selalu mengusik hari-hari saya. Tanpa usikannya, kebosanan saat menuliskan buku ini tentunya akan lebih berlipat ganda.

Sebagai suatu pengantar tulisan, tentu saja ini bukan pengantar yang bagus. Tidak ada bocoran tentang isu buku. Tidak ada argumentasi teoretis yang mengawalinya. Namun, di titik itulah alasan saya sebenarnya mengharapkan kebesaran hati pembaca untuk memiliki waktunya bersama buku ini. Sebagai anak rohani, buku ini telah lahir, maka biarkan dia menempuh sejarah hidupnya sendiri, terpisah dari ayah yang menuliskannya. Kini dia bisa menyambut dunia luas, entah melalui tanggapan, kritikan, atau bahkan cibiran. Biarlah, asal bukan terserak tanpa ada yang membacanya.

Semoga buku ini berguna bagi pembaca sekalian.

Tuban, Mei 2016

Hendra Try Ardianto

KATA PENGATAR

MENJAJAL ANALISIS KEBIJAKAN BERWATAK TRANSFORMATIF

Prof. Dr. Purwo Santoso, MA

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

Selama bertahun-tahun, saya menjadi pengajar berbagai mata kuliah analisis kebijakan di Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, bahkan beberapa kampus lain. Dalam setiap sesi kuliah, saya menekankan agar mahasiswa mendalami kebijakan sebagai kajian yang tidak semata persoalan ontologis, tetapi juga persoalan epistemologis sekaligus aksiologis. Artinya, menggeluti studi kebijakan bukan sekadar usaha menjelaskan realitas (ontologis) kebijakan, melainkan juga harus mengerti mengapa kebijakan didekati dengan cara

tertentu (epistemologis) dan untuk tujuan apa analisis kebijakan dikerjakan (aksiologis).

Posisi saya tersebut tampaknya membuat banyak mahasiswa kedodoran dalam memahami penjelasan-penjelasan yang saya uraikan, meskipun sejumlah mahasiswa yang cerdas dan kritis justru menikmati cara saya mengajar. Tidak jarang juga mahasiswa menganggap saya sebagai dosen yang rumit dengan penjelasan yang jelimet dan susah dimengerti. Padahal, maksud saya bukan membikin sulit. Hal demikian tidak terelakkan karena saya tidak ingin para peserta perkuliahan sekadar melafal dan menghafal saja, tanpa menghayati dan berpikir kritis terhadap model-model analisis yang mereka pilih.

Saya tidak ingin mahasiswa hanya mengetahui atau mengerti tentang ragam model analisis yang kemudian dihafalkan untuk dijadikan pegangan setelah masa studi berakhir. Saya lebih menuntut mahasiswa agar memahami asumsi-asumsi dasar setiap model analisis dibandingkan sekadar memahami cara kerja masing-masing. Dengan mengenali asumsi-asumsi dasar setiap model analisis, saya berharap mereka secara sadar mencerna bahwa setiap analisis kebijakan memiliki konsekuensi (beban dan tanggung jawab) serius bagi subjek yang digeluti. Untuk itu, kuliah kebijakan yang saya ampu sesungguhnya berada dalam koridor kebutuhan mahasiswa agar memiliki kepiawaian analisis sesuai dengan tiga dimensi filsafat ilmu: dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Dilatari oleh kebutuhan mengasah kepiawaian mahasiswa dalam analisis kebijakan, saya sangat mendukung

penerbitan buku Hendra Try Ardianto, yang awalnya merupakan naskah tesis untuk gelar masternya. Mas Hendra memenuhi harapan saya tentang cara menganalisis sekaligus menawarkan terobosan penting dalam analisis kebijakan. Sebetulnya ada karya-karya lain mahasiswa dalam studi kebijakan. Namun, kebanyakan analisis mereka berhenti pada persoalan ontologis, yakni semata menjelaskan fenomena kebijakan. Berbeda dengan apa yang dituliskan dalam buku ini. Penulis buku ini mencoba melakukan lompatan cara analisis yang sama sekali berlainan dengan model analisis arus-utama (*mainstream*). Bukan hanya itu, penulis memiliki sikap yang jelas dalam misi analisisnya, yakni keberpihakan pada warga atau petani yang menjadi objek kebijakan.

Meskipun demikian, ada kemungkinan beberapa pegiat studi kebijakan akan menganggap analisis dalam buku ini tidak lazim disebut sebagai analisis kebijakan. Ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Sebab, bisa jadi analisis dalam buku ini adalah genre baru dalam analisis kebijakan, khususnya di Indonesia. Dikatakan sebagai "genre baru" karena saya menilai analisis dalam buku ini berusaha mendobrak kemapanan-kemapanan dalam studi kebijakan sebelumnya. Sejauh ini, para analis kebijakan terlalu asyik dan menyibukkan diri untuk mendeskripsikan temuan yang berakhir dengan serangkaian rekomendasi. Kebijakan selalu dibayangkan sebagai domain negara yang tidak memiliki cacat legitimasi. Setiap sekuel kebijakan dianggap sebagai komponen yang bisa dirasionalisasikan secara pasti. Kemapanan cara pandang dalam melihat

kebijakan semacam itulah yang coba dilampaui penulis buku ini.

Penulis secara sadar menempatkan kebijakan sebagai persoalan yang sangat dinamis, yang di dalamnya terjadi berbagai permainan dan pertarungan kepentingan. Oleh karena itu, penulis menyadari, untuk menangkap dinamika kepentingan, dirinya harus menyingkap banyak tabir (*disclosure*) yang berlangsung dalam kebijakan. Hasilnya, buku ini hadir bukan hanya sebagai sebuah analisis kebijakan, melainkan juga menjadi narasi tanding atas hegemoni (*counter-hegemony*) negara dalam kebijakan pertambangan, khususnya di Kabupaten Rembang. Semua narasi negara yang awalnya ditunjukkan berjalan dengan "baik-baik" saja ternyata hadir secara telanjang sebagai kebijakan yang "tidak ada baik-baiknya" bagi warga dan komunitas (petani). Oleh karena itu, saya berani mengatakan, analisis dalam buku ini adalah genre baru dalam analisis kebijakan; sebuah alternatif dari cara analisis kebijakan yang layak diuji coba dan diikuti para pegiat studi kebijakan.

Mengganti Bingkai, Mengasah Ketajaman Analisis

Meskipun merupakan usaha menyuguhkan alternatif atau cara baru, buku ini tetap tidak kehilangan ketajaman analisis. Sebagai usaha mengawali cara pandang yang berbeda dalam analisis kebijakan, buku ini memang belum memperlihatkan pemetaan secara rapi bagaimana perangkat kerjanya bisa direduplikasi sebagaimana model-model yang telah ada sebelumnya. Namun, dari sisi

penyuguhan analisis, buku ini sama sekali tidak kehilangan jati diri sebagai analisis yang canggih dan tajam.

Setidaknya ada tiga hal yang saya identifikasi mengapa buku ini bisa dikatakan memiliki ketajaman analisis. Pertama, tajam atau tidaknya sebuah analisis bergantung pada kejelasan posisi (*standing position*) dalam menggunakan perspektif tertentu. Dengan adanya kejelasan perspektif tertentu, kecanggihan dan kekhasan analisis bisa secara jelas diuraikan dengan tuntas. Saya tidak sedang memuji perspektif post-Marxis yang digunakan penulis buku ini. Kejelasan dan ketaatan penulis pada satu tradisi tertentu membuat posisi dan tujuan penyampaian analisis dalam buku ini bisa dimengerti secara mudah.

Kedua, ketajaman analisis sangat didasarkan pada penguasaan teori. Tanpa ada penguasaan yang baik atas teori, sebanyak apa pun data yang ditemukan tidak akan pernah berbunyi secara bagus. Selain itu, tanpa pemahaman yang utuh atas teori, seorang analis akan mudah terjebak pada data yang disediakan melalui konvensi umum, yang berarti berpotensi gagal mencermati dan memilah data yang saling bertentangan. Buku ini memberi contoh bagus. Penulis secara jelas memakai asumsi-asumsi teori lingkungan (*enviromentalist*) untuk menyeberangi data di luar konvensi umum. Uraian yang dikemukakan cenderung berseberangan dengan konvensi yang disuguhkan negara, korporasi, bahkan media massa, yang lebih mengagungkan narasi pembangunan (*developmentalist*) daripada narasi ekologi.

Ketiga, ketajaman analisis terletak pada kemampuannya dalam menciptakan "*discursive engagement*". Maksud saya, relasi seorang analis dengan analisisnya bukan berada pada hasil deskripsi temuan, melainkan pada dampak yang ditimbulkan analisisnya terhadap diskursus yang sedang berlangsung. Sebagai pembanding, ada banyak karya yang dalam analisisnya telah mem-*blejeti* kegagalan negara dalam penerapan kebijakan, tetapi secara bersamaan si analis menyerahkan rekomendasinya kepada negara. Negara diminta memperbaiki kebijakannya sendiri. Ibaratnya, telah capai-capai menunjukkan kesalahan, umpan balik yang dihasilkan hanya bergaung: "Silakan Anda perbaiki sendiri!" Contoh demikian menunjukkan bahwa si analis gagal membangun *discursive engagement* terhadap subjek yang digeluti. Dirinya hanya berperan sebagai pengamat, tanpa memiliki sikap dan kehendak atas diskursus yang sedang berlangsung.

Lain cerita dengan buku ini: ketegasan posisi, baik dalam argumentasi maupun pemaparan data, secara jelas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya memengaruhi diskursus yang ada. Penulis buku ini, sarjana politik sekaligus aktivis gerakan, secara sadar menjadikan analisisnya sebagai bagian integral dari usaha mengubah diskursus yang sedang berlangsung (kebijakan pertambangan di Rembang). Sikap tersebut menjadikan buku ini bukan saja mampu menjelaskan realitas kebijakan (ontologis) yang sedang terjadi, melainkan juga memiliki misi (aksiologis) yang memberi apresiasi terhadap gerakan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Membangun Proyek Keilmuan Transformatif

Di luar nilai *plus* yang telah saya sampaikan, saya sebenarnya lebih melihat buku ini sebagai *exercise* tentang proyek keilmuan transformatif. Cara memaparkan data, rangkaian argumentasi, dan penyimpulan-penyimpulan yang dijabarkan penulis memiliki sikap (politik) yang jelas sekali terhadap kasus kebijakan yang diuraikan. Benar bahwa analisis tetap perlu mengungkap realitas yang ada dalam suatu kebijakan, tetapi sekali lagi, keberanian menjadikan analisis untuk memengaruhi diskursus kebijakan adalah misi dari praktik berilmu yang dilakoni penulis. Titik aksiologis semacam ini sangat jarang ditemukan dalam analisis kebijakan pada umumnya. Jadi, kajian yang disajikan penulis melalui buku ini sesungguhnya merupakan langkah awal untuk memulai proyek keilmuan transformatif.

Usaha menelurkan ilmu sosial transformatif tentu merupakan hal yang sangat signifikan untuk situasi saat ini.[1] Sejauh saya amati, praktik berilmu yang kebanyakan dijalani ilmuwan sekarang hanya menyajikan suatu penjelasan, paling banter memprediksi realitas, proses, dan dinamika masyarakat. Metode ilmiah yang dijunjung tinggi sebenarnya melarang dirinya untuk mendorong perubahan sosial. Padahal, secara bersamaan, ilmuwan diposisikan sebagai agen perubahan yang bertujuan mengatasi

1 Santoso, Purwo. "Ilmu Sosial Transformatif". Naskah pidato yang disampaikan dalam pengukuhan jabatan Guru Besar Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada 19 April 2011.

masalah-masalah sosial.[2] Tidak sinkronnya tujuan dan praktik berilmu inilah yang menjadi alasan diperlukannya proyek keilmuan transformatif.

Apabila ilmu-ilmu sosial dikenai beban untuk mengawal proses transformasi, prasyarat pertama yang harus dipastikan adalah ilmu yang dijalani harus berwatak transformatif. Jika setiap kajian ilmiah yang dilakukan para ilmuwan hanya berhasil memproduksi teori, model, preskripsi, dan sejenisnya, sesungguhnya kajian-kajian yang dikerjakan belumlah beranjak ke mana pun. Kajian-kajian itu masih berkutat pada "ilmu sosial sebagai persoalan itu sendiri, bukan ilmu untuk mengatasi masalah publik seperti kesejahteraan, kesenjangan, dan ketimpangan sosial".[3] Begitu juga dalam hal kebijakan: jika hendak merancang kebijakan yang bermisi menciptakan kesejahteraan, terlebih lagi untuk mengurangi kemiskinan, kebijakan itu harus dirumuskan dalam nalar transformatif.

Saya curiga, banyak program/kebijakan kesejahteraan atau pengurangan kemiskinan yang digagas negara mengalami kegagalan bukan karena kesalahan penerapan lapangan, melainkan karena instrumentasi yang sedari awal dibuat tidak memiliki watak transformatif. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan yang mengusung misi mengubah keadaan

---

2 Santoso, Purwo. "Transformasi Ilmu-Ilmu Sosial untuk Menggeluti Kesenjangan dan Perubahan Sosial". Makalah yang disampaikan dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional XI yang diselengarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada 8–9 Oktober 2015.

3 Santoso, Purwo. "Transformasi Ilmu-Ilmu Sosial untuk Menggeluti Kesenjangan dan Perubahan Sosial".

dirancang tidak dalam nalar transformatif? Secara jelas dan memikat, buku ini mengingatkan kenyataan semacam itu. Kebijakan pertambangan di Rembang hadir bukan dengan misi membangun kesejahteraan atau mengurangi kemiskinan. Kebijakan itu malah hadir dengan logika memuluskan investasi korporasi dalam rencana eksploitasi sumber daya alam.

Dari sini, saya menilai buku ini berhasil menjadi contoh bagaimana menjajal analisis kebijakan yang berwatak transformatif. Keberhasilan penulis, untuk sementara, bukan pada perubahan kebijakan yang dihasilkan (lewat analisisnya), melainkan pada keberaniannya untuk menyuguhkan analisis yang memiliki sikap dan kehendak untuk mengubah kebijakan. Pada titik ini, bisa dilihat bahwa gerakan sosial bukan satu-satunya elemen yang memiliki hasrat untuk mendorong perubahan. Sebuah analisis kebijakan juga mampu hadir dengan misi serupa, sepanjang memiliki watak transformatif. Dengan kata lain, analisis kebijakan yang berwatak transformatif adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan sosial itu sendiri.

Demikian pembacaan yang bisa saya tangkap atas buku ini. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

Dari Penulis v
Kata Pengantar xiii
Daftar Isi xxiii
Daftar Singkatan xxvii
Daftar Tabel xxix
Daftar Bagan xxxi
Daftar Foto xxxii

Bagian 1. Berebut Makna Sejahtera..... 1

- Plot Awal: Bisakah Kebijakan Berlaku Netral? 1
- Limitasi Teknokratisme & Proseduralisme dalam Analisis Kebijakan 10
- Kebijakan sebagai Arena Pertarungan Wacana 16
- Strategi Analisis Wacana Konstruktivis sebagai Perangkat Kerja 26
- Peta Buku 34

Bagian 2. Pertambangan dalam Persimpangan Wacana Pembangunan 37

- Pembangunan, Pertambangan, dan Perdebatannya 37
- Berlanjutnya Hasrat Eksploitasi..... 43
- Catatan Penutup..... 51

Bagian 3. Konteks Lokal: Hadirnya Mitos Tambang untuk Kesejahteraan 53

- "Miskin dan Tidak Produktif": Memaknai Kondisi Krisis..... 55
- "Tambang untuk Kesejahteraan": Menegaskan Solusi..... 59
- PT Semen Indonesia: "Berkah yang ditunggu-tunggu" 72
- Catatan Penutup..... 77

Bagian 4. Menciptakan Hegemoni Pembangunan Berbasis Tambang..... 81

- *Good Mining Practices*: Jalan yang "Harus Ditempuh" 83
- Sesuai Prosedur dan Kata Ahli "Tidak Pernah Salah" 98
- Mobilisasi Kesepakatan sebagai Penanda Persetujuan 112
- Catatan Penutup..... 120

Bagian 5. Dislokasi Makna: Celah yang Ditutupi Terbuka Kembali 123

- *Green Industry* yang Tidak Pernah Hijau 125
- Atas Nama "Taat Aturan", Manipulasi Diperlukan 143
- Catatan Penutup..... 163

Bagian 6. Antagonisme Menolak Pertambangan 165

- Bertani sebagai Jalan Kesejahteraan 167
- Menyelamatkan Alam, Menghidupi Manusia..... 185
- Catatan Penutup..... 195

Bagian 7. Keluar dari Teknokratisme dan Proseduralisme: Mencari Model Analisis Alternatif 197

- Antara Rasionalitas dan Konstruktivis: Sebuah Perbandingan..... 199
- Berkaca pada Kasus Rembang: Tawaran Model Analisis Agonistik 205
- Catatan Penutup..... 218

Bagian 8. Post-Skriptum: Pekerjaan Rumah Studi Kebijakan ke Depan ... 221

Daftar Pustaka..... 221
Indeks 253
Tentang Penulis..... 263

DAFTAR SINGKATAN

Amdal	: Analisis Dampak Lingkungan
ASC	: Acintyacunyata Speleological Club
BKPRD	: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAT	: Cekungan Air Tanah
CSR	: *Corporate Social Responsibility*
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
GMP	: *Good Minning Practices*
GG	: *Good Governance*
HGU	: Hak Guna Usaha
IAGI	: Ikatan Ahli Geologi Indonesia
Jateng	: Jawa Tengah
ITB	: Institut Teknologi Bandung
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
JMPPK	: Jaringan Masyarakat Peduli Pengunungan Kendeng
Kepres	: Keputusan Presiden

Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Minerba	: Mineral dan Batubara
NU	: Nahdlatul Ulama
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
Perda	: Peraturan Daerah
Perhutani	: Perusahaan Hutan Negara Indonesia
Permen	: Peraturan Menteri
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SD	: Sustainable Development
SIPD	: Surat Izin Penambangan Daerah
SSS	: *Sikep Samin Semen* (judul film dokumenter)
SvS	: *Samin vs Semen* (judul film dokumenter)
UGM	: Universitas Gadjah Mada
Undip	: Universitas Diponegoro
UU	: Undang-undang
WGI	: Wisata Green Industry
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbedaan Metode dan Strategi Analisis 29
- Tabel 2. Strategi Analisis Laclau 32
- Tabel 3. Daftar Usaha Tambang di Kabupaten Rembang sampai Tahun 2013 66
- Tabel 4. Ragam Teknologi Ramah Lingkungan yang Diklaim PT Semen Indonesia 89
- Tabel 5. Bantuan yang Pernah Diberikan PT Semen Indonesia di Rembang 92
- Tabel 6. Beberapa Kegiatan PT Semen Indonesia di Sekitar Area Tambang 93
- Tabel 7. Tim Pelaksana Studi Amdal PT Semen Indonesia 104
- Tabel 8. Ketaatan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia dengan Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 144
- Tabel 9. Ketaatan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia dengan Regulasi Penataan Ruang 147

- Tabel 10. Jumlah Penduduk (usia 15 th ke atas) Berdasarkan Lapangan Kerja..... 168
- Tabel 11. Perbandingan Asumsi Dasar Antara Pendekatan Rasionalitas dengan Konstruktivis..... 202
- Tabel 12. Proses Agenda Seting Kebijakan Tambang di Rembang..... 211

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1. Perusahaan yang Ditutup Pemerintah Cina pada Tahun 2010 128
- Bagan 2. Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri Tahun 2000-2012 129
- Bagan 3. Perbandingan Kapasitas dan Kebutuhan Semen di Indonesia 130
- Bagan 4. Neraca Pemakaian Air PT Semen Indonesia di Rembang 133

DAFTAR FOTO

- Foto 1. Peta Rencana Pertambangan Semen di Rembang versi PT Semen Indonesia 88
- Foto 2. Jajaran Petinggi PT Semen Indonesia dan Orang-Orang Samin 117
- Foto 3. Ilustrasi tentang Kawasan Karst..... 135
- Foto 4. Bantuan CSR PT Semen Indonesia untuk 30 Unit Rumah Senilai 1 Miliar 138
- Foto 5. Peta Tumpang Tindih Izin Lokasi Izin Eksplorasi di Rembang 151
- Foto 6. Peta Rencana Pertambangan Versi Warga Penolak Tambang..... 158
- Foto 7. Pamflet Protes: Hama Paling Berbahaya untuk Petani 178
- Foto 8. Pamflet Protes: Bertani atau Mati 183
- Foto 9. Bantuan CSR PT Semen Indonesia untuk Kegiatan Sedekah Bumi 194

BAGIAN 1

BEREBUT MAKNA SEJAHTERA

Plot Awal: Bisakah Kebijakan Berlaku Netral?

Terdapat kecenderungan kuat dalam studi kebijakan untuk menempatkan analisis kebijakan sebagai sebuah analisis yang netral, apolitis, dan nir-kepentingan. Kenyataan ini terjadi lantaran pendekatan rasional dalam studi kebijakan direproduksi terus menerus oleh perguruan tinggi dan secara bersamaan digunakan sebagai nalar umum yang memandu bekerjanya birokrasi pemerintahan. Minimnya hasrat untuk mencoba model analisis yang lebih 'menantang' dibanding pendekatan rasional, serta tidak kreatifnya negara dalam mengujicobakan terobosan baru dalam pembuatan kebijakan membuat proses reproduksi pendekatan rasional diterima begitu saja (*taken for granted*) tanpa ada sikap kritis atas konsekuensi dipakainya pendekatan tersebut.

Secara spesifik, model analisis teknokratis[1] maupun proseduralis[2]—yang berada dalam rumpun pendekatan rasionalitas—adalah model yang paling *mainstream* di Indonesia. Kedua model ini kerap kali menjadi justifikasi terhadap "salah-benarnya" suatu kebijakan. Komentar seorang pejabat publik terhadap suatu polemik kebijakan dengan mengatakan bahwa "*Kebijakan yang diambil telah sesuai prosedur"* atau *"Semua telah melalui kajian para ahli*" adalah sinyalemen yang menunjukkan betapa nalar proseduralis dan teknokratis bekerja secara otomatis dalam kepala mereka. Secara tiba-tiba, kesesuaian prosedur atau klaim pendapat ahli menjadi pembenar begitu saja atas rumusan dan beroperasinya sebuah kebijakan. Bersamaan dengan kesesuaian prosedur dan klaim ahli ini, berbagai pertimbangan lain yang berlawanan atau memiliki kemungkinan untuk mengubah kebijakan dinafikan begitu saja.

Dari sini kegelisahan saya muncul. Benarkah kebijakan yang sesuai prosedur atau klaim ahli bisa hadir dalam wajah yang netral, apolitis, bahkan nir-kepentingan? Siapakah yang menjalankan prosedur itu? Mungkinkah birokrat atau seorang ahli bisa berlaku netral tanpa memiliki kepentingan? Pertanyaan-pertanyaan itu dengan sendirinya merupakan bahan perdebatan yang sering kali meletup saat

1 Model analisis kebijakan yang berpandangan bahwa kebijakan hanya bisa dipertimbangkan menurut sisi teknis tertentu, yang bisa diperankan secara tepat oleh para pakar dengan bidang keahlian/teknis spesifik.

2 Model analisis kebijakan yang berorientasi pada penegakan prosedur-prosedur yang disepakati (berlaku).

saya mendiskusikan model analisis proseduralis maupun teknokratis.

Selain mendeklarasikan diri sebagai pendekatan yang netral, apolitis, dan nir-kepentingan, model kebijakan yang sesuai prosedur dan klaim ahli juga selalu memakai klaim kesejahteraan sebagai misi yang diusungnya. Kebijakan memang sering kali dipahami sebagai sesuatu yang menyangkut urusan publik. Kesejahteraan, dengan demikian, selalu diasosiasikan sebagai kepentingan publik yang paling hakiki, dan kepentingan itu berusaha dipenuhi melalui instrumen kebijakan. Masalahnya, banyak sekali kebijakan yang ternyata membuat publik, "bukan hanya tidak sejahtera, tetapi malah sengsara". Karena itu, penelitian ini berhasrat melakukan studi kebijakan dengan melacak bagaimana wacana kesejahteraan dibentuk dan dibangun untuk memuluskan sebuah proses kebijakan. Penelitian ini tidak berkeinginan melihat apakah instrumen kebijakan mampu menyejahterakan atau tidak, tetapi lebih berusaha menjajaki bagaimana wacana kesejahteraan menjadi arena untuk memahami dinamika kebijakan.

Untuk memenuhi keinginan itu, saya mengangkat sebuah fenomena konflik kebijakan, khususnya di sektor pertambangan. Adapun kasus yang dijadikan bahan kajian adalah konflik kebijakan di Rembang terkait pro-kontra pertambangan semen di sana. Konflik kebijakan ini melibatkan pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang) dan korporasi (PT Semen Indonesia) di satu pihak dan masyarakat lokal di dua desa—yakni para petani di Desa Tegaldowo

dan Desa Timbrangan—di pihak lain.[3] Bagi negara dan korporasi, kehadiran pertambangan dinilai sebagai jawaban atas kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat lokal yang dianggap tidak mampu mengembangkan sendiri kehidupan ekonominya. Sebaliknya, bagi masyarakat lokal, keberadaan pertambangan dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup mereka dan kerusakan lingkungan yang bahkan berdampak buruk bagi masyarakat luas. Dua kepentingan yang berseberangan ini saling berkontestasi dalam kebijakan pertambangan di Rembang.

Dengan titik berangkat di atas, kebijakan pertambangan dilihat sebagai arena kontestasi kepentingan dari beragam identitas sosial. Pengertian seperti ini penting digunakan untuk membaca dinamika politik dalam kebijakan. Jadi, cara analisis kebijakan yang dikerjakan dalam penelitian ini sesungguhnya adalah kebalikan dari model teknokratis ataupun proseduralis. Umumnya, kedua model tersebut memahami kebijakan sebagai seperangkat prosedur atau skema yang bersifat bertahap, melalui proses pengimplementasian yang ketat, bahkan memiliki kesepakatan untuk memperlakukan sentralisasi peran negara (pemerintah) sebagai satu-satunya pihak yang menentukan kebijakan. Model seperti itu selalu memahami kebijakan sebagai sesuatu yang netral dan tidak menyediakan ruang bagi pihak lain untuk mempertanyakan benar tidaknya tujuan atau misi yang dicanangkan. Ada watak

3 Dua desa ini berada di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar lahan yang akan ditambang oleh PT Semen Indonesia berada di wilayah kedua desa tersebut.

terlalu percaya diri (*over-confidence*) pada bekerjanya nalar bahwa para pembuat kebijakan (*policy makers*) diandaikan sanggup mencerna rasionalitas setiap orang dan cukup komprehensif untuk memperhitungkan segala hal. Sayangnya, meski model ini begitu populer di kalangan akademisi dan para pengambil kebijakan, ia mengandung cacat bawaan yang fatal karena justru abai pada dinamika politik yang ada di lapangan, terutama pada subjek sasaran yang ditujunya.

Karena watak yang berbeda dengan cara kerja model teknokratis maupun proseduralis, maka cara mengerjakan studi kebijakan yang sensitif terhadap dimensi kekuasaan dan dinamika politik adalah dengan memosisikan kebijakan sebagai wacana. Menempatkan kebijakan sebagai wacana memang masih belum terlalu umum dalam studi kebijakan di Indonesia. Namun, studi semacam ini sebenarnya tidak terlalu asing dalam khasanah studi kebijakan. Harry Jones (2009) dalam *Policy-Making as Discourse: a Review of Recent Knowledge to Policy Literature*, dan Sally Hewitt (2009) dalam *Discourse Analysis and Public Policy Research* sudah mengurai panjang lebar bagaimana kebijakan sebagai wacana didudukkan dalam studi kebijakan.

Penempatan kebijakan sebagai wacana penting dilakukan karena dengan menganalisis wacana yang ada, maka beroperasinya kekuasaan dalam kebijakan bisa dipahami. Analisis wacana membantu kita memahami mengapa pengetahuan satu dianggap benar dan yang lainnya dianggap salah. Pada proses menjadi benar dan salah inilah sesungguhnya operasi kekuasaan sedang berlangsung.

Hal ini bertentangan dengan gagasan positivisme yang memahami 'pengetahuan' hanya sebatas pada kumpulan data, informasi, kemudian dijadikan justifikasi untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada titik seperti itu, positivisme memandang pengetahuan adalah hal yang netral. Padahal, pengetahuan sejatinya merupakan kekuasaan itu sendiri, atau dalam istilah populer Nietsczhe (1968) dikenal dengan "kehendak untuk mengetahui adalah kehendak untuk benar, dan kehendak untuk benar adalah kehendak untuk berkuasa". Dengan demikian, penetapan atas sebuah pengetahuan sesungguhnya merupakan dimensi kekuasaan tersendiri.

Melalui penempatan kebijakan sebagai kontestasi wacana, penelitian ini sedang membongkar relasi kekuasaan yang ada dalam kebijakan. Guna memenuhi harapan tersebut, penelitian ini memanfaatkan perangkat konseptualisasi Laclau dan Mouffe (2008) tentang bekerjanya hegemoni, khususnya hegemoni yang berlangsung dalam kebijakan yang menyokong rencana pertambangan semen skala besar di tingkat lokal. Hegemoni yang dimaksud merujuk pada proses penciptaan realitas sehingga realitas itu tampak "objektif dan alami" (Jorgensen 2007: 63). Sesuatu yang tampak "objektif dan alami" bukanlah sesuatu yang ada begitu saja, melainkan sebuah realitas yang dibentuk dari beragam praktik. Dalam konteks pertarungan membangun hegemoni, pembangunan berbasis tambang adalah makna yang hendak dibangun negara menjadi sebuah hegemoni, dan sebaliknya menjadi arena yang hendak dirusak/direbut oleh warga penolak tambang. Secara sederhana

bisa dibahasakan: "negara ingin membangun hegemoni pembangunan berbasis pertambangan, dan warga (petani) sedang membangun hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) atas hegemoni negara".

Wacana kesejahteraan menarik untuk digeluti karena selama ini negara selalu berusaha memakai bingkai pemaknaan itu dalam berbagai penerapan kebijakan. Salah satu pembingkaian makna kesejahteraan tersebut disematkan dalam regulasi-regulasi pertambangan. UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba yang menyebutkan bahwa tujuan pertambangan adalah "meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat".[4] Hal ini secara jelas memperlihatkan upaya negara dalam melakukan pembingkaian makna terkait kesejahteraan. Tidak mengherankan akibat pengesahan UU itu semua jenis kebijakan pertambangan selalu diklaim sebagai bagian dari usaha menyejahterakan warga. Berangkat dari kehendak untuk menghadirkan kesejahteraan tersebut, negara melakukan berbagai praktik artikulasi untuk menciptakan pemaknaan bahwa substansi kebijakan pertambangan adalah kesejahteraan itu sendiri. Namun hal yang perlu dicatat, kesejahteraan dari pertambangan ini bersifat *das sollen* (norma ideal), bukan berarti kenyataan (*das sein*) sehari-hari.

Meskipun begitu, bangunan wacana kesejahteraan yang berusaha dibentuk negara melalui berbagai kebijakan

4 Garis bawah dari penulis.

pertambangan sejatinya tidak pernah menghadirkan pemaknaan secara penuh dalam ruang sosial sehari-hari. Bahkan bangunan wacana kesejahteraan yang dibentuk negara tetap melahirkan disensus dalam ruang sosial yang lebih luas. Kesejahteraan yang disematkan negara dalam praktik pertambangan memperoleh banyak gugatan dari warganya sendiri. Sebagai akibatnya, lahirlah antagonisme warga yang terwujud dalam gerakan menolak pertambangan yang berusaha merusak atau bahkan membentuk bangunan wacana yang sama sekali lain dari wacana yang dipaksakan oleh negara. Kondisi demikian memicu munculnya banyak perlawanan terhadap rencana pertambangan sekaligus melahirkan definisi-definisi baru tentang kesejahteraan.

Pertambangan, bagi warga yang menolak, bukan sekadar ketidakpercayaan atas kemampuan menciptakan kesejahteraan, melainkan juga ancaman bagi ruang hidup mereka yang selama ini aman dan tentram. Hidup dalam usaha pertanian, dalam kasus Rembang, dianggap sebagai satu-satunya jalan paling masuk akal untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Cara pandang warga ini bertentangan dengan cara pandang negara yang melihat pertambangan sebagai jalan menuju masyarakat sejahtera. Negara melihat keberadaan pertambangan akan mampu mendongkrak ekonomi sebuah daerah, terutama daerah yang dianggap masih tertinggal. Dua pertentangan makna ini merupakan pertarungan wacana yang tidak pernah tuntas menciptakan pemaknaan tunggal (universal). Kedua pemaknaan yang berbeda itu pun berlangsung dalam berbagai praktik artikulasi dan arena yang beragam.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka pertanyaan dasar dari penelitian saya adalah "Bagaimana pertarungan wacana kesejahteraan berlangsung dalam kebijakan pertambangan?" Pertanyaan tersebut akan menyoroti wacana kesejahteraan sebagai arena pertarungan makna di antara berbagai aktor dan kepentingan untuk memenangkan hegemoni atas sebuah kebijakan. Dalam hal ini, negara berusaha membentuk hegemoni pembangunan berbasis tambang dengan menjadikan wacana kesejahteraan sebagai titik pijaknya. Sebaliknya, warga penolak tambang berusaha menentang jalinan pemaknaan yang dibentuk negara.

Dengan memahami pertarungan wacana dalam kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memenuhi beberapa tujuan penting yang selama ini tidak banyak digeluti studi kebijakan. *Pertama*, menyuguhkan pembacaan tentang bagaimana sebuah kebijakan dibentuk dari pertarungan wacana. *Kedua*, mendapatkan sebuah definisi baru tentang kebijakan yang menggugat kesepakatan-kesepakatan baku dalam studi kebijakan arus-utama. *Ketiga*, meletakkan antagonisme yang terekspresikan dalam gerakan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam studi kebijakan. *Keempat*, mengajukan refleksi teoritis untuk melakukan studi kebijakan yang sensitif terhadap kaum lemah yang selama ini terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Limitasi Teknokratisme dan Proseduralisme dalam Analisis Kebijakan

Ada kecenderungan umum dalam studi kebijakan di Indonesia, yakni model analisis teknokratis dan proseduralis sebagai arus-utama yang dipakai dalam seluruh naskah atau tugas akhir akademik di perguruan tinggi. Bukan hanya itu, para birokrat negara juga selalu menggunakan cara analisis proseduralis maupun teknokratis dalam menjalankan roda birokrasi sehari-hari. Pada titik ini, sesungguhnya baik kalangan akademisi maupun birokrat memaknai kebijakan hanya dalam dua cara pandang utama, yakni proseduralisme dan teknokratisme.[5]

Meskipun demikian, baik model proseduralis maupun teknokratis mendapat kritik karena kecenderungannya yang meletakkan negara sebagai satu-satunya aktor yang mampu mengatasi persoalan-persoalan publik (Santoso, Hanif, dan Gustomy ed. 2004: xxvi). Akibatnya, tidak mengherankan jika kedua cara analisis tersebut selalu membuat pagar pemisah antara pembuat dan penerima kebijakan. Dalam hal ini, penerima hanya diposisikan sebagai pihak yang pasif yang berfungsi sebagai penunggu datangnya "kebaikan" sang pembuat kebijakan (*the*

5 Istilah proseduralis dan teknokratis yang saya gunakan disini merujuk pada corak atau karakter dari kebijakan. Kebijakan proseduralis memiliki corak berupa penegakan pada prosedur, sedangkan teknokratis memiliki corak kebijakan yang berorientasi pada skema pengujian ilmiah yang dikerjakan oleh para ahli (teknis). Adapun istilah proseduralisme dan teknokratisme merujuk pada cara pandang atau paham (bersifat ideologis) dalam memahami kebijakan.

policy maker). Penerima kebijakan selalu menjadi pihak yang tersubordinasi oleh para pembuat kebijakan. Jadi, pemisahan ini sebenarnya adalah penegasan atas hubungan yang dominatif.

Selain itu, model teknokratis-proseduralis juga cenderung mengunci studi kebijakan sebagai tahapan-tahapan, prosedur-prosedur yang berjalan linear dan bisa diuji setiap sekuel alurnya. Akibatnya, studi kebijakan kehilangan sisi politis sehingga dinamika, konflik, pertentangan dan kontestasi seakan-akan sirna dalam unit analisis. Kenyataan hilangnya politik dalam studi kebijakan bisa ditemukan dalam karya-karya yang mengangkat judul bernuansa "analisis perumusan, implementasi, evaluasi, dan faktor-faktor penyebab gagal-berhasilnya kebijakan" maupun tema-tema sejenis. Literatur semacam itu banyak ditemukan di perpustakaan berbagai perguruan tinggi. Tidak hanya itu, buku-buku kebijakan yang memiliki logika dasar teknokratisme maupun proseduralisme (seperti Nugroho 2003 & 2009, Suharto 2012, Dunn 2003),[6] ternyata juga menjadi buku pegangan wajib bagi para calon sarjana di seluruh Indonesia yang mengambil studi kebijakan.

Bertolak dari kecenderungan di atas, maka studi kebijakan dinilai perlu memperhitungkan kenyataan politik keseharian yang hadir di akar rumput karena bagaimanapun juga, kajian kebijakan yang sensitif terhadap politik

6 Beberapa buku ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak pegangan wajib mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang melakukan studi kebijakan. Ada banyak buku sejenis yang intinya memberikan panduan praktis dalam memahami kebijakan secara teknokratis dan proseduralis.

keseharian lebih mampu mengedepankan aktualisasi potensi dan kepentingan warga melalui partisipasi (Santoso 2008:vii). Isu yang diangkat pun kemudian bukan persoalan para elit, melainkan isu sehari-hari yang dekat dengan kehidupan individu (Savirani 2003:66). Untuk itu, perlu kiranya kita memulai sebuah proyek penelitian yang memberi ruang bagi analisis dinamika politik dalam kebijakan.

Meski tidak banyak studi kebijakan yang sensitif terhadap dinamika politik, bukan berarti tidak ada studi semacam itu di Indonesia. Disertasi Purwo Santoso (1999) yang berjudul *The Politics of Enviromental Policy Making in Indonesia: A Study of State Capacity, 1967-1994* adalah salah satu studi spesifik yang menunjukkan dinamika politik yang sangat kompleks dalam suatu kebijakan. Santoso (1999) melihat bahwa perubahan kebijakan lingkungan di era Orde Baru sangat ditentukan oleh perkembangan konflik antara aparatus negara, *non government organisation* (NGO), dan aktor-aktor dalam negara Orde Baru. Sayangnya, studi ini masih melihat kebijakan sebagai 'milik' negara dengan kapasitas negara melaksanakan kebijakan sebagai fokus utama. Bisa dikatakan, meski memiliki sensitivitas pada dimensi kekuasaan, studi ini masih tergolong sebagai studi yang berlensa *state-actor oriented*.

Adapun studi kebijakan yang sensitif dengan dimensi kekuasaan dan menggunakan kaca mata *society-actor oriented* bisa ditemukan dalam beberapa karya di antaranya, studi kebijakan yang dilakukan Sukardi (2003) yang berjudul *Modal Sosial dan Reorientasi Kebijakan Publik: Studi Utilisasi*

Modal Sosial dalam Proses Reorientasi Kebijakan Agraria Lokal pada Kasus Sengketa Properti Tanah Petani Melawan PTPN XII di Kawasan Malang Selatan. Studi ini memperlihatkan bagaimana modal sosial warga yang dihimpun menjadi kekuataan besar yang mampu mengubah kebijakan agraria di wilayah Blitar. Dengan teoretisasi modal sosial, studi ini berusaha mengisi celah teoretis seputar kebijakan publik.

Studi lain yang serupa dilakukan oleh Dimpos Manalu (2009) dalam tesisnya yang kemudian dibukukan dengan judul *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatra Utara*. Dalam buku tersebut, Manalu (2009) menunjukkan bahwa gerakan sosial berkontribusi besar dalam perubahan kebijakan, bahkan lebih efektif (berdampak pada warga) dibanding dengan kebijakan yang dihasilkan negara. Dalam hal ini, Manalu (2009) memakai kaca mata gerakan sosial sebagai kerangka teoretis yang digunakan untuk memasuki perdebatan akademik seputar kebijakan.

Mungkin beberapa kalangan akan tidak sependapat dengan saya dan mengganggap beberapa studi di atas bukan studi kebijakan, melainkan lebih cenderung pada studi politik. Akan tetapi, terlepas dari silang pendapat tersebut, saya telah menunjukkan bahwa materi dasar dari ketiga literatur di atas menempatkan kebijakan sebagai pokok persoalan yang diperdebatkan. Sebagai contoh pembanding, studi Hilmy Mochtar (2006) dalam disertasi berjudul *Politik Mobilisasi Dukungan Pembangunan*

Industri Semen Tuban (1989-1998)[7] adalah salah satu studi politik yang tidak menjadikan kebijakan sebagai pokok persoalan yang dibedah meskipun fenomena yang diangkat seharusnya memiliki keterkaitan dengan kebijakan (pertambangan). Dalam disertasinya, Mochtar (2006) memilih lebih berfokus pada persoalan politik mobilisasi dukungan dibanding usaha untuk mendalami dinamika kebijakan. Hal ini didasarkan pada ekstraksi kesimpulan yang berusaha melengkapi teoretisasi tentang politik mobilisasi, bukan untuk sumbangsih dan pemikiran dalam studi kebijakan. Ini artinya, studi Mochtar (2006) bukan termasuk studi kebijakan, sedangkan ketiga studi sebelumnya masuk dalam kategori studi kebijakan.

Dari sini terlihat, studi yang dilakukan Santoso (1999), Sukardi (2003), dan Manalu (2006) mencoba menerobos sekat antar-bidang studi yang selama ini diyakini para akademisi secara umum, yakni adanya pemisahan yang tegas antara, *"Mana yang studi kebijakan dan mana yang studi politik"*. Ketiga penulis tersebut sadar sepenuhnya bahwa kemacetan-kemacetan studi kebijakan yang ada saat ini adalah akibat abainya kalkulasi terhadap dinamika politik (kekuasaan). Sebaliknya, studi politik juga abai

7 Studi Mochtar (2006) sengaja saya kutip sebagai perbandingan karena terdapat irisan kuat dengan fenomena yang saya teliti dalam buku ini. Persis dalam buku ini, Mochtar (2006) juga melakukan penelitian yang melacak bagaimana berlangsungnya kebijakan yang menopang pembangunan industri semen di suatu daerah (Kabupaten Tuban). Perbedaannya, saya memfokuskan diri pada perdebatan dalam teori kebijakan, sedangkan Mochtar (2006) lebih berfokus pada diskusi teori (politik) mobilisasi.

terhadap advokasi kebijakan. Dengan demikian, tujuan menyuguhkan studi kebijakan yang sensitif terhadap dimensi kekuasaan, selain untuk mendobrak sekat bidang studi yang kaku, juga untuk mendorong semangat advokasi dalam kebijakan.

Dari berbagai pemetaan literatur di atas, saya hendak menempatkan posisi penelitian saya di tengah studi lain yang pernah dilakukan. Saya menempatkan studi ini dalam dua posisi. *Pertama*, studi ini memiliki semangat untuk menyuguhkan uraian tentang dinamika politik yang berlangsung dalam kebijakan—sebagaimana telah dilakukan oleh tiga studi di atas—, terutama yang menggunakan pendekatan *society-actor oriented*. Dengan kata lain, studi ini adalah ikhtiar untuk memperkaya cara pandang kebijakan dengan kaca mata politik yang selama ini masih belum banyak dilakukan para peminat studi kebijakan di Indonesia. *Kedua*, studi ini mencoba untuk menukik ke jantung persoalan dalam kebijakan, yakni mendefinisikan ulang makna kebijakan itu sendiri. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka studi ini akan dirangkai dengan menggunakan analisis wacana konstruktivis, yaitu menempatkan kebijakan sebagai wacana itu sendiri. Dengan cara demikian, studi ini memiliki perbedaan dengan tiga literatur sebelumnya, yakni tidak sedang berfokus pada hal-hal yang memengaruhi perubahan kebijakan, tetapi pada upaya de-ontologi dengan cara mencari definisi baru dari kebijakan yang ada.

Kebijakan sebagai Arena Pertarungan Wacana

Jika kebijakan dipahami sebagai medan pertarungan wacana, berarti kebijakan diletakkan sebagai lokus perebutan hegemoni. Sebagai medan pertarungan wacana, kebijakan menjadi arena bagi konsensus maupun disensus untuk saling berebut satu dengan yang lainnya. Hegemoni sendiri diartikan secara sederhana sebagai praktik kuasa bukan dengan cara kekerasan (*coersive*), melainkan sebagai praktik kuasa berbasis konsensus.[8] Konsep hegemoni Laclau dan Mouffe (2008) yang digunakan dalam penelitian ini sangatlah berbeda dengan konsep hegemoni yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci melalui bukunya *Selection from The Prison Notebook*.[9] Bagi Gramsci, hegemoni berlangsung efektif jika kelas penguasa berhasil menundukkan kekuatan-kekuatan oposisi, dan kemudian berhasil menciptakan konsensus atas kelas yang dikuasai (Gramsci 1986: 104-105). Dengan pengaruh pemikiran Marx yang melatarinya, tampak jelas teori hegemoni yang dikembangkan Gramsci menempatkan kelas sebagai dasar pijakan teoritis.

---

8 Dominasi lebih menekankan pada kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik, sedangkan hegemoni lebih menekankan pada terbentuknya persetujuan/konsensus terhadap pihak yang dikuasai (*lihat* Soegiono 1999: 31).

9 Inilah yang menjadikan Laclau dan Mouffe dikenal sebagai teoretikus *post*-Marxis. Semangat dan cita-cita (*logos*) Marxisme masih melekat, tetapi analisisnya keluar dari analisis kelas yang biasa digunakan oleh teori Marxis umumnya.

Definisi hegemoni Gramsci berlainan dengan teori Hegemoni Laclau dan Mouffe (2008) sebagaimana dirangkum dalam buku *Hegemoni dan Strategi Sosialis*. Bagi Laclau dan Mouffe (2008), konsep hegemoni diletakkan pada nalar berlangsungnya sebuah wacana, bukan nalar subordinasi kelas sebagaimana dipahami Gramsci.[10] Laclau dan Mouffe (2008) menegaskan bahwa hegemoni merupakan pengakhiran (sementara) dari proses kewacanaan. Dengan kata lain, kemapanan wacana bisa dianggap sebagai sebuah hegemoni. Dalam kerangka berpikir demikianlah penelitian ini dikembangkan, yakni konflik kebijakan pertambangan di Rembang tidak dilihat sebagai persoalan konflik kelas untuk merebut sumber ekonomi semata, tetapi konflik antaraktor dalam memenangkan formasi wacana tertentu.[11] Dalam hal ini, wacana kesejahteraan adalah formasi wacana yang diperebutkan antara negara dan korporasi berhadapan dengan warga atau para petani.

---

10 Ada tiga pokok gagasan yang membedakan konsep hegemoni Laclau dan Mouffe dengan para teoretisi Marxis. *Pertama*, penolakan terhadap pembagian basis dan superstruktur yang ditentukan (*determined*) oleh logika ekonomi, karena bagi Laclau dan Mouffe, sebuah formasi kemasyarakatan adalah produk kewacanaan. *Kedua*, penegasian atas penguraian masyarakat yang terpilah-pilah dalam kelas-kelas tertentu. *Ketiga*, penolakan atas identitas dan formasi kelompok yang bisa ditetapkan secara objektif. Bagi Laclau dan Mouffe, identitas tidak pernah tetap (*fixed*), bergantung pada formasi wacana apa identitas tersebut disematkan. (*lihat* Jorgensen & Phillips 2010: 63-64).

11 Kerangka berpikir ini penting dipahami agar pembaca bisa langsung membedakan dengan cara pandang Marxis yang pada umumnya mempertentangkan kelas dalam dua oposisi binerian (borjuis vs proletar).

Karena konsep hegemoni diletakkan pada nalar bekerjanya wacana, maka penting untuk mendudukkan seperti apa dan bagaimana wacana itu berlangsung. Wacana sendiri didefinisikan oleh Laclau dan Mouffe (2008) sebagai totalitas makna yang terstruktur yang dihasilkan dari praktik artikulasi. Adapun makna adalah sesuatu yang cair dan tidak pasti (*contigent*). Makna hanya bisa dipahami dengan menempatkannya pada suatu wacana tertentu (Jorgensen & Phillips 2010: 53). Sedangkan praktik artikulasi adalah praktik apa pun yang berusaha menetapkan hubungan antara makna-makna sehingga identitas dalam makna tersebut mengalami modifikasi dan bisa ditetapkan. Untuk mendapatkan makna spesifik, praktik artikulasi bertugas melakukan fiksasi terhadap makna yang semula *contingent* tersebut. Sebagai contoh, batu merupakan sebuah makna tersendiri. Namun, batu bisa menjadi karya seni, material bangunan, dan sebagainya tergantung pada praktik artikulasi apa yang menopang makna batu tersebut. Batu menjadi sebuah karya seni apabila dibarengi oleh praktik artikulasi seperti pameran, pernyataan seniman, dan sebagainya.

Namun yang perlu dicatat, meskipun praktik artikulasi telah menjalankan fungsi fiksasi makna, bukan berarti makna itu solid sepenuhnya. Makna hanya solid sementara saja sejauh polisemi makna yang lain juga tidak mencuat secara kuat. Artinya, makna bisa ditetapkan apabila berada dalam sebuah formasi wacana spesifik. Adapun penghubung yang memberi penegasan atas formasi wacana tertentu adalah struktur signifikansi berupa logika

kesamaan (*logic of equivalence*) dan logika perbedaan (*logic of difference*). Kokohnya sebuah formasi wacana bergantung pada keberhasilan praktik artikulasi dalam menempatkan makna dalam sebuah jalinan kesamaan (*chain of equivalence*). Apabila makna yang ada masih tersekat dalam berbagai jalinan yang berbeda-beda (*chain of difference*), maka formasi wacana yang terbentuk akan rapuh (Hutagalung 2008: xxxiv). Dengan kata lain, dislokasi merupakan sebuah keniscayaan karena proses penetapan makna melalui praktik artikulasi hanya berlangsung pada struktur signifikansi tertentu. Dalam operasi kerja semacam itulah, makna maupun wacana dapat ditetapkan (fiksasi).

Agar sebuah makna berada dalam satu jalinan kesamaan, maka praktik artikulasi harus diarahkan sebagai intervensi hegemoni, yakni praktik artikulasi yang terus-menerus guna menetapkan makna tunggal dan meniadakan makna-makna lain. Ini berarti, intervensi hegemoni berlangsung dengan menetapkan makna tertentu, sekaligus mengosongkan atau mengeluarkan kelebihan makna yang berpotensi menyubversinya. Dalam penelitian ini, wacana kesejahteraan ditetapkan maknanya melalui berbagai intervensi hegemoni negara, mulai dari pernyataan pejabat negara, regulasi, pernyataan korporasi, pembingkaian (*framing*) media, mobilisasi kesepakatan dan lain sebagainya. Dengan adanya intervensi hegemoni, makna 'kesejahteraan' bisa didefinisikan dalam cara tertentu sehingga berbeda dengan makna kesejahteraan yang lainnya.

Adapun proses wacana menjadi hegemoni berlangsung melalui praktik artikulasi yang bekerja untuk memodifikasi penanda-penanda mengambang *(floating signifiers)* agar tersedimentasi menjadi sebuah titik nodal (*nodal point*) yang sepenuhnya kokoh. Penanda mengambang adalah makna-makna yang diperjuangkan oleh wacana-wacana yang berbeda guna mendedahkan makna dengan caranya sendiri. Sedangkan titik nodal merupakan titik kristal dalam upaya menetapkan makna terhadap makna-makna yang penting, atau bisa disebut titik tanda persetujuan. Sebagai misal, 'tubuh' merupakan titik nodal dari wacana medis, tetapi 'tubuh' juga penanda mengambang bagi perjuangan wacana medis dan wacana pengobatan alternatif (Jorgensen & Phillips 2010).

Dalam konteks penelitian di Rembang, kesejahteraan adalah sebuah penanda kosong (*empty signifier*) yang maknanya tidak pernah final dan selalu berkontestasi dengan makna-makna lain. Artinya, kesejahteraan ditempatkan sebagai titik nodal yang diperjuangkan negara dan korporasi untuk membangun hegemoni pembangunan berbasis pertambangan. Sebaliknya, kesejahteraan juga merupakan penanda mengambang bagi perjuangan warga untuk mendefinisikan sendiri makna kesejahteraan.

Untuk menegaskan titik nodal kesejahteraan, para pejabat negara melakukan intervensi hegemoni melalui berbagai praktik artikulasi agar penanda-penanda mengambang yang terserak mampu terjahit dalam satu jalinan kesamaan dan tidak direcoki oleh keberadaan makna-makna yang lain (terutama subversi makna dari para

petani). Jadi, intervensi hegemoni yang dilakukan melalui regulasi, pernyataan, klaim, hingga berbagai aktivitas lain dari negara dan juga korporasi memiliki fungsi untuk melakukan fiksasi atas pemaknaan kesejahteraan melalui jalan pertambangan. Adapun penanda-penanda mengambang yang digunakan negara akan diamati dari tiga praktik artikulasi, yakni praktik pertambangan, praktik kebijakan, dan mobilisasi dukungan. Ketiga praktik ini nantinya akan dicermati untuk melihat sejauh mana titik tanda persetujuan dibentuk. Dengan operasi kerja semacam itu, maka "kesejahteraan" yang dipakai sebagai "konsensus" dalam kebijakan-kebijakan yang menopang rencana pertambangan semen bisa dicermati dengan seksama.

Supaya makna-makna yang dibentuk tetap berada dalam logika kesamaan dan tidak terjebak dalam logika perbedaan, maka intervensi hegemoni yang dilakukan harus mencapai posisi "politik dan objektif" dalam sebuah batas politik (*political frontier*) yang sama. Politik dipahami sebagai pengorganisasian dari sisi tertentu dengan cara tertentu dengan meniadakan kemungkinan adanya cara lain.[12] Sedangkan objektif dipahami bukan seperti positivisme (sebagai kebenaran yang bisa diuji), tetapi

12 Lebih lanjut Jorgensen & Phillips (2010: 70) menjelaskan bahwa "Semua makna sifatnya cair dan semua wacana mungkin. Objektivitas-lah yang menyamarkan ketergantungan dan agar bisa menyamarkan ketergantungan seperti itu objektivitas harus menyembunyikan kemungkinan-kemungkinan alternatif. Bila tidak disembunyikan tentu kemungkinan alternatif tersebut bisa mencuat. Karena itu objektivitas bisa dikatakan bersifat ideologis."

objektif oleh Laclau dan Mouffe dipahami sebagai istilah untuk menyebut apa yang dianggap sebagai sesuatu yang ditetapkan (*given*) dan sulit diubah karena perbedaan dari sesuatu yang lain (Jorgensen & Phillips 2010: 68-70). Adapun batas politik inilah yang memisahkan antara 'kami' dan 'mereka' secara berseberangan, dengan kata lain antara yang menghegemoni dan yang sedang membangun hegemoni tandingan (*counter-hegemony*).

Dalam konteks semacam itu, terjadinya inklusi dan eksklusi dalam dinamika kebijakan sepenuhnya harus dimengerti sebagai pertarungan wacana untuk merebut posisi politik dan objektif, yakni dengan mengadakan sekaligus meniadakan saluran pemaknaan tertentu. Dalam kerangka teoretik seperti ini, maka penetapan saluran "legal dan tidak legal" atau "akademik-non akademik" adalah upaya menegaskan jarak batas politik. Sementara itu, pemosisian sebuah saluran tertentu (legal atau akademik) sebagai saluran yang "benar" dan saluran lain dianggap "salah" merupakan upaya untuk mencapai posisi politik sekaligus objektif. Dengan demikian, siapa yang berhasil memenangkan pertarungan wacana dan memperoleh posisi politik dan objektif, maka wacana yang diusungnya yang akan menjadi hegemoni.

Karena hegemoni merupakan proses kewacanaan, maka hegemoni memiliki sifat dasar yang sama dengan makna, yakni tidak pernah solid sepenuhnya. Untuk itu, hegemoni pun tetap bersifat kontingensi (*contingency*) dan tidak pernah secara penuh (*fixed*) menuntaskan wilayah sosial dari pemaknaan (Hutagalug 2008: xxviii). Dengan

sifatnya yang demikian, hegemoni yang dibangun tetap berpotensi menciptakan dislokasi sosial. Dislokasi sendiri merupakan kondisi yang tidak bisa dioperasikan dari sesuatu yang simbolis ke dalam sesuatu yang riil (Biglieri dan Perello 2011: 56). Dislokasi adalah sumber dari kebebasan—bukan dalam pengertian identitas positif—, tetapi lebih mengacu pada kebebasan dari kesalahan struktural yang memungkinkan untuk membangun ulang makna lain melalui tindakan identifikasi (Laclau, 1990: 60).

Dipahaminya dislokasi sebagai kemungkinan membangun ulang makna membuat dislokasi menjadi ruang bagi tersemainya berbagai antagonisme. Laclau mendefinisikan antagonisme sebagai "bukti dari ketidakmungkinan terciptanya sebuah proses tenunan yang bersifat final", sebab kondisi ini "merupakan pengalaman akan batas ranah sosial". Antagonisme juga "tidak bersifat internal, tetapi bersifat eksternal dari masyarakat" (Laclau & Mouffe 2008: 189). Jadi, antagonisme adalah sebuah kesaksian atas ketidakmungkinan dari batas-batas yang objektif, sehingga apa yang tidak dikatakan bisa ditampilkan (Biglieri dan Perello 2011: 51-52). Penjelasan tentang antagonisme ini menjadi penting bagi aksi-aksi politik untuk menata ulang makna baru. Dalam pandangan Laclau, aksi politik inilah yang disebut dengan perjuangan hegemoni (*hegemony struggle*). Pengartikulasikan titik yang berbeda (dari hegemoni yang eksis) menjadi suatu proyek politik kredibel yang mampu menjawab permasalahan yang hadir di dalam masyarakat adalah tujuan dari perjuangan hegemoni (Torfing 2005 :165). Sebab bagaimanapun juga,

tidak ada wacana yang bersifat tertutup; karena wacana senantiasa mengalami transformasi-transformasi akibat adanya interaksi dengan wacana lain (Jorgensen & Phillips 2010: 12).

Melalui konsep dislokasi sosial dan antagonisme, menjadi krusial untuk mengajukan pertanyaan ulang atas hegemoni yang hendak dibentuk negara, yakni: Apakah wacana kesejahteraan yang menopang hegemoni pembangunan berbasis tambang berhasil menjadi representasi simbolis dari yang riil? Untuk menjelaskan ini, Laclau (1990) memperkenalkan dua konsep lain, yakni mitos (*myth*) dan imaji sosial (*social imaginary*). Mitos menyediakan sebuah pembacaan pokok yang memungkinkan aktor politik melakukan penafsiran atas penyebab krisis sosial dengan menekankan peristiwa tertentu dan kemudian menyarankan solusi tertentu (Torfing 2003: 164). Selama masih ada krisis atau struktur terdislokasi yang belum terselesaikan, maka mitos akan tetap menjadi ruang representasi baru (*new spaces of representation*) yang menjahit berbagai dislokasi yang ada (Laclau 1960: 61). Ketika suatu mitos mampu menjadi yang simbolis dan bisa mendominasi peristiwa-peristiwa empiris, maka di saat itulah mitos bertransformasi menjadi imaji sosial (Torfing 2003: 164). Dengan kata lain, transformasi mitos menjadi imaji sosial bisa terjadi ketika mitos berhasil menetralisir struktur yang terdislokasi dan menggabungkannya menjadi tuntutan sosial secara luas (Howarth & Stavrakakis 2000).

Dalam penelitian ini, wacana kesejahteraan hadir sebagai akibat dari struktur yang terdislokasi berupa kondisi tidak sejahtera atau miskin. Dengan demikian, kemiskinan dipahami sebagai kondisi krisis. Dalam struktur yang demikianlah, aktor-aktor politik berpeluang untuk memberikan penafsiran-penafsiran atas penyebab krisis, sekaligus membangun narasi tentang jalan keluar (solusi). Tepat di titik ini para aktor dalam negara dan korporasi mulai membangun mitos "tambang untuk kesejahteraan". Selama makna tentang kondisi miskin (tidak sejahtera) belum terselesaikan, maka mitos "tambang untuk kesejahteraan" akan tetap dipakai negara sebagai representasi bagi jalan kesejahteraan. Akan tetapi, apabila mitos tersebut tidak bisa menjadi representasi simbolis dari tuntutan kolektif banyak orang, maka mitos ini juga akan gagal menjadi imaji sosial. Sebab, kuat tidaknya bangunan hegemoni bergantung pada mampu tidaknya mitos bertransformasi menjadi imaji sosial.

Selama mitos yang dibangun untuk menopang hegemoni pembangunan berbasis tambang selalu menciptakan kontradisksi-kontradiksi dalam wacana kesejahteraan, maka itu akan terus memicu munculnya dislokasi sosial lebih besar dan berpotensi menciptakan antagonisme baru yang menolak formasi wacana yang dibangun sebelumnya. Jika antagonisme ini terkonsolidasi dalam sebuah struktur signifikansi lain yang mengganggu kemapanan hegemoni yang dibangun negara, maka antagonisme ini bisa menjadi perjuangan hegemoni, yang tidak saja merusak hegemoni yang mapan, melainkan juga bisa menjadi jalinan makna

lain yang sama sekali berbeda (*counter-hegemony*) dari yang dibangun negara.

Dari uraian di atas, saya hendak mengatakan bahwa hegemoni dan antagonisme ibarat dua sisi mata uang. Keduanya merupakan satu bagian yang sama. Antagonisme yang mengalami sedimentasi, dalam pengertian berhasil menundukkan antagonisme lain, adalah bentuk dari hegemoni. Dasar pijakan berlangsungnya antagonisme maupun hegemoni berada pada sebuah formasi wacana spesifik. Hubungan antara makna satu dengan makna lain dalam suatu wacana berlangsung saling antagonsitik atau bertentangan satu sama lain. Jika makna satu dirusak dan berhasil ditundukkan oleh makna yang lain, maka di situlah berlangsung jalur pembentukan hegemoni. Atau bisa dikatakan, pemaknaan parsial yang mengalami universalisasi merupakan wujud dari hegemoni.

Strategi Analisis Wacana Konstruktivis sebagai Perangkat Kerja

Bagaimana melakukan analisis wacana dalam kebijakan? Untuk permulaan, pernyataan Foucault berikut ini bisa menjadi jawaban sementara.

> Jika Anda ingin mengerti perilaku manusia pada tempat dan waktu tertentu, temukanlah berbagai wacana yang dominan di sana. Dan jika Anda ingin mengerti mengapa sebuah wacana begitu berkuasa, jadilah seorang arkeolog sosial: dengan menelusuri asal-usul cara mengetahui, dengan melakukan dekonstruksi, dan mengerti landasan yang ada pada kekuasaan berada

> hinga akhirnya menjadi dominan (Foucault dalam Jones 2009: 174)

Sederhananya, analisis wacana merupakan upaya untuk mendekonstruksi struktur-struktur yang dianggap ada begitu saja (*taken for granted*). Struktur yang dinilai "lumrah dan lazim" diposisikan sebagai struktur dominan, yang terbentuk melalui proses sosial yang kompleks, bukan lantaran hadir begitu saja. Dalam konteks studi kebijakan ini, maka analisis wacana dilakukan dengan mengamati struktur-struktur dominan yang ada dalam sebuah kebijakan.

Ada cukup banyak cara melakukan analisis wacana. Dalam hal ini, saya memilih menggunakan analisis wacana Laclau. Penggunaan analisis wacana Laclau banyak dikategorikan ahli meta-teori sebagai analisis wacana konstruktivis,[13] terutama karena dipengaruhi sangat kuat oleh tradisi pemikiran post-fondasionalis. Bagi penganut post-fondasionalis, dunia sosial tidak dipahami sebagai sesuatu yang solid dan permanen, sebaliknya bersifat cair dan tidak stabil (Torfing 1999). Jadi, dalam analisis wacana kontruktivis, struktur sosial dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya merupakan ciptaan dari produk wacana. Itulah yang membedakannya dengan jenis analisis lain yang masih melakukan pembedaan antara struktur diskursif dengan non-diskursif. Bagi Laclau, pembedaan kedua struktur itu tidak diakui lantaran keseluruhan proses yang membentuk struktur sosial dihasilkan oleh wacana

13 Hal ini yang membedakan dengan analisis wacana kritis maupun psikologi kewacanaan. Lebih lanjut baca Jorgensen & Phillips 2010.

itu sendiri (Jorgensen & Phillips 2010). Oleh karenanya, dalam kontruktivisme tidak ada kebenaran universal, yang ada hanyalah kebenaran parsial yang di(ter)universalkan.

Karena berada dalam rumpun post-fondasionalis, maka sebuah analisis kebijakan tidak diletakkan sebagai wilayah yang bisa dipahami secara objektif begitu saja tanpa ada ruang untuk mengalkulasikan berbagai kontestasi yang ada di dalamnya. Artinya, keberadaan kebijakan dipahami sebagai konsensus dalam sebuah konteks dan periode waktu tertentu saja. Berangkat dari landasan itu, kebijakan mesti dimengerti sebagai persoalan yang sangat subjektif dan ditentukan atas konsensus berbagai kepentingan yang melingkupinya. Untuk mengikuti cara berpikir ini, maka seorang analis kebijakan mesti melihat sebuah kebijakan dengan cara mencermati berbagai intersubjekvifitas yang hadir dalam kebijakan. Oleh karena itu, memahami kebijakan harus melihat konteks yang spesifik dan unik, serta tidak bisa lagi menyamaratakan pengamatan hanya pada kesesuaian antarprosedur satu dengan yang lainnya.

Melalui cara berpikir semacam itu, praktis penelitian ini bisa dianggap sebagai kebalikan dari cara analisis teknokratis-proseduralis yang cenderung sangat positivistik. Dalam kerangka positivistik, keberadaan data, informasi, bahkan keputusan dalam kebijakan diasumsikan bisa dikalkulasikan dengan cermat karena dianggap dapat dirasionalisasikan secara netral. Sebaliknya, cara pandang konstruktivis menekankan bahwa seluruh dinamika dalam kebijakan digerakkan oleh kepentingan-kepentingan yang saling berebut makna. Artinya, analisis kebijakan

konstruktivis bertujuan untuk mengungkap makna-makna yang hadir dalam kebijakan.

Dalam melakukan analisis, saya lebih memilih menggunakan istilah strategi analisis wacana daripada metode analisis wacana. Penggunaan istilah "strategi analisis wacana" perlu dibedakan dengan "metode analisis wacana". Andersen (2003: xiii) menjelaskan bahwa strategi analisis tidak terdiri dari seperangkat aturan metodologis, tetapi merupakan strategi yang mendudukkan bagaimana seorang peneliti akan mengonstruksi pengamatannya terhadap sesuatu, menjadi objek dari pengamatannya sendiri dan mendeskripsikan apa yang dia deskripsikan (*lihat* Tabel 1). Melalui pengertian demikian, maka saya berposisi sebagai peneliti yang berusaha mengamati persoalan—dan secara bersamaan—menjadi objek dari pengamatannya sendiri. Posisi demikian menjadikan saya sebagai peneliti sekaligus aktivis yang terlibat (bersama warga) dalam dinamika kebijakan yang berlangsung.

Tabel 1

Perbedaan Metode dan Strategi Analisis

Metode	Strategi Analisis
Pengamatan terhadap objek	Pengamatan atas pengamatan
Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan yang benar dari objek	Tujuannya adalah mempertanyakan keadaan untuk melakukan de-ontologi
Aturan metodologis	Strategi menganalisis

Metode	Strategi Analisis
Tujuannya mengikuti seperangkat prosedur yang dibutuhkan untuk menghasilkan pengetahuan yang ilmiah	Tujuannya menghasilkan pengetahuan yang secara kritis berbeda dari sistem pemaknaan yang ada

Sumber: diadaptasi dan diterjemahkan dari Andersen (2003: xiii)

Mengacu pada tabel di atas, maka secara khusus saya mengambil beberapa posisi dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini bukan menanyakan tentang "apa" atau "mengapa" sebuah kebijakan bisa hadir dalam bentuk tertentu. Namun, fokus saya yang lebih utama adalah menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan itu dihadirkan. *Kedua*, penelitian saya tidak bertujuan untuk menemukan realitas yang sebenarnya terjadi dalam kebijakan. Sebaliknya, saya lebih cenderung untuk mengungkap bagaimana pembentukan realitas dalam kebijakan sehingga dianggap benar dan lazim. *Ketiga*, proses penelitian tidak dilalui dengan seperangkat aturan dan prosedur penelitian dalam kebijakan, tetapi melalui strategi keterlibatan langsung untuk menemukan praktik pemaknaan yang berbeda dari sistem pemaknaan yang mapan. Dengan ketiga posisi tersebut, kerja penelitian yang saya lakukan bukan saja untuk memahami mengapa muncul sebuah kebijakan, melainkan juga mengapa kebijakan muncul dengan cara tertentu.

Karena menjadi bagian dari objek, maka saya bertindak sebagai pihak yang sedang melakukan *counter* atas wacana dominan. Saya terlibat dalam beragam aktivitas yang

dilakukan warga mulai dari tinggal bersama warga, rapat dan kosolidasi bersama warga, demonstrasi, berjejaring dengan aliansi, hingga menghadiri sidang-sidang terkait gugatan warga atas kebijakan pertambangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Semua itu sepenuhnya dikerjakan untuk menemukan berbagai makna yang berbeda dari sistem pemaknaan dominan yang dibentuk negara.

Adapun tentang data penelitian, strategi analisis wacana tidak membedakan antara data primer dan sekunder. Semua data adalah data primer. Semua yang ditemukan adalah bagian penting dalam penelitian, entah itu dokumen negara, surat perizinan, perundang-undangan, bahkan pernyataan berbagai aktor yang terlibat dalam suatu formasi wacana tertentu merupakan kekayaan data yang bisa digunakan. Termasuk lagu, puisi, poster, foto, video juga menjadi bagian data yang bisa mendeskripsikan proses sebuah wacana. Tidak hanya itu saja, data berupa berbagai publikasi media, catatan, monograf, laporan penelitian, dan berbagai literatur merupakan data yang sangat penting.

Sedangkan untuk cara menganalisis data, ada dua strategi yang saya pakai, yakni dekonstruksi dan analisis hegemoni (*lihat* Tabel 2). Dekonstruksi merupakan cara untuk melihat dualitas persoalan, yakni yang universal dan yang partikular. Dekonstruksi berusaha menunjukkan bahwa sesuatu yang universal sesungguhnya adalah sesuatu yang partikular. Sementara itu analisis hegemoni merupakan cara untuk memperlihatkan bagaimana sebuah hegemoni berhasil dibangun melalui mekanisme eksklusi-

inklusi, konsensus-disensus, dan *equivalence-difference*. Sedangkan bagaimana analisis disusun secara sistematis sepenuhnya dikerjakan dengan mengikuti kerangka teoretis yang telah saya jabarkan sebelumnya.

Tabel 2

Strategi Analisis Laclau

Strategi	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Spesifik
Dekonstruksi	Pemaknaan seperti apakah yang bangun dalam sebuah dualitas (konflik) yang spesifik?	Dengan cara apa wacana tertentu dibangun secara universal? Dengan cara apa pula wacana yang lain menjadi tidak terungkap (menjadi parsial)?
Analisis Hegemoni	Bagaimana sebuah wacana dibangun dari sebuah pertarungan wacana-wacana yang berbeda, hingga terjadi pengendapan berbagai elemen mengambang.	Dengan cara apa penanda tertentu dibentuk, diberi makna, dan difiksasi dari berbagai konflik wacana melalui struktur kesamaan dan perbedaan (*equivalence/ deference*).

Sumber: diadaptasi dari Andersen (2003: 62)

Dengan mengikuti tabel di atas, maka data-data yang terkumpul diposisikan sebagai makna yang berserak. Karena makna bersifat cair dan tidak stabil, maka makna

tersebut harus ditetapkan secara parsial dengan mengamati praktik artikulasi yang mengikutinya. Dengan menguraikan makna-makna yang telah ditetapkan itulah dekonstruksi dan analisis hegemoni bisa dikerjakan. Melacak bagaimana praktik artikulasi (negara dan korporasi) yang menopang wacana pembangunan berbasis pertambangan adalah bagian yang akan didekonstruksi. Sasaran dekonstruksi adalah melihat berbagai dualitas makna, baik yang dibentuk maupun disingkirkan oleh wacana pembangunan berbasis pertambangan. Adapun pertarungan wacana dalam kebijakan akan menjadi bagian dari analisis hegemoni. Masing-masing subjek harus dipahami sedang melakukan pertarungan yang berusaha membentuk, memberi makna, dan memenangkan wacana. Jadi, analisis dekonstruksi dan analisis hegemoni bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam strategi analisis wacana Laclaunian.

Peta Buku

Untuk memahami secara utuh pertarungan wacana yang terjadi dalam kebijakan pertambangan di Rembang, saya membagi tulisan ini menjadi delapan bagian pembahasan. Setelah bagian pertama ini, BAGIAN 2 akan mengupas bagaimana konteks global wacana pembangunan dalam mendudukan persoalan pertambangan. Di bagian ini, saya akan menguraikan jejak-jejak pertambangan yang mengalami pasang surut akibat berbagai kritik dan perdebatan. Saya juga akan menyinggung bagaimana wacana

pertambangan saat ini dipengaruhi oleh ide-ide *sustainability* dan *governance*.

Di BAGIAN 3 saya akan mengupas bagaimana konteks lokal dalam merespons hadirnya mitos (*myth*) sebagai sebuah representasi makna baru. Dalam hal ini saya akan menguraikan bagaimana mitos "tambang untuk kesejahteraan" diciptakan. Mitos tidak dipahami sebagai sesuatu yang palsu (tanpa bukti) yang ada begitu saja. Mitos di sini dipahami dalam pengertian Laclaunian, yakni buah dari hasil konstruksi aktor-aktor politik yang berkepentingan dalam pertarungan wacana.

Kemudian di BAGIAN 4, saya akan menunjukkan bagaimana wacana kesejahteraan digunakan untuk membangun hegemoni pembangunan berbasis pertambangan. Terma kesejahteraan di bagian ini akan didudukkan sebagai titik nodal yang dibangun negara sebagai hasil sedimentasi berbagai tenunan penanda mengambang. Oleh karenanya, saya akan mengupas bagaimana berbagai penanda mengambang itu diberi makna dan diteguhkan posisinya melalui praktik artikulasi. Beberapa penanda mengambang itu akan diamati dalam tiga praktik utama, yakni praktik pertambangan, praktik kebijakan, dan praktik mobilisasi dukungan. Penanda mengambang yang teramati dari tiga praktik artikulasi itulah yang dijahit untuk mengukuhkan hegemoni pembangunan berbasis tambang.

Selanjutnya di BAGIAN 5, saya akan menyajikan uraian tentang dislokasi dari bangunan hegemoni pembangunan berbasis pertambangan. Selama membentuk hegemoni tersebut, negara diharuskan menyingkirkan berbagai

kelindan makna yang dianggap mengganggu. Melalui pembahasan dalam bagian ini, berbagai makna yang ditutupi sebelumnya akan ditampilkan ulang. Dengan membuka kembali celah-celah itu, maka upaya dekonstruksi makna terhadap hegemoni pembangunan berbasis pertambangan bisa diuraikan secara lebih cermat.

Berikutnya, di BAGIAN 6 saya akan menguraikan bagaimana dislokasi yang ada memicu lahirnya antagonisme sosial yang berusaha untuk merusak hegemoni negara sembari juga membangun hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) yang lain. Jika "kesejahteraan" adalah titik nodal dari hegemoni yang dibangun negara, maka di bagian ini saya akan tunjukkan bagaimana "kesejahteraan" menjadi penanda mengambang bagi perjuangan warga untuk mendefinisikan kesejahteraan dengan caranya sendiri.

Sedangkan di BAGIAN 7, para pembaca mungkin akan merasa ada keterputusan alur cerita dari sebelumnya. Hal ini wajar karena saya sengaja menulis bagian ini untuk membuat sebuah refleksi kritis tentang studi kebijakan sebagaimana hasil yang saya temukan dalam penelitian. Refleksi itu adalah upaya merekonstruksi sebuah studi kebijakan baru yang secara epistemologis bergerak dalam nalar konstruktivis. Secara bersamaan, saya juga hendak mengenalkan sebuah model analisis kebijakan alternatif untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pendekatan yang cenderung netral, apolitis, dan nir-kepentingan.

Terakhir di BAGIAN 8, saya akan menyimpulkan hasil penelitian di level teoretis, baik secara mikro untuk

menjawab pertanyaan seputar penelitian di Rembang, maupun secara makro untuk memberikan sumbangsih dalam perdebatan analisis kebijakan. Selain itu, saya juga akan menawarkan sebuah pekerjaan rumah yang bisa digeluti oleh pada pengkaji kebijakan.

BAGIAN 2

PERTAMBANGAN DALAM PERSIMPANGAN WACANA PEMBANGUNAN

Pembangunan, Pertambangan, dan Perdebatannya[14]

Kita mulai pembicaraan ini dari era pasca Perang Dunia II (awal perang dingin) saja. Sebab di masa itu, dimulailah kemunculan berbagai lembaga supranasional seperti PBB, juga lembaga seperti *the International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia serta *the General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)[15] yang merupakan institusi penyuplai gagasan-gagasan

14 Pembahasan ini merupakan penyederhanaan atas berbagai diskusi tentang konsep-konsep pembangunan. Tujuan penempatan bahasan ini untuk memberikan konteks bahwa pertambangan memiliki relasi yang tidak terpisah dalam wacana pembangunan (global). Beberapa bagian dari argumen ini pernah dimuat dalam Ardianto (2015b: 35-46).

15 Ditahun 1995, GATT berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO).

pembangunan, khususnya bagi negara dunia ketiga. Apabila dilacak jejak teoretisnya, mulai dari konsep "Tabungan dan Investasi" Harrod-Domar, gagasan "Dorongan Berprestasi" David McClelland, hingga teori "Tahapan Pembangunan" W. W. Rostow merupakan beberapa contoh dari teori-teori modernisme yang menjadi obat generik yang diusung oleh lembaga-lembaga supranasional untuk mendorong pembangunan negara dunia ketiga (Budiman 1995). Lewat landasan teori-teori semacam itu, cara pandang pembangunan bercorak sangat ekonomistik. Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci satu-satunya yang harus dilihat untuk menunjukkan apakah suatu negara berhasil dalam pembangunan atau tidak.

Secara tidak langsung, cara pandang pembangunan berwatak ekonomistik ini juga memengaruhi cara pandang sebagian besar negara dalam melihat praktik eksploitasi sumber daya alam (salah satunya pertambangan). Eksploitasi sumber daya alam dilihat sebagai salah satu upaya menuju industrialisasi yang menjadi syarat kunci dalam pembangunan ekonomi. Persis sebagaimana ditahbiskan Rostow (1961).

> "Pemanfaatan sumber daya alam akan menjadikan negara-negara berkembang memiliki kemampuan melakukan transisi dari keterbelakangan menuju lepas landas (take-off) pembangunan seperti yang terjadi di negara-negara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris".

Fungsi produksi negara bisa berjalan dengan adanya usaha pertambangan. Secara teknis, pertambangan akan menghasilkan output tenaga kerja, modal, energi, material,

dan berbagai output lainnya (Davis & Tilton 2002: 5). Dengan sumber kapital dari hasil pertambangan, maka suatu negara dapat menyokong proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, perumahan, rumah sakit, dan beragam fasilitas publik lainnya.

Pertambangan juga dianggap mampu memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi suatu negara. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan disarankan lebih baik dilakukan oleh korporasi, bukan oleh negara. Korporasi yang berfokus dibidang pertambangan memiliki teknologi tinggi yang bisa ditransferkan ke daerah/negara yang wilayahnya akan ditambang. Dalam istilah Wright (1999: 308-313) ini disebut dengan efek "pengalaman belajar bersama" (*collective learning experience*). Alur narasi ini yang mensyaratkan suatu negara membuka pintu lebar bagi eksploitasi pertambangan skala besar.

Selain transfer teknologi dari korporasi, narasi pembangunan yang dibangun oleh para ahli ekonomi itu juga meyakini bahwa pemerintah dan masyarakat lokal sekitar kawasan tambang juga akan mendapatkan efek menetes *(trickle down effect)* dari aktivitas pertambangan seperti lapangan pekerjaan, pembelian lahan, proyek infrastruktur, investasi komunitas, kompensasi, dan aktivitas *Corporate Social Responsbility* (Wall & Pelon 2011: 7). Pertambangan skala besar, dengan demikian, tidak hanya memberikan dampak positif bagi pemerintah tetapi juga terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat di sekitar kawasan tambang akan mampu mengembangkan kehidupan ekonominya berkat kehadiran dan aktivitas korporasi pertambangan.

Namun, kenyataan bahwa industrialisasi pertambangan merupakan syarat untuk mendongkrak pembangunan suatu negara tidak semulus seperti dibayangkan. Kritik paling keras terhadap teori pembangunan ekonomi (yang dipengaruhi teori modernisme) berasal dari para strukturalis Amerika Latin yang sekaligus pencetus teori dependensi. Mereka melihat bahwa hampir seluruh konsep pembangunan ekonomi yang disokong oleh teori modernisme menempatkan gagasan pembangunan sebagai persoalan internal suatu negara.[16] Padahal dalam kenyataannya terdapat persoalan eksternal (dalam hubungan internasional) berupa relasi yang tidak setara antara negara kaya dan miskin. *Trickle down effect* yang dibayangkan akan lahir dari industrialisasi ternyata tidak terjadi. Alih-alih efek menetes ke bawah sebagaimana yang diyakini para teoretisi pembangunan, menurut Arundhati Roy (2015), industrialisasi justru melahirkan efek semburan ke atas *(gush-up)*. Keuntungan industrialisasi lebih banyak terserap ke negara kaya dibanding negara miskin, lebih banyak mengalir ke kantong pengusaha-pengusaha kaya daripada ke rakyat miskin. Hal ini terjadi persis ketika paket ekonomi lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia gagal mengangkat ekonomi negara-negara Amerika Latin dan beberapa negara berkembang lainnya.

16 Beberapa strukturalis Amerika Latin yang dimaksud adalah Raul Prebisch, Hans Singer, Celso Furtado dan Osvaldo Sunkell, serta neo-Marxian seperti André Gunder Frank, Paul Baran dan Samir Amin. Mereka dikenal sebagai pencetus teori-teori dependensi. (*Lihat* Knutsson 2009).

Tidak saja kritikan dari penganut teori dependensi, pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam juga mendapat kritik dari penganut teori pertumbuhan ekonomi sendiri, yakni dengan adanya fenomena kutukan sumber daya alam (*resource curses*). Dalam disertasinya yang berjudul *Sustaining Development in Mineral Economies*, Richard M. Auty (1993) menemukan kenyataan bahwa antara tahun 1960 dan 1990 pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedikit sumber daya ternyata dua sampai tiga kali lebih tinggi daripada negara-negara yang melimpah sumber dayanya. Lebih lanjut, Auty (1993) menjelaskan bahwa ketergantungan sebuah negara pada keberlimpahan alam cenderung menyebabkan merebaknya korupsi bahkan melebarnya jurang kemiskinan. Pada titik ini, ekspoitasi sumber daya secara besar-besaran malah menjadi kutukan bagi negara tersebut. Senada dengan argumen di atas, Sachs & Warner (1997; 2001) juga menyatakan bahwa negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah tidak selalu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam beberapa variabel negara-negara tersebut malah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang besar.

Sebuah laporan lain berjudul *Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development* menunjukkan kenyataan yang hampir sama. Laporan yang dirilis Oxfam tersebut menyatakan bahwa pertambangan tidak banyak memberi efek positif bagi sebuah negara. Dengan telak laporan itu menunjukkan bahwa

pertambangan memiliki kontribusi yang sangat kecil bagi pendapatan nasional, khususnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.[17] Dijelaskan lebih lanjut, "Bahkan keberadaan pertambangan bagi masyarakat lokal seringkali diikuti dengan kemiskinan dan *ghost town*".[18] Keberlangsungan pembangunan ekonomi lokal di sekitar kawasan tambang pun, umumnya bukan hasil dari sektor pertambangan" (Power, 2002). Tidak hanya itu, untuk beberapa kasus, pertambangan bahkan memberikan efek negatif yang berbahaya bagi suatu daerah. Kasus *conflict diamond* di Angola, Sierra Leone dan Kongo mengonfirmasi argumen tersebut. Di tiga negara ini, *conflict diamond* telah menciptakan konflik sosial yang masif dan tingkat kemiskinan yang ekstrem (Goreux, 2001).

Beberapa kritik di atas menjadikan teori pembangunan bercorak ekonomistik mengalami dekadensi dan secara bersamaan semakin memojokkan industrialisasi yang berkecenderungan melakukan eksplotasi sumber daya alam. Minimnya ekuivalensi antara industri (tambang) dengan pertumbuhan ekonomi menjadikan ide pembangunan yang dipercaya penganut modernisme semakin tidak meyakinkan. Terlebih, dampak dari eksploitasi sumber daya alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan lingkungan. Polusi udara, pencemaran air (danau, sungai) dan tanah, bahkan

17 Argumen ini berlawanan dengan dalil teori tahapan pembangunan Rostow (1961) sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

18 Kota hantu (*ghost town*) merujuk pada desa atau kota yang telah ditinggalkan penghuninya, biasanya dikarenakan oleh adanya bencana, perang, atau akibat kegagalan kehidupan (ekonomi) sebuah daerah.

kesehatan manusia semakin hari semakin memburuk seiring dengan aktivitas-aktivitas pertambangan di banyak negara (Bell & Donnelly 2006; Ashton, Love, Mahachi, & Dirks 2001). Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi gagasan pembangunan yang berhasrat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, tetapi dalam kenyataannya malah melahirkan ancaman.

Berlanjutnya Hasrat Eksploitasi

Ketika teori pembangunan yang bercorak ekonomistik mulai kehilangan pamor, muncul gagasan lainnya, yakni pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pada 1972, Konferensi PBB tentang pembangunan manusia (*the United Nations Conference on Human Development*) menjadi titik puncak dari krisis teori pembangunan ekonomi yang bercorak kapitalistik dan bernalar sangat modernis, sekaligus menjadi embrio bagi gagasan *sustainable development* (selanjutnya disebut *SD*). Kemudian di tahun 1987, sebuah kelompok yang bernama *Brundtland Commision* menyepakati *Deklarasi Tokyo* yang menjadi dokumen pertama atas ide tentang *SD*. Komisi ini mendefinisikan *SD* sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.[19] Sederhananya, gagasan *SD* merupakan

19 *World Commission on Enviromental and Development* (WCED) atau biasa lebih dikenal dengan *Brundtland Commission* mendefinisikan "*sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*".

perkawinan dua gagasan, yakni peningkatan ekonomi dan kelangsungan/kelestarian lingkungan.

Pada perkembangannya, *SD* mendapat posisi istimewa dalam wacana pembangunan. Konsep *SD* berkembang pesat sebagai pendekatan baru dalam melihat arah pembangunan. Dalam *SD*, pembangunan tidak semata mengejar kebutuhan manusia hari ini, tetapi juga keberlangsungan hidup di masa datang. Itu berarti pengejaran ekonomi demi memenuhi kebutuhan manusia tetap bisa dilakukan tanpa harus mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Logika keberlanjutan inilah yang disisipkan dalam proyek-proyek pembangunan suatu negara. Dengan begitu, gagasan keberlanjutan lingkungan (*sustainability*) akhirnya ditempatkan sebagai moral etis bagi pembangunan itu sendiri. Lingkungan tidak semata berdimensi ekologis, tetapi juga berdimensi sosial masyarakat. Artinya, pembangunan tidak hanya sensitif bagi kalkulasi dampak kerusakan ekologis, tetapi juga juga sensitif bagi keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Efek dari gagasan *SD* kemudian mendorong banyak negara untuk menginisiasi paket kebijakan pembangunan dengan berbagai nama dan model yang merujuk pada terminologi-terminologi *SD* (Jamison 2004: 17). Beberapa negara, contohnya yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), beramai-ramai membuat paket kebijakan pembangunan dengan

---

Lihat UN Document. (tanpa tahun). "Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development".

istilah-istilah berasosiasi pada keberlanjutan lingkungan (Meadowcroft 1999: 221).[20] Bahkan, menurut laporan *A Briefing for Policy Makers* yang dikeluarkan Komisi Eropa, *SD* dianggap sebagai tatanan baru ekonomi dunia global (Robertson, 2005). Menurut laporan itu, Uni-Eropa adalah contoh sukses kawasan yang mampu melakukan restrukturisasi berbagai kebijakan yang selaras dengan *SD*.

Meski demikian, banyak kalangan mengkritisi gagasan *SD* yang dianggap bermasalah. Secara semantik, *SD* dianggap sudah sangat problematis. Lélé (1991) menyatakan bahwa *'sustainability'* memiliki akar semantik yang merujuk pada ekologi dan kepekaan sosial (nilai, lembaga, budaya, atau karakteristik sosial lainnya), sedangkan *'development'* merujuk pada gagasan pertumbuhan, peningkatan, atau sesuatu yang berasosiasi pada pengejaran kepuasan (*satisfying basic needs*). Itulah sebabnya, bagi Lélé (1991), konsep *SD* sebenarnya sangat kontradiktif dan tidak bermakna (*contradictory and trivial*). Kritik lain, beberapa kalangan menilai sinis bahwa *SD* hanyalah instrumen negara maju untuk membatasi perkembangan ekonomi negara berkembang (Anderson 2002; Bolay 2011). Negara

20 Pada kisaran 1989-1997, negara yang tergabung dalam OECD seperti Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat mengeluarkan berbagai kebijakan yang memakai istilah-istilah lingkungan. Beberapa di antara istilah itu seperti *ecological sustainable* (Australia), *Green Plan* (Kanada), *Enviromental Act* (Jerman), *Enviromental Basic Plan/Law* (Jepang), *Enviromental Management* (Belanda), *Enviromental Protection* (UK), *Enviromental Project* (Amerika Serikat). (*Lihat* Meadowcroft 1999: 221).

maju banyak menggelontorkan dana untuk perbaikan lingkungan, tetapi secara bersamaan ikut menanamkan modal untuk eksploitasi alam secara besar-besaran di negara lainnya.

Selain gagasan *SD*, di tahun 1990-an—yang ditandai dengan berakhirnya perang dingin—, wacana pembangunan juga beririsan secara kuat dengan ide-ide tentang tata kelola (*governance*). Melalui dukungan institusi supranasional semacam Bank Dunia, IMF, dan lembaga donor sejenis, wacana pembangunan seakan memiliki kegandrungan baru berupa semangat *good governance (*selanjutnya disebut *GG)*. G*ood governance* adalah syarat bagi suksesnya program pembangunan suatu negara. Singkatnya, negara yang gagal melakukan pembangunan karena memiliki tata kelola yang buruk.

Melalui konsep *GG*, dilema yang dihadirkan dari fenomena kutukan sumber daya seakan bisa dijawab. Negara yang memiliki sumber daya alam banyak tetapi hasil yang didapat hanya berandil kecil—bahkan negatif—bagi pembangunan suatu negara, dipahami akibat dari kesalahan tata kelola yang ada. Sebaliknya, dengan tata kelola yang bagus, eksploitasi sumber daya bukan saja akan menjadi motor pembangunan, melainkan juga instrumen pengentasan kemiskinan. Selama prinsip-prinsis *GG* dipenuhi, maka hasil yang didapat dari usaha eksploitasi sumber daya pun akan maksimal. Artinya, pertambangan

bisa saja terus digalakkan selama pemerintah memenuhi kaidah tata kelola yang baik.

Agar negara memiliki justifikasi untuk melanjutkan aktivitas eksploitasi, maka dimulailah kampanye tentang bagaimana melakukan pertambangan yang memenuhi kaidah *GG*. Hal ini bisa dilacak dari sebuah rilis berjudul *Mainstreaming Mineral Wealth in Growth and Poverty Reduction Strategies*. Laporan ini menyatakan bahwa melalui strategi yang tepat pada tata kelola sektor mineral, hasil pertambangan bisa diakumulasikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.[21] Tidak hanya itu, Bank Dunia juga merilis beberapa laporan untuk dijadikan pedoman para ahli maupun pengambil kebijakan dalam menyinergikan sektor tambang dengan program pengentasan kemiskinan, yakni *Striking a Better Balance*[22] dan *Mining and Poverty Reduction*[23]. Laporan-

21 Beberapa strategi yang dimaksud antara lain seperangkat kebijakan dan regulasi yang stabil dan kondusif; alokasi dan redistribusi keuntungan yang tepat; kemitraan antara negara, swasta, dan aktor lokal; pemberdayaan komunitas; implementasi CSR; dan lain sebagainya. *Lihat* Pedro (2006).

22 Laporan ini menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya akan menghasilkan banyak dampak positif jika memiliki tata kelola pemerintahan yang transparan, redistribusi keuntungan industri ekstraktif bagi kelompok miskin, adanya program mitigasi, perlindungan hak warga, promosi energi ramah lingkungan, koordinasi antarkelembagaan, dan pengawasan (*learning and reviewing*) yang berkelanjutan. *Lihat* Salim (2003).

23 Laporan ini menekankan bahwa dengan memperhatikan bagaimana ketersambungan keempat faktor, yakni kesempatan, kapasitas, keamanan dan pemberdayaan ekonomi (e*conomic opportunities, capacity, security, empowerment*), sektor pertambangan akan memberi dampak nyata bagi

laporan di atas sering kali menjadi rujukan beberapa negara untuk mengadopsi sistem tata kelola yang baik dalam praktik pertambangan, tidak terkecuali bagi Indonesia. Terlebih, laporan *Striking a Better Balance* sendiri disusun oleh mantan Menteri Lingkungan Indonesia, yakni Prof. Emil Salim.

Dengan adanya dua gagasan baru, *SD* dan GG, maka lahirlah berbagai terminologi baru dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal tersebut bisa dilacak dari keberadaan konferensi-konferensi internasional terkait lingkungan yang menelorkan konsep ekonomi hijau (*green economy*), yang didalamnya terdapat berbagai istilah kunci seperti valuasi lingkungan (*environmental valuation*), akuntasi untuk kapitalisasi alam (*accounting for natural capital*), pelayanan-pelayanan ekosistem (*ecosystem services*), kompensasi hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity offsets*).[24] Konsep-konsep di atas memiliki satu akar induk pada kehendak untuk meningkatkan akses ekonomi (pasar bebas) sembari menyematkan ide tentang tata kelola yang

---

pengentasan kemiskinan. *Lihat* Weber-Fahr, Strongman, Kunanayagam, McMahon, & Sheldon (2001).

24 *Lihat* (UNEP 2011) *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Dokumen setebal 631 ini merupakan rujukan terpenting dalam membahas ekonomi hijau. Adapun ekonomi hijau yang dimaksud adalah konsep tata kelola ekonomi-bisnis yang menguntungkan bagi para pelaku pasar (moneter) tanpa harus meninggalkan efek destruktif dari aktivitas bisnis (global) yang mereka jalankan.

baik serta perhatian bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Dalam konteks bahasan ini, terdapat sebuah titik kesamaan antara gagasan *SD* maupun *GG*, yakni keduanya sama-sama memberi prioritas utama pada eksploitasi sumber daya alam di atas segala hal meskipun menyematkan beberapa syarat secara khusus. Jika *SD* mensyaratkan eksploitasi harus memperhatikan keberlanjutan alam/kehidupan, sedangkan *good governance* mensyaratkan adanya tata kelola yang baik dalam aktivitas eksploitasi. Oleh karena itu, ini bisa dibaca bahwa baik *SD* maupun *GG* merupakan ilusi baru arah pembangunan yang bertujuan menutupi berbagai kehancuran yang dihasilkan dari aktivitas (bisnis) ekploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Ada beberapa alasan mengapa saya berargumen seperti di atas. Pertama, persimpangan antara *SD* dan *GG* dengan bisnis sumber daya alam tidak pernah mengarah pada logika ekosentrisme sepenuhnya. Sebagaimana dalil Dasgupta (2008): "Ecosystems are capital assets" yang sering dirujuk para penganut ekonomi hijau, jelas meletakkan alam dalam relasi transaksional yang bisa dikalkulasi. Penyelamatan atas alam disamapahami sebagai usaha mengkalkulasikan nilai ekonomi dari alam, dalam istilah Jutta Kill (2014): "memberikan label harga atas alam (*putting a price tag on nature*)".[25] Kedua, baik *GG* dan *SD* memiliki kecenderungan

25 "Calculating the economic value is not the same as putting a price tag on nature" adalah satu dari lima kesimpulan yang diutarakan oleh Jutta Kill

menjadikan negara berkembang sebagai objek atau sasaran yang dituju. *Carbon trading* adalah contoh yang paling mudah yang bisa ditemukan. Tidak hanya itu saja, dalam pergaulan global, negara-negara kaya mensponsori kampanye masif (melalui lembaga donor masing-masing) agar negara berkembang mengintegrasikan tata kelola yang baik (*good governence*) dan pembangunan berkelanjutan sembari juga harus mengikuti kehendak agar negara berkembang membuka kran investasi secara luas dalam usaha membabat sumber daya (alam) melalui korporasi-korporasi multinasional skala besar. Dari sini terlihat pihak yang paling diuntungkan dari gagasan *SD* maupun *GG* sesungguhnya adalah korporasi itu sendiri. Mereka akan mendapat legitimasi ramah lingkungan dengan program-program berkonotasi sadar lingkungan atau "hijau" (*eco/green*) dan semacamnya meski aktivitas eksploitasi sumber daya sendiri jelas memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, baik saat eksploitasi maupun pasca eksploitasi.

Catatan Penutup

Uraian di atas memberikan gambaran bagaimana pemaknaan atas pertambangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari wacana pembangunan. Sejak manusia menemukan alat-alat untuk menaklukkan alam, di saat itu pula berbagai aktivitas eksploitasi atas sumber daya

(2014) terkait kritiknya terhadap konsep valuasi ekonomi terhadap alam. Lebih lanjut baca Jutta Kill (2014: 39-52).

dimaklumi atas nama pembangunan. Mulai dari argumen menyokong pertumbuhan ekonomi, efek kesejahteraan, hingga pemberantasan kemiskinan yang dihadapi manusia adalah sebagian dari ragam argumentasi yang menopang legitimasi aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Tidak terkecuali dengan ide-ide tentang *sustainable development* maupun *good governace*—meski dengan syarat-syarat tertentu—sebenarnya tidak pernah beranjak dari hasrat untuk melanjutkan rencana-rencana eksploitasi alam, khususnya agar sumber daya yang masih tersisa bisa terserap dalam pasar bebas.

Mungkin saja beberapa pembaca yang telah akrab dengan perdebatan *SD* maupun *GG* akan menyangkal argumen ini karena dianggap terlalu menggeneralisasikan persoalan. Namun, argumen itu sengaja saya tegaskan di sini untuk memantik diskusi sejenis di bagian-bagian selanjutnya. Pada pembahasan buku ini nanti, para pembaca akan melihat bagaimana ide tentang keberlanjutan (*sustainability*) maupun tata kelola yang baik (*good practices*) hadir dalam bentuk yang sangat politis dan sarat akan kepentingan korporasi. Istilah-istilah ramah lingkungan, *green industry*, dan pengaturan-pengaturan negara dalam kebijakan pertambangan nyaris sepenuhnya ada dalam konteks kebutuhan melapangkan rencana eksploitasi, bukan untuk visi *sustainability* maupun tata kelola yang baik. Itu artinya, ide "keberlanjutan" sesungguhnya adalah keberlanjutan atas hasrat ekploitasi, bukan keberlanjutan atas alam dan kehidupan. Argumen semacam itu akan

berkelindan banyak saat pembaca menyusuri cerita-cerita bagaimana kebijakan pertambangan (di Rembang) itu dibentuk dan diberi makna, khususnya oleh aktor negara dan korporasi.

BAGIAN 3

KONTEKS LOKAL: HADIRNYA MITOS TAMBANG UNTUK KESEJAHTERAAN

"...yang punya ilmu dan ketrampilan baik, ajari saudara yang di desa supaya pandai dan trampil dalam mengelola potensi desa. Yang kaya membantu saudara di desa seperti modal usaha dan pendampingan manajemen usaha agar masyarakat desa berdaya dalam mengelola kehidupan dan pembangunan desa".

(Bibit Waluyo)[26]

Pernyataan di atas disampaikan oleh Bibit Waluyo saat dirinya hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode kedua. Apa yang bisa dipetik dari pernyataan tersebut? Pernyataan yang mengingatkan kita pada jubah kesantunan politik

26 *Lihat* Suara Pembaruan, 11 Mei 2013, "Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo: Melanjutkan Gerakan *Bali Ndeso Mbangun Deso*".

Soeharto di era Orde Baru yang diartikulasikan kembali oleh Bibit Waluyo, dengan melihat masyarakat desa sebagai kelompok yang harus ditolong dan menjadi sasaran kemajuan/pembangunan. Dengan menampilkan diri sebagai seorang moralis, ia meminta kepada siapa pun yang telah menjadi kaya agar mau membantu mereka yang masih miskin di desa. Tidak hanya itu, desa juga dianggap menjadi masalah manakala potensi yang ada tidak bisa digarap dengan baik oleh masyarakat desa sendiri. Dibutuhkan bantuan dari mereka yang sudah kaya dan terampil, agar masyarakat desa bisa lebih berdaya. Demikian yang kira-kira dipikirkan dalam benak Bibit Waluyo saat itu. Retorika Bibit Waluyo ini menegaskan kembali cara pandang negara yang penuh kebaikan di satu sisi dan menganggap resep pembangunan yang ditawarkannya tidak memiliki cacat-cacat bawaan dalam dirinya sendiri.

Meskipun Bibit Waluyo akhirnya kalah dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, tetapi pernyataannya bisa menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana negara memandang apa yang terjadi dengan masyarakatnya dan bagaimana negara memperlakukan warganya. Dalam bagian ini, saya akan mengulas bagaimana wacana kesejahteraan itu pada mulanya dihadirkan dan kemudian secara bertahap diberi makna guna mendorong suksesnya rencana pertambangan semen skala besar di Rembang. Singkatnya, saya akan menunjukkan bagaimana mitos "tambang untuk kesejahteraan" akhirnya bisa (di)muncul(kan). Pembahasan ini merupakan landasan utama sebelum mendalami

bagaimana wacana kesejahteraan dipakai sebagai justifikasi atas pilihan-pilihan kebijakan yang ditempuh negara.

"Miskin dan Tidak Produktif": Memaknai Kondisi Krisis

Cerita diawali ketika Jawa Tengah masih dipegang oleh Bibit Waluyo, mantan Pangdam IV/Diponegoro yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) periode 2008-2013. Bibit, panggilan akrab gubernur tersebut, dikenal luas dengan motto kepemimpinan *Bali Deso Mbangun Deso*, yang berarti "Kembali ke Desa Membangun Desa". Penggunaan motto ini diklaim paling sesuai karena dalam era kepemimpinannya, Jateng memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada 2007 mencapai 6,6 juta orang atau sekitar 20,43% dari seluruh penduduk Jawa Tengah, dan tingkat pengangguran mencapai 1,3 juta atau 7,77%.[27] Lalu mengapa harus kembali ke desa? Tidak lain karena saat itu, di Jawa Tengah nyaris seluruh konsentrasi kemiskinan berada di kawasan pedesaan. Kondisinya, dari 7.807 desa yang ada di Jawa Tengah, sebanyak 3.300 di antaranya merupakan kategori desa miskin. Beberapa desa dengan kemiskinan tertinggi ditemukan di Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Banjarnegara, Pati, Kebumen, dan Wonogiri.[28] Dengan paparan statistik yang sekilas sangat meyakinkan tersebut,

27 *Lihat* RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (hlm. 16).

28 *Lihat* Tempo, 11 Juli 2009, "Ribuan Desa di Jawa Tengah Masih Masuk Kategori Miskin".

tampak masuk akal jika misi yang diemban Bibit sebagai gubernur adalah memberantas kemiskinan, khususnya yang ada di pedesaan.

Dari beberapa daerah yang disebut sebagai kawasan miskin di atas, sebagian besar merupakan daerah yang secara geografis berada dalam deretan Kawasaan Pegunungan Kendeng. Itu berarti, wilayah-wilayah yang berada di sekitar kawasan Pegunungan Kendeng dinilai sebagai kantong-kantong kemiskinan di Jawa Tengah. Dengan merujuk data konsentrasi kemiskinan itulah, *plus* arah pembangunan "Kembali ke Desa Membangun Desa", maka Gubernur Bibit memulai kampanye besar soal pengentasan kemiskinan khususnya di desa-desa sekitar kawasan Pegunungan Kendeng. Kemiskinan, terutama yang ada di desa-desa di Jawa Tengah, dimaknai sebagai sebuah kondisi krisis yang dihadapi negara. Penegasan adanya krisis menjadi penting sebab lewat medium ini negara dapat melakukan penafsiran-penafsiran terhadap apa yang menyebabkan krisis, kemudian mengintrepretasikan berbagai tindakan yang dianggap solusi terbaik.

Tidak hanya di tingkat Jawa Tengah, pemaknaan tentang kemiskinan sebagai krisis juga dipercayai oleh para pejabat di tingkat Kabupaten Rembang. Pada 2005, topik tentang Kabupaten Rembang sebagai daerah miskin banyak menjadi bahan perbincangan selama dan setelah Pemilukada. Salah satunya yang pernah dilontarkan oleh Bupati Rembang terpilih saat itu, M. Salim, yang mengutarakan:

> Mumpung bupatinya putra daerah, mari kita bangun Kota Rembang ini dengan lebih baik, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat.... Sebagai putra daerah, saya merasa malu sebab Rembang diperingkatkan sebagai kota termiskin nomor dua atau tiga se-Jawa Tengah. Namun, hal itu justru menjadi tantangan saya dan warga Rembang yang masih ada di sini maupun di luar kota, untuk bersama-sama mengubah peringkat tersebut.[29]

Pernyataan demikian keluar karena saat itu jumlah penduduk miskin di Rembang mencapai 246.443 jiwa. Bila dibandingkan dengan total penduduk, lebih dari 40% dari total penduduk yang berjumlah 585.446 jiwa berada di bawah garis kemiskinan.[30] Tentu saja data statisitik tentang kemiskinan ini terbilang sangat besar.[31] Penalaran bahwa angka statistik merupakan realitas yang sesungguhnya membuat pernyataan HM. Salim hadir sebagai sebuah keniscayaan untuk menerbitkan berbagai kebijakan pemberantasan kemiskinan di Rembang.

---

29 Pernyataan ini dilontarkan Bupati Rembang, M. Salim pada sebuah acara reuni alumni IPB dan anggota Himpunan Keluarga Rembang di Bogor (HKRB) di pendapa rumah dinas bupati pada 5 November 2005. *Lihat* Suara Merdeka, 7 November 2005, "Ajak Putra Rembang Ubah Status Miskin" .

30 Jumlah ini berdasarkan data Pendataan Sosial Ekonomi yang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai (PSE-BLT). *Lihat* RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008.

31 Merujuk pada definisi makna sebagai sesuatu yang cair (*contingent*), maka yang harus ditekankan bahwa makna "kemiskinan" di sini hanya berlaku dalam intersubjektivitas Badan Pusat Statistik (BPS). Sangat mungkin, makna kemiskinan ini tidak berlaku bagi posisi subjek yang lain.

Sama persis dengan pernyataan Bibit Waluyo yang dikutip di awal bab ini, kondisi miskin di Rembang juga dimaknai sebagai akibat dari tidak maksimalnya pemanfaatan potensi daerah yang ada di Rembang. Masih pada 2005, Ketua DPRD Kabupaten Rembang saat itu, Djoemali, memberi penekanan makna bahwa ketidakmampuan Rembang keluar dari jurang kemiskinan karena tidak mampu memanfaatkan 'harta karun' yang ada di daerahnya, sebagaimana pernyataannya:

> Diakui atau tidak Rembang punya kekayaan. Tetapi kekayaan yang dimiliki bentuknya masih berupa "harta karun". Maksud saya daerah Rembang punya banyak potensi yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal… Rembang kaya akan galian C. Namun belum seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah.[32]

Krisis di sini hadir tidak hanya dalam bentuk kemiskinan, melainkan juga karena tidak termanfaatkannya potensi-potensi yang ada di Kabupaten Rembang. Akibat tidak termanfaatkannya potensi daerah secara baik, maka Kabupaten Rembang masih dianggap bergulat dalam kemiskinan. Kondisi demikianlah yang membuka peluang bagi para aktor politik dalam negara untuk mendefinisikan sebuah makna yang nantinya akan dianggap sebagai solusi.

---

32 *Lihat* Suara Merdeka, 19 April 2005, "Ketua DPRD H Djoemali SSos: Rembang Punya Harta Karun".

"Tambang untuk Kesejahteraan": Menegaskan Solusi

Untuk mengatasi kondisi krisis berupa kemiskinan di berbagai pedesaan di Jawa tengah, menurut Bibit Waluyo ada dua bidang yang harus diperbaiki, yakni memperkuat infrastruktur dan energi.[33] Untuk mengerjakan itu, di bidang infrastruktur gubernur berencana menggarap jalan tol Semarang-Solo, melakukan perbaikan bandara dan perbaikan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sedangkan di bidang energi, gubernur akan menggalakkan pembangunan proyek PLTU seperti di Batang. Dalam bayangan Bibit Waluyo, keberadaan infrastruktur yang baik dan energi yang tercukupi akan mengundang berbagai investasi ekonomi yang nantinya bisa membangkitkan perekonomian warga dan membuka banyak lapangan pekerjaan terutama di desa-desa yang masih miskin.

Bibit Waluyo berpikir bahwa penggarapan bidang infrastruktur dan energi akan berimbas pada banyaknya industri skala besar yang datang membantu pembangunan ekonomi di desa-desa. Salah satu industri potensial itu adalah bidang pertambangan semen, mengingat Jawa Tengah memiliki bentang pegunungan kapur yang melimpah. Keberadaan pabrik-pabrik semen ini diperkirakan akan mampu meningkatkan ekonomi warga dan menyerap banyak tenaga kerja di desa-desa sekitar operasi pabrik. Karena melihat peluang ini, maka di masa kepemimpinannya, Bibit membuat perencanaan jangka menengah

33 *Lihat* Tempo, 31 Maret 2013, "Bibit Akui Gagal Turunkan Angka Kemiskinan".

untuk merangkul industri semen skala besar agar berinvestasi di Jawa Tengah. Secara eksplisit, penegasan makna ini tertulis dalam RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2008-2013:

> Pada 2007 telah tercatat 76 Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian golongan C... Kondisi tersebut diharapkan dalam 5 tahun mendatang akan meningkat dan dapat mendorong tumbuhnya industri besar seperti industri semen, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.

Apa yang tertuang dalam dokumen RPJMD di atas menunjukkan bahwa sejak awal, Bibit memang merupakan gubernur yang menyokong rencana untuk investasi-investasi pertambangan semen.

Pentingnya pembangunan industri semen tidak sekadar disebutkan dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-2013 saja, tetapi juga secara jelas terlihat pada dukungan yang diberikan oleh Gubernur Bibit kepada PT Semen Gresik (sekarang PT Semen Indonesia) yang pada 2007 berencana membangun pabrik semen di Kecamatan Sulolilo, Pati. Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan karena gugatan warga di Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat kasasi mendapat kemenangan. Kemenangan gugatan warga Pati tersebut membuat PT Semen Gresik terpaksa membatalkan rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo pada medio 2010. Hal inilah yang menyebabkan mengapa Gubernur Bibit meluapkan kemarahan kepada warga Pati dan LSM yang menolak rencana pendirian

pabrik saat itu.[34] Namun, meski rencana pendirian pabrik semen di Pati gagal, kurang lebih setahun kemudian, Bibit kembali mengeluarkan izin lingkungan untuk pendirian pabrik kepada perusahaan yang sama di Kabupaten Rembang.[35] Selain di Rembang, Gubernur juga menyatakan telah mempersiapkan rencana pembangunan pabrik semen di kabupaten lain, seperti Banyumas dan Wonogiri.[36] Meskipun akhirnya Bibit tidak mampu mempertahankan jabatannya sebagai gubernur pada periode berikutya, saat ini rencana-rencana tersebut tetap berjalan satu per satu.

Pemaknaan yang diletakkan Bibit sebelumnya ternyata terus berlanjut hingga era gubernur baru, Ganjar Pranowo (2013-sekarang). Awalnya Ganjar, panggilan akrab gubernur, adalah sosok yang dianggap warga terutama kalangan petani akan mampu menghentikan laju rencana pendirian pabrik-pabrik semen di Jawa Tengah.[37] Namun,

---

34 *Lihat* Suara Merdeka, 27 Juli 2009a, "Bibit Enggan Cari Lokasi Baru".

35 Hal ini ditegaskan dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

36 *Lihat* Suara Merdeka, 18 Januari 2013, "Pembangunan Pabrik Semen Diminta Tak Dihalang-halangi".

37 Ganjar Pranowo dalam Pemilukada Jawa Tengah 2013 merupakan calon gubernur yang mendapat dukungan luas oleh kelompok penolak tambang di Jawa Tengah. Saat itu, dirinya menjadi kompetitor paling kuat dari calon *incumbent*, Bibit Waluyo, yang dianggap paling bermasalah dengan keluarnya izin-izin pertambangan di seluruh kawasan Pegunungan Kendeng. Dari hasil pergaulan saya dengan aktivis penolak tambang, beberapa di antara mereka dulunya adalah tim sukses Ganjar di tingkat akar rumput, terutama mereka yang dari Rembang, Pati, dan Blora. Motto Ganjar dalam kampanye yang berbunyi "Jateng Ijo Royo-Royo"

kenyataan berkata sebaliknya. Setelah terpilih dalam Pemilukada 2013 menggantikan posisi Bibit sebagai gubernur, ternyata Ganjar tetap meneruskan narasi yang sama, yakni kehadiran investasi tambang semen dianggap jalan memberantas kemiskinan di Jawa Tengah. Sikap dan keputusannya ini ditunjukkan dengan penolakannya untuk mencabut izin lingkungan yang diberikan kepada PT Semen Indonesia di Rembang yang pernah dikeluarkan Gubernur Bibit. Menurut Gubernur Ganjar, "Sebagian masyarakat di Rembang belum memahami Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)... saya (Ganjar –pen.) berkeyakinan tak ada masalah dalam proyek pembangunan pabrik semen itu."[38]

Tidak saja mendukung kelanjutan proses pendirian pabrik semen di Rembang, pada perkembangannya, di era Gubernur Ganjar dimulailah babak baru gelombang investasi pertambangan semen yang kian tidak terbendung. Laju investasi tambang semakin banyak lantaran narasi yang dibentuk dari Bibit hingga Ganjar mendapat gayung bersambut dari para elite-elite lokal yang juga duduk

---

jelas berkonotasi dengan penyelamatan lingkungan. Kondisi para petani di Jawa Tengah yang memusuhi Bibit Waluyo saat itu dibaca dengan baik oleh Ganjar sehingga dirinya pun mengidentifikasi diri sebagai pihak yang akan menyelamatkan alam dan mempertahankan pertanian dengan janji "Jateng Lumbung Pangan". Namun, setelah menjabat, Ganjar ternyata berlaku sama seperti Bibit, tetap melanjutkan izin-izin pertambangan, bahkan melakukan pembiaran aksi-aksi kekerasan yang ada di area konflik pertambangan, salah satunya di Rembang.

38 *Lihat* Kompas, 21 Juni 2014, "Didesak Cabut Izin Amdal Pabrik Semen, Ini Jawaban Ganjar Pranowo".

dalam birokrasi pemerintahan daerah, yakni para bupati dan pejabat-pejabat lokal. Narasi Bibit yang diteruskan oleh Ganjar dan mendapat sambutan dari para elite lokal berakibat pada merebaknya pengajuan dan pemberian izin pertambangan nyaris di seluruh kabupaten yang berada dalam deretan Kawasan Pegunungan Kendeng. Selain PT Semen Indonesia di Rembang, ada juga PT Sahabat Mulia Sakti (anak perusahaan PT Indocement) yang telah mendapat izin pertambangan di Pati. Adapun yang akan menyusul dan telah masuk daftar antrian adalah PT Vanda Prima Listri dan PT Cemindo Gemilang yang berencana akan membangun pabrik di Grobogan, serta PT Imasco Tambang Raya di Blora, serta masih banyak lagi.

Dalam konteks Rembang sendiri, pada periode kedua kepemimpinan Bupati Salim (2010-2015) terjadi perubahan drastis dalam haluan perencanaan pembangunan. Hal ini ditandai dengan upaya menempatkan sektor pertambangan dan penarikan investor sebagai salah satu misi penting. Disebut periode kedua karena saat periode pertama kepemimpinan Bupati Salim, hampir tidak pernah muncul upaya menjadikan pertambangan sebagai prioritas utama. Pada periode pertama kepemimpinannya (2005-2010) Bupati Salim lebih mengedepankan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), pengembangan industri produktif (pertanian dan bahari), serta pengembangan BUMD sebagai upaya peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pada periode 2005-2010, Bupati Salim lebih menampilkan dirinya sebagai kepala daerah yang sukses merancang pendidikan dan

kesehatan gratis di Rembang daripada pejabat eksekutif yang membuka pintu lebar pada investasi pertambangan.[39]

Namun, semenjak Bibit Waluyo menjadi Gubernur (sejak 2008) dan memiliki agresivitas serius menyokong pembangunan infrastruktur, energi, dan pendirian berbagai pabrik semen di Jawa Tengah, Bupati Salim pun ikut 'banting setir' mengubah haluan pembangunan di Rembang. Dari enam isu strategis yang dicanangkan Bupati Salim pada masa jabatan kedua (2010-2015), muncul dua prioritas baru yang pada masa sebelumnya (2005-2010) tidak pernah ada. P*ertama*, prioritas untuk meningkatkan investasi dan jalinan kemitraan berbagai pihak. *Kedua*, memprioritaskan segala upaya untuk persiapan menyambut globalisasi dan perdagangan bebas. Penempatan kedua isu ini sesuai dengan pandangan bahwa peningkatan ekonomi dan jalan pengentasan kemiskinan harus diatasi dengan menarik investasi sebesar-besarnya (baik dalam negeri maupun asing) guna membuka lapangan pekerjaan yang luas dan berkompetisi dalam persaingan global.[40]

Dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, berulang kali disebutkan bahwa Rembang memiliki potensi kekayaan luar biasa besar tetapi tidak banyak yang termanfaatkan. Salah satu yang sering kali disinggung adalah sektor pertambangan. Penegasan tentang arti penting sektor pertambangan untuk memaksimalkan

39 *Lihat* Dahlan (2011) dan *Suara Merdeka*, 27 Juli 2009b, "Hari Jadi Ke-268 Rembang Bebaskan Predikat sebagai Daerah Tertinggal".

40 *Lihat* RPJMD Kabupaten Rembang 2010-2015, hlm. II-72.

potensi kekayaan daerah yang belum terkelola secara jelas tersurat dalam RPJMD Kabupaten Rembang lewat pernyataan bahwa "sebagian wilayah Kabupaten Rembang adalah pegunungan kapur maka mengandung bahan batuan galian tambang, untuk menjadi bahan baku pembuatan semen".[41]

Tidak sekadar disebutkan secara tersurat dalam dokumen RPJMD saja, para pejabat di Rembang pun ikut menguatkan makna adanya potensi yang belum termaksimalkan di wilayahnya. Pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Zaenuddin Ja'far, berikut ini menguatkan sinyalemen di atas:

> ...selama ini hasil tambang dari Rembang justru disetorkan kepada pabrik-pabrik yang berada di luar daerah. Jika ada yang membuka pabrik yang menggunakan bahan tambang sebagai bahan bakunya, tentu akan sangat menghemat biaya transpor... Justru di sinilah potensi yang masih sangat terbuka lebar untuk digarap. Siapa pun yang ingin menambang di Rembang masih terbuka kesempatan luas.[42]

Pernyataan Zaenuddin Ja'far ini sebenarnya merupakan respons dirinya sebagai pejabat daerah agar di Rembang terdapat pabrik yang mengolah berbagai galian tambang secara langsung. Sebagaimana diketahui, usaha pertambangan bukan hal yang baru di Rembang, tetapi kebanyakan

41 *Ibid*.

42 *Lihat* Suara Medeka, 16 Desember 2005, "Tambang di Rembang: Banyak Potensi, Sedikit Dimanfaatkan".

aktivitas pertambangan di sana adalah pertambangan skala kecil dan tidak mengolah langsung bahan baku tambang menjadi barang jadi. Adapun daftar usaha tambang tersebut di antarannya:

Tabel 3

Daftar Usaha Tambang di Kabupaten Rembang sampai Tahun 2013

No.	Nama	Lokasi	Alamat Perusahaan	Komoditas
1.	CV. Alam Megah Putih	Desa Tahunan, Kec. Sale	Desa Tahunan, Kec. Sale	Batu kapur
2.	CV. Andesit Tras Makmur	Desa Terjan, Kec. Kranggan	Rungkut, Surabaya	Batu tras
3.	CV. Batu Permata	Desa Pamotan, Kec. Pamotan	Desa Ngotet, Kec. Rembang	Pasir
4.	CV. Driji Kencana	Desa Sidumulyo, Kec. Sedan	Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang	Marmer
5.	CV. Mitra Sukses	Desa Tegaldowo, Kec. Gunem	Margomulyo, Surabaya	Batu
6.	CV. Sinsantuk	Desa Sudan, Kec. Kranggan	Desa Gedongmulyo, Kec. Lasem	Batuan Tras
7.	CV. Sumilir Jaya Kembar	Desa Terjan, Kec. Kranggan	Desa Binangun, Kec. Lasem	Batuan Tras

No.	Nama	Lokasi	Alamat Perusahaan	Komoditas
8.	CV. Wahyu Manunggal	Desa Tegaldowo, Kec. Gunem	Desa Tegaldowo, Kec. Gunem	Batu Kapur
9.	CV. Zen 99	Desa Terjan, Kec. Kranggan	Desa Bulu Jawa, Kec. Bancar, Tuban	Batuan Tras
10.	Koperasi Aneka Tambang	Desa Sendangmulyo, Kec. Sluke	Desa Bogorejo, Kec. Sedan	Batuan Tras
11.	Koperasi Wreda Sejahtera	Desa Terjan, Kec. Kranggan	Jl. Kartini - Gresik	Batuan tras
12.	PT Kawi Aria Putra	Desa Terjan, Kec. Kranggah	Jl. Dukuh Kupang XIV surabaya	Batuan Tras
13.	PT Sinar Asia Fortuna	Desa Tahunan, Kec. Sale	Desa Tahunan, Kec. Sale	Batu Gamping
14.	PT Sinar Asia Fortuna	Desa Tegaldowo, Kec. Gunem	Desa Tahunan, Kec. Sale	Batu Gamping
15.	Sdr. Basirun	Desa Kedung, Kec. Pancur	Desa Sumberagung, Kec. Pancur	Batu Andesit
16.	Sdr. Djuwaro	Desa Ngulahan, Kec. Sedan	Desa Pamotan, Kec. Pamotan	Batuan Andesit
17.	Sdr. Fatimatuz Zahro	Desa Terjan, Kec. Kranggan	Desa Binangun, Kec. Lasem	Batuan Tras

No.	Nama	Lokasi	Alamat Perusahaan	Komoditas
18.	Sdr. H. Achyar	Desa Gesikan, Kec. Sedan	Desa Bangunrejo, Kec. Sedan	Pasir Kuwarsa
19.	Sdr. Sarip	Desa Sidomulyo, Kec. Sedan	Desa Sidomulyo, Kec. Sedan	Pasir Kuwarsa
20.	Sdr. Sekar Sari	Desa Terjan, Kec. Kranggan	Desa Binangun, Kec. Lasem	Batuan Tras
21.	Sdr. Siti Naula	Desa Terjan, Kec. Kranggan	Jl Leran, Kec. Sluke	Batuan Tras
22.	Sdr. Supriyanto	Desa Ngolahan, Kec. Sedan	Desa Jolotundo, Kec. Lasem	Batuan Andesit
23.	UD Jago	Desa Sendang Mulyo, Kec. Sluke	Jangkli Krajan-Candisari Semarang	Batuan Sirtu

Sumber: diolah Walhi 2015, dalam "Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang", hlm. 10.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tidak adanya pabrik skala besar menjadikan potensi pertambangan di Rembang dimaknai belum berjalan maksimal. Karena hal inilah, para pejabat lokal bersepakat untuk merencanakan pendirian pabrik-pabrik tambang skala besar di Rembang.

Guna memenuhi hasrat adanya pabrik tambang skala besar, para pejabat lokal mengupayakan berbagai usaha serius untuk menarik investasi sebesar-besarnya

ke berbagai korporasi. Usaha menarik investasi ini secara sadar dilakukan para pejabat lokal sebagai bagian dari perencanaan pembangunan yang telah mereka gariskan. Hal ini persis sebagaimana tertulis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2010-2015:

> Perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas di antaranya pelaksanaan *Asia Free Trade Area* pada 2010, dan *North American Free Trade Area* (NAFTA) dan liberalisasi moneter dan pasar modal... (maka) Pemerintah Kabupaten Rembang harus berusaha meningkatkan pelayanan publik, kebijakan pro-investasi sebagai langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN.[43]

Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2010-2015 tersebut secara jelas menunjukkan bahwa nalar yang diikuti para pejabat Rembang adalah mengupayakan berbagai kebijakan yang mempermudah laju investasi skala besar.

Guna menarik investor dalam jumlah besar itu, Pemda Rembang merasa masih terhambat oleh beberapa persoalan.[44] *Pertama*, belum memadainya infrastruktur pendukung proses produksi seperti pelabuhan niaga di Rembang. *Kedua*, tidak adanya lembaga promosi pada upaya peningkatan investasi agar berjalan optimal. *Ketiga*, regulasi di bidang penanaman modal belum memadai dalam pemberikan pelayanan dan insentif bagi minat investasi.

---

43 *Lihat* RPJMD Kabupaten Rembang 2010-2015, hlm. II-11.

44 *Ibid*, hlm. IV-3.

Untuk mengatasi persoalan itu, para pejabat Pemerintah Kabupaten Rembang secara otomatis menyiapkan berbagai langkah untuk menutup lubang penghambat investasi tersebut.

Guna mengatasi faktor pertama yakni tiadanya pelabuhan niaga, di tahun 2010 Bupati Salim telah mengalokasikan dana 200 milliar untuk memulai rencana pembangunan pelabuhan berskala nasional di Kecamatan Sluke. Secara keseluruhan rencana ini akan menelan biaya sebesar 3 trilliun.[45] Sedangkan untuk mengatasi persoalan promosi, sejak 2010 Pemerintah Daerah (Pemda) Rembang secara gencar melakukan promosi untuk menarik investasi kakap ke daerahnya.[46] Upaya menarik investor besar di sektor tambang ini pun masih terus bergulir setiap tahunnya, mungkin hingga sekarang.

Sedangkan untuk perubahan regulasi penanaman modal, tidak banyak jejak yang bisa saya temukan. Meski ada tulisan Thomafy (2012) yang menuliskan bahwa perizinan di Rembang merupakan *best practices* menurut

---

45 *Lihat* Tempo, 29 Desember 2010, "Februari Pelabuhan Nasional di Rembang Beroperasi".

46 Pemda Kabupaten Rembang melakukan berbagai upaya agar investor-investor yang bergerak dalam pertambangan semen bisa membuka usaha di Rembang. Hal ini ditunjukkan dari klaim sebelumnya bahwa dalam acara *Central Java Infrastructure Business Forum* di Jakarta disebutkan ada tiga investor industri semen yang tertarik membuka pabrik semen di Rembang, yakni PT Bin Mahmoud Mining and Industries asal Uni Emirat Arab, PT Jui Shin Indonesia, serta PT Makmur Jaya Grup. *Lihat* Suara Merdeka, 1 November 2010, "Tiga Investor Baru Minati Tambang Rembang".

lembaga *University Network for Governance Innovation UGM*, tetapi tidak jelas apa perubahan signifikannya.[47] Yang pasti rezim yang berkuasa di Rembang saat itu (dan mungkin saat ini) sangat terbuka dan bersahabat pada investor besar. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat PT Semen Indonesia sedang menghadapi penolakan besar-besaran di Pati (2009), Pemda Rembang secara terang-terangan menyatakan kesediaannya apabila rencananya investasi dialihkan ke Rembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang saat itu, Hamzah Fathoni, secara terbuka menyatakan siap membantu jika PT Semen Indonesia berminat untuk melakukan penambangan di salah satu kawasan di Rembang.[48]

Ketika izin pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang akhirnya keluar, maka secara serempak negara mengontruksikan makna bahwa kehadiran pabrik semen di Rembang adalah misi untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan warga Rembang sendiri. Mulai dari gubernur hingga pejabat daerah mengorkestrasikan irama yang sama dalam menciptakan konstruksi pemaknaan semacam itu. Gubernur Bibit menyatakan bahwa investasi triliunan rupiah ini bakal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.[49] Sedangkan Bupati Salim

47 *Lihat* Thomafy (2012), "Potret Usaha Perizinan Kabupaten Rembang".

48 *Lihat* Suara Merdeka, 13 Juni 2009, "Rembang Siap Bantu PT Semen Gresik".

49 *Lihat* antarajateng.com, 8 Februari 2013, "Pabrik Semen Senilai Rp 37 Triliun Masuk Rembang".

menyatakan bahwa pendirian pabrik akan menyerap ribuan tenaga kerja, yang sebagian besarnya akan diambil dari daerah Rembang.[50] Jadi, "tambang untuk kesejahteraan" merupakan makna yang disematkan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi krisis. Di titik inilah "tambang untuk kesejahteraan" diposisikan sebagai mitos. Adapun mitos ini yang akan menjadi makna awal dalam proses kewacanaan demi mencapai posisi hegemoni.

Uraian di atas menunjukkan bahwa negara sedang menciptakan suatu mitos sosial (*social myths*) berupa "tambang untuk kesejahteraan". Mitos ini lahir dari sebuah konstruksi bahwa kemiskinan (sebagai krisis) harus diatasi dengan menghadirkan pertambangan skala besar (sebagai solusi). Negara sedang mengonstruksi makna bahwa hadirnya pabrik-pabrik semen di berbagai pelosok desa di Jawa Tengah kelak akan membuka banyak lapangan kerja baru. Dibayangkan pula bahwa *multiplier effect* dari aktivitas pertambangan akan mendongkrak produktivitas warga di desa-desa sekitar kawasan pertambangan. Dengan begitu, kehadiran pertambangan skala besar merupakan jawaban sempurna dari negara terhadap kondisi krisis yang dihadapi masyarakat di Jawa Tengah, tidak terkecuali bagi Kabupaten Rembang.

---

50 *Lihat* Suara Merdeka, 18 Januari 2013, "Pembangunan Pabrik Semen Diminta Tak Dihalang-halangi".

PT Semen Indonesia: "Berkah yang ditunggu-tunggu"

Setelah hiruk pikuk untuk membangun makna "tambang untuk kesejahteraan", kedatangan PT Semen Indonesia di Rembang seakan dianggap "berkah" yang ditunggu-tunggu oleh para pejabat lokal. Kerja keras mereka untuk membujuk para investor dalam berbagai forum bisnis serasa terbayar sudah. Terlebih, investor yang mereka dapatkan bukan korporasi biasa, yakni PT Semen Indonesia yang dikenal sebagai korporasi terbesar dalam bidang pertambangan semen di Indonesia. PT Semen Indonesia sendiri merupakan salah satu pemain besar dalam industri semen, yang menguasai kapitalisasi pasar domestik sebesar 40%, baru disusul Indocement Tunggal Prakarsa yang mengusai 32%, Holcim Indonesia sebesar 16%, dan Bosowa Corporation sebesar 5% (Koalisi Responsi Bank Indonesia 2015: 14). Dengan profil PT Semen Indonesia seperti itu, maka para pejabat lokal meyakini bahwa pembangunan di Rembang dan Jawa Tengah pada umumnya akan semakin terpacu berkat kehadiran PT Semen Indonesia di sana.

PT Semen Indonesia sendiri sesungguhnya adalah induk dari empat perusahaan semen besar, yaitu PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa dan Thang Long Cemen Vietnam. Saham PT Semen Indonesia pun merupakan saham unggulan di bursa saham sehingga korporasi ini dianggap sebagai bisnis yang prospektif dan selalu diminati investor. Terlebih, ada setidaknya delapan bank di Indonesia yang selalu aktif mengalirkan pinjaman

ke perusahaan ini (hingga 2014).[51] Dalam kategori pinjaman jangka pendek, Bank Mandiri merupakan bank paling banyak menyalurkan pinjaman, yakni senilai lebih dari 100 milyar US$ dan 10 triliun rupiah, diikuti oleh Bank BNI dengan jumlah pinjaman 40 milyar US$ dan 4,6 milyar rupiah, dan Indonesia Eximbank dengan pinjaman sebesar 260 milyar rupiah (Koalisi Responsi Bank Indonesia 2015: 17).

Sebagai korporasi terbesar dalam industri semen, kehadiran PT Semen Indonesia dinilai para pejabat lokal sebagai awal yang menandai bangkitnya pembangunan dan kesejahteraan warga di Rembang. Setidaknya itu yang terlihat dari pernyataan Bibit dan Salim berikut ini.[52]

> Lebih dari tiga triliun rupiah dikucurkan PT Semen Indonesia untuk membangun pabrik di sini. Pasti nantinya akan membawa kesejahteraan warga. (Bibit Waluyo)

> Berdirinya pabrik semen di daerah ini selain membangun titik baru pertumbuhan ekonomi juga menegaskan kesiapannya sebagai daerah tujuan investasi berskala besar. (M. Salim)

---

51 Kedelapan bank ini ialah BNI, BRI, Bank Mandiri, Indonesia Eximbank, Bank BCA, Bank CIMB-Niaga, BPD Jawa Timur, Bank Sulawesi Selatan. Sedangkan yang berasal dari asing, terdapat tiga bank dari Vietnam yaitu An Binh Commercial Joint Stock Bank, Bui Thi The, dan Standard Chartered, serta satu bank dari Jepang yakni Sumitomo Mitsui. (Koalisi Responsi Bank Indonesia 2015: 17)

52 *Lihat* AntaraJateng, 18 Februari 2013, "Pabrik Semen Senilai Rp3,7 Triliun Masuk Rembang"

Kedua pejabat ini, Bibit Waluyo dan M. Salim, merupakan dua aktor paling penting yang berhasil menyeret investasi PT Semen Indonesia masuk ke Rembang. Bibit adalah Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan izin lingkungan dalam rencana ekploitasi tambang semen di Rembang. Sedangkan M. Salim merupakan Bupati Rembang yang saat itu paling getol menarik investasi pertambangan skala besar ke Kabupaten Rembang.

Karena adanya dukungan para pejabat lokal, PT Semen Indonesia pun mengumbar banyak janji kesejahteraan bagi warga Rembang. Terlebih, nilai investasi yang akan ditanamkan ini jumlahnya triliunan rupiah. Janji kesejahteraan itu di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris PT Semen Indonesia.[53]

> Kebutuhan tenaga kerja hingga 4.000 orang. Kami mendayagunakan masyarakat sekitar untuk *supply* makanan tenaga kerja dan tenaga *outsource* untuk pembangunan pabrik semen di Rembang. Para *supplier* dan para kontraktor adalah 70% dari masyarakat sekitar yang membantu pembangunan pabrik di Rembang. Kami rutin membantu masyarakat sekitar, fasilitas umum dan ke depannya kami akan memberikan beasiswa untuk masyarakat sekitar yang berprestasi.

53 *Lihat* http://www.semenindonesia.com/assets/files/files/investor/Public%20Expose/2014/Laporan%20 Public%20Expose_25.08.2014%20Final.pdf

Kepercayaan diri dalam memenuhi janji kesejahteraan ini adalah citra yang dibangun PT Semen Indonesia saat masa awal kedatangannya di Rembang.

Dengan keyakinan yang dimiliki PT Semen Indonesia, maka berbagai pernyataan optimistis yang mendukung rencana pertambangan PT Semen Indonesia pun disemai ke berbagai media massa. Seorang jurnalis *Antara Jateng*, Achmad Zaenal, bahkan menuliskan banyak sekali liputan tentang "kabar gembira" atas keberhasilan PT Semen Indonesia masuk ke Rembang.[54] Ia menuliskan, "Rencana pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo nyaris tanpa penolakan dari warga. Bahkan warga menyambut gembira investasi PT Semen Indonesia ke daerahnya".[55] Pada masa itu, *framing* seperti yang diusung Achmad Zaenal merupakan nada umum yang diusung oleh para pejabat negara, media massa, dan korporasi pertambangan.

Sebagai "berkah" sekaligus "kabar gembira", para pejabat lokal menilai tidak ada alasan untuk menunda-nunda terlaksananya rencana investasi tersebut. Karena itu, mereka menekankan bahwa kehadiran PT Semen Indonesia ini tidak boleh lagi dibatalkan, seperti yang terjadi sebelumnya di Pati. Setelah PT Semen Indonesia

54 Semua liputan di AntaraJateng yang ditulis atau dieditori oleh Ahmad Zaenal antara 2013 hingga 2014, berkecenderungan nada positif dalam melihat rencana ekploitasi tambang oleh PT Semen Indonesia di Rembang.

55 *Lihat* AntaraJateng, 18 Februari 2013, "Pabrik Semen Senilai Rp3,7 Triliun Masuk Rembang".

mendapatkan beberapa izin yang dibutuhkan, pendirian pabrik segera dilaksanakan. Meskipun belum terlalu jelas bagaimana pembebasan lahan akan dilakukan,[56] para pejabat lokal ini secara bersamaan merestui proses pendirian pabrik tersebut. Saya katakan merestui, karena saat itu tidak ada satu pun pejabat lokal (baik eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat Kabupaten Rembang maupun Provinsi Jawa Tengah) yang menyatakan keberatannya atas pendirian pabrik semen di Rembang. Sebaliknya, warga ring-1 area pertambangan (Desa Tegaldowo dan Timbrangan) terlihat melakukan demontrasi penolakan pendirian pabrik secara terus menerus.

Catatan Penutup

Dari cerita di atas, kita bisa melihat bagaimana negara (baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Rembang) mengonstruksikan sebuah makna yang khas tentang kondisi krisis. Data statistik, predikat kota termiskin, dan kekayaan yang belum terkelola, merupakan makna-makna parsial yang dihimpun sedemikian rupa untuk mengatakan kemiskinan di Jawa

56 Tidak hanya saat masa awal pendirian pabrik, hingga naskah ini ditulis pun, masih belum jelas bagaimana mekanisme pembebasan lahan akan dilakukan. Padahal, beberapa diantara lahan-lahan yang berada dalam WIUP PT Semen Indonesia masih menjadi hak milik warga. Hal semacam ini merupakan fenomena yang kurang umum, yakni pendirian pabrik dilangsungkan sebelum ada kejelasan bagaimana pembebasan lahan dilakukan.

Tengah, khususnya Rembang. Makna tentang kondisi krisis ini hanya bisa dibangun melalui praktik artikulasi. Pernyataan, keputusan, dan berbagai sikap politik yang dilakukan para pejabat lokal yang terus menerus membangun sebuah makna tentang kemiskinan dan tidak terkelolanya sumber daya secara maksimal berada dalam koridor praktik artikulasi tersebut. Itu berarti, makna tentang kemiskinan sangatlah subjektif, bergantung pada parsialitas makna yang dibentuk negara dan korporasi.

Sejalan dengan makna krisis, pilihan atas solusi juga bersifat subjektif bergantung siapakah aktor yang mengartikulasikannya. Dalam hal ini, solusi yang ditempuh negara adalah memajukan sektor pertambangan skala besar. Pernyataan Gubernur Bibit, Gubernur Ganjar, Bupati Salim, dan elit lokal, bahkan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah secara jelas menegaskan pemaknaan atas solusi ini. Pada titik inilah, "tambang untuk kesejahteraan" dipahami sebagai mitos, yakni representasi makna baru yang hendak dijejalkan negara pada rakyat melalui para pejabatnya.

Dengan bersandar pada mitos "tambang untuk kesejahteraan", maka dibayangkan pilihan atas kebijakan yang diambil negara ke depan harus memuluskan rencana-rencana pertambangan skala besar. Jika nanti mitos ini mampu secara simbolis menjadi representasi yang riil dari tuntutan warga secara luas, maka mitos ini dapat bertransformasi menjadi imaji sosial (*social imaginary*). Mitos yang berhasil

melakukan transformasi sebagai imaji sosial menyebabkan jalinan makna yang terbentuk akan menguat menjadi hegemoni. Sebaliknya, jika mitos tersebut tidak mampu bertransformasi menjadi imaji sosial, maka hegemoni yang terbentuk akan selalu rapuh bahkan menguatkan antagonisme lain yang berusaha menyubversi posisi hegemoni yang telah dibangun sebelumnya.

Dengan kata lain, apakah kehadiran PT Semen Indonesia mampu memberi kesejahteraan secara riil kepada warga Rembang, adalah tantangan bagi makna yang telah dibentuk negara (melalui para pejabatnya). Jika PT Semen Indonesia tidak mampu memenuhi "janji kesejahteraan" itu, maka makna yang dibentuk hanya akan berakhir sebagai mitos, dan tidak pernah menjadi imaji sosial bagi warga Rembang, terutama kalangan petani.

BAGIAN 4

MENCIPTAKAN HEGEMONI PEMBANGUNAN BERBASIS TAMBANG

"...kita tidak akan merusak lingkungan, kita tidak akan merusak sosial, dan tidak merusak budaya."

(Dwi Soetjipto)[57]

Dalam sebuah reportase yang diturunkan *Kompas*, Dwi Soetjipto selaku Dirut PT Semen Indonesia menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa proses pembangunan pabrik semen di Rembang tidak akan merusak ekologi, sosial, dan budaya yang ada di Rembang. Pernyataan di atas dilontarkan semasa dirinya masih menjabat sebagai Direktur PT Semen Indonesia. Saat itu, Dwi Soetjipto meyakinkan semua orang bahwa

57 *Lihat* Kompas, 31 Agustus 2014, "Dirut Semen Indonesia: Kami akan Berjalan Sesuai Aspek Legal".

apa yang akan dilakukan oleh PT Semen Indonesia di Rembang tidak akan pernah memberi efek kerusakan terhadap apa pun. Tidak sekadar menjamin tiadanya tiga jenis kerusakan tersebut, dengan penuh percaya diri ia juga meyakinkan publik bahwa seluruh rencana pertambangan akan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya bagi mereka yang ada di sekitar kawasan pertambangan. Pernyataan ini tentu saja merupakan bagian dari rangkaian artikulasi mitos "tambang untuk kesejahteraan" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan menyerahkan pengelolaan sumber daya di Rembang kepada PT Semen Indonesia, maka dianggaplah hal tersebut sebagai cara untuk mengatasi berbagai kemiskinan yang dihadapi warga.

Bagian ini akan mengupas bagaimana wacana kesejahteraan dibentuk melalui berbagai praktik artikulasi yang menyokong konsensus tentang pentingnya pertambangan bagi usaha membangun kesejahteraan warga. Dengan kata lain, bagian ini membahas bagaimana hegemoni pembangunan berbasis pertambangan berusaha dibentuk. Setidaknya ada tiga praktik artikulasi yang menjadi pengamatan untuk melihat bagaimana makna kesejahteraan disematkan dalam narasi pembangunan berbasis pertambangan, yakni artikulasi dalam praktik pertambangan, praktik kebijakan, dan praktik mobilisasi kesepakatan.

Good Mining Practices: Jalan yang "Harus Ditempuh"

Jika bagian 2 buku ini menyinggung bagaimana konteks global pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) maupun *good governance* memberi keleluasaan terhadap aktivitas eksploitasi, maka di bagian ini hal serupa akan ditunjukkan dalam politik keseharian yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu yang mudah dicermati adalah dengan mengamati praktik artikulasi yang menopang makna G*ood Minning Practices* (*GMP*) atau praktik pertambangan yang baik. Untuk memulai pengamatan, perlu kiranya kita melacaknya dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Pada pasal 95 dan 96 UU Minerba disebutkan bahwa perusahaan yang akan membuka usaha pertambangan wajib memenuhi kaidah *good mining practices*. Jadi jelas, *GMP* adalah sebuah norma baku (*das sollen*) yang telah masuk dalam regulasi.[58] Setiap korporasi yang hendak melakukan penambangan minerba diwajibkan untuk mengikuti kaidah-kaidah *GMP* yang termaktub dalam UU Minerba tersebut.

Di sini saya tidak akan mengajukan pertanyaan apakah korporasi pertambangan telah melakukan kaidah-kaidah *GMP* tersebut. Alih-alih mengajukan pertanyaan tersebut, saya lebih tertarik untuk mengajukan pertanyaan apa yang dilakukan korporasi (dan negara) terhadap kaidah-kaidah

58 Makna parsial dari *GMP* sesungguhnya sangat spesifik, yakni praktik pertambangan yang mengikuti kaidah berikut ini: keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan; pemantauan lingkungan seperti reklamasi dan pasca tambang; konservasi sumber daya; dan pengelolaan sisa tambang.

itu sendiri. Saya menemukan satu kenyataan menarik dari konsekuensi hadirnya *GMP*, yakni lahirnya banyak acara penghargaan bagi siapa pun yang mampu memenuhi kaidah *GMP* tersebut. Bukan saja negara, banyak lembaga non-negara juga menyelenggaran acara-acara penghargaan ini. Adapun sasaran penghargaan ini adalah para korporasi, tentu salah satunya yang bergerak di bidang pertambangan. Tujuan normatifnya mudah dipahami, yakni penghargaan ini akan mendorong korporasi-korporasi untuk memiliki tata-kelola yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Namun, dampak politis dari penghargaan ini adalah, ketika sebuah korporasi mendapat penghargaan maka korporasi tersebut akan mendapat legitimasi sebagai perusahaan dengan aktivitas yang ramah lingkungan. Apalagi acara ini sifatnya tahunan, maka bisa dibayangkan setiap tahun "harus" ada korporasi atau institusi yang diberi penghargaan tersebut. Secara politis, bagi korporasi yang telah mendapatkan penghargaan, maka penghargaan itu akan dikomodifikasi sebagai alat kampanye yang menegaskan usaha pertambangan yang mereka kerjakan sebagai "aktivitas ramah lingkungan".

Alur politis dari acara penghargaan inilah yang juga dimainkan oleh PT Semen Indonesia. Korporasi ini tercatat telah memperoleh banyak sekali penghargaan lingkungan atas *GMP* yang mereka lakukan. Mulai dari "Proper Emas"

2012 dan 2013,[59] "Green Industry" 2012 & 2013,[60] dan penghargaan atas "Indonesian Green Award" 2013.[61] Untuk memuluskan setiap rencana ekspansi dan menghindar dari tuduhan kegiatan tidak ramah lingkungan, maka berbagai prestasi ini dipakai untuk kampanye besar-besaran bahwa PT Semen Indonesia adalah industri ramah lingkungan. Beberapa kali saya menemukan kenyataan ini dalam berbagai kegiatan atau acara-acara publik, salah satunya adalah saat acara Muktamar NU 2015 di Jombang. Di sana, PT Semen Indonesia membuka *outlet* yang isinya seputar aktivitas ramah lingkungan dan segudang foto penghargaan yang pernah didapat. Tidak hanya itu, secara lebih ambisius, PT Semen Indonesia bahkan menginisiasi sebuah paket wisata gratis khusus bagi para pegiat media sosial dengan label *Wisata Green Industry (WGI)*. Efeknya, sejak ada kegiatan WGI, muncul banyak tulisan di media online yang ditulis oleh para peserta WGI tentang ramahnya

59 Proper adalah singkatan dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan. Program ini dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

60 Industri hijau (*green industry*) adalah salah satu penghargaan yang dikeluarkan Kementerian Perindutrian yang bertujuan mendorong korporasi untuk menerapkan konsep produksi yang lebih bersih (*cleaner production*) melalui aplikasi 4R, yaitu *reduce* (pengurangan limbah pada sumbernya), *reuse* (penggunaan kembali limbah), dan *recycle* (daur ulang limbah), dan *recovery* (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah).

61 *Indonesia Green Award* (IGA) merupakan penghargaan yang dikeluarkan oleh lembaga non-negara bernama La-Tofi Enterprise bagi korporasi, institusi (swasta/negara) yang memiliki andil terhadap misi keberlanjutan lingkungan.

aktivitas tambang PT Semen Indonesia dalam menjalankan bisnis pertambangan.[62]

Bermodal legitimasi telah melaksanakan *GMP*, PT Semen Indonesia menekankan bahwa apa yang dikerjakan sebagai rencana pertambangan semen di Rembang "pasti berjalan dengan baik" secara keseluruhan. Persis sebagaimana pernyataan Dwi Soetjipto yang dikutip di awal tulisan, "tidak adanya kerusakan" merupakan makna yang ditetapkan untuk meneguhkan proses sedimentasi wacana kesejahteraan yang dibangun atas dasar mitos "tambang untuk kesejahteraan". Ini berarti, pertambangan yang hendak dilakukan PT Semen Indonesia akan selalu berjalan aman tanpa menimbulkan efek samping yang merusak, baik terhadap lingkungan, sosial, maupun budaya.

"Tiadanya kerusakan" merupakan jaminan yang diberikan oleh PT Semen Indonesia karena seluruh aspek dari lingkungan telah diperhitungkan secara cermat

---

62 Media kompasiana.com, salah satunya, merupakan arena pertarungan makna para peserta WGI untuk menuliskan "efek positif" dari hadirnya pertambangan semen yang dilakukan PT Semen Indonesia. Bila memasukkan kata kunci "kompasiana semen rembang" di *google*, maka Anda akan menemukan puluhan artikel yang ditulis oleh para blogger tentang "bagusnya, baiknya, ramahnya" PT Semen Indonesia terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dari ratusan blogger yang menjadi peserta WGI, nama Damae Wardani adalah pegiat yang paling gencar, terutama tulisan yang menyerang makna-makna yang dibangun kelompok penolak tambang. Selain kompasiana, terdapat banyak sekali blog sejenis yang berisikan cerita semacam itu. Sebab, WGI memang didedikasikan PT Semen Indonesia secara khusus bagi para pegiat sosial media sehingga kelak, setelah mengikuti kegiatan-kegiatan WGI, mereka bisa menulis berbagai "cerita baik tentang PT Semen Indonesia" di dunia *cyber*.

dan teliti, sejak dari pra-pertambangan, selama proses penambangan, hingga pasca-pertambangan. Perencanaan yang dilakukan telah melalui pengkajian yang mendalam oleh para ahli dari beragam disiplin dengan kredibilitas akademik yang sangat baik. Klaim ini senada dengan apa yang ditegaskan oleh Abimanyu, Kabiro Komunikasi Perusahaan PT Semen Indonesia saat itu:[63]

> Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kegiatan proyek pembangunan maupun pasca-proyek di Rembang. Semuanya sudah melalui kajian yang mendalam oleh para ahli.[64]

"Tidak perlu ada kekhawatiran" merupakan makna yang ditetapkan untuk menghindari berbagai makna yang menyudutkan praktik pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Jikapun tambang tidak ramah lingkungan, maka itu bukan yang dikerjakan oleh PT Semen Indonesia, demikian kira-kira makna yang hendak dibangun.

Ketika pertambangan belum dimulai, pihak korporasi mengklaim telah melakukan penelitian tentang ekosistem karst secara mendalam guna menghindari kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Mereka telah memetakan posisi goa dan mata air, dan menempatkan posisi rencana pertambangan di luar area yang terdapat goa dan mata airnya (*lihat* Foto 1).

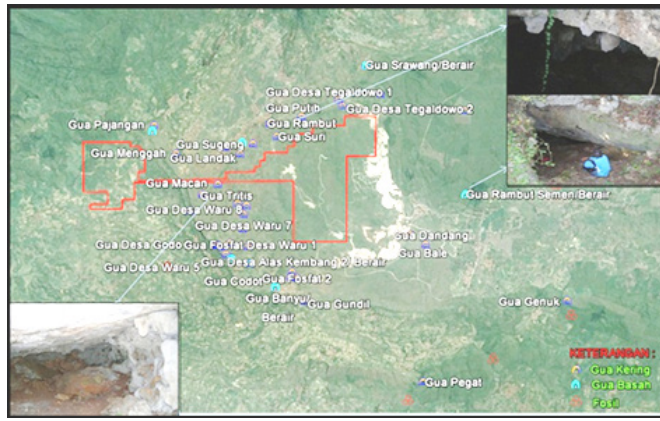
---

63 *Lihat* antarajateng.com, 5 September 2015, "Warga Rembang Buktikan Pabrik Semen Indonesia Bermanfaat".

64 Garis bawah dari penulis.

Foto 1

Peta Rencana Pertambangan Semen di Rembang versi PT Semen Indonesia



Sumber: dokumen Amdal PT Semen Indonesia, 2012.

Logika yang dibangun dari hasil penelitian Amdal PT Semen Indonesia tersebut adalah bahwa rencana pertambangan yang akan dilakukan tidak akan merusak sistem air bawah tanah karena seluruh rencana pertambangan yang dilakukan terletak di luar area keberadaan air. Makna demikian mengandaikan bahwa aktivitas pertambangan yang akan dilakukan PT Semen Indonesia telah melalui analisis yang matang yang memastikan keberlanjutan lingkungan di Rembang tetap terjaga.

Adapun saat proses penambangan, PT Semen Indonesia mengklaim bahwa proses yang dilakukan akan menggunakan teknologi berwawasan lingkungan. Beberapa di antara teknologi ramah lingkungan yang rencananya dipakai PT Semen Indonesia di Rembang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 4

Ragam Teknologi Ramah Lingkungan yang Diklaim PT Semen Indonesia

Nama Teknologi	Fungsi
Downhill Long Belt Conveyor	Mampu mengurangi konsumsi listrik sebesar 20% dibanding rancangan standar
Main Bag House Filter	Menyaring debu hingga 30 mg/m^3 udara
Preheater & Blinding Silo	Untuk 5 tahap *preheater* bisa menghemat konsumsi panas sebesar 20 Kcal/kg *clinker* atau setara 10.000 ton batubara/tahun
Correctives & Additives Storage	Mekanisasi *storage* menghemat konsumsi solar dari alat-alat berat
Vertical Cement Mill	Mampu menghemat 30% konsumsi energi listrik dibanding *Horizontal Cement Mill*
Water Preservation	Penghematan pemakaian air pada gas *conditioning tower*, memanfaatkan resirkulasi air dengan pembangunan *Water Treatment Plant*
Green House Gas Reduction	Pengurangan batu bara, bahan bakar minyak dan listrik, serta mengurangi gas rumah kaca hingga 80.000 ton per tahun.

Sumber: video berjudul Rembang I Cement Plan 3D65

65 *Lihat* youtube.com, 21 Juli 2014, "Rembang Cement Plant 3D".

Dengan penggunaan berbagai teknologi ramah lingkungan ini, maka kuatlah makna bahwa operasi pertambangan yang dikerjakan oleh PT Semen Indonesia tidak akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Klaim tersebut ditegaskan karena penggunaan listrik, air, batubara, telah dihemat sedemikian besar bahkan kadar CO2 yang dihasilkan telah ditekan hingga batas minimal. Pemaknaan yang dibangun sejak proses penambangan dan pengolahan kapur menjadi semen ini memberi penekanan bahwa ekosistem alam tidak akan terganggu dengan operasi pertambangan yang memakai alat-alat berteknologi mutakhir yang disebutkan sebagai teknologi ramah lingkungan.

Sedangkan pada tahap pasca-penambangan nanti, PT Semen Indonesia mengklaim telah membuat perencanaan yang jitu berkenaan dengan rekayasa alam agar tidak mengalami kerusakan. Penambangan batu kapur nantinya akan dikerjakan dengan sistem blok. Blok yang telah ditambang akan dijadikan area perhutanan datar yang luas sebelum dilakukan revegetasi. Sedangkan area penambangan tanah liat akan dibatasi dengan parit dan tanggul dengan lebar 50 meter mengelilingi area tersebut. Segera setelah terbentuknya tanggul-tanggul, kegiatan reklamasi dapat dilakukan termasuk kegiatan revegetasi tanaman keras dengan intensitas cukup rapat.[66] Selain itu, area eks-tambang tanah liat juga bisa digunakan

66 *Lihat* PT Semen Gresik Tbk. (2012). "Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah". hlm. II-42.

sebagai sumber air dan budidaya ikan.[67] Dari perlakuan PT Semen Indonesia terhadap area yang menjadi sasaran penambangan, bisa disimpulkan bahwa makna yang hendak dibangun dari proses perencanaan, proses eksploitasi, hingga pasca-pertambangan dijalin sedemikian rupa agar terwujud makna seutuhnya, yaitu aktivitas penambangan ramah lingkungan.

Bukan saja ramah lingkungan, PT Semen Indonesia juga mengklaim aktivitasnya menyumbangkan pengaruh positif terhadap aspek sosio-kultural masyarakat. Pada paparan awal, sesuai dengan jaminan yang diucapkan oleh Dwi Soetjipto, korporasi ini mengklaim tidak akan ada gangguan apa pun terhadap sosio-kultural warga akibat aktivitas tambang. Sebaliknya, kehadiran perusahaan semen ini dinyatakan akan memberi banyak manfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat di Rembang, terutama di sekitar area pertambangan. Hal ini ditegaskan kembali melalui klaim bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia memiliki banyak program bantuan yang sangat menguntungkan masyarakat Rembang (*lihat* Tabel 5).

67 Pemaparan ini disampaikan Agus Wiharto dalam Seminar "Semen Indonesia: Model Pengelolaan Industri Semen Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Terkait Ekosistem", pada 28 Mei 2015 di Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Tabel 5

Bantuan yang Pernah Diberikan PT Semen Indonesia di Rembang

Kegiatan	Jenis Bantuan	Kelompok Sasaran	Sumber Berita
Pelatihan tukang las dan tukang batu	Pelatihan 10 hari untuk 40 orang di Gunem dan Bulu	Masyarakat Ring 1 (satu) pabrik semen	Antara Jateng, (23 Mei 2014)
Penghijauan pada hari bumi dan lingkungan hidup	Bantuan 10.000 pohon mangrove	Kelompok pencinta lingkungan	Antara Jateng (10 Juni 2014)
Safari Ramadan	Bantuan senilai 1,2 milliar (4.000 paket sembako dan 10.450 sarung)	Kalangan Pondok Pesantren	Tribun Jateng, (23 Juli 2014)
Pinjaman pada 60 UKM di Rembang	Pinjaman UKM senilai 600 juta	Kelompok UKM di Rembang	Antara Jateng (2 Oktober 2014)

Tidak hanya masyarakat Rembang yang menikmati keuntungan dari keberadaan tambang ini, tetapi juga masyarakat di sekitar area tambang. Tercatat ada banyak kegiatan PT Semen Indonesia yang dianggap telah berkontribusi

mendukung kemajuan masyarakat di sekitar kawasan yang ditambang (lihat Tabel 6).

Tabel 6

Beberapa Kegiatan PT Semen Indonesia di Sekitar Area Tambang

Kegiatan
Bantuan 200 sak semen untuk pembangunan masjid Desa Pasucen Kecamatan Gunem
Peningkatan mutu pendidikan berbasis karakter dengan peserta para guru SD, SMP, SMA, se-Kecamatan Gunem
Penyaluran bantuan Sembako untuk delapan desa-desa sekitar lokasi pabrik di antaranya Suntri, Dowan, Tegaldowo, Kajar, Timbrangan, Pasucen, Kadiwono, dan Jatisari
Bantuan untuk *launching* SMK N 1 Gunem dengan pertunjukan pergelaran wayang kulit
Bantuan sembako untuk program banjir Desa Bitingan
Penyaluran bantuan sembako peduli Ramadhan di desa ring-1 rencana pembangunan pabrik
Komunikasi dan sosialisasi telah dilakukan secara intensif kepada berbagai kelompok khususnya masyarakat sekitar Gunem, media, Forpimda, dan lain-lain
Pelaksanaan beberapa kegiatan kesenian seperti pagelaran pergelaran wayang kulit terkait *ground clearence* pabrik
Pemasangan halte untuk tempat tunggu masyarakat yang akan naik transportasi umum di empat titik sekitar Gunem

Kegiatan
Pelaksanaan beberapa kegiatan terkait HUT Kemerdekaan RI dan HUT pabrik Semen Indonesa di antaranya sepeda santai, jalan sehat, tarik tambang, panjat pinang dan bola volley
Pembagian karpet dan sajadah kepada beberapa mushola dan masjid di sekitar Gunem
Bantuan dana untuk pembangunan masjid Desa Suntri
Bantuan dana untuk pembangunan masjid dan gorong-gorong Desa Kajar

Sumber: makalah presentasi Agung Wiharto (hlm.28)[68]

Lewat berbagai bantuan di atas, PT Semen Indonesia hendak menunjukkan bahwa keberadaannya sangat *compatible* terhadap eksistensi sosial-budaya yang melekat dalam masyarakat. Mereka mendukung setiap kegiatan kesenian seperti wayang kulit, kegiatan olah raga, bahkan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan budaya seperti sedekah bumi.

Dari sini jelas terlihat adanya usaha untuk menciptakan pemaknaan bahwa industri pertambangan berwawasan lingkungan merupakan jawaban yang tepat untuk menemukan jalan kesejahteraan. Melalui pertambangan ramah lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung, segala potensi daerah yang selama ini tidak dikelola dengan baik akan dapat dimaksimalkan lewat keberadaan pertambangan yang dimotori PT Semen Indonesia ini. Sementara itu, kesejahteraan yang diperoleh warga melalui

68 Pointer presentasi Agung Wiharto (2015).

usaha pertanian tetap berjalan dan tidak akan terganggu sama sekali. Untuk menguatkan pemaknaan tersebut, PT Semen Indonesia mengorkestrasikan kampanye tentang dampak positif aktivitas pertambangan yang dianggap berhasil di Kabupaten Tuban. Hal itu secara kasat mata ditampilkan dalam banyak nukilan yang ada dalam video berjudul *Kondisi Pasca-Penambangan Pabrik Semen Gresik di Tuban* berikut ini:[69]

> Waktu pabrik semen menambang di sini, *kok* keluar airnya, jadi orang-orang banyak yang bikin sumur. Baru-baru ini, tanah yang habis digali pabrik semen, tanah-tanah di sini sekarang menjadi subur. (Bapak Anang, warga Desa Temandang Kabupaten Tuban)
>
> Dulu di sini sangat sulit sekali mencari air. Paling satu tahun itu panen sebanyak dua kali, itu pun belum maksimal. Kalau sekarang sudah agak lumayan. Sejak ada pabrik dan ada kolam air, bisa digunakan untuk irigasi untuk sawah sekitar kawasan tambang... Sekarang pun bisa panen 3 kali setahun. (Bapak Sholeh, petani Desa Sembungrejo Kabupaten Tuban)
>
> Kalau dulu per hektar itu hanya 6 ton, sedang sekarang (sejak ada pabrik semen –*pen*) bisa 8-9 ton. (Bapak Mufti, petani Desa Sembungrejo Kabupaten Tuban)
>
> Dari zaman saya kecil sampai sekarang memiliki 2 anak tidak pernah sumur itu kering. Di sini dibor, di sana juga dibor, di desa sana juga dibor, tetapi tidak pernah

69 *Lihat* youtube.com, 22 Juli 2014, "Kondisi pasca penambangan Pabrik Semen Gresik di Tuban".

> saya menemukan airnya habis. (anonim, Ibu-ibu Desa Tobo Kabupaten Tuban)

Beberapa pernyataan warga Kabupaten Tuban tentang dampak industri semen di atas menegaskan bahwa keberadaan PT Semen Indonesia malah memberikan kemajuan bagi pertanian itu sendiri. Secara simbolis, mereka ingin mengatakan bahwa tanah yang menjadi semakin subur, jumlah dan hasil panen juga bertambah banyak, dan air semakin melimpah adalah dampak positif dari pertambangan semen yang dilakukan PT Semen Indonesia.

Secara bersamaan pula, PT Semen Indonesia memberikan artikulasi negatif tentang kawasan di Rembang yang kurang begitu bermanfaat jika hanya dijadikan usaha pertanian. PT Semen Indonesia menyatakan signifikansi menyegerakan rencana pertambangan semen di Rembang adalah karena kawasan tersebut berstatus "kering, tandus, dan dianggap tidak terlalu produktif" untuk pertanian. Sebagaimana ditegaskan Agung Wiharto, Sekertaris PT Semen Indonesia:[70]

> Topografi dan geografi Kecamatan Gunem dan Sluke dengan kandungan kapur yang tinggi, serta struktur tanah kering dan tadah hujan kurang cocok untuk pertanian dan perkebunan sehingga perlu kebijakan alih fungsi lahan ke arah industri pengolahan (misalnya, dengan pendirian pabrik semen).

70 Pointer presentasi Agung Wiharto (2015: 14).

Pernyataan sekretaris PT Semen Indonesia di atas secara jelas hendak menekankan bahwa pertanian di wilayah Rembang tergolong kurang subur sehingga perlu digantikan dengan usaha yang lebih menjanjikan yang mampu memberi kesejahteraan lebih maksimal.

Klaim Agung Wiharto tidak berdiri sendiri. Klaim PT Semen Indonesia mendapat justifikasi akademik dari akademisi ITB, Budi Sulistijo. Menurut dosen Program studi Teknik Pertambangan ITB itu, usaha pertambangan lebih menjanjikan dibanding pertanian. Sebagaimana argumennya (Sulistijo 2014):

> Sebenarnya ada upaya lain juga, yakni mengubah budaya pertanian yang banyak ditinggalkan generasi muda menjadi budaya industri yang mengandalkan keahlian. Adapun petani generasi tua diarahkan dalam program penghijauan berkesinambungan guna menjamin nafkah mereka.
>
> Namun obsesi itu saat ini masih terhalang peraturan dan anggapan yang kurang tepat dari sebagian masyarakat tentang karst. Sebenarnya hal itu bisa diatasi dengan konsep pemilihan lahan tambang yang tepat, tata-cara penambangan berwawasan lingkungan. Jadi, apakah kita bersikukuh menambang di cekungan air tanah dan karst tidak boleh dilakukan? Artinya apakah kita siap untuk terus mengimpor semen karena ingin mempertahankan wilayah karst tapi tak bisa menyejahterakan rakyat sekaligus memperbaiki lingkungan karst?

Pernyataan akademisi ITB ini hendak mendudukan sebuah makna bahwa pertambangan bukanlah praktik yang kontradiktif terhadap lingkungan maupun kesejahteraan warga sekitar kawasan tambang. Pertambangan yang dilakukan dengan pengkajian secara cermat, terutama yang menggunakan perencanaan berwawasan lingkungan, pada akhirnya akan memberi kesejahteraan pada warga sendiri. Makna seperti itulah yang dibangun untuk menegaskan perlunya pertambangan semen skala besar di Rembang.

Sesuai Prosedur dan Kata Ahli "Tidak Pernah Salah"

Bagian ini akan mengulas bagaimana proseduralisme dan teknokratisme menjadi salah satu penopang bagi tegaknya formasi wacana pembangunan berbasis pertambangan. Guna melacak bekerjanya proseduralisme dan teknokratisme, perlu kiranya melihat bagaimana praktik artikulasi yang terjadi dalam dinamika kebijakan pertambangan di Rembang. Untuk itu, ada dua bagian yang akan diulas. *Pertama*, memahami bekerjanya proseduralisme dengan menelusuri bagaimana praktik artikulasi dalam proses perizinan. *Kedua*, menguji teknokratisme dengan melihat bagaimana praktik artikulasi dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan/Amdal.

Pada bagian pertama, yakni memahami rangkaian proses perizinan, perlu lebih dahulu dilihat kapan izin yang pertama kali—dari berbagai jenis izin—didapatkan PT Semen Indonesia dalam rencana eksploitasi semen di Rembang. Sebagai informasi awal, PT Semen Indonesia dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung atas gugatan

warga Sukolilo, Pati, terjadi pada tanggal 27 Mei 2010.[71] Sedangkan izin pertama yang diperoleh PT Semen Indonesia di Rembang adalah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada 14 Oktober 2010.[72] Artinya, kurang dari lima bulan setelah dinyatakan gagal mewujudkan rencana pertambangan di Pati, PT Semen Indonesia telah mendapat izin usaha serupa di Rembang.[73]

Setelah PT Semen Indonesia mengantongi WIUP, pada beberapa bulan berikutnya berbagai jenis izin lainnya pun diperoleh. Salah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi.[74] Karena seluruh rencana pertambangan ini ada di satu kabupaten, maka seluruh izin pertambangan sepenuhnya dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, kecuali izin lingkungan yang dikeluarkan oleh

---

71 *Lihat* Mahkamah Agung. (2010). "Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2010 Tahun 2010 Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) vs Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dkk".

72 *Lihat* Keputusan Bupati Rembang No.545/68/2010 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

73 Cepatnya proses perizinan ini terjadi karena para pejabat lokal sejak awal memiliki nalar berfikir pro-investasi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bahasan di Bagian 3.

74 Menurut UU Minerba dijelaskan, ada dua tahapan perizinan pertambangan untuk batuan, yakni pertama pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan kedua pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun IUP untuk batuan terdiri dari dua katagori, yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Gubernur Bibit Waluyo pada 7 Juni 2012.[75] Meskipun pengeluaran izin terkesan begitu cepat dan terburu-buru, secara prosedural PT Semen Indonesia memastikan dirinya telah mengikuti tata aturan yang ada untuk melakukan investasi pertambangan skala besar. Tidak aneh jika kemudian Agung Wiharto selaku Sekertaris PT Semen Indonesia pernah mengeluarkan pernyataan bahwa sebanyak 35 izin dan 12 persyaratan Amdal telah dipenuhi secara keseluruhan.[76]

Dengan kenyataan bahwa seluruh jenis perizinan telah didapatkan PT Semen Indonesia, maka menurut pandangan proseduralisme berarti rencana pertambangan yang akan dilakukan telah sesuai dengan seluruh ketentuan dan regulasi lain yang terkait. Misalnya, keterkaitan rencana tambang dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku baik di provinsi maupun di kabupaten. Dalam konteks ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono, telah memberi penegasan bahwa rencana pertambangan PT Semen Indonesia tidak melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW.[77] Tidak hanya

---

75 Izin lingkungan ini dikeluarkan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena saat itu tidak ada lembaga di jajaran pemerintah Kabupaten Rembang yang bersertifikasi lingkungan sehingga tidak memiliki kewenangan mengeluarkan izin lingkungan. Wawancara Zaenal Arifin, LBH Semarang.

76 *Lihat* semenindonesia.com, 3 September 2014, "Semen Indonesia Serius Tangani Lingkungan".

77 *Lihat* Tempo, 21 Februari 2014. "Pabrik Semen di Rembang Dianggap Tak Langgar Perda".

pemerintah provinsi yang memberi jaminan atas kesesuaian RTRW dengan rencana pertambangan semen, tetapi juga pemerintah daerah Kabupaten Rembang. Menurut Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Rembang, Sugiarto, persetujuan izin pemanfaatan kawasan tambang untuk pabrik dan pertambangan yang diberikan kepada PT Semen Indonesia telah mengikuti serangkaian kajian di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dan dinyatakan telah sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Rembang.[78] Artinya, selain telah mengikuti prosedur, rencana pertambangan tersebut juga telah melalui serangkaian kajian yang terperinci.

Dengan dalih bahwa segala prosedur telah terpenuhi, maka tegas sudah makna bahwa seluruh rencana pertambangan di Rembang pasti berjalan baik dan benar. Sebagai bentuk penegasan ini, negara melalui para pejabatnya berbondong-bondong memberikan artikulasi atas makna "sesuai prosedur" tersebut. Gubernur Bibit yang mengeluarkan izin lingkungan hingga Bupati Rembang M. Salim tercatat telah berulang kali memberi penegasaan soal kesesuaian rencana pertambangan itu dengan aturan yang ada.[79] Gubernur Ganjar pun pernah menegaskan bahwa PT Semen Indonesia dipastikan telah memenuhi

78 *Lihat* mataairradio.com, 20 September 2013. "Pemkab Tetap Kukuh, Izin Pabrik Semen Sesuai RTRW".

79 *Lihat* Suara Merdeka, 18 Januari 2013. "Pembangunan Pabrik Semen Diminta Tak Dihalang-halangi".

prosedur perizinan yang berlaku.[80] Tidak terkecuali dengan Plt. Bupati Rembang, Abdul Hafidz,[81] yang menolak rekomendasi Komnas HAM[82] untuk menghentikan sementara pembangunan pabrik dengan alasan tidak ada prosedur yang dilanggar.[83] Bahkan dari pejabat pusat pun, Menteri Perindustrian MS Hidayat saat itu, ikut menegaskan bahwa PT Semen Indonesia telah mengantongi seluruh izin dan persyaratan Amdal sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan rencana pertambangan.[84]

Selain pihak negara yang memberikan penekanan makna kesesuaian prosedur, aktor-aktor non-negara pun turut ambil bagian. Sebagai contoh, Budi Sulistijo, Pakar Geoteknik, Hidrologi dan Lingkungan Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menjelaskan bahwa rencana pertambangan semen di Rembang sudah memenuhi seluruh kaidah dan syarat perizinan penambangan yang ada.[85] Untuk menyempurnakan penegasan tersebut, Adi Purwoto, seorang warga Desa Kadiwono Rembang juga menyampaikan alasan bahwa "Kalau izinnya saja sudah

---

80 *Lihat* semenindonesia.com, 22 Januari 2015. "Gubernur Ganjar Pranowo Pastikan Izin Sesuai Prosedur".

81 Pada Pemilukada 2016, Abdul Hafidz terpilih sebagai Bupati Kabupaten Rembang untuk periode 2016-2021.

82 Surat Komnas HAM No.2/K/PMT/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014.

83 *Lihat* detakjateng.com, 15 Nop 2014. "Pabrik Semen di Rembang Jalan Terus, Rekomendasi Komnas HAM Ditolak".

84 *Lihat* liputan6.com, 19 Jun 2014. "Kalau Semen Indonesia Punya Amdal, Pembangunan Pabrik Bisa Lanjut".

85 *Lihat* Republika, 25 September 2014. "Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Sudah Penuhi Syarat".

keluar dan sesuai prosedur yang ditetapkan, mengapa tidak segera dibangun?".[86]

Kenyataan di atas menekankan bahwa jika seluruh rangkaian prosedur telah dipenuhi, maka secara legal tidak ada alasan lagi untuk menghentikan/menghambat rencana pertambangan di Pegunungan Kendeng oleh PT Semen Indonesia, khususnya di Kecamatan Gunem. Sebaliknya, segala upaya yang menghambat proses terselenggaranya rencana pembangunan pabrik semen di Rembang merupakan langkah "ilegal". Ini persis sebagaimana surat jawaban yang berisi penolakan atas rekomendasi Komnas HAM agar Pemda Rembang menghentikan pembangunan pabrik, yakni penghentian pembangunan pabrik merupakan keputusan "salah" karena tidak ada satu pun prosedur yang dilanggar sebelumnya.

Pada bagian kedua, untuk mengulas bagaimana proses penyusunan Amdal dikerjakan para teknokrat, pertama perlu dilacak siapa yang terlibat dalam proses penyusunan Amdal ini. Dalam dokumen Amdal PT Semen Indonesia di Rembang, pihak yang ditunjuk sebagai penyusun Amdal adalah PT Kuala Biru Utama Baru (PT KBUB), perusahaan jasa konsultan berkantor di Batam, Kepulauan Riau.[87]

---

86 *Lihat* Republika, 26 September 2014. "Pabrik Semen di Rembang Diminta Segera Dibangun".

87 Dalam dokumen yang bisa diakses di website Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Perusahaan ini telah teregistrasi memiliki kompetensi sebagai penyedia jasa konsultan Amdal hingga 25 Februari 2017 (lihat www.kompetensilingkungan.menlh.go.id). Penanggung jawab PT KBUB adalah Husaini Rahman, dan memiliki tenaga tetap bersertifikat

Adapun dalam pelaksanaan studi Amdal ini, PT KBUB melibatkan narasumber dan tim pelaksana dari berbagai bidang keahlian dan beragam latar belakang (*lihat* Tabel 7).

Tabel 7

Tim Pelaksana Studi Amdal PT Semen Indonesia

No.	Jabatan dalam Tim (Keahlian)	Nama (Asal Institusi)
1.	PENANGGUNG JAWAB	
1.1	Direktur	Ir. Husaini Rahman Direktur Utama PT Kuala Biru Utama Baru
2.	NARASUMBER	
2.1	Ahli Konservasi Lingkungan	Prof. Dr.Ir.H.Chafid Fandeli Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM)
2.2	Ahli Ilmu Lingkungan	Drs. Dwi P. Sasongko, M.Si. Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro (Undip)
2.3	Ahli Karst dan Speleologi	Dr. Eko Haryono Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM)

kompetensi lingkungan, di antaranya adalah Chafid Fandeli dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Amin Nugroho dari Program Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Keduanya berstatus sebagai Ketua Tim. Masih menurut dokumen KLH, website resmi perusahaan ini adalah www.kualabiru.com. Hasil pelacakan yang saya lakukan, website ini dibuat pada 12 Mei 2014, dan hingga saat ini (Juli 2016) website tersebut masih tidak memiliki informasi apa pun, bahkan terkesan sebagai domain mati atau domain mentah yang belum digarap.

No.	Jabatan dalam Tim (Keahlian)	Nama (Asal Institusi)
2.4.	Ahli Geomorfologi	Prof. Dr. Suratman Woro Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM)
2.5.	Ahli Tata Guna Lahan	Prof. Totok Gunawan, DEA Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM)
2.6.	Ahli Ekologi/Biotis	Prof. Dr. S. Djalal Tandjung, M.Sc Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada (UGM)
2.7.	Ahli Kesehatan Masyarakat	Prof. Dr. dr. Adi Heru Sutomo, M.Sc Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (UGM)
3.	PELAKSANA	
3.1.	Ketua Tim (Ahli Teknik Lingkungan)	Ika Bagus Priyambada, ST. M. Eng Program Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro (Undip)

No.	Jabatan dalam Tim (Keahlian)	Nama (Asal Institusi)
3.2	Koordinator Bidang Fisik – Kimia (Ahli Teknik Kimia)	Ir. Amin Nugroho, MS Program Teknik Kimia, Universitas Diponegoro (Undip)
	Tenaga Ahli Geologi	Dr. Ir. Agus Hendratno, M.Sc Program Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada (UGM)
	Tenaga Ahli Industri	Heri Pramono, ST *Tidak ditemukan data*
	Tenaga Ahli Hidrologi	Drs. Soenarso Simoen, MS Ilmu Geohidrologi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM)
	Tenaga Ahli Kimia	Ir. Sigit Hernowo, M. Kes Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Yogyakarta
3.3	Koordinator Bidang Biotis (Ahli Biologis)	Drs. Asep Herlian *Tidak ditemukan data*
	Anggota Tenaga Ahli Biotis	Sidik Purnomo, S.Si *Tidak ditemukan data*

No.	Jabatan dalam Tim (Keahlian)	Nama (Asal Institusi)
3.4.	Koordinator Bidang Sosekbudkesmas (Ahli Sosekbudkesmas)	Dra. Ina Sita Nuraina, M.Hum Pengkaji Lingkungan di PT Karya Prima Lestari Cemerlang, Yogyakarta
	Anggota	
	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	Ir. Agus Untarno, BSc. *Tidak ditemukan data*
	Tenaga Ahli Kelembagaan	Ir. Sri Yuniyarti, M.Par Program Teknik Lingkungan, Institute Teknologi Yogyakarta (ITY)
3.5.	Tenaga Ahli Transportasi	Ir. Wahyu Widodo, MT Program Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Sumber: Amdal PT Semen Indonesia, Bab II, hlm. 2.[88]

Keberadaan para ahli yang disebutkan dalam Tabel 6 memperlihatkan dengan jelas bahwa beberapa nama merupakan para profesor dan ahli-ahli dengan berbagai bidang pengkajian. Dwi Soetjipto menegaskan, "Amdal itu dikerjakan oleh lembaga independen. Siapa saja yang mengerjakan Amdal bisa dilihat. Para ahli dan profesor-profesor ini tentu saja mempertaruhkan profesionalisme

88 Informasi tentang latar belakang institusi para tim ahli diperoleh dari pelacakan saya sendiri secara manual melalui mekanisme *searching by google.*

mereka".[89] Artinya, dalam kerangka berpikir teknokratisme, kajian Amdal yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia telah melalui medan kaji dan analisis dari para ahli-ahli terkait sehingga tingkat presisi atas analisisnya tidak mungkin salah.

Dengan klaim di atas, negara dan korporasi berusaha membangun makna bahwa kajian lain yang tidak dilakukan para ahli ditempatkan sebagai sesuatu yang bermasalah, tidak akademis, dan tidak bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Oetnil Moeda, Kabid II Teknologi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa tengah, bahwa penolakan Amdal tidak bisa dilakukan asal dengan menolak saja. Tegasnya, "..orang Jawa bilang ini waton suloyo, pokoke ora, pokoknya tidak bisa. Kata 'pokoke' dalam kajian Amdal yang saya bilang punya kandungan ilmiah; tidak bisa diterima". Penegasan semacam ini merupakan cara untuk menekankan makna bahwa pengetahuan yang disampaikan harus memiliki muatan akademis. Dengan demikian, pernyataan yang tidak didasarkan pada kajian akademis tidak bisa dipakai sebagai rujukan untuk membuat kebijakan.

Cara pandang teknokratis ini pada dasarnya ingin membangun makna bahwa keberadaan para profesor dan ahli yang terlibat penyusunan Amdal dijadikan garansi bahwa hasil studi tersebut memiliki akurasi yang sangat baik

89 *Lihat* youtube.com, "Metro Realitas: Perempuan-Perempuan Penjaga Karst". Video dibuat oleh Metro TV, diunggah ulang pada 21 Juli 2014.

dan tidak mungkin diragukan. Menurut Agung Wiharto, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia, Tim Ahli yang digunakan merupakan ahli-ahli dengan kredibilitasi sangat baik, di antaranya dari Undip, UGM, dan UPN yang mencakup berbagai segi mulai dari aspek hidrologi, sosial hingga ekonomi.[90] Pernyataan ini memberi penegasan bagaimana Tim Ahli secara "pasti" bisa mengukur dan mengendalikan dampak dari aktivitas pertambangan di Rembang. Nada yang lebih optimis diterangkan oleh Kabiro Komunikasi Perusahaan PT Semen Indonesia, Abimanyu, yang mengungkapkan:[91]

> "Dalam kegiatan operasionalnya, seluruh pabrik Semen Indonesia senantiasa mengedepankan keseimbangan dan keselarasan alam. Semua sudah dikaji sehingga setiap kegiatan sudah terukur dan terkendali."[92]

Dengan begitu, teknokratisme dalam kebijakan rencana pertambangan semen diposisikan sebagai keputusan yang sudah seharusnya. Jika pun masih ada yang mempersoalkan, itu hanya persoalan belum maksimalnya sosialisasi tentang hasil studi tersebut. Makna ini ditegaskan oleh Gubernur Ganjar secara persis ketika dirinya menemui warga penolak pada 28 Juni 2014. Dalam perbincangan dengan warga penolak tambang saat itu, gubernur melontarkan sebuah pertanyaan kepada warga, "Apakah saudara-

90 *Lihat* semenindonesia.com, 3 September 2014. "Semen Indonesia Serius Tangani Lingkungan".

91 *Lihat* antarajateng.com, 5 September 2015. "Warga Rembang Buktikan Pabrik Semen Indonesia Bermanfaat".

92 Garis bawah dari penulis.

saudara sekalian sudah membaca Amdal?".[93] Pertanyaan ini menyiratkan sebuah makna bahwa Amdal merupakan analisis yang dikerjakan para ahli yang memiliki kredibilitas, sehingga tidak mungkin salah. Untuk itu, warga perlu membaca dan memahami isi yang terkandung dalam dokumen Amdal. Harapannya, warga akan membuka mata bahwa rencana pertambangan itu sudah benar bahkan baik untuk keberlangsungan dan kesejahteraan warga sendiri.

Beberapa praktik artikulasi yang telah ditunjukkan di atas memperlihatkan bagaimana kebijakan yang dianggap "benar" dibingkai dalam nalar proseduralisme dan teknokratisme. Proseduralisme melihat suatu kebijakan sebagai susunan/tahapan dari berbagai prosedur (administrasi) yang memastikan kebijakan yang dibuat memiliki dampak positif sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Para pembuat kebijakan membayangkan prosedur perizinan yang lengkap merupakan tatanan baku dalam sebuah kebijakan dan tatanan itu diposisikan sebagai sesuatu yang wajib ditaati/dipatuhi. Ketaatan/kepatuhan pada tatanan inilah kunci apakah kebijakan bisa dinilai "benar atau salah". Kebijakan menjadi salah jika ada bagian dari prosedur yang tidak dipatuhi. Adapun birokrasi, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, diandaikan sebagai pihak yang netral dan

93 Pertanyaan Ganjar ini berulang kali diceritakan warga penolak kepada saya. Hal yang sama persis yang ditulis Arlian Buana (2015: 89) sebagai berikut: "Ganjar tanya ibu-ibu yang mukanya kayak gini kok tanya Amdal? Yang bodoh itu Ganjar atau ibu-ibu petani? Kalau ibu-ibu ditanya apa sudah mencangkul, apa sudah ambil rumput, mungkin ibu-ibu bisa jawab. Tapi tanyanya Amdal?! Yang bodoh itu Ganjar-nya atau ibu-ibunya?"

bebas dari kepentingan apa pun. Dengan pengandaian tersebut rasionalitas birokrasi hanya berorientasi pada penegakan kepatuhan atas prosedur yang ada.

Sementara itu, dalam teknokratisme, pembuatan kebijakan dibayangkan sebagai suatu pengimplementasian metode ilmiah yang bisa diuji baik lewat perhitungan akal sehat maupun lewat uji empiris di lapangan. Pihak yang terlibat (para teknokrat) dalam proses penyusunan Amdal adalah pihak profesional yang netral, mampu berpikir rasional, dan bisa berkerja mengandalkan instrumen yang bisa diuji secara ilmiah. Bagi para teknokrat, masalah kebijakan diposisikan sebagai sesuatu yang objektif, yang mengandaikan permasalahan bisa dipahami oleh siapa pun. Jika ada yang belum mengerti, itu hanya persoalan ruang sosialisasi yang belum berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, ketidakmengertian atas hasil studi para teknokrat dibayangkan bukan akibat kesalahan pembuatnya (para teknokrat), melainkan kekeliruan dalam memberi pemahaman secara luas.

Dari sini menjadi jelas bagaimana proseduralisme dan teknokratisme adalah penanda kuat yang digunakan untuk menyokong wacana kesejahteraan. Kepatuhan atas seluruh prosedur yang berlaku memberikan makna bahwa rencana pertambangan merupakan sesuatu yang benar dan tidak menyalahi apa pun. Adapun teknokratisme memberikan garansi bahwa seluruh rencana yang dibuat untuk pertambangan semen tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semua telah diukur dan diuji secara cermat. Artinya, baik proseduralisme dan teknokratisme dalam formasi

wacana diposisikan sebagai sesuatu yang pasti benar dan tidak mungkin menyisakan celah kesalahan. Pemaknaan demikian menjadi *compatible* dalam mengupayakan terjadinya sedimentasi dalam hegemoni pembangunan berbasis pertambangan.

Mobilisasi Kesepakatan sebagai Penanda Persetujuan

Dalam portal *semenindonesia.com* bertanggal 12 Februari 2015, terdapat sebuah berita berjudul *Mbah Maimun Doakan SMI untuk Bangsa*. Berita itu secara jelas atraktif menuliskan:

> Di akhir haflah dzikir tersebut, Mbah Maimun memimpin doa untuk kemaslahatan pabrik Semen Indonesia di Rembang. "Jadikan pabrik Semen Indonesia pabrik yang dapat mengayomi bangsa, pabrik yang dapat memberkahi bangsa, pabrik yang dapat menjunjung harkat dan martabat bangsa, jadikan negara ini *gemah ripah loh jinawi* ya Allah. .," doa mbah Maimun yang diamini oleh ribuan warga Rembang.[94]

Mbah Maimun adalah sapaan akrab dari Kyai Haji Maimun Zubair, pengasuh pondok pesantren Al Anwar di Karangmangu Sarang di Rembang dan salah satu tokoh NU terkemuka di Indonesia. Publikasi berita ini, secara langsung maupun tidak langsung, ditujukan untuk menciptakan ekuivalensi bahwa Mbah Maimun (seolah-olah) telah

94 *Lihat* semenindonesia.com, 12 Februari 2015. "Mbah Maimun Doakan SMI untuk Bangsa".

merestui pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Rembang.[95]

Hal senada yang lebih tegas disampaikan oleh tokoh Nahdliyin yang disebutkan sebagai Pakar Ushul Fiqh, yakni Gus Wahyu NH Aly.[96] Dalam pemberitaan berjudul *Pakar Ushul Fiqh: Pabrik Semen di Rembang Mengurangi Pengangguran*,[97] secara terang-terangan tokoh tersebut menunjukkan dukungan atas pendirian pabrik semen di Rembang.

> Saya kira perlu kita dukung. Kita kan tahu, jumlah pengangguran di Rembang cukup besar. Jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan juga cukup tinggi. Pada sisi lain, pembangunan di Rembang juga

95 Menurut Bodhi Pop, salah seorang aktivis JMPKK Rembang, saat saya mengonfirmasi tentang dukungan Mbah Maimun, dirinya meragukan fakta tersebut. Salah satu pemerhati *heritage* di Lasem ini menyatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Mbah Maimun untuk mengungkapkan persoalan yang sama (menolak pabrik), dan Mbah Maimun juga mendoakan semoga mendapat jalan yang baik. Baginya, Mbah Maimun akan mendoakan siapa saja yang datang agar mendapat jalan terbaik. Terlebih, pada bulan Juni 2016, kedatangan ibu-ibu penolak tambang ke pondok pesantren Al Anwar juga mendapat dukungan moral dengan petuah dari Mbah Maimun agar ibu-ibu terus berjuang melindungi alam Pegunungan Kendeng.

96 Nama Gus Wahyu NH Aly dalam id.wikipedia.org disebutkan sebagai budayawan dan *ahli ushul fiqh*. Namun, situs semacam ini sangat mungkin diragukan, terlebih tidak ada kejelasan di pesantren atau majelis apa dia mengasuh kajian Fiqh. Informasi yang pasti, dia adalah seorang penulis dengan tema-tema agama, baik buku maupun esai-esai di media massa.

97 *Lihat* bumn.go.id, 24 Maret 2015. "Pakar Ushul Fiqh: Pabrik Semen di Rembang Mengurangi Pengangguran".

> lambat. Dengan adanya Pabrik Semen di Indonesia, semoga membuka harapan memberikan kemanfaatan tersendiri bagi masyarakat.
>
> Mari bersikap arif. Jangan sampai kita barangkali dikasih uang oleh pihak tertentu kemudian membabi buta menolak atau menerima suatu hal. Karena berlebih-lebihan atau *isrof* bisa menimbulkan fitnah, dan fitnah itu berat bebannya.

Dari kutipan di atas, tampak jelas pembentukan makna bahwa pertambangan yang akan digalakkan di Rembang telah mengikuti kaidah *Ushul Fiqh*. Meski tidak menguraikan kaidah mana yang dimaksud, pemberitaan ini secara jelas mengarahkan kehendak untuk menciptakan jalinan kesamaan bahwa kalangan agamawan mendukung sepenuhnya rencana pertambangan semen di Rembang.

Selain kalangan agamawan, salah satu pihak yang dianggap memiliki kekuatan besar dalam persoalan pendirian pabrik semen adalah kalangan adat. Kalangan adat yang diarahkan sebagai pendukung pabrik semen adalah kalangan *Sedulur Sikep* (Samin). Pelibatan salah satu kelompok *Sedulur Sikep* dalam orkestrasi pembentukan makna positif tentang pertambangan tidak lepas dari dua latar belakang sebelumnya. *Pertama,* kegagalan investasi PT Semen Indonesia pada awal 2010 di Sukolilo Pati yang sebagian besar dimotori oleh kalangan Samin. *Kedua,* beredarnya film "Samin vs Semen" (SvS) karya Dhandy Laksono di awal 2015 yang mem-*framing* konfrontasi antara

komunitas adat Samin dengan PT Semen Indonesia.[98] Kedua hal ini menjadikan logika perbedaan antara Samin dan PT Semen Indonesia semakin menguat. Untuk itu, dibutuhkan praktik artikulasi yang membangun sebuah jalinan kesamaan tentang proses restu dari kalangan Samin atas rencana pertambangan semen.

Jalinan kesamaan tentang restu kalangan Samin terhadap rencana pertambangan semen secara jelas tampak dengan hadirnya film *Sikep Samin Semen* (selanjutnya disingkat *SSS*).[99] Dari sisi judul, film ini ingin menunjukkan adanya satu jalinan yang sama antara orang Samin dan perusahaan semen. Orang-orang Samin hendak menyanggah makna bahwa kedua entitas tersebut saling berkonfrontasi sebagaimana film Dhandy Laksono sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, di film *SSS* kalangan Samin yang mendukung pertambangan adalah kelompok Samin dari berbagai daerah mulai dari Kudus, Pati, Blora hingga Bojonegoro.[100] Kehadiran film ini hendak mengukuhkan pandangan bahwa konfrontasi kalangan Samin terhadap keberadaan tambang adalah palsu. Di saat bersamaan mereka ingin menunjukkan

98 *Lihat* youtube.com. (2015). "Samin vs Semen (Full Movie)".

99 *Lihat* youtube.com. (2014) "Sikep Samin Semen".

100 Film ini berdurasi 1 jam 1 menit 16 detik dan diproduksi oleh Mkz Picture. Film ini tidak secara langsung (literer) menunjukkan dukungan pada pertambangan semen. Namun, posisinya sebagai counter makna dari film "Samin vs Semen", menjadikan film ini sebagai bagian dari jalinan kesamaan dari pemaknaan bahwa kalangan Samin tidak pernah melawan rencana pertambangan semen. Lebih lanjut saksikan youtube.com, 26 Juli 2015. "Sikep Samin Semen".

makna sebaliknya bahwa kalangan Samin sesungguhnya adalah pendukung atas kehadiran tambang semen yang bermaksud menyejahterakan rakyat luas.[101]

Tidak berhenti dalam pembuatan film saja, dalam kasus semen di Pati, orang-orang Samin—kelompok yang terlibat dalam film SSS—tercatat pernah menyambangi Gubernur Ganjar persis satu hari sebelum putusan gugatan warga Kecamatan Kayen dan Tambakromo di Sidang PTUN Semarang. Pada 16 November 2015, sebagaimana dituliskan dalam berita yang berjudul *Sedulur Sikep Nyatakan Tak Bermasalah dengan Pabrik Semen Pati*,[102] kesepuluh orang Samin tersebut dibingkai secara khusus untuk menunjukkan dukungannya pada pertambangan semen.

101 Argumen ini didasarkan pada nukilan dalam film *SSS*, yakni demonstrasi menolak semen adalah palsu pada menit 14:50, sedangkan pesan industri semen bertujuan untuk kesejahteraan rakyat luas terlihat dalam film di menit 25: 50. Lihat youtube.com, 26 Juli 2015. "Sikep Samin Semen".

102 Lihat Tribun Jateng, 16 November 2015. "Sedulur Sikep Nyatakan Tak Bermasalah dengan Pabrik Semen Pati".

Foto 2

Jajaran Petinggi PT Semen Indonesia dan Orang-Orang Samin



Sumber: twitter, dengan nama akun: Front Pembela NKRI

Kelompok Samin ini adalah kelompok yang sama yang ada dalam film SSS dan secara jelas memiliki kedekatan dengan pihak PT Semen Indonesia (*lihat* Foto 2). Bukan itu saja, kelompok ini juga menjadi bagian yang sama dalam meracik jalinan kesamaan bagi dukungan pertambangan semen di Pati. Di titik ini, kelompok Samin di atas merupakan batas politik (*political frontier*) yang berseberangan dengan kelompok Samin yang menolak tambang.

Selain kalangan agamawan dan adat, rencana pertambangan semen oleh PT Semen Indonesia juga dibentuk dengan praktik artikulasi dari dukungan kalangan masyarakat di Rembang sendiri. Tercatat setidaknya ada enam

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Rembang yang secara terang-terangan mendukung rencana pertambangan semen, yakni LSM Semut Abang, LSM Balas, LSM Aliansi Tajam, LSM Komras, LSM Hitam Putih, dan LSM LP3.[103] Adapun dukungan dari kalangan massa bisa dilihat ketika proses persidangan PTUN di Semarang (September 2014 - April 2015). Di masa-masa tersebut, kelompok demonstran yang mendukung rencana pertambangan PT Semen Indonesia selalu muncul. Kelompok demonstran ini berasal baik dari kalangan warga di sekitar lokasi penambangan, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Orkestrasi dukungan-dukungan di atas disambut PT Semen Indonesia dan negara untuk menegaskan makna bahwa pihak-pihak yang dianggap menolak pertambangan semen di Rembang hanyalah isu-isu yang tidak bisa dipegang kebenarannya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Hari Subagyo, juru bicara PT Semen Indonesia,"Kami pastikan bahwa isu-isu itu telah dihembuskan oleh LSM yang pada prinsipnya adalah tidak ingin pabrik Semen Indonesia atau Semen Gresik itu ekspansi di Rembang."[104] Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Haryadi, perwakilan dari Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Pantura (SPMP). Menurutnya "Tidak terlihat perpecahan antara

103 *Lihat* Suara Merdeka, 3 Juli 2014. "Enam-LSM-Dukung-Pendirian-Pabrik-Semen".

104 *Lihat* portalkbr.com. 17 Juni 2014. "PT Semen Indonesia Tuding LSM Provokasi Warga Rembang".

pihak yang pro dan kontra di antara warga desa ring 1. Suasana mencekam yang digambarkan melalui berbagai media termasuk media sosial adalah hasil eksploitasi dari pihak luar".[105] Lebih jauh lagi, para ibu-ibu yang mendirikan tenda sebagai protes pembangunan pabrik semen dimaknai sebagai orang-orang yang mengais rezeki dengan mencari "uang demo".[106] Dengan cara demikian makin kuat penekanan makna tentang dukungan luas dari berbagai kalangan terhadap rencana pertambangan semen di Rembang. Mobilisasi kesepakatan ini pada saat yang sama menempatkan berbagai ekspresi penolakan sebagai sekadar isu palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jadi, mengikuti alur teoretis Laclau dan Mouffe tentang hegemoni, maka 'restu berbagai kalangan' di sini ditempatkan sebagai jalinan kesamaan yang dihasilkan dari praktik artikulasi yang memobilisasi berbagai penanda mengambang sehingga terbentuk konsensus atas rencana pertambangan. Doa dan kaidah-kaidah fiqh dipakai guna menciptakan makna bahwa rencana pertambangan telah diridhoi oleh para pemuka agama. Dukungan kalangan adat khususnya Samin dibentuk guna menunjukkan makna bahwa selama ini konfrontasi Samin melawan perusahaan

105 *Lihat* Suara Merdeka, 1 April 2015. "Mahasiswa Diminta Tidak Provokasi Warga Rembang

106 *Lihat* bareksa.com. 16 Maret 2015. "Pabrik Semen Indonesia di Rembang dan Demonstran Tenda Biru".

semen adalah salah, karena "sesungguhnya" mereka (Samin) sangat mendukung pertambangan semen. LSM dan para demonstran pendukung pertambangan dipakai untuk menciptakan makna tentang penerimaan yang luas di kalangan akar rumput. Hal ini semua bisa dibaca sebagai sebuah upaya membangun jalinan kesamaan yang mengarah pada satu titik makna: tambang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hadirnya restu dan dukungan yang luas atas rencana pertambangan semen merupakan wujud dari makna masyarakat menantikan hadirnya kesejahteraan di tengah kehidupan mereka.

Catatan Penutup

Dalam uraian di atas, ditunjukkan secara jelas bagaimana titik nodal kesejahteraan dibentuk dari jahitan berbagai penanda mengambang yang terekspresikan dalam berbagai praktik artikulasi. Ketiga penanda mengambang yang teramati itu adalah *good mining practices* sebagai "pilihan yang tepat", kebijakan proseduralis-teknokratis yang "pasti benar", dan mobilisasi kesepakatan yang tidak bisa ditolak. Berbagai penanda mengambang ini berfungsi untuk melakukan fiksasi pemaknaan bahwa segala sesuatu yang direncanakan dalam usaha pertambangan semen di Rembang sudah berjalan baik sebagaimana mestinya dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Artinya, rencana eksploitasi tambang semen di Rembang dibayangkan akan mewujudkan pembangunan di kawasan itu sendiri, sebab

keseluruhan rencana telah dikelola dan diperhitungkan secara matang.

Dengan cara seperti itu, maka wacana kesejahteraan bisa dipakai untuk mewujudkan hegemoni pembangunan berbasis pertambangan. Untuk melakukan hal tersebut, berbagai kebijakan yang menyokong rencana pertambangan diupayakan mencapai "posisi politik dan objektif" (lihat kembali hlm.21-22). Usaha untuk memperoleh posisi politik adalah dengan menekankan bahwa: 1) sumber daya bisa termanfaatkan hanya diperoleh melalui praktik pertambangan yang baik, 2) kebijakan yang benar hanya yang sesuai prosedur dan menurut kajian ilmiah, 3) restu berbagai pihak adalah bukti atas kesepakatan yang harus ditempuh. Sedangkan upaya untuk mendapat posisi objektif dilakukan melalui penekanan bahwa segala penolakan atas rencana pertambangan yang tidak berdasarkan prosedur dan tidak berdasar kajian ilmiah, serta upaya penolakan yang muncul adalah isu-isu yang tidak memiliki dasar. Eksklusi semacam itu dibutuhkan untuk menghindari subversi makna yang dibangun negara demi menciptakan hegemoni.

Jika menilik kerangka teoretis yang saya pakai, maka upaya negara untuk mencapai posisi politik dan objektif di atas memperlihatkan arah untuk mendapatkan posisi hegemoni. Namun, bukan berarti posisi hegemoni itu solid dan permanen, sebab masih sangat bergantung pada terjadi tidaknya transformasi mitos menjadi imaji sosial.

Selama mitos yang dijadikan representasi makna baru tidak menjadi imaji sosial bersama, maka posisi hegemoni tersebut akan menjadi struktur yang terdislokasi ulang. Jika terdapat struktur yang terdislokasi, maka akan membuka ruang antagonisme lain yang mensubversi kemapanan hegemoni sebelumnya. Dalam bahasan berikutnya saya akan mengupas bagaimana bangunan hegemoni yang terbentuk ternyata menciptakan dislokasi baru, kemudian melahirkan antagonisme sosial yang menggerogoti hegemoni pembangunan berbasis pertambangan.

BAGIAN 5

DISLOKASI MAKNA: CELAH YANG DITUTUPI TERBUKA KEMBALI

"Mayoritas penduduk Tegaldowo ini petani. Jadi, bagaimana mungkin pertambangan yang merusak pertanian bisa dibiarkan. Lahan akan hilang, air akan hilang, rumput akan hilang, kerukunan terganggu, dan macam-macam lagi."

(Javar)[107]

Pernyataan di atas diutarakan oleh Javar, seorang petani dari Desa Tegaldowo yang menolak pertambangan semen skala besar yang akan dibuka di desanya. Makna dari pernyataan ini tentu saja

107 Wawancara dengan Javar, Petani Tegaldowo pada 23 September 2014. Wawancara ini dikerjakan oleh Unu Herlambang dan Rian Adhivira dari Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saya mengutip rekaman hasil wawancara yang pernah mereka lakukan.

bertentangan dengan seluruh narasi yang dibangun oleh hegemoni pembangunan berbasis pertambangan sebagaimana telah diulas sebelumnya. Pemaknaan bahwa rencana pertambangan yang akan dilakukan di Rembang "berjalan aman, tidak akan merusak, dan bisa menghadirkan kesejahteraan" tiba-tiba bisa berbalik 180 derajat. Javar, yang telah beberapa generasi sebelumnya bergulat dalam usaha pertanian, merasa dirinya terancam oleh rencana pertambangan yang digaung-gaungkan akan menghadirkan kesejahteraan itu.

Kekhawatiran dan perasaan terancam itu tidak hanya dirasakan oleh Javar. Warga di sekitar area pertambangan, terutama di desa Tegaldowo dan Timbrangan merasakan kekhawatiran serupa. Berangkat dari kenyataan sosial dan pernyataan petani Rembang tersebut, muncul tanda tanya: Apakah makna kesejahteraan yang dibentuk negara ini menjadi imaji sosial di tingkatan akar rumput, terutama para petani di sekitar area tambang? Pertanyaan tersebut bisa menjadi pintu untuk mengulas secara panjang lebar bagaimana rencana pertambangan semen di Rembang—yang selama ini dianggap baik-baik saja—ternyata menyisakan banyak celah yang tidak saja belum terselesaikan, tetapi sebaliknya malah menggerogoti formasi wacana yang dibangunnya sendiri.

Bagian ini akan secara khusus membahas bagaimana wacana kesejahteraan yang dipakai untuk membentuk hegemoni pembangunan berbasis tambang ternyata tidak mampu bertransformasi secara simbolis menjadi

sesuatu yang riil dalam ruang sosial. Sebaliknya, wacana kesejahteraan yang diusung negara itu malah membuka berbagai celah yang mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan struktural yang lain. Dalam kerangka teoretis yang saya gunakan, maka pembahasan pada bagian ini merupakan ulasan tentang dislokasi sosial yang justru tercipta dari segala upaya negara membangun hegemoninya lewat kebijakan yang berwatak proseduralis dan teknokratis. Melalui uraian tentang dislokasi sosial, berbagai makna yang sebelumnya ditutup atau disingkirkan akan mengemuka. Dengan menunjukkan celah-celah tersebut, upaya perjuangan politik warga untuk mendefinisikan kesejahteraan dengan caranya sendiri niscaya bisa dilakukan.

Green Industry yang Tidak Pernah Hijau

Saya pernah mendapat kelakar menarik saat proses penelitian. Seorang pemuda menanyakan kepada saya (kebetulan saya berasal dari Kabupaten Tuban) tentang pabrik utama PT Semen Indonesia di Tuban. Dia mengajukan pertanyaan unik, "Mas, sudah pernah melihat pabrik semen di Tuban kan? Mana yang lebih hijau antara pabrik semen di sana, dengan kawasan pertanian di sini?". Saat itu, Desa Tegaldowo sedang hijau-hijaunya, dan saya pun menjawab, "Lebih hijau di sini". Pemuda itu kemudian menimpali lagi, "Lalu mengapa pabrik semen yang disebut *Green Industry,* bukan pertanian milik kita ini?" Nukilan ini saya hadirkan di sini untuk menjadi refleksi awal sebelum memulai pembahasan bagian ini.

Di Bagian 4 saya telah menguraikan bagaimana PT Semen Indonesia mengklaim sebagai *green industry* yang tidak akan merusak alam. Dari teknologi ramah lingkungan hingga pengkajian detail dan terukur, PT Semen Indonesia meyakinkan berbagai pihak bahwa segala hal yang direncanakan dalam industri semen tidak akan berpengaruh apa pun terhadap kondisi lingkungan. Secara simbolis, makna demikian dikuatkan terus menerus baik oleh para pejabat, pihak korporasi, media massa, bahkan kampanye-kampanye massif seperti *Wisata Green Industry* dan lain sebagainya. Namun, di balik itu semua, ternyata ada kenyataan yang jauh berbeda atau bahkan bertentangan sama sekali.

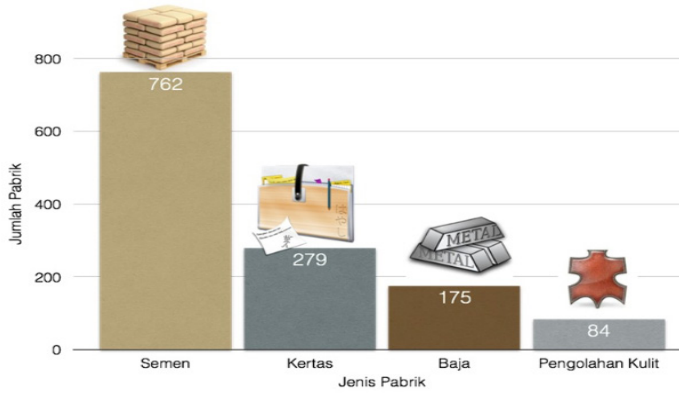
Pertama, PT Semen Indonesia mengklaim memiliki teknologi dan perencanaan yang bisa menekan pelepasan gas rumah kaca seminimal mungkin (*baca* Bagian 4). Dari sini, terjadi lompatan pemaknaan yang menguniversalkan makna parsial, bahwa adanya teknologi ramah lingkungan disama-pahami sebagai aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. Untuk itu, perlu ada upaya dekonstruksi guna mengembalikan makna tersebut kembali pada parsialitasnya, bahwa teknologi adalah satu hal, dan aktivitas pertambangan adalah hal lainnya. Saya coba sederhanakan, mana yang lebih ramah lingkungan antara (1) adanya aktivitas tambang yang berteknologi ramah lingkungan, dengan (2) tiadanya aktivitas tambang. Jawaban kedua menjadi lebih masuk akal. Untuk kembali meyakinkan kenyataan ini, mari kita cermati bagaimana profil industri semen yang ada selama ini.

Profil industri semen menunjukkan bahwa industri inilah yang menjadi penyuplai gas rumah kaca terbesar di dunia dibanding dengan jenis industri yang lainnya. Majalah the Economist menuliskan, "The cement industry is one of the world's most polluting: it accounts for 5% of man-made carbon-dioxide emissions each year".[108] Pernyataan itu menunjukkan bahwa industri semen merupakan salah satu industri penghasil polutan terbesar sekaligus penyebab pemanasan global. Argumen ini diperkuat seiring dengan adanya laporan *The International Energy Agency* yang menyatakan bahwa Cina adalah negara pengguna energi terbesar di dunia, dan itu berarti Cina adalah penyumbang efek rumah kaca terbesar di dunia. Sejak laporan itu dirilis, dua bulan kemudian, pemerintah China mengambil tindakan dramatis dengan menutup lebih dari 2000 perusahaan yang dinilai sebagai penyebab polusi di negeri Tirai Bambu tersebut. Dari 2000 perusahaan, 762 di antaranya adalah korporasi yang bergerak dalam usaha pertambangan semen (*lihat* Bagan 1). Mengapa industri semen yang paling banyak ditutup? Tidak lain karena industri ini adalah penyumbang karbondioksida dan polusi udara (Hasanbeigi dkk. 2012).

108 *Lihat* www.economist.com. "Cement manufacturers: Cracks in the surface". 27 Agustus 2016.

Bagan 1

Perusahaan yang Ditutup Pemerintah Cina pada Tahun 2010

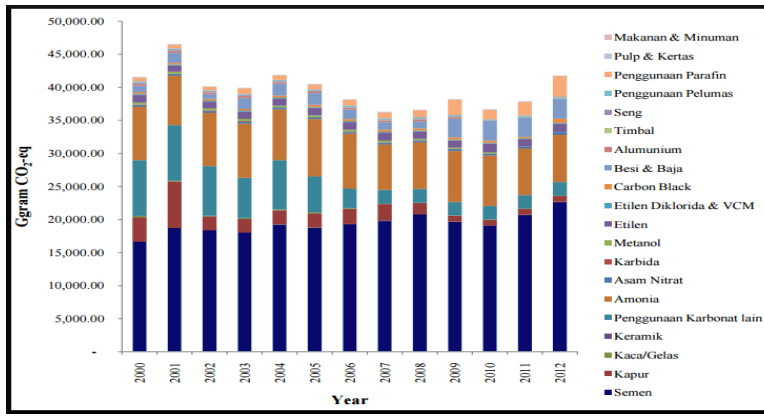


Sumber: dalam Falah dan Rahmadi (2015)

Tidak jauh beda dengan yang terjadi di Cina, dalam konteks industri di Indonesia sendiri, keberadaan industri semen juga menyandang titel sebagai penghasil gas rumah kaca paling tinggi di antara industri yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan nyaris separuh dari emisi gas rumah kaca di Indonesia dihasilkan dari aktivitas pabrik-pabrik semen.

Bagan 2

Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri Tahun 2000-2012

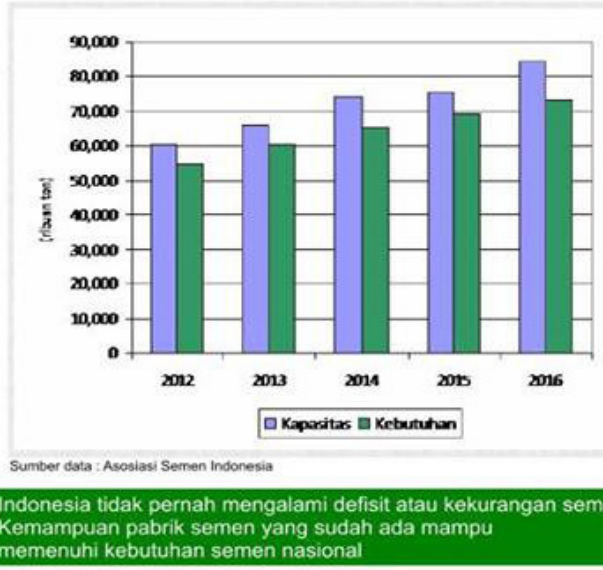


Sumber: Laporan Gas Rumah Kaca 2014,
Kementrian Lingkungan Hidup

Bagan 2 di atas secara jelas menunjukkan bahwa dalam 12 tahun terakhir, pemasok gas rumah kaca terbesar di Indonesia dihasilkan dari industri semen. Berkaca dari pengalaman di Cina maupun Indonesia, masyarakat umum akan dengan mudah mengerti bahwa industri semen memiliki andil serius pada pemanasan global. Dengan memakai kaca mata yang lebih luas, bisa dipahami bahwa tiadanya industri semen ternyata memiliki makna ramah terhadap lingkungan yang jauh lebih baik dibanding dengan adanya industri semen meski telah memakai teknologi ramah lingkungan secanggih apa pun.

Karena profil Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan Cina, maka para penolak tambang mengartikulasikan bahwa sudah selayaknya jika industri semen di Indonesia perlu dibatasi/dikurangi, bukan malah ditambah terus menerus. Nada sinis atas argumen ini mungkin akan dinegasikan karena anggapan pembangunan di Indonesia masih sangat membutuhkan produksi semen. Namun, jika dicermati data tentang produksi semen yang bisa diakses oleh publik, ternyata kapasitas produksi pabrik semen yang ada di Indonesia hingga hari ini telah mencukupi kebutuhan semen secara nasional.

Bagan 3
Perbandingan Kapasitas dan Kebutuhan Semen di Indonesia



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia diolah oleh A. B. Rodhial Falah

Data yang diolah dari Asosiasi Semen Indonesia di atas menunjukkan kenyataan bahwa Indonesia selalu mengalami surplus semen (*lihat* Bagan 3). Ini artinya, ekspansi terus menerus melalui pembangunan industri semen di berbagai wilayah sebenarnya berada dalam nalar pemenuhan pasar global atau untuk kepentingan ekspor ke luar negeri. Dengan kata lain, dipaksakannya produksi semen besar-besaran ini justru menunjukkan kenyataan bahwa ekspansi untuk mengejar produksi semen bermotif memenuhi kebutuhan semen negara lain, bukan dalam negeri. Hal ini tidak terkecuali yang dilakukan PT Semen Indonesia yang berstatus BUMN dengan 51,01% sahamnya milik negara—sisanya milik privat dan asing—, ternyata guna memenuhi kebutuhan pasar global.

Celah lain yang selama ini ditutupi adalah tidak adanya korelasi negatif antara eksistensi air dengan praktik pertambangan semen. Peneguhan makna tersebut secara berkebalikan justru berakibat terbukanya banyak persoalan yang muncul sebagai akibat industri semen. Hal ini bisa dilacak dengan melihat bagaimana operasi industri semen serta mempertimbangkan apa pengaruh industri semen terhadap sebuah kawasan karst yang merupakan bentang alam yang menjadi penopang cadangan air selama ini.

Untuk mencari penjelasan di atas, saya akan memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana air dipakai dalam operasional pabrik semen. Namun sebelum itu, saya perlu menceritakan sebuah kejadian terlebih dulu. Pada 28 Mei 2015 diadakan sebuah seminar bertema *Semen Indonesia: Model Pengelolaan Industri Semen yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Terkait Ekosistem*. Acara ini disponsori

oleh PT Semen Indonesia yang bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam acara tersebut, ada seorang mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan UGM yang mengajukan pertanyaan: "Berapa volume air yang digunakan untuk pertambangan semen di Rembang dan dari mana diperolehnya?" Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Agung Wiharto selaku perwakilan dari PT Semen Indonesia. Dia mengutarakan bahwa kebutuhan air untuk operasi pabrik semen di Rembang tidak banyak. Kebutuhan air terbanyak hanya untuk sanitasi dan operasional sehari-hari bagi pekerja, sedang airnya diperoleh dari air permukaan yang nantinya akan dibuat embung-embung seperti yang ada di Tuban.[109]

Jawaban Agung Wiharto di atas jelas sekali sedang menyembunyikan kenyataan sesungguhnya. Sebab, secara jelas dalam dokumen Amdal, Bab II, halaman 77, menjelaskan secara gamblang, "Untuk memenuhi kebutuhan air, digunakan sumber air tanah dengan jumlah pemakaian sekitar 2000 m^3 per hari atau setara dengan 23 liter per detik" (*lihat* Bagan 4). Jika kita lakukan perbandingan dengan rata-rata penggunaan air masyarakat Gunem sekitar 15-20 liter/hari/orang (Wacana, dkk 2015: 15), maka ditemukan kenyataan bahwa penggunaan air selama 5,5 jam pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang setara dengan satu hari penggunaan air seluruh warga di Kecamatan Gunem.[110]

---

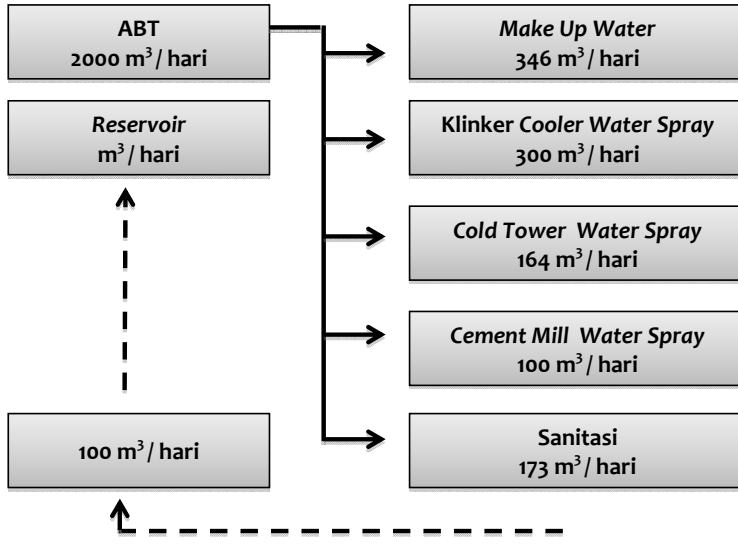
109 Saya hadir secara langsung sebagai peserta dalam acara seminar tersebut.

110 Jumlah warga di Kecamatan Gunem adalah 22.924 (Rembang Dalam Angka, 2012), maka penggunaan air yang digunakan selama 1 hari (1 hari=20 liter) berarti sekitar 460.000 liter/hari untuk seluruh orang di Kecamatan Gunem. Jika dilakukan perbandingan, penggunaan air pabrik

Kenyataan ini membantah dua penyataan Agung Wiharto dalam acara seminar tesebut. *Pertama*, air yang digunakan ternyata sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak dari konsumsi air seluruh warga dalam satu kecamatan per harinya. *Kedua*, konsumsi air terbesar ternyata bukan untuk sanitasi dan kebutuhan pekerja melainkan untuk operasional mesin/teknologi yang dipakai, serta air yang diperoleh bukan dari air permukaan, melainkan dari air tanah.

Bagan 4

Neraca Pemakaian Air PT Semen Indonesia di Rembang



Sumber: Dokumen Amdal PT Semen Indonesia 2012

semen sebesar 2 juta liter/hari dengan konsumsi air warga di seluruh Kecamatan Gunem sebesar 460.000 liter/hari, berarti: penggunaan air Pabrik Semen di Rembang selama 5,5 jam setara dengan 1 hari penggunaan air semua orang di Kecamatan Gunem.

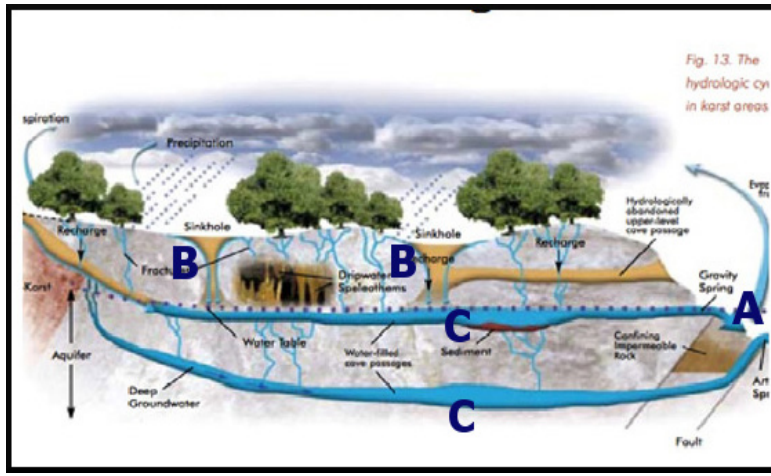
Kebohongan ini perlu dilakukan tidak lain untuk menutupi kenyataan bahwa industri semen memiliki dampak signifikan terhadap eksistensi air. Bagaimana pun juga, konsumsi air tanah yang sangat tinggi akan berdampak serius pada kondisi hidrologi wilayah di sekitarnya (Falah & Rahmadi 2015).

Kalkulasi dampak buruk bagi kondisi hidrologi ini menjadi makin problematis mengingat kawasan yang akan ditambang sebenarnya merupakan kawasan lindung geologi.[111] Kawasan tersebut lebih dikenal sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Oleh para geolog dan pengkaji lingkungan, kawasan ini biasanya disebut juga sebagai kawasan karst karena memiliki sistem hidrologi yang menyerupai karst (*lihat* Foto 3). Dalam aturan perundang-undangan, kawasan ini lebih dikenal sebagai kawasan imbuhan air, yang merujuk pada wilayah tempat air tanah memiliki satu kesatuan sistem yang saling berhubungan.

111 Yang disebut dengan kawasan lindung geologi ada tiga macam, yakni kawasan lindung karst, kawasan cagar alam geologi, dan kawasan imbuhan air. *Lihat* Perda Jateng No.20 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, pasal 30.

Foto 3

Ilustrasi tentang Kawasan Karst



Sumber: dicuplik dari beritaloka.com[112]

Foto di atas hanyalah ilustrasi sederhana tentang eksistensi kawasan karst, bukan visualisasi riil tentang kondisi di Rembang. Namun, dari ilustrasi ini, kita bisa mengerti bagaimana sesungguhnya karst dijelaskan. Secara sederhana, karst adalah sebuah sistem penampungan air yang menjadi penghubung sekaligus penyuplai berbagai mata air disekitarnya (dalam foto bertanda huruf A). Keberadaan kawasan karst ini dibuktikan dengan adanya beberapa mata air permanen dengan debit yang besar. Dalam konteks Rembang, hal ini dibuktikan dengan adanya

112 *Lihat* beritaloka.com, 5 Februari 2015. "Karst Pegunungan Sewu Rentan Pencemaran".

mata air permanen seperti Sumber Semen dan mata air Brubulan yang merupakan bagian tidak terpisah dari CAT Watuputih. CAT merupakan bank air yang memiliki fungsi menyimpan air dalam jumlah yang sangat besar. Ketika terjadi hujan, air hujan yang turun akan secara langsung masuk lewat pori-pori tanah dan tersimpan secara alami di cekungan air tanah. Air tersebut masuk melalui pipa-pipa alami yang biasa disebut *ponor* (dalam foto bertanda huruf B). Jika sebuah kawasan ditemukan banyak *ponor*, maka besar kemungkinan kawasan itu memiliki bank air yang besar di dalamnya. Selain ponor, kawasan semacam ini biasanya terdapat beberapa jenis goa basah. Keberadaan goa basah inilah yang mengukuhkan bukti adanya aliran air di dalam tanah, atau dikenal dengan sungai bawah tanah (dalam foto bertanda huruf C). Begitu juga dengan keadaan di sekitar CAT Watuputih, di sana ditemukan ada 64 gua, 125 sumber mata air, terdapat 28 titik ponor.[113]

Seiring dengan perjalanan waktu, kerjasama para petani dengan pihak-pihak lain terutama para peneliti gua dan ahli geologi membuat warga bisa memahami logika

113 Data ini dikutip dari Rilis JMPPK bertanggal 28 Juli 2016. Penggunaan data ini sengaja saya lakukan karena data inilah narasi yang hendak dibangun warga penolak tambang, sehingga merupakan jalinan makna yang dikehendaki warga untuk melakukan *counter* wacana. Dalam keragaman data, terdapat banyak perbedaan dari waktu ke waktu, baik yang disampaikan media massa, pemerintah, dan PT Semen Indonesia sendiri. Bahkan, di kalangan warga penolak sendiri, data ini sering berubah-ubah seiring dengan penemuan-penemuan baru yang dilakukan warga maupun peneliti lain.

bagaimana ekosistem karst bekerja. Pemahaman inilah yang memicu gugatan warga atas makna "aman tanpa perlu dikhawatirkan" dalam rencana pertambangan semen di Rembang. Mereka mulai memahami bahwa, bagaimanpun juga, kawasan karst memiliki sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pengeprasan batuan kapur maupun tanah liat di lapisan permukaan kawasan CAT Watuputih akan berpengaruh pada seluruh sistem hidrologi yang ada di bawahnya. Bila sistem hidrologi terganggu, kepastian pasokan air bagi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, ternak, dan lahan yang mereka kerjakan menjadi terganggu. Pemaknaan seperti ini menimbulkan banyak keresahan karena selama ini warga sekitar menggantungkan diri pada eksistensi air dari beberapa mata air tersebut. Tidak hanya itu, beberapa mata air besar bahkan digunakan untuk air PDAM dan kebutuhan warga di luar Kecamatan Gunem.

Selain memiliki dampak negatif pada alam dan lingkungan, hadirnya pertambangan semen skala besar juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan sosial. Kondisi ini terjadi manakala rasa aman dan tenteram warga mulai terusik oleh aktivitas *corporate social responsibility* (*CSR*) PT Semen Indonesia. Kenyataan ini tentu kontradiktif dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *CSR* digambarkan mendukung kondisi sosial-budaya yang ada dalam masyarakat, bahkan selalu memberi bantuan untuk menyejahterakan warga. Lebih jauh, PT Semen Indonesia telah mengklaim meningkatkan dana *CSR* menjadi 14

miliar.[114] Klaim-klaim tersebut seakan-akan menunjukkan aktivitas PT Semen Indonesia sangat baik. Padahal, dalam banyak hal aktivitas *CSR* inilah yang menggerogoti sendi kehidupan masyarakat di Rembang yang selama ini aman dan tenteram.

Foto 4

Bantuan CSR PT Semen Indonesia untuk 30 Unit Rumah Senilai 1 Miliar



Sumber: Suara Merdeka, 26 September 2015

Bagaimana nalar aktivitas *CSR* malah membuat ketidaktentraman dan mengancam sendi kehidupan masyarakat? Untuk membantu menjelaskan persoalan ini, kita perlu memakai kaca mata politik, yaitu penempatan

114 *Lihat* Suara Merdeka. (2015). "PT Semen Indonesia Targetkan CSR Rp 13,5 Miliar untuk Rembang". 26 September 2015.

CSR sebagai bagian dari pertarungan kuasa. Dengan cara demikian, makna *CSR* tidak lebih dari upaya politik bantuan yang berusaha melancarkan usaha-usaha meraih kekuasaan. Politik bantuan adalah sebentuk kegiatan amal (*charity*) berupa bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu (*cermati kembali* Tabel 5 dan 6, hlm. 92-93). Tujuan dari politik bantuan ini adalah mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu serta mengkapitalisasi kegiatan amal (*charity*) guna menciptakan citra "baik" bagi korporasi. Artinya, jika kelompok sasaran yang diberi bantuan tidak memberikan dukungan nyata, setidaknya pihak korporasi masih bisa mengkapitalisasinya melalui berbagai media untuk menarik simpati kalangan yang lebih luas.

Sasaran politik bantuan adalah pihak-pihak yang cenderung memberi dukungan atas pertambangan. Pemilihan kelompok sasaran dilakukan sangat selektif dan tidak memungkinkan adanya bantuan yang mengalir kepada kelompok penolak tambang. Tujuan dari politik bantuan, satu sisi adalah menciptakan "hutang balas budi" kepada pihak PT Semen Indonesia yang telah memberikan bantuan, di sisi lain pihak yang mendapatkan bantuan dikondisikan untuk memberikan dukungan terhadap rencana pertambangan. Namun, kenyataan ini justru memecah belah relasi sosial yang ada di masyarakat sebab *CSR* sebagai politik bantuan dalam perkembangannya menciptakan kelompok "pendukung tambang" di akar rumput.

Demikianlah kenyataan yang ada di Rembang, bahwa warga pendukung tambang adalah hasil ciptaan dari korporasi yang telah mendistribusi materi dan uang yang dibagikan kepada sekelompok warga saja.[115] Beberapa kali saya menemukan kenyataan yang memperlihatkan bahwa aksi-aksi demonstrasi yang mendukung pertambangan semen merupakan aksi-aksi bayaran.[116] Bahkan kegiatan-kegiatan yang nalarnya mendukung pertambangan nyaris seluruhnya digerakkan oleh gelontoran dana *CSR* tersebut. Berkaca dari pengalaman di Kabupaten Tuban, *CSR* dari PT Semen Indonesia juga pernah diprotes karena program-programnya tidak secara serius berkomitmen menyejahterakan warga terdampak, sebaliknya hanya melayani kepentingannya sendiri, seperti promosi dan kampanye.[117] Di titik ini, tidak ada aksi yang bersifat sukarela (*volunteer*) bagi para pendukung rencana pertambangan.

---

115 Bukan saja warga di sekitar pabrik, orang-orang yang sering menulis "kebaikan" PT Semen Indonesia di media online juga berada dalam nalar ini, yakni tulisan-tulisan yang mereka buat merupakan "balas budi" atas kebaikan diselenggarakannya acara *Wisata Green Industry*.

116 Saya pernah melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pernah terlibat dalam acara maupun demonstrasi yang mendukung pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia. Ada seorang anak perempuan masih duduk di bangku SMA mengaku melakukan demonstrasi di PTUN Semarang karena akan mendapat uang dan diajak rekreasi ke Semarang. Selain itu, ada juga seseorang yang diajak studi banding bersama pemerintah daerah Rembang. Sepulangnya dari acara, dirinya mendapat uang dan sembako. Cerita semacam ini sangat banyak saya jumpai saat proses dan setelah penelitian.

117 *Lihat* kabartuban.com,26 April 2012. "Warga Tuding PTSG Penjahat Lingkungan". *Lihat juga* lensaindonesia.com. 13 Juli 2013. "Komisi C

Hampir semua aktivitas dukungan tambang digerakkan oleh nalar transaksional akibat mendapatkan 'sesuatu' dari pihak PT Semen Indonesia. Sebaliknya, warga penolak tambang sering kali melakukan aksi demontrasi maupun acara-acara lainnya dengan merogoh uangnya sendiri secara iuran meski belakangan muncul berbagai kegiatan donasi untuk warga penolak tambang di berbagai kota.[118]

Kehadiran distribusi materi, baik berupa uang maupun barang (baju batik, payung, atau sembako), sebenarnya justru merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat desa secara perlahan-lahan. Desa Tegaldowo dan Timbrangan merupakan desa yang hingga saat ini masih memegang norma-norma kehidupan sosial seperti hidup guyup, gotong royong, dan solidaritas yang tinggi. Di desa ini, pemandangan hidup guyup mudah dijumpai, mulai dari *sambatan*[119] saat pindah rumah maupun saat panen raya.

---

tuding PT Semen Indonesia tak populis". *Juga* realita.co. 19 Maret 2015. "Dinsosnaker Tuding Semen Indonesia Hanya Peduli Promosi".

118 Saya beberapa kali menemani ibu-ibu Rembang untuk acara penggalangan dana di Yogyakarta. Komunitas Taring Padi dan musisi-musisi Yogyakarta pernah mengadakan penggalangan dana untuk ibu-ibu Rembang pada pertengahan Februari 2015. Saya juga pernah menghadiri pelelangan karya untuk amal yang diselenggarakan oleh Perempuan Indonesia Anti Korupsi pada 2 Mei 2015 di Bentara Budaya Yogyakarta (BBY). Penggalangan dana semacam ini juga terjadi di beberapa kota lain, seperti Semarang, Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya.

119 *Sambatan* dalam bahasa Jawa artinya berbagi tenaga untuk menyelesaikan urusan. Di dua desa yang saya teliti, praktik *sambatan* dilakukan saat ada keluarga akan pindah atau membangun rumah. Biasanya, kerangka rumah itu dipikul beramai-ramai dengan tetangga dan kerabat terdekat ke lokasi rumah baru. Semua yang terlibat dalam *sambatan* ini tidak diberi upah

Tidak hanya itu, saat *sedekah bumi*,[120] masing-masing keluarga petani akan mengumpulkan berbagai makanan untuk dihidangkan pada ritual doa bersama sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Namun, hadirnya PT Semen Indonesia yang masuk ke sendi-sendi kehidupan sosial warga menimbulkan kekacauan. Distribusi bantuan berupa materi ke sebagian warga desa, dalam kenyataannya menimbulkan kecemburuan sosial, saling curiga, hingga konflik-konflik antar tetangga bahkan sesama kerabat.

Selama proses penelitian, sering sekali saya menemukan cerita bagaimana kehidupan antar warga bergejolak. Ada warung kopi pro-tambang, ada juga warung yang tolak tambang. Ada seorang pemuda yang harus berseteru dengan mertua karena sang mertua telah dibujuk oleh pihak PT Semen Indonesia yang menjanjikan akan menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan, ada pemuda yang harus pisah ranjang dengan istri gara-gara sang istri termakan bujuk rayu dan dipekerjakan di salah satu koperasi milik PT Semen Indonesia. Tidak hanya itu, *sedekah bumi* yang biasanya

---

dalam bentuk uang. Praktik ini merupakan kebiasaan saling membantu yang melekat sejak lama dalam sejarah sosial kehidupan masyarakat di sana. Meskipun tidak saya pungkiri, praktik ini terlihat mulai luntur tergerus relasi transaksional antar indifidu.

120 *Sedekah bumi* merupakan acara syukuran atas hasil panen yang melimpah. Di dua desa ini, *sedekah bumi* biasanya dilakukan dengan doa bersama di sumber air terdekat dusun mereka. Pilihan melakukan doa bersama di dekat sumber air merupakan ekspresi dari rasa bersyukur mereka karena diberi limpahan air yang banyak sehingga kebutuhan pertanian dan kehidupan mereka sehari-hari selalu tercukupi.

dilakukan secara guyub dan gotong royong di masing-masing dusun, tiba-tiba menjadi ajang kecemburuan sosial dan saling curiga antar warga manakala salah satu dusun tertentu mendapat dana dari korporasi.

Atas Nama "Taat Aturan", Manipulasi Diperlukan

Dalam pembahasan bagian 4 diterangkan bahwa kebijakan proseduralis dan teknokratis telah dilangsungkan dengan baik dan benar sehingga tidak akan ada satu pun yang keliru. Ini berarti, secara simbolis kebijakan yang digulirkan untuk menyokong pertambangan semen diposisikan "pasti benar". Namun, ketika kenyataan yang ditemukan warga menunjukkan terjadi banyak manipulasi dalam kebijakan yang menyokong rencana pertambangan semen, maka kebijakan yang proseduralis dan teknokratis tersebut menjadi sebuah persoalan. Birokrat negara yang diposisikan sebagai pihak yang netral ternyata terbukti mengutak-atik regulasi sesuka hati mereka demi memuluskan kepentingan-kepentingan korporasi. Di sisi lain, para teknokrat yang terlibat dalam kebijakan terbukti memakai kedok "objektif dan ilmiah" guna menutupi berbagai kesalahan argumentasi yang mereka buat.

Seberapa jauh birokrasi yang diasumsikan netral mampu melaksanakan "ketaatan prosedur kebijakan" bisa ditelaah dengan melihat kesesuaian antara rencana pertambangan yang akan dilakukan PT Semen Indonesia dengan perangkat regulasi (prosedur) yang berlaku. Bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali kontradiksi dalam rencana pertambangan semen lantaran

ditemukan berbagai pertentangan dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Hal ini bisa dilacak dari tiga hal. *Pertama*, ketaatan pada regulasi pengelolaan lingkungan hidup. *Kedua*, ketaatan terhadap regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. *Ketiga*, ketaatan pada regulasi tentang perizinan.

Perlu diketahui bahwa area penambangan yang akan dilakukan oleh PT Semen Indonesia sesungguhnya beririsan persis dengan wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Adapun CAT Watuputih adalah kawasan yang secara tegas ditetapkan pemerintah sebagai kawasan yang memiliki fungsi konservasi lingkungan (*lihat* Tabel 8).

Tabel 8

Ketaatan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia dengan Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Regulasi	Poin dalam Regulasi	Kondisi di Rembang
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Penjelasan Pasal 57 (a)*: Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan konservasi sumber daya alam. Salah satunya adalah konservasi ekosistem karst.	CAT Watuputih memiliki ciri-ciri sangat kuat sebagai kawasan karst, bahkan memiliki ragam aneka hayati, baik tumbuhan dan satwa (*lihat* Wacana dkk 2015: 1-27).

Regulasi	Poin dalam Regulasi	Kondisi di Rembang
UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air	*Pasal 12 Ayat 2:* Pengelolaan air tanah di dasarkan pada cekungan air tanah (CAT).	CAT Watuputih di Rembang termasuk CAT yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden.
	Pasal 13 Ayat 1: Wilayah Cekungan Air Tanah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).	
	Pasal 13 Ayat 5: (Keppres) meliputi CAT satu kabupaten/ kota, CAT lintas kabupaten/ kota, CAT lintas provinsi, dan CAT lintas negara.	

Regulasi	Poin dalam Regulasi	Kondisi di Rembang
Keppres No.26/2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah	Penetapan kawasan Watuputih sebagai CAT berklasifikasi B, yakni jenis CAT lintas kabupaten.	CAT Watuputih berada di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.

Dari beberapa poin dalam tabel di atas, maka pemberian konsesi pertambangan di kawasan CAT Watuputih sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap upaya konservasi lingkungan. Dalam logika yang normatif sekali pun, seharusnya birokrasi sendiri yang mesti menjaga fungsi konservasi ini. Namun, demi kepentingan rencana pertambangan dan memberi jalan lapang bagi korporasi, ketentuan dalam regulasi pengelolaan hidup ini harus ditabrak. Tentu saja, sebagai konsekuensinya, negara juga harus mengingkari bahwa kenyataan ini adalah suatu pelanggaran.

Sedangkan apabila menilik regulasi RTRW, baik tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten, ternyata juga banyak yang mengalami perbenturan. Hal ini bisa dibaca dalam pemaparan tabel di bawah ini.

Tabel 9

Ketaatan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia dengan Regulasi Penataan Ruang

Lingkup	Regulasi	Isi	Kondisi Rembang
Nasional	UU No.26/ 2007 tentang Penataan Ruang	*Pasal 20 Ayat 1 (c):* Salah satu perencanaan pola ruang wilayah nasional adalah penetapan kawasan lindung nasional.	-
		Pasal 20 Ayat 6: RTRW diatur dengan peraturan pemerintah (PP).	
	PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	*Pasal 51 (e):* Salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi.	Survei LIPI dan KLH, yang dipaparkan Antung Deddy Radiansyah menegaskan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih memiliki fungsi lingkungan tinggi. Hal ini dikonfirmasi dari keberadaan puluhan mata air, gua, dan ponor yang menandakan eksistensi ekosistem karst.[124] Tidak hanya itu, di kawasan ini terdapat berbagai jenis kelelawar pemakan serangga (sekitar 490 jenis).
		Pasal 52 Ayat 5: Kawasan Lindung Geologi salah satunya adalah kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.	
		Pasal 53 Ayat 1 (b): Salah satu kawasan cagar alam geologi (pasal 52 ayat 5) adalah kawasan keunikan bentang alam. *Pasal 53 Ayat 3 (a):* kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah salah satunyaa dalah kawasan imbuhan air.	
		Pasal 60 Ayat 2(c & f): Kawasan keunikan bentang alam memiliki kreteria: bentang alam gua dan bentang alam karst.	

121 *Lihat* Kompas, 22 Oktober 2014. "Karst Rembang Punya Fungsi Lindung".

Lingkup	Regulasi	Isi	Kondisi Rembang
Provinsi	Perda Jawa Tengah No.6/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2011-2030	*Pasal 30:* Pola Tata Ruang Wilayah Provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.	Jika CAT Watuputih oleh Perda RTRW ditetapkan sebagai kawasan imbuhan air, artinya kawasan itu adalah kawasan lindung geologi. Itu menegaskan bahwa kawasan tersebut bukan kawasan budidaya, apalagi untuk usaha pertambangan.
		Pasal 31: Kawasan Lindung meliputi: (a) kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya, (b) kawasan perlindungan setempat, (c) kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, (d) kawasan rencana bencana alam, (e) kawasan lindung geologi, (f) kawasan lindung lainnya.	
		Pasal 60: Kawasan lindung geologi (pasal 30) terdiri: (a) kawasan lindung karst, (b) kawasan cagar alam geologi, (c) kawasan imbuhan air.	
		Pasal 63: Kawasan imbuhan air sebagaimana disebut pasal 60 (c), salah satunya adalah CAT Watuputih.	

Lingkup	Regulasi	Isi	Kondisi Rembang
Kabupaten	Perda No.14/2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031	*Pasal 19:* Kawasan lindung geologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 2 (f) berupa kawasan imbuhan air meliputi: Cekungan Watuputih, dan Cekungan Lasem.	CAT Watuputih jelas merupakan kawasan lindung geologi, dengan klasifikasi kawasan imbuhan air. Ini artinya CAT Watuputih merupakan kawasan konservasi.
		Pasal 27 Ayat 2: Peruntukan industri besar hanya terdapat di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Rembang, Sluke dan Gunem.	Berdirinya pabrik semen di Kecamatan Bulu menyalahi regulasi ini.
		Pasal 27 Ayat 2 (c): Kawasan Industri pertambangan seluas kurang lebih 205 ha berada di wilayah Kecamatan Gunem.	Amdal PT Semen Indonesia menyebutkan penggunaan lahan seluas 520 ha di Kecamatan Gunem, artinya melebihi ketentuan Perda RTRW Kabupaten Rembang.

Dengan membaca secara seksama regulasi RTRW, baik lingkup nasional, provinsi, hingga kabupaten, terlihat jelas bahwa rencana pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang secara keseluruhan melanggar ketentuan penataan ruang yang ada. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengeluarkan izin lingkungan, tampak bagaimana Perda RTRW Provinsi ditabrak begitu saja meski terdapat aturan yang menempatkan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung, bukan kawasan budidaya. Juga,

pemberian IUP oleh Pemda Rembang kepada PT Semen Indonesia menyalahi aturan mengingat konsesi yang diberikan tidak pada porsinya bahkan melebihi luasan yang telah ditetapkan Perda RTRW Kabupaten Rembang. Di titik ini, birokrasi yang dicitrakan bekerja netral tanpa ada kepentingan, tampak sangat kontradiktif. Birokrasi yang diklaim sebagai penjaga ketaatan aturan, secara jelas dan nyata melakukan pelanggaran demi kelancaran rencana pertambangan semen di Rembang.

Sekarang, mari kita cermati bagaimana ketaatan birokrasi dalam menjalankan regulasi perizinan. Ada tiga hal yang bisa kita amati. *Pertama*, bagaimana ketaatan birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada regulasi-regulasi tentang pengesahan Amdal. *Kedua*, bagaimana perilaku birokrasi Kabupaten Rembang dalam mengeluarkan izin-izin pertambangan. *Ketiga*, bagaimana proses tukar guling lahan untuk kebutuhan pabrik semen dilakukan.

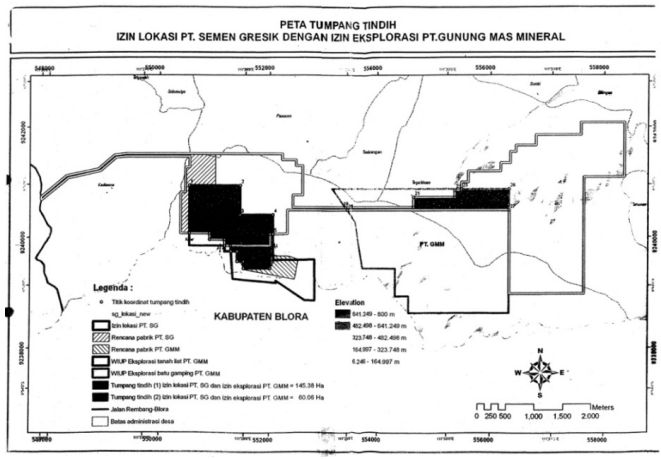
Sebagai ulasan pertama, dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dijelaskan pada Pasal 4 Ayat 3 bahwa "Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa". Sekarang, bandingkan dengan bahasan sebelumnya, bahwa rencana pertambangan semen di Rembang terbukti secara jelas menabrak nyaris seluruh regulasi tata ruang mulai dari RTRW nasional, provinsi, hingga kabupaten. Namun, kenyataan berbicara lain. Dokumen Amdal tetap disahkan bahkan diikuti dengan penerbitan izin lingkungan dari BLH Provinsi Jateng. Hal

ini menunjukkan adanya ketidak-taatan birokrasi dalam mengikuti aturan dalam pengesahan Amdal.

Untuk ulasan *kedua*, terdapat data spesifik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang yang menunjukkan bahwa izin lokasi eksplorasi baik untuk tanah liat maupun batu gamping mengalami tumpang tindih perizinan (*lihat* Foto 5). Tumpang tindih antara PT Semen Indonesia dengan PT Gunung Mas Mineral atas lokasi eksplorasi tanah liat mencapai 145,38 ha, sedangkan untuk eksplorasi batu gamping mencapai 60,06 ha. Hal ini bisa dilihat dalam foto di bawah ini.

Foto 5

Peta Tumpang Tindih Izin Lokasi Izin Eksplorasi di Rembang



Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang

Masyarakat tidak pernah tahu bahwa ada pengajuan izin rencana pertambangan semen oleh PT Gunung Mas Mineral

(GMM). Menurut Pengumuman Kepala Badan Lingkungan Hidup yang saya temukan,[122] sosialisasi dan pengajuan saran atau masukan dari masyarakat kepada pemerintah maksimal bisa dilakukan sampai 10 Januari 2013. Namun, sampai sekarang (Mei 2016) masyarakat di desa Tegaldowo dan Timbrangan tidak ada yang pernah mengetahui bahkan sekadar mendengar perihal permohonan izin PT GMM ini. Jika pun ada yang tahu, kemungkinan hanya segelintir aparat desa yang dengan sengaja tidak pernah membuka pembicaraan ini kepada warganya.[123] Nalar partisipasi elitis dan tertutup semacam ini bukan semata karena negara tidak taat prosedur, melainkan lebih karena kepentingan birokrasi negara agar tidak terganggu kepentingannya andaikan sosialisasi dibuka luas. Sebab, jika sosialisasi dilakukan secara menyeluruh, adanya tumpang tindih perizinan ini akan memperbesar jurang dislokasi lain yang dicitrakan baik-baik saja.

Sedangkan perihal *ketiga*, proses tukar guling lahan antara Perhutani dan PT Semen Indonesia ternyata dilakukan secara manipulatif bahkan koruptif. Pada 22 April 2013, Kementerian Kehutanan memberikan

122 Surat pengumuman ini bernomor seri: 660.1/487/2013.

123 Saya beberapa kali melakukan *cross check* informasi tentang permohonan izin PT GMM kepada warga, tetapi tidak ada yang tahu tentang persoalan tersebut. Bukan hanya itu saja, selama puluhan tahun sebelumnya, perihal pemberian izin operasi pertambangan skala kecil yang ada di desa Tegaldowo, tidak ada masyarakat yang tahu bagaimana proses perizinannya. Mereka meyakini, hanya beberapa aparat desa saja yang tahu, sedangkan warga sengaja tidak pernah diberitahu apa pun soal kehadiran izin-izin pertambangan selama ini.

persetujuan atas tukar menukar kawasan hutan untuk PT Semen Indonesi melalui Surat Kementerian Kehutanan No S.279/Menhut-II/2013. Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa kawasan yang diizinkan adalah hutan Mantingan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, tepatnya di Desa Kajar dan Desa Pasucen.[124] Namun praktik penebangan hutan oleh PT Semen Indonesia justru dilakukan di hutan Kadiwono Kecamatan Bulu. Terlebih, dalam RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan bagi kawasan industri besar. Tindakan ini secara jelas melakukan manipulasi dari ketentuan yang telah ditetapkan regulasinya. Proses manipulasi ini jelas tidak akan bisa dilakukan tanpa persetujuan Perhutani yang *notabane*-nya adalah pengelola kawasan itu.

Tidak saja menyalahi ketetapan hutan mana yang boleh ditebang, PT Semen Indonesia juga melakukan pelanggaran dalam proses tukar menukar kawasan hutan. Dalam Permen Kehutanan RI No. P.27/Menhut-II/2014 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, pasal 1 ayat 7, dijelaskan bahwa tukar menukar harus mengikuti prinsip kepentingan umum terbatas, yakni "kepentingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan".[125] Padahal, PT Semen Indonesia jelas korporasi bisnis yang bertujuan untuk menarik keuntungan

124 *Lihat* hijauku.com, 16 Juni 2014. "Warga Rembang Tolak Pabrik Semen".

125 Garis bawah dari penulis.

melalui bisnis pertambangan semen, terlebih produksinya digunakan untuk kebutuhan ekspor.

Selain itu, dalam Permen yang sama tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, dalam Pasal 6 (e) dijelaskan bahwa lahan pengganti yang digunakan sebagai tukar menukar kawasan hutan diharuskan "tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan". Dalam praktiknya, PT Semen Indonesia menyediakan lahan pengganti di desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal yang menyimpan permasalahan status yang pelik di dalamnya. Jika dirunut secara singkat, lahan pengganti seluas 127 ha di Surokonto Wetan itu sejatinya adalah tanah negara. Pada 1972, PT Sumurpitu Wringinsari mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) dan dikabulkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria Nomor: SK. 16/HGU/DA72 tanggal 13 Oktober 1972. HGU ini berlaku sampai 31 Desember 1997 dengan status tanah sebagai tanah negara yang hak pengelolaan adalah PT Sumurpitu Wringinsari. Pada 1999, PT Sumurpitu Wringinsari mengajukan perpanjangan dan disetujui melalui SK Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: SK/540.2/005/7/504/33/1999 tanggal 20 Februari 1999. HGU ini pun berlaku hingga 31 Desember 2022. Perpanjangan ini tentunya masih berstatus HGU, bukan hak milik.

Namun anehnya kemudian, pada 2012, PT Sumurpitu Wringinsari melakukan penjualan saham yang pola penjualannya tidak lazim, yakni saham dijual dengan standar ukur berupa tanah per meter persegi seharga Rp

20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bukan dijual per lembar dengan ukuran nilai rupiah tertentu sebagaimana lazimnya jual beli saham. Bisa ditebak siapa yang membeli saham ini, yakni PT Semen Indonesia yang membelinya sebesar 75 milliar. Dengan jumlah tersebut, maka PT Semen Indonesia berhak mendapatkan HGU seluas 400 hektar lahan yang sebelumnya dipakai PT Sumurpitu Wringinsari. Kejadian berikutnya juga mudah ditebak, PT Semen Indonesia melakukan tukar guling lahan itu kepada Perhutani Kendal sebagai ganti lahan Perhutani yang menjadi pabrik semen di Rembang.[126]

Adakah sesuatu yang manipulatif dari kejadian di atas? Beberapa hal berikut bisa menjelaskan. *Pertama*, sejak kapan jual beli saham didasarkan pada luas lahan, bukan menurut ukuran lembar saham. *Kedua*, sejak kapan status tanah itu menjadi hak milik perusahaan, baik PT Sumurpitu Wringinsari, kemudian PT Semen Indonesia, dan terakhir Perhutani. Bagaimanapun juga, status hak milik tanah ini adalah tanah negara. Artinya, merujuk pada Pasal 6 (e) Permen tentang tukar menukar kawasan hutan, pengalihan lahan antar korporasi ini jelas tidak sah. Andaikan ketiga korporasi itu (PT Sumurpitu Wringinsari, PT Semen Indonesia dan Perhutani) mengklaim hanya mengalihkan HGU saja, maka tetap ada penyelewengan regulasi, yakni menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Peraturan Umum Agraria pasal 28 ayat (1), dan dipertegas ulang dalam PP No. 40 tahun 1996 pada pasal 14 ayat (1), bahwa HGU hanya diberikan untuk perusahaan

126 Kronologi lebih lengkap bisa dibaca di Saragih & Aziz (2016).

pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan. Padahal, PT Semen Indonesia jelas bergerak dalam usaha pertambangan, bukan pertanian dan sejenisnya itu.

Keanehan lain kembali terjadi ketika warga Surokonto Wetan yang sebelumnya pernah mengadu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi dan pemufakatan jahat antarkorporasi kini malah dikriminalisasikan atas tuduhan pembalakan liar, penyerobotan lahan dan permufakatan jahat. Padahal, dalam sejarah sosial masyarakat Surokonto Wetan, sejak dahulu lahan itu telah dikelola oleh warga bahkan sejak masa kolonial.[127] Ketika PT Sumurpitu Wringinsari menelantarkan lahan-lahan ini, warga Surokonto yang merawatnya. Sudah jatuh tertimpa tangga, para petani yang terancam kehilangan lahan garapan itu kini malah dituduh sebagai kriminal yang menyerobot lahan. Kenyataan kriminalisasi ini memang bukan barang baru bagi PT Semen Indonesia. Jika dirunut dari awal, sejak PT Semen Indonesia berencana membangun pabrik semen baru, telah terjadi kriminalisasi atas sekitar 12 petani, yakni sembilan petani asal Pati pada tahun 2009, dan tiga petani dari Kendal pada 2016. Sebaliknya, aduan kekerasan terhadap ibu-ibu Rembang pada 2014 hingga kini tidak pernah ada kejelasannya di kepolisian.

Dari uraian panjang di atas, secara jelas terlihat bagaimana proseduralisme berjalan bukan dalam makna normatif yang netral dan bebas dari kepentingan. Sebaliknya, birokrasi dan seluruh jajaran elite negara serempak

127 *Ibid.*

memanipulasi dan mengutak-atik aturan yang berlaku agar sesuai dengan kepentingan (pesanan) pihak-pihak yang terlibat dalam rencana pertambangan semen. Karena itu, proseduralisme tidak lagi bisa dibaca sebagai sesuatu yang apolitis, tetapi sebaliknya sangat politis dan sarat akan pertukaran kepentingan. Dengan mencermati berbagai cerita di atas, bisa dikatakan bahwa justru atas nama prosedur-lah pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan.

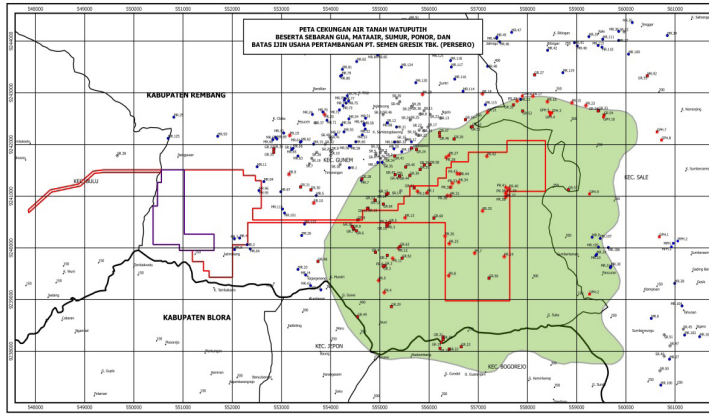
Sekarang saya akan mencoba membahas bagaimana teknokratisme berlangsung. Untuk menjelaskan hal tersebut, pertama yang perlu dilakukan adalah melihat sejauh mana dokumen Amdal dikerjakan. Dalam pembahasan Bagian 4 telah disinggung bagaimana teknokratisme dikerangkai dalam sifatnya yang "objektif dan ilmiah". Di bagian ini, akan ditunjukkan bagaimana detail-detail dari praktik yang disebut "objektif dan ilmiah" dalam kenyataannya di lapangan. Untuk memantik diskusi ini, ada sebuah pertanyaan penting yang bisa diajukan, yakni: "Mengapa tidak ada penjelasan sama sekali—baik dalam dokumen Amdal maupun dalam pernyataan para ilmuwan pendukung tambang—tentang posisi pasti dari Cekungan Air Tanah Watuputih?"

Pertanyaan tersebut menjadi kunci untuk menuntun kita dalam memahami mengapa para ilmuwan yang menyusun Amdal PT Semen Indonesia sengaja menyembunyikan kenyataan bahwa area penambangan itu sebenarnya adalah kawasan CAT Watuputih. Ada beberapa hal yang menurut saya sengaja disembunyikan dalam dokumen Amdal. *Pertama*, tidak ditemukan satu penjelasan pun tentang irisan antara kawasan CAT Watuputih dan

lokasi pertambangan. Ketidakjelasan ini sengaja dilakukan untuk mengaburkan fakta bahwa area pertambangan dan CAT Watuputih merupakan kawasan yang sama. *Kedua*, klaim bahwa di area pertambangan tidak terdapat goa dan mata air adalah dalih menyembunyikan kenyataan adanya ancaman kerusakan terhadap ekosistem CAT Watuputih. Kedua argumen itu bisa dilihat melalui perbandingan peta yang dibuat PT Semen Indonesia (*lihat* Foto 1, hlm. 88) dengan peta yang dibuat warga bersama para peneliti speleologi di bawah ini.

Foto 6

Peta Rencana Pertambangan
Versi Warga Penolak Tambang



Sumber: dokumen ASC, 2013

Sekarang coba kita lakukan sebuah perbandingan tentang perbedaan antara peta yang dibuat PT Semen Indonesia (*lihat* Foto 1, hlm. 88) dengan peta di yang dibuat warga bersama ahli speleologi (Foto 6). *Pertama*, mari

melihat irisan CAT Watuputih dengan lokasi pertambangan. Dari sekian banyak peta dalam dokumen Amdal, tidak ada gambaran maupun penjelasan sedikitpun tentang irisan CAT Watuputih dengan lahan yang akan ditambang. Ini berbeda dengan peta buatan *Acintyacunyata Speleological Club* (*ASC*) yang dengan gamblang menunjukan posisi antara CAT Watuputih dan rencana lokasi pertambangan sebagai area yang sama/beririsan. Adanya perbedaan ini terjadi karena para ahli yang dipekerjakan PT Semen Indonesia hendak mengaburkan kenyataan bahwa rencana pertambangan yang akan dilakukan berada persis di kawasan lindung geologi. Hingga saat ini pun, saya sama sekali belum pernah mendengar adanya pengakuan tentang irisan ini, entah itu dari pejabat negara, pihak PT Semen Indonesia, ataupun para ilmuwan yang mendukungnya.

Untuk perbandingan kedua, di peta versi PT Semen Indonesia (Foto 1, hlm. 88) mengesankan bahwa lokasi pertambangan sudah dipilah sedemikian rupa sehingga tidak merusak ekosistem. Hal ini ditunjukkan melalui kosongnya keterangan gua, mata air, dan ponor di dalam area pertambangan. Sedangkan dalam peta versi *ASC* (Foto 6), terlihat secara jelas keberadaan sebaran ponor dan gua yang begitu banyak. Perbedaan peta versi PT Semen Indonesia dengan peta versi *ASC* hanya bisa dijelaskan dengan kacamata politik kepentingan. Sebab, kepentingan utama PT Semen adalah terbentuknya pemaknaan tentang rencana pertambangan yang tidak mengganggu ekosistem, baik di permukaan maupun di bawah tanah kawasan CAT Watuputih.

Adanya kenyataan manipulasi tersebut baru didasarkan pada pengamatan terhadap perbedaan peta saja, sedangkan dalam diskusi keilmuan geologi, persoalan ini jauh lebih rumit lagi. Dalam ilmu geologi, pemodelan atau peta hanyalah satu dari sekian bentuk interpretasi, bukan kenyataan sesungguhnya atas eksistensi alam. Bosman Batubara, yang juga seorang geologis pernah melakukan sanggahan atas kesaksian ilmuwan-ilmuwan PT Semen Indonesia dalam Sidang PTUN yang dianggap memberikan kesaksian manipulatif dalam persoalan ilmu geologi (*lihat* Batubara 2015: 55-64). Baginya, terdapat cacat bawaan dari kesaksian Eko Haryono (dosen Fakultas Geografi UGM) dan Heru Hendrayana (dosen Teknik Geologi UGM) dalam kesaksian di sidang gugatan lingkungan antara warga Rembang dengan PT Semen Indonesia. *Pertama*, asumsi peta atau model sebagai kenyataan yang 'pasti' jelas menyalahi asas kebiasaan dalam ilmu geologi. *Kedua*, argumen kedua ilmuwan UGM itu menyatakan bahwa batu yang akan ditambang PT Semen Indonesia tidak mengandung sumber air jelas manipulasi fakta. Sebab, selain area itu ditetapkan sebagai CAT, di sana juga terdapat banyak sekali penopang sistem hidrologi alam, seperti ponor dan gua basah. Batubara (2015) mengutip berita Kompas bertanggal 16 Agustus 2014:

> Djumadi menyatakan bahwa Amdal PT SI [Semen Indonesia] tidak sesuai fakta. Ketidaksesuaian ini misalnya terlihat dari Amdal yang menyebutkan bahwa di kawasan ini hanya ada 9 gua, padahal dirinya menemukan 49 goa, dengan 4 diantaranya memiliki sungai bawah tanah. Ketaksesuaian kedua terletak

> pada keterangan dalam Amdal yang menyebutkan Goa Megah berkedalaman 115 m merupakan goa kering. Padahal menurut Djumadi kedalamannya hanya 20 m dan memiliki sungai bawah tanah. (Batubara 2015: 67)

Cacat *ketiga*, kenyataan bahwa Amdal menerangkan adanya beberapa ponor di wilayah IUP jelas dengan sendirinya menyanggah argumen kedua akademisi UGM yang menyatakan batuan di Rembang tidak mengandung air. Sebab air yang masuk (melalui ponor) dan air yang keluar (melalui mata air) adalah satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Artinya, argumen tiadanya sumber air di batuan yang akan ditambang adalah manipulasi akademik yang dilakukan kedua saksi PT Semen Indonesia saat itu, yakni Eko Haryono dan Heru Hendrayana.

Mengapa sesuatu yang "objektif dan ilmiah" mesti melakukan praktik manipulatif? Hal ini sulit dipahami jika tidak menggunakan kaca mata politik. Maksudnya, membaca 'praktik berilmu' harus juga mendudukkan pertarungan kuasa yang terjadi di dalamnya. Untuk memahami persoalan ini, perlu kita menengok kejadian lain yang pernah terjadi sebelumnya, yakni ketika geger kalangan ilmuwan dalam melihat fenomena bencana lumpur Lapindo yang muncul di Sidoarjo. Ketika luapan lumpur menenggelamkan puluhan desa di Sidoarjo, banyak pernyataan para ilmuwan di media massa bahkan dalam seminar-seminar di Indonesia menyatakan bahwa penyebab luapan lumpur tersebut adalah akibat gempa bumi Yogyakarta (2006). Hal ini merujuk pada temuan Tim Investigasi yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Geologi

Indonesia (IAGI) sebelumnya. Namun, tim yang terdiri dari ahli geologi ini pada kenyataannya ternyata sangat sarat manipulasi dan tarik menarik kepentingan.

> Kemunculan wacana kedua [*mud volcano*] ini sarat dengan nuansa politis dan manipulasi sejak awal kemunculannya. Wacana *mud volcano* ini pertama kali muncul sebagai publikasi penelitian Tim Investigasi Semburan Lumpur IAGI pada akhir 2006. Anggota tim 'Investigasi Semburan Lumpur IAGI' ini dilakukan oleh 3 ahli geologi yaitu; Bambang P. Istadi, Edi Sunardi, Soffian Hadi. Nuansa manipulasi mulai tercium karena ternyata belakangan publik baru tahu jika Bambang P. Istadi adalah ahli geologi dari PT Lapindo Brantas Inc (Gustomy 2012: 62).

Terkuaknya kebohongan dalam 'praktik berilmu' para geolog tentang wacana *mud vulcano* (lumpur akibat gempa) menjadi semakin tampak pada konferensi *American Association Petroleum Geologis* pada Oktober 2008 di Cape Town, Afrika Selatan. Dari 74 geolog yang mengikuti konferensi, hanya tiga ilmuwan yang menyatakan munculnya lumpur akibat gempa. Dari tiga ilmuwan itu, dua di antaranya berasal dari Indonesia yang ternyata juga merupakan bagian dari kepentingan perusahaan yang saat itu dimiliki oleh salah satu menteri di Republik Indonesia (Gustomy 2012: 65).

Belajar dari kasus lumpur Lapindo sebelumnya, tidak mengherankan jika dalam praktiknya penyusunan Amdal PT Semen Indonesia sarat dengan praktik manipulasi. Penegasan adanya manipulasi dalam 'praktik berilmu' semakin jelas ketika pihak Rektorat UGM memberikan

sanksi kepada Eko Haryono dan Heru Hendrayana selaku dosen UGM yang dianggap memberi kesaksian yang tidak sesuai dengan asas kepatutan saksi ahli, seperti memberikan kesaksian yang mengarahkan pada kesimpulan tertentu meski keduanya sama sekali tidak melakukan penelitian langsung di lapangan.[128] Hal semacam ini bisa sering terjadi karena penelitian untuk menyusun Amdal sepenuhnya dibiayai oleh pemrakarsa, yakni PT Semen Indonesia itu sendiri. Termasuk, siapa ilmuwan yang terlibat pun biasanya ditentukan oleh pemrakarsa. Sedangkan para ilmuwan yang dilibatkan tentu saja mendapat bayaran yang besar untuk mengerjakan proyek penelitian yang hasilnya nanti digunakan untuk mendukung kepentingan korporasi.

Catatan Penutup

Pembahasan bagian ini adalah deskripsi dari upaya dekonstruksi yang menggugat seluruh makna yang ditetapkan negara (dan korporasi) dalam membentuk hegemoni pembangunan berbasis pertambangan. Gugatan ini persis terjadi dalam wacana kesejahteraan yang ternyata tidak mampu menjadi imaji sosial bagi para petani. Makna kesejahteraan yang dibangun atas dasar mitos "tambang untuk kesejahteraan" ternyata tidak berhasil bertransformasi secara simbolis sebagai realitas yang dihadapi warga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan

128 Lihat *Tribun Jateng*, 15 April 2015. "UGM Beri Sanksi Dua Akademisinya Terkait Kasus Rembang".

bahwa makna yang dibangun dalam wacana kesejahteraan mengalami dislokasi baru.

Munculnya dislokasi sosial dari struktur wacana yang dibentuk negara ini membuka kelindan makna yang selama ini ditutupi. Sedimentasi makna bahwa *green industry* merupakan pilihan yang tepat untuk mengelola sumber daya terbukti menyisakan berbagai ancaman kerusakan, baik terhadap eksistensi lingkungan dan alam, maupun kerusakan sendi-sendi sosial yang telah terbangun sebelumnya. Tidak hanya itu, bekerjanya prosedduralisme dan teknokratisme sebagai jalan yang "aman dan tidak perlu dikhawatirkan" ternyata dipenuhi dengan praktik-praktik manipulatif yang dilakukan semata demi melapangkan proses terselenggaranya pertambangan skala besar di Rembang. Akibatnya, wacana kesejahteraan mengalami berbagai dislokasi yang justru membuka ruang antagonisme warga untuk menolak rencana pertambangan.

BAGIAN 6

ANTAGONISME MENOLAK PERTAMBANGAN

"Tanah kami memang kering, Mas, tapi sangat subur jika ditanami, selain itu hasilnya pun melimpah. Hasil dari pertanian kami sudah sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari kami. Jadi, janji-janji kesejahteraan seperti apa yang akan diberikan Semen Indonesia maupun pemerintah pada kami. Padahal, kami sudah sejahtera."

(Joko Prianto)[129]

*"Pertambangan tidak terbukti mampu menghidupi beberapa generasi, bahkan dampaknya (negatif-*pen*) dirasakan anak-cucu. Sedangkan pertanian mampu menghidupi bangsa ini beberapa generasi dan anak cucu".*

(Gunretno)[130]

---

129 Pernyataan ini dikutip dari Hidayatullah (2016: 87). Ketika saya sedang melakukan penelitian, di waktu bersamaan Hidayatullah juga sedang melakukan penelitian di Rembang untuk kebutuhan skripsinya.

130 Pernyataan ini disampaikan Gunretno dalam acara diskusi "Dibalik Polemik Pembangunan Pabrik Semen", pada Minggu 7 Agustus 2016 di Jakarta.

Joko Priyanto adalah pemuda asal Desa Tegaldowo. Sehari-hari dirinya bekerja sebagai petani tembakau. Dia adalah orang yang bisa dibilang sejak awal tidak pernah percaya dengan janji kesejahteraan yang diiming-imingkan dari rencana pertambangan di Rembang. Tanah yang ia miliki saat ini sudah dipercaya mampu menghidupi dirinya, bahkan sejak beberapa generasi sebelumnya. Lebih jauh, Gunretno, *Sadulur Sikep* asal Sukololi Pati —salah satu petani yang dulunya menggagalkan rencana pendirian pabrik semen di sana— membuat sebuah perbandingan yang sangat kontras. Kehidupan melalui usaha pertanian yang digeluti kaum petani terbukti telah menyejahterakan, tidak saja bagi orang per orang, tetapi juga bagi anak cucu dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, belum ada bukti nyata bahwa pertambangan mampu menghidupi sebuah generasi tertentu di Indonesia.

Tiadanya imaji sosial (*social imaginary*) dalam memahami kesejahteraan melalui usaha pertambangan menjadikan petani melakukan gugatan atas makna-makna yang disematkan negara selama ini. Wacana kesejahteraan yang diusung negara tidak mendapat pijakan bagi kehidupan para petani. Sebaliknya, mereka semakin terancam atas kehadiran rencana pertambangan itu. Hal ini mengakibatkan munculnya antagonisme warga yang berusaha merebut formasi wacana kesejahteraan. Mereka tidak saja mendekonstruksi formasi wacana yang dibentuk negara sebelumnya, tetapi juga membangun formasi wacana kesejahteraan yang sama sekali berbeda sebagaimana dikehendaki negara melalui rencana pertambangan.

Hal ini terekspresikan secara nyata dalam perjuangan petani mempertahankan tanah dan airnya sendiri. Untuk itu, bagian ini akan mengupas bagaimana antagonisme terwujud dalam berbagai praktik artikulasi para petani dalam mendefinisikan tanah dan airnya sebagai sumber kehidupan sekaligus jalan kesejahteraan.

Bertani sebagai Jalan Kesejahteraan

Hadirnya dislokasi dari wacana kesejahteraan yang dibangun negara—sebagaimana dijelaskan pada Bagian 5—akhirnya membuka ruang artikulasi lain dari kalangan warga/petani. Kenyataan industri pertambangan yang coba dipaksakan negara di tengah-tengah kawasan pertanian milik warga memicu subversi makna dari akar rumput. Hal inilah yang menciptakan antagonisme yang diekspresikan dalam berbagai perjuangan politik di kalangan petani. Mereka membangun dan mengonsolidasi perjuangannya guna mematahkan hegemoni negara sekaligus membangun hegemoni tandingan . Hal ini bisa dilacak dari menguatnya makna "bertani sebagai jalan kesejahteraan".

Bertani atau pertanian sebenarnya merupakan soko kehidupan bagi sebagian besar warga di Rembang. Hal ini secara jelas terlihat dari hampir separuh warganya menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian.

Tabel 10

Jumlah Penduduk (usia 15 th ke atas) Berdasarkan Lapangan Kerja

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (jiwa)
Pertanian	145.046
Industri (manufaktur)	18.247
Konstruksi	18.273
Pertambangan dan galian, listrik, gas dan air bersih	1.305
Perdagangan	60.531
Transportasi	8.868
Keuangan	3.361
Jasa	55.162
Total	310.793

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2014, dalam "Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang", hlm. 7

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tiga sektor usaha terpenting yang digeluti warga Rembang sehari-hari, yakni pertanian, perdagangan, dan jasa. Jika sektor pertanian merupakan usaha yang paling dominan di sana, maka sektor pertambangan adalah usaha yang paling sedikit yang digeluti masyarakat di Rembang.

Setali tiga uang dengan kondisi di Rembang secara umum, penduduk di sekitar wilayah beroperasinya PT Semen Indonesia juga memiliki profil yang tidak jauh berbeda. Di Desa Tegaldowo misalnya, dari jumlah

penduduk 4.764 jiwa, sebanyak 3.268 di antaranya berprofesi sebagai petani. Dengan kata lain, hampir 70% warga Desa Tegaldowo menggantungkan hidup pada usaha pertanian. Selain bekerja sebagai petani, secara bersamaan beberapa di antara mereka juga beternak sapi dan kambing. Tercatat ada 557 orang yang memiliki ternak sapi sebanyak 971 ekor, dan 156 orang memiliki ternak kambing sebanyak 572 ekor (Hidayatullah 2016: 87).

Secara umum, terdapat dua jenis lahan pertanian di sana, yakni sawah dan tegalan. Sawah memiliki karakteristik tanah basah, sedangkan tegalan memiliki karakteristik tanah kering. Namun kedua jenis lahan ini hampir seluruhnya merupakan lahan tadah hujan, baik sawah maupun tegalan. Ketiadaan aliran sungai besar di wilayah itu menjadikan sistem tadah hujan yang paling mungkin untuk diterapkan. Meski demikian, adakalanya jika musim penghujan tidak kunjung datang, petani akan mengangkat air dari sumur/mata air ke area pertanian baik secara manual (dengan timba) maupun menggunakan mesin diesel. Pertanian tadah hujan merupakan jenis pertanian dengan perspektif 'bersiasat dengan musim'. Maksudnya, penentuan waktu, jenis tanaman, dan lain sebagainya sangat bergantung pada perkiraan adanya musim penghujan.

Sedangkan dari segi kepemilikan, ada beberapa jenis lahan pertanian di desaTegaldowo maupun Timbrangan. *Pertama*, lahan pertanian milik Perhutani yang oleh

masyarakat sering disebut dengan tanah *persil*.[131] Sejak lama telah terjadi hubungan mutualisme antara petani dengan Perhutani. Perhutani mendapat keuntungan karena pemeliharaan tanaman jati sejak bibit hingga dewasa dikerjakan oleh petani. Sebaliknya, petani boleh menggunakan sisa dari ruas lahan tanaman jati untuk ditanami produk pertanian. Hubungan ini telah berlangsung sejak lama meski kini polanya berubah menjadi sewa-menyewa: petani harus menyewa lahan ke Perhutani jika ingin menggunakan tanah persil.[132] *Kedua*, tanah milik pribadi yang diperoleh dari proses turun temurun. Bukti kepemilikan tanah ini hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bukan sertifikat tanah. *Ketiga*, tanah bengkok, yakni tanah yang digunakan oleh para perangkat desa guna mengganti gaji jabatan yang diembannya.

---

131 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanah *persil* sebagai tanah sewa (75 tahun). Adapun dalam kenyataan sehari-hari—yang saya temukan bahwa—petani di Gunem menyebut tanah persil dengan merujuk pada tanah milik Perhutani, yang dipakai oleh warga melalui mekanisme menyewa. Sedangkan lama dan biaya sewa bergantung pada kesepakatan penyewa dengan mandor Perhutani.

132 Sebelum tahun 1999, tanah persil biasa digunakan warga tanpa menyewa. Bahkan, adakalanya Perhutani memberi kompensasi berupa pupuk karena telah merawat tanaman jati. Namun, selepas tahun 1999, yang ditandai dengan penjarahan besar-besaran pohon jati, penggunaan tanah persil berubah menjadi sewa menyewa, yang relasinya ditentukan bersama-sama antara warga dengan *mandor* Perhutani. Meskipun demikian, saya tidak terlalu jelas apakah biaya sewa tersebut masuk kas Perhutani atau kantong pribadi mandornya. Beberapa petani mengungkapkan, uang sewa ini merupakan penghasilan sampingan para mandor.

Dengan melihat konteks kehidupan warga di atas, maka bisa diketahui bahwa lahan pertanian merupakan sumber kehidupan sehari-hari. Sawah maupun tegalan merupakan sarana produksi bagi petani untuk menghasilkan padi, jagung, ketela, dan bahan pokok lainnya. Tanaman di luar bahan pokok biasanya ditanam di sela-sela lahan yang tidak ditanam bahan pokok. Beberapa tanaman itu diantaranya kunyit, laos, jahe, talas, cabai, dan sebagainya. Selain itu, ada juga petani yang menanam untuk kepentingan bisnis, seperti nangka, sukun, dan tembakau. Menanam bahan-bahan pokok hanya mungkin dilakukan sekali dalam setahun, meski ada kalanya jagung bisa dihasilkan dua kali dalam setahun. Kondisi ini dikarenakan pola pertanian tadah hujan sangat bergantung pada musim penghujan yang datang sekali dalam setahun.

Melalui proses produksi dari lahan pertanian inilah mereka menyandarkan kehidupan sehari-hari. Dana-dana *CSR* yang dijanjikan oleh PT Semen Indonesia jelas tidak akan bisa menggantikan fungsi tersebut karena para petani telah memiliki mekanisme bagaimana kebutuhan hidup mereka harus dipenuhi. Sebagai misal, jenis makanan pokok yang ditanam ternyata memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jika petani menanam padi, itu berarti mereka sedang mempersiapkan kebutuhan makanan sehari-hari untuk setahun ke depan. Nantinya, padi yang dihasilkan dari pertanian tidak dijual, tetapi ditimbun di rumah dalam bentuk gabah. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan ada petani yang menjual padinya jika ada kebutuhan lain di luar kebutuhan makanan pokok. Para

petani, terutama para ibu rumah tangga, sebagian besar berpikir bahwa menyimpan padi di rumah merupakan cara yang paling pas untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan dalam rumah tangga selama satu tahun. Keberadaan gabah di rumah sama artinya dengan ketercukupan bahan makanan di hari depan.

Akan berbeda pertimbangannya jika jenis tanaman yang ditanam petani adalah jagung atau ketela. Jika para petani menanam jagung atau ketela, berarti mereka cenderung memiliki rencana untuk menjualnya. Jagung atau ketela berbeda dengan gabah yang bisa disimpan dalam waktu lama. Karena daya tahan jagung maupun ketela tidak lama, maka pilihan paling tepat saat panen adalah menjualnya, meski sebagian kecil ada yang disimpan di rumah. Kadang ada pula petani yang menanam padi merah dengan tujuan untuk dijual. Padi merah memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding padi biasa (putih). Namun yang perlu dicatat, orang yang menanam ketela, jagung dan padi merah biasanya memperhitungkan bahwa ketersediaan pangan (terutama gabah) di rumah masih relatif mencukupi. Menanam jagung maupun ketela juga dipengaruhi musim yang sedang berlangsung. Jika musim hujan tidak terlalu banyak, pilihan menanam jagung maupun ketela adalah pilihan yang tepat karena kebutuhan air untuk tanaman jagung dan ketela lebih sedikit dibanding dengan tanaman padi.

Selain menaman bahan makanan pokok, petani biasanya menanam tanaman lain seperti rempah-rempah atau buah-buahan di luar area petak utama pertanian

mereka.[133] Tanaman-tanaman tersebut nantinya akan dijual di pasar. Setiap hari Senin dan Kamis, di Desa Tegaldowo biasanya diadakan pasar bersama. Di pasar ini para petani biasanya menjual produk pertanian seperti laos, jahe, kunyit, sukun, nangka muda, dan sebagainya. Di pasar itu pula para tengkulak akan datang untuk membeli produk-produk pertanian dari para petani. Selain jual beli hasil pertanian, di pasar tersebut juga berdatangan para pedagang yang menjual kebutuhan di luar pertanian, seperti ikan laut, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi, bagi petani, tanaman-tanaman di luar bahan makanan pokok memiliki fungsi untuk menambah penghasilan mereka. Jika di tegalan milik petani ada pohon sukun, misalnya, maka ketika berbuah hasilnya akan dijual ke pasar atau kadang dijual langsung ke tengkulak yang datang. Pola semacam inilah yang digunakan para petani, yaitu gabah disimpan untuk kebutuhan makanan pokok, sedangkan tanaman seperti rempah atau buah-buahan digunakan untuk penghasilan tambahan melalui jual-beli di pasar.

Dengan konteks sosial yang demikian, maka para petani mengartikulasikan keberadaan pertambangan lebih sebagai ancaman. Mereka beranggapan bahwa keberadaan tambang skala besar perlahan tetapi pasti akan menggeser usaha pertanian yang mereka geluti selama ini. Kekawatiran itu secara jelas terlihat dari rencana pertambangan yang secara sepihak berdiri di tengah-tengah lahan yang masih

133 Petak utama yang dimaksud adalah area yang ditanami tanaman bahan pangan pokok, seperti padi, jagung, dan ketela.

dimiliki dan dikerjakan oleh warga. Cerita penyerobotan lahan oleh korporasi tentunya bukan cerita baru bagi para petani di Rembang. Terlebih, para petani di Surokonto Wetan, Kendal saat ini tengah mengalami hal tersebut akibat ulah PT Semen Indonesia.

Kekhawatiran seperti itu bisa dipahami mengingat dokumen *Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Atas Nama PT Semen Gresik Tbk No: 02/ PTP-IL.33.17.400.9/XI/2011* yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa rencana operasi pertambangan belum memperoleh tanah karena sebagian besar tanah masih berstatus hak milik. Diterangkan juga bahwa PT Semen Indonesia hanya akan mengakui pelepasan Hak Atas Tanah jika tanah-tanah milik masyarakat telah bersertifikat. Jika menilik pada dokumen tersebut, besar kemungkinan yang akan terjadi di hari depan adalah penyerobotan atau perampasan tanah (*land grabbing*). Mengapa bisa begitu? *Pertama*, ketika proses perizinan masih dalam gugatan, pabrik semen dipaksakan dibangun dengan tergesa-gesa, bahkan sekarang sudah hampir jadi. Padahal, di titik yang sama, para birokrat negara telah mengetahui bahwa tanah yang akan dijadikan area pertambangan masih menjadi hak milik warga. Ini berarti telah terjadi konspirasi antara birokrat negara dan korporasi yang sengaja mendirikan pabrik terlebih dahulu agar tidak bisa digagalkan sebagaimana kegagalan PT Semen Indonesia mendirikan pabrik pada 2006-2010 di Kabupaten Pati.

Alasan potensi *land grabbing* kedua adalah, dari sekitar 860 hektar lahan yang akan dijadikan area pertambangan, hanya sekitar 30 hektar lahan masyarakat yang bersertifikat. Sisanya belum diketahui secara jelas, mulai dari tanah bengkok hingga tanah milik berstatus *letter-C*.[134] Padahal, pihak PT Semen Indonesia hanya akan melakukan proses pelepasan tanah yang yang bersertifikat saja. Kemudian yang *ketiga*, penolakan warga atas rencana pertambangan juga berarti penolakan menjual tanah kepada pihak korporasi. Terdapat beberapa warga penolak tambang yang memiliki status tanah yang berada persis di dalam area pertambangan. Apabila pabrik telah selesai dibangun, tentunya PT Semen Indonesia ke depan akan memaksa dengan segala cara untuk mendapatkan tanah tersebut, entah dengan cara tipu muslihat sebagaimana telah terjadi sebelumnya,[135] pemaksaan melalui keputusan pejabat negara, atau mungkin putusan pengadilan.

---

134 Tanah *letter-C* merupkan tanah yang pencatatannya berada di kantor desa dan bukan termasuk tanah bersertifikat yang disahkan BPN. Tanah berstatus *letter-C* ini dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak. Jadi, warga selalu membayar pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) kepada negara, tetapi status tanah ini tergolong bukan jenis tanah bersertifikat.

135 Saat penelitian, saya menemukan kenyataan bahwa di awal tahun 2010, beberapa keluarga telah menjual tanah mereka kepada para makelar tanah. Para makelar itu membujuk agar tanah mereka dijual karena akan ada program penanaman jarak, sedang mereka dijanjikan tetap bisa bekerja di sana. Saya juga mendapat konfirmasi serupa dari petani di Pati, bahwa kejadian semacam ini juga terjadi ketika PT Semen Indonesia akan membangun pabrik di Sukolilo, Pati, sekitar 2006 lalu.

Selain khawatir kehilangan lahan pertanian, para warga penolak tambang juga tetap merasa terganggu dengan adanya aktivitas pertambangan skala besar di tengah kawasan pertanian yang mereka garap. Hal ini berkaca pada operasi pertambangan skala kecil yang telah ada sebelumnya. Beberapa lahan yang berada di "kanan-kiri" penambangan kapur rata-rata tidak bisa mendapat hasil baik karena sering terkena debu dan tidak jarang terbenam lumpur sisa penambangan yang mengalir saat turun hujan. Jika penambangan skala kecil saja mengakibatkan kerusakan yang merugikan petani, maka rencana PT Semen Indonesia yang akan membuka usaha tambang dengan luasan lahan, alat berat, dan peledak yang jauh lebih besar, tentunya akan memiliki efek kerusakan yang jauh lebih besar pula.

Keadaan-keadaan di atas menjadikan rencana pertambangan semen skala besar dimaknai para petani sebagai pengganggu bagi kehidupan mereka sehari-hari. Jika sebelumnya hanya ada dua gangguan bagi kehidupan petani, maka sekarang bertambah satu dengan adanya PT Semen Indonesia. Kedua hal yang dianggap mengganggu sebelumnya, yakni p*ertama*, terjadinya penurunan intensitas hujan dalam satu tahun sehingga hujan turun sangat sedikit, atau bahkan tidak ada hujan sama sekali. Keadaan ini biasanya disebut dengan masa *paceklik*. Masa *paceklik* tidak hanya mengganggu pertanian tetapi juga mengakibatkan kesulitan mencari pakan ternak bagi beberapa keluarga tertentu. *Kedua*, datangnya hama yang mengganggu lahan pertanian seperti serangga, tikus, maupun babi hutan. Beberapa wilayah pertanian yang merupakan lahan persil

memiliki masalah dengan babi hutan karena babi-babi ini bisa merusak seluruh tanaman jagung/ketela milik petani. Kedua keadaan inilah yang menyebabkan mengapa setiap panen sebuah keluarga petani tidak akan menjual padi miliknya, tetapi menyimpannya di rumah dalam bentuk gabah. Dengan tidak menjual padi hasil panen, mereka juga mengantispasi andaikan terjadi masa paceklik atau lahan pertaniannya diserang hama. Namun, kedua gangguan itu bersifat temporer. Sementara itu, jika ada pabrik semen, maka gangguan itu akan ada sepanjang hidup para petani selama atau bahkan sesudah pabrik berhenti beroperasi.

Dari beberapa penjelasan tersebut, bisa dimengerti mengapa para petani mengartikulasikan keberadaan PT Semen Indonesia sebagai pengganggu yang mengancam kehidupan mereka. Ancaman ini semakin membesar ketika rencana pertambangan semen skala besar berdampingan persis dengan wilayah produktif pertanian warga. Terlebih, sesungguhnya lokasi penambangan juga berada di wilayah CAT Watuputih yang menjadi pemasok utama air bagi warga di kawasan tersebut. Inilah faktor-faktor yang menjelaskan mengapa para petani mengartikulasikan pertambangan yang dilakukan PT Semen Indonesia sebagai "hama paling berbahaya" dibanding sekadar serangga, tikus, dan babi hutan (*lihat* Foto 7).

Foto 7

Pamflet Protes:

Hama Paling Berbahaya untuk Petani



Sumber: poster karya Attak, Omah Gugah, Pati

Selain konteks bertani, kehidupan warga di dua desa ini juga berkaitan sangat erat dengan pola hidup beternak. Dalam kehidupan sosial mereka, sapi dan kambing disebutkan sebagai "rajakaya" yang menjadi simbol kekayaan sebuah keluarga.[136] Ketika Anda berkunjung ke Desa

136 *Rajakaya* merupakan gabungan dari dua kata, yakni "raja dan kaya". *Rajakaya* sebenarnya merujuk pada hewan ternak, seperti sapi, kerbau, atau kambing. Ungkapan ini merupakan simbol kekayaan bagi petani.

Tegaldowo dan Timbrangan, akan mudah ditemukan pemandangan berupa sapi dan kandangnya hampir di setiap rumah, dengan jumlah sapi mulai dari 1 hingga 3 ekor. Sapi-sapi ini biasanya ditempatkan di depan atau di belakang rumah. Sebagian besar jenis sapi yang dipelihara adalah sapi Jawa.

Ternak-ternak tersebut tidak dimiliki secara individual, tetapi menjadi hak milik bersama (kolektif) seluruh anggota keluarga.[137] Hal ini dimungkinkan karena tanggung jawab memelihara sapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Jika orang tua sedang bekerja di sawah/tegalan, maka sang anak wajib memastikan bahwa ternak di rumah tetap mendapatkan pasokan makanan. Biasanya mereka akan mencari rumput (bahasa jawa: *ngarit*) di sawah atau tegalan miliknya. Makanan ternak pun bermacam-macam, mulai dari rumput, daun jagung, bahkan batang jagung atau pohon ketela yang lunak. Adakalanya, di musim kemarau, sapi-sapi ini diberi makan daun-daun kering. Sederhananya, kebutuhan pakan ternak bergantung pada musim yang berlangsung. Kebutuhan pakan ternak yang

---

Artinya, semakin banyak *rajakaya* seseorang, maka semakin kaya orang tersebut.

137 Keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga inti (*nuclear family*), yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Namun, adakalanya, beberapa orang menyatakan kepemilikan sapi hanya dimiliki oleh satu anggota keluarga, sebagai misal, jika sapi dewasa melahirkan anak, maka anak ini akan dibagi kepemilikannya kepada anggota keluarga. Yang perlu dicatat, status kepemilikan sapi ini bisa berbeda-beda antara keluarga satu dengan lainnya, tergantung bagaimana suatu keluarga menentukan siapa dan bagimana sapi-sapi itu dikelola.

bermacam-macam itu biasanya diperoleh petani dari lahan yang rencananya akan menjadi area penambangan PT Semen Indonesia.

Ternak-ternak tersebut bisa dijual jika ada kebutuhan yang mendesak bagi sebuah keluarga. Namun, karena ternak menjadi hak milik bersama, ketika dijual maka seluruh anggota keluarga akan mendapat bagian hasil penjualan. Adapun yang mendapat bagian terbesar adalah mereka yang saat itu sedang sangat membutuhkan. Adakalanya anggota keluarga lain merelakan bagiannya jika kebutuhan yang diperlukan sangat besar. Sebagai contoh, jika ada salah satu anak akan menikah, maka untuk melangsungkan proses (tradisi) pernikahan, uang hasil penjualan ternaklah yang akan menjadi sumber pembiayaan. Selain untuk membiayai pernikahan, alasan menjual ternak ada bermacam-macam, mulai dari memperbaiki rumah, membeli sepeda motor, dan lain sebagainya.

Apabila ingin menjual sapi, mereka tinggal menghubungi tengkulak (sapi) yang ada di desa mereka. Kemudian proses tawar-menawar dilakukan hingga ada kesepakatan harga. Adakalanya orang tinggal bicara di warung atau pasar bahwa sapi mereka akan dijual, maka dengan sendirinya beberapa tengkulak datang menawar sapi miliknya. Harga sapi cenderung fluktuatif bergantung dari proses tawar menawar dan kualitas sapi sendiri. Sebagai misal, seekor anak sapi berusia satu tahun bisa dihargai antara 4-7 juta rupiah. Sedangkan sapi dewasa, harganya bisa belasan hingga puluhan juta, tergantung tingkat kegemukan, kesehatan, dan bentuk kulit sapi tersebut.

Apa makna dari kehidupan beternak ini sehingga para petani merasa terganggu dengan adanya pertambangan skala besar? Bagi mereka, dengan adanya tambang skala besar, tidak saja kehidupan bertani yang terganggu, tetapi aktivitas berternak pun akan ikut terancam mengingat pakan-pakan ternak ini sangat bergantung pada kelestarian kawasan sekitar. Dengan adanya aktivitas peledakan dan operasi pabrik, kawasan hijau tempat tumbuhan dan pakan ternak berkembang akan terganggu dengan intensitas debu dan lumpur yang dihasilkan pabrik. Selain itu, ketakutan akan perluasan operasi pabrik—yang sering kali dilakukan perusahaan semen—dalam beberapa tahun mendatang tentu akan mengurangi luasan lahan masyarakat untuk mencari pakan ternak. Dengan begitu keberadaan pabrik semen dianggap akan mematikan kehidupan berternak sapi maupun kambing.

Jika kehidupan beternak ini terganggu, maka bisa dipastikan kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi sangat tidak stabil. Saat penelitian, saya mendapat banyak cerita tentang para petani yang tidak memiliki ternak kemudian terlilit oleh hutang. Jika ada kebutuhan mendesak, para petani yang tidak memiliki tabungan berupa ternak akan melakukan hutang pada rentenir di desa. Pola hutang dilakukan secara informal, tanpa menggunakan jaminan (karena berbasis kepercayaan), dan bunganya sangat tinggi. Mekanisme seperti ini biasanya dikenal sebagai

praktik *ijon*.[138] Umumnya, praktik kredit dengan pola *ijon* ini menjadikan petani terlilit hutang terus menerus sebab harga jual hasil panen yang digunakan untuk membayar hutang ditentukan secara sepihak dan sangat rendah oleh rentenir, padahal bunga hutang semakin besar seiring berjalannya waktu. Karena itulah, para petani menegaskan makna penolakan terhadap rencana pertambangan dengan pertimbangan bahwa rencana itu hanya akan menghapus aspek-aspek kehidupan warga dalam memenuhi kesejahteraannya sendiri.

Berdasarkan cerita di atas, maka bisa ditunjukkan sebuah pertarungan makna yang saling bersebarangan antara negara dan korporasi di satu sisi berhadapan dengan warga/petani di sisi yang lain. Jika negara terus-menerus mengartikulasikan makna tujuan tambang untuk kesejahteraan warga, maka antagonisme warga juga terus menerus mengartikulasikan pertanian sebagai jalan kesejahteraan. Penegasan bahwa, "Tanpa ada industri pertambangan kehidupan kami sudah cukup sejahtera" (*lihat* Foto 8) adalah bentuk artikulasi yang hendak dimunculkan warga. Lebih jauh, pilihan bertani sebagai jalan kesejahteraan adalah pilihan hidup atau mati. Pada titik ini, terlihat hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) yang hendak dibangun warga berpusat pada ekspresi mempertahankan jalan hidup sebagai petani.

---

138 Praktik *ijon* adalah praktik kredit informal yang memiliki bunga sangat tinggi, biasa dilakukan petani dengan rentenir, dan pola pembayarannya dilakukan dengan mengganti hasil panen yang besarannya (harga) ditentukan oleh rentenir secara sepihak.

Foto 8

Pamflet Protes: Bertani atau Mati



Sumber: Poster karya Attak, Omah Gugah, Pati

Dalam pandangan warga, adanya potensi perampasan lahan, ancaman kerusakan pertanian, terganggunya aktivitas berternak, dan kenyataan bahwa izin lingkungan yang digugat warga telah dimenangkan pemerintah dan korporasi,[139] jelas akan memicu terjadinya degradasi

139 Hasil dari penyelesaian konflik ekologi yang diselesaikan di PTUN (hingga kasasi) dimenangkan oleh pihak PT Semen Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah selaku pemberi izin lingkungan. Namun yang perlu dicatat, kemenangan tersebut sebenarnya tidak pernah menyentuh substansi ekologi yang diperdebatkan, karena lebih mempermasalahkan gugatan

besar-besaran terhadap kehidupan bertani yang telah mereka geluti selama beberapa generasi. Pengaruh jangka panjang selanjutnya yang tidak terelakkan dari keberadaan pertambangan skala besar ini adalah terjadinya *depeasantization* maupun *deagrarianization* di kawasan pegunungan Kendeng. *Depeasantization* merujuk pada gejala memudarnya jumlah pekerjaan bertani di desa (Araghi 1995), sedangkan *deagrarianization* merujuk pada gejala semakin kecilnya andil kerja sektor agraris bagi ekonomi dan penghidupan rakyat (Bryceson 1996). *Depeasantization* dan *deagrarianization* ini dalam konteks yang lebih besar melahirkan persoalan urbanisasi yang menyebabkan bukan hanya kehancuran tatanan sosial masyarakat pedesaan, melainkan juga menambah beban persoalan di pusat-pusat perkotaan (metropolis).

Meskipun asumsi *depeasantization* maupun *deagrarianization* perlu ada penelitian tersendiri (lanjutan), tetapi fakta operasi pertambangan selalu memperluas area usahanya adalah bukan rahasia lagi. Persis sebagaimana PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban yang awalnya hanya membangun satu pabrik, namun dalam beberapa tahun kemudian sudah mendirikan beberapa pabrik baru di tempat yang sama. Apabila kegiatan pertambangan yang dijalankan telah menghasilkan banyak keuntungan (*profit*) bagi korporasi, maka target pada tahun-tahun berikutnya adalah ekspansi atau perluasan area operasi, dan itu berarti

yang dianggap kadaluarsa, yakni melewati batas waktu agar dikatakan sah untuk menggugat. Lebih lanjut *lihat* Ardianto (2015c).

diperlukan lebih banyak lahan eksploitasi. Mengingat alur argumentasi yang demikian, maka perlahan namun pasti, gejala *depeasantization* maupun *deagrarianization* akan muncul pula di Rembang, terutama di sekitar area pertambangan PT Semen Indonesia.

Menyelamatkan Alam, Menghidupi Manusia

Selain mengartikulasikan bertani sebagai jalan kesejahteraan, warga penolak tambang juga menguatkan makna penyelamatan lingkungan (ekologi). Makna ini terus menerus digaungkan dalam berbagai perjuangan politik warga. Bentuk material dari makna ini mulai dari aksi-aksi protes, negosiasi, audiensi, pengadilan, bahkan dalam bentuk perlawanan dengan tinggal di tenda tepat di depan tapak pabrik selama lebih dari dua tahun ini. Ada watak khas yang dibangun dalam artikulasi menyelamatkan alam itu. Untuk melihat watak tersebut, ada baiknya saya menunjukkan terlebih dahulu sebuah syair lagu yang selalu dinyanyikan warga (ibu-ibu) dalam berbagai momen yang saya temui. Lagu ini berjudul *Ibu Pertiwi* yang secara langsung menjadi ekspresi dari artikulasi makna yang dibangun warga.

Ibu pertiwi, paring boga lan sandhang kang murakabi
peparing rejeki manungsa kang bekti
Ibu pertiwi, ibu pertiwi,
sesutresna mring sesami
Ibu pertiwi kang adil luhuring budi
Ayo sumungkem mring ibu pertiwi

(Ibu pertiwi, memberi pangan dan sandang yang layak

Memberikan rezeki kepada manusia yang berbakti
Ibu pertiwi, ibu pertiwi,
kasih sayang terhadap sesama
Ibu Pertiwi yang adil dan luhur budi
Mari, memberi hormat kepada ibu pertiwi)

Di saat para ibu-ibu menyanyikan lagu ini, salah satu dari mereka biasanya akan membacakan lirik puisi berikut:

Yen bumi berdiri, arep mbok de'ke pabrik-pabrik
terus ditambang rino-wengi
Dudu petani tok sing bakal cures
nanging wit-witan lan ugo kewan-kewan
ugo bakale tuges cures tubes ludes
Sawangen kae, gunung-gunung podo gundul
Sawangen kae, sawah-sawah podo banjir
Duh ibu pertiwi, kulo sampun doso
Bilih niko dateng pratondo
geni, banyu, angin, kabeh bakal podo nageh
Duh ibu pertiwi, kulo mung petani, kulo mboten wani
Nangin kulo kerso
Bumi bade kulo belani, banyu bade kulo ayomi

(Jika bumi yang kukuh berdiri mau dibangun pabrik pabrik
lalu ditambang siang-malam
Bukan petani saja yang akan mati
Tetapi tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang
Semua akan hilang tanpa bekas
Lihat itu, gunung-gunung menjadi gundul
Lihat itu, sawah-sawah menjadi banjir
Duh ibu pertiwi, saya sudah berdosa
Apabila datang pertanda

api, air, angin, semua akan menagih
Duh ibu pertiwi, kami hanya petani, kami tidak berani
Namun kami berkehendak
Bumi akan saya bela, air akan saya jaga)

Melalui lagu "*Ibu Pertiwi*", para ibu-ibu penolak tambang menunjukkan sebuah makna simbolis tentang cinta mereka terhadap alam dan lingkungan. *Pertiwi* artinya tanah atau bumi, maka memiliki pengertian sebagai ibu bumi. Manusia yang hidup di atas bumi, dipersonifikasikan sebagai anak. Jadi, selama ini, manusia hidup (dan beranak-pinak) telah dirawat oleh *ibu pertiwi* dengan segala berkah yang dihasilkan dari tanah. Di sini nalar relasi manusia dan alam diwujudkan sebagai hubungan saling membutuhkan. Cara pandang semacam ini menjadikan keberadaan pertambangan hanya akan merusak relasi manusia dengan alamnya, terlebih karena alam telah memberikan kehidupan sekaligus kesejahteraan bagi para petani.

Melalui pemahaman akan konsepsi *Ibu Pertiwi*, setiap perlawanan terhadap rencana pertambangan adalah bentuk antagonisme warga dalam membangun hegemoni tandingan (*counter-hegemony*). Jika para teknokrat atau ilmuwan yang dipakai PT Semen Indonesia memiliki kepercayaan bahwa alam bisa direkayasa dengan suatu perencanaan matang, maka warga justru berkeyakinan bahwa hubungan alam dan manusia hanya bisa dijalin melalui relasi saling mengasihi dan menyayangi. Alam bukan mesin yang secara mekanis bisa direkayasa begitu saja. Eksploitasi dengan pengerukan tanah dan kapur dalam skala besar bukan hubungan yang setara, dan hal ini jelas

ditolak oleh para petani yang memercayai tanah sebagai *ibu pertiwi*. Inilah wujud dari antagonisme warga dalam mewujudkan hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) yang dibangun negara.

Para petani penolak pertambangan ini memahami hubungan alam dan manusia sebagai relasi saling menjaga antara manusia dan alam. Sebagaimana diungkapkan Gunretno, "Manusia adalah bagian dari alam. Makanya harus *dandan-dandan* (memperbaiki sikap), supaya jangan ada korban dan dampak lebih besar dari proses itu".[140] Ia melanjutkan bahwa kunci keselamatan manusia adalah *dumunung* (tidak serakah) terhadap keadaan sekitar. Dengan logika yang demikian, maka pengerukan besar-besaran melalui pertambangan dipahami sebagai bentuk keserakahan.

Sebagai turunan dari hubungan yang saling menjaga antara manusia dengan alam, kehidupan di desa sekitar kawasan Pegunungan Kendeng pun berelasi satu sama lain dengan cara saling menjaga. Hal tersebut terekspresikan dalam kebiasaan saling berbagi antar-sesama. Karena semua kebutuhan diproduksi mereka sendiri, maka berbagi dan saling menolong menjadi norma sehari-hari. Mesranya hubungan manusia dengan alam ini yang kemudian diteguhkan dalam banyak adat istiadat. Semua itu perlu dimengerti sebagai sejarah sosial masyarakat Pegunungan Kendeng, tanpa kecuali di Tegaldowo maupun Timbrangan.

---

140 *Lihat* omahkendeng.org. "Gunretno: Ilmu itu *Lelaku*". 25 Agustus 2014.

Relasi tolong menolong di daerah pertanian seperti ini cenderung masih sangat kuat. Saling berbagi makanan, misalnya, adalah fenomena yang sangat biasa ditemukan di Tegaldowo maupun Timbrangan. Setiap ada tamu atau tetangga yang tidak sengaja berkunjung ke sebuah keluarga, maka keluarga itu akan menawarkan makan bersama di rumahnya. Relasi saling berbagi ini terjadi karena produk atau makanan yang mereka saling bagikan adalah hasil produksi dari lahan pertanian mereka sendiri, bukan karena membeli (pertukaran).[141]

Kebiasaan berbagi juga banyak tercermin dalam berbagai acara seperti dalam acara khitanan atau pernikahan. Ketika sebuah keluarga akan melangsungkan pernikahan atau khitanan, maka para saudara dan tetangga akan saling membantu. Para tetangga, umumnya ibu-ibu, biasanya secara bersama akan menjadi juru masak keluarga tersebut dan menyiapkan segala keperluan makanan untuk disuguhkan pada para tamu. Kesediaan menjadi juru masak ini biasanya dilakukan secara sukarela. Selepas acara, para ibu-ibu ini tidak dibayar dalam bentuk uang, tetapi mereka berhak membawa makanan yang telah mereka masak bersama sebelumnya.[142]

Adapun para tamu undangan, terutama tamu perempuan, biasanya mereka akan membawa bahan makanan,

141 Meski demikian, saya tidak hendak menyatakan bahwa relasi transaksional tidak ada. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa relasi berbagi masih dipegang kuat oleh beberapa orang di Desa Tegaldowo maupun Timbrangan.

142 Meski begitu, ada kalanya juga beberapa keluarga membayar upah orang yang telah membantunya.

misalnya beras. Para tamu laki-laki biasanya menyerahkan amplop berisi uang kepada keluarga yang melangsungkan acara pernikahan atau khitanan. Kebiasaan semacam ini biasanya mereka sebut dengan istilah *buwoh*. Mekanisme sosial yang serupa dengan ini juga terjadi ketika ada sebuah keluarga yang mendapat musibah, misalkan anggota keluarga ada yang meninggal. Secara spontan para kerabat dan tetangga akan datang ke rumah keluarga tersebut dengan membawa bahan makanan untuk disumbangkan pada keluarga yang terkena musibah.

Relasi saling berbagi atau tolong menolong ini tidak hanya dalam acara-acara besar, tetapi berlaku pula pada seluruh relasi sosial yang ada di sana. *Sambatan* adalah salah satu jenis relasi sosial yang masih ada di Desa Tegaldowo dan Timbrangan. Pengertian *sambatan* adalah berbagi tenaga untuk membantu keperluan spesifik sebuah keluarga. *Sambatan* bisa dilakukan baik lelaki maupun perempuan. Sebagai contoh, jika sebuah keluarga baru akan membangun rumah, seluruh warga secara bersama-sama akan terlibat untuk membangun rumah keluarga baru tersebut. Perlu diketahui, bahwa hampir sebagian besar rumah petani di dua desa ini terbuat dari kayu. Pola *sambatan* ini tidak didasarkan pada relasi transaksional yang ditandai dengan pemberian upah. Mereka melakukan sambatan secara sukarela tanpa dibayar apa pun. Prosesnya dilakukan secara bergantian dan bergiliran sesuai dengan siapa yang sedang membangun rumah baru.

Tidak hanya saat ada sebuah keluarga pindah atau membangun rumah, *sambatan* juga sering dilakukan saat

musim panen tiba. Ketika tanaman-tanaman yang ada di lahan pertanian sudah waktunya dipanen, maka beberapa keluarga yang memiliki anggota keluarga sedikit biasanya akan melakukan *sambatan* dengan keluarga lain. Caranya, ketika keluarga A panen lebih dahulu, maka dirinya akan meminta keluarga B untuk membantu proses panen dilahannya. Sama seperti perpindahan rumah, *sambatan* ini tidak dikerjakan dengan relasi transaksional berupa upah, tetapi dengan pola tukar tenaga di waktu berbeda, yakni ketika keluarga B nanti panen, maka keluarga A yang akan membantu.

Sekilas relasi tolong-menolong seperti ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam suatu keluarga. Sebuah keluarga petani menceritakan pengalaman hidupnya kepada saya tentang perbandingan jika bekerja sebagai buruh di kota.

> Kami pernah tinggal di Jepara selama enam tahun. Bapak menjadi buruh bangunan, saya sendiri bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tetapi, waktu itu saya tidak tahan karena hidup rasanya serba susah. Dulu bapak pernah diare selama 6 hari. Bukan sakitnya yang menjadi masalah utama, namun tidak bekerja selama enam hari itu kan berarti tidak mendapatkan penghasilan. Ekonomi keluarga menjadi kacau balau. Beda jika hidup di desa, sakit enam hari masih bisa digunakan untuk istirahat, dan kita tetap bisa makan. Hidup di kota rasanya semua serba uang, tidak ada saling membantu antartetangga. Beda dengan di desa, mau makan ketela tidak perlu membeli karena sudah banyak tetangga yang berbagi.

Yang hendak dikatakan dari cerita ini adalah bahwa relasi saling berbagi ini juga bagian dari kesejahteraan sebuah keluarga. Para petani ini sepenuhnya sadar bahwa kesejahteraannya bukan semata persoalan kepemilikan uang, namun adanya relasi yang membuat antar orang satu dengan lainnya saling menolong saat sedang membutuhkan.

Meskipun masih kuat, relasi tolong-menolong akhir-akhir ini mulai retak semenjak kehadiran rencana pertambangan semen oleh PT Semen Indonesia. Konflik horizontal muncul akibat relasi transaksional melalui distribusi materi (bantuan) kepada beberapa elit desa dan kelompok-kelompok pendukung tambang yang tidak jarang adalah tetangga bahkan keluarganya sendiri. Suasana makin diperkeruh karena pihak PT Semen Indonesia menggelontorkan dana terus menerus baik berupa bantuan maupun uang untuk memobilisasi dukungan terhadap rencana pertambangan. Keadaan semacam ini dikhawatirkan semakin mengeras mengingat telah banyak keluarga yang terpecah belah dalam dualisme pro-kontra pertambangan semen. Jika hal seperti itu terus berlanjut, maka dalam beberapa waktu ke depan kebiasaan guyup, rukun, dan saling tolong menolong akan terancam musnah.

Kenyataan menghilangnya relasi tolong-menolong bukan hal yang mengada-ada. M. Nurul Huda (2011) dalam tesisnya tentang *Penetrasi Kapitalisme dan Transformasi Sosial di Bojonegoro* pernah mengulas secara detail dan lengkap bagaimana tatanan kehidupan masyarakat berantakan pasca kehadiran korporasi skala besar di Kabupaten Bojonegoro. Semenjak ada korporasi minyak

Exxon Mobile, kehidupan masyarakat di Bojonegoro berubah drastis menjadi saling "memakan". Para elite desa, elite kota, makelar proyek dan pendatang pencari rente (di antaranya para LSM) banyak yang kecipratan rezeki. Sebaliknya, di sisi lain, warga desa kalangan bawah makin berantakan kehidupannya. Persis di titik itulah, ketakutan para petani terhadap kehadiran PT Semen Indonesia di Rembang muncul.

Dalam pandangan warga, alam, manusia dan relasi sosial yang dibentuk di dalamnya telah menjadi satu kesatuan dalam kronik kehidupan para petani di Rembang. Hal ini tercermin ketika berlangsung acara *Sedekah Bumi*. *Sedekah bumi* adalah sejenis perayaan bagi kalangan petani sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas berkah yang diberikan alam. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan masyarakat di setiap dusun. Masyarakat di masing-masing dusun akan membuat tumpeng yang dihias dengan beberapa produk pertanian yang mereka hasilkan. Tumpeng dan hasil pertanian ini kemudian akan diarak keliling dusun sebelum mereka menggelar doa bersama di salah satu sumber air yang ada di dusun tersebut. Kegiatan ini memiliki dua makna sekaligus. *Pertama*, secara sosial kehidupan mereka (relasi antarmanusia) didasarkan pada semangat gotong-royong. Hal ini disimbolkan dari proses pembuatan tumpeng ketika setiap warga wajib menyetorkan nasi mereka untuk disusun bersama dengan nasi dari warga yang lain. *Kedua*, secara ekologis, mereka menyadari betul akan pentingnya air. Hal ini disimbolkan

dari kegiatan doa bersama yang dilakukan di lokasi sumber air.

Foto 9

Bantuan CSR PT Semen Indonesia untuk Kegiatan *Sedekah Bumi*



Sumber: diperoleh dari JMPKK Rembang

Artikulasi yang terwujud pada penolakan terhadap tambang skala besar, dengan demikian, menjadi satu bagian dari rangkaian makna mempertahankan ruang hidup para petani. Mereka memiliki tempat dan cara hidup yang khas guna memenuhi kesejahteraan hidupnya. Hadirnya tambang di kawasan CAT Watuputih selain merusak alam juga berpotensi merusak tatanan kehidupan yang melekat dalam sejarah sosial para petani. Persis ketika CSR PT Semen Indonesia mengucurkan uang untuk acara-acara *Sedekah Bumi*, berbagai *rerasan* dan saling curiga bermunculan di tengah-tengah masyarakat (*lihat* Foto 9).

Padahal jauh sebelumnya, semua acara *Sedekah Bumi* selalu dilakukan dengan suka rela dan guyup karena semua orang setara dan terlibat secara bersamaan.

Catatan Penutup

Dengan mengupas antagonisme warga, maka bisa dilihat bagaimana warga melakukan praktik artikulasi menolak makna 'kesejahteraan' yang dibentuk negara. Warga memiliki pemaknaan yang sama sekali berbeda. Kesejahteraan sebagai sebuah titik nodal pembangunan berbasis tambang ternyata gagal dijahit sebagai *chain of equivalence* yang sama dengan intersubjektif warga. Sebaliknya, warga meyakini bahwa sumber kesejahteraan itu berpusat dari cara hidup mereka dengan bertani. Lebih jauh, praktik artikulasi yang terus-menerus dibangun warga akhirnya menyeret makna kesejahteraan ke dalam *chain of difference,* yang menegaskan makna ancaman pertambangan terhadap kesejahteraan itu sendiri. Maksudnya, pertambangan tidak pernah bermakna akan mampu menghadirkan kesejahteraan, sebaliknya malah menjauhkan kesejahteraan warga sendiri.

Meski demikian, apakah hidup bertani sebagai jalan kesejahteraan mampu menjadi hegemoni baru belum bisa dipastikan. Saat ini kedua posisi tersebut tetap berelasi antagonistik, warga dengan negara dan korporasi masih saling bertarung memperebutkan posisi hegemoninya. Di sini, saya belum banyak mengelaborasi sejauh mana

proyek hegemoni tandingan (*counter-hegemony project)* yang dibangun warga bisa berjalan efektif. Namun yang jelas, dislokasi sosial yang disisakan dari hegemoni pembangunan berbasis tambang telah terbuka begitu lebar. Hal tersebut menjadi ruang bagi antagonisme untuk melakukan perjuangan-perjuangan hegemoni (*hegemony struggles*) melalui aksi-aksi politik warga.

BAGIAN 7

KELUAR DARI TEKNOKRATISME DAN PROSEDURALISME: MENCARI MODEL ANALISIS ALTERNATIF

Pembahasan bagian ini akan sedikit melompat dari alur sebelumnya. Bagian ini saya tulis secara khusus untuk membuat sebuah refleksi teoretis dalam studi kebijakan, dan secara bersamaan mencari cara pandang yang berbeda dari arus-utama analisis kebijakan yang selama ini ada. Untuk itu, saya akan mengulas model-model pendekatan dalam kebijakan terlebih dahulu, kemudian mencoba menawarkan sebuah alternatif lain yang sejauh ini belum banyak dilakukan oleh para ilmuwan kebijakan di Indonesia.

Tawaran alternatif ini perlu dihadirkan dengan pertimbangan pendekatan kebijakan yang sangat mengagungkan rasionalitas sebagai inti dasar dalam analisis kebijakan

terasa semakin tidak relevan. Proses pengambilan kebijakan yang dianggap bisa dirasionalisasi secara cermat dan dinilai mampu menghasilkan kebijakan yang terbaik dalam praktiknya justru melahirkan antagonisme dan narasi kebijakan tandingan yang disodorkan oleh aktor-aktor lain. Sementara itu, pendekatan lain yang lebih mengedepankan cara berpikir konstruktivis, yang memandang sebuah kebijakan sebagai jalinan makna yang saling bertukar satu sama lain justru lebih bisa menutupi lubang-lubang kelemahan yang melekat dalam pendekatan kebijakan yang rasional.

Untuk mengupas hal tersebut, maka saya akan paparkan dua ulasan krusial di sini. *Pertama*, adanya kebutuhan untuk menyandingkan beberapa asumsi-asumsi dasar antara pendekatan yang mengedepankan rasionalitas dengan pendekatan yang sensitif terhadap konstruksi makna. Perbandingan kedua pendekatan ini penting dilakukan agar para peminat studi kebijakan memiliki arah yang jelas dan tegas perihal posisi dirinya dalam sebuah analisis kebijakan. *Kedua*, setelah melakukan perbandingan, saya akan menyuguhkan ulasan tentang model analisis alternatif yang selama ini tidak banyak digeluti oleh para pengkaji kebijakan. Dengan menyuguhkan kedua pokok bahasan ini, penyegaran atas studi kebijakan yang selama ini saya anggap stagnan bisa terpenuhi.

Antara Rasionalitas dan Konstruktivis: Sebuah Perbandingan

Jika kita mengamati karya-karya akhir para sarjana yang menulis studi kebijakan di berbagai perguruan tinggi, kita akan menemukan kenyataan bahwa banyak dari mereka memiliki pola nyaris sama dalam memperlakukan analisis kebijakan. Pola tersebut adalah penggunaan dasar asumsi bahwa rasionalitas mampu mencerna berbagai persoalan secara objektif. Akibatnya, pendekatan rasional menjadi pendekatan arus-utama yang dipakai hampir seluruh aktor yang terlibat dalam kebijakan, terutama para teknokrat dan birokrat yang duduk dalam pemerintahan. Di titik lain, sebenarnya ada pendekatan yang kurang begitu populer di Indonesia, yakni pendekatan konstruktivis. Saya perlu menguraikan suatu perbandingan tentang kedua pendekatan tersebut agar kita bisa menimbang pendekatan mana yang lebih relevan dan lebih operatif dalam konteks Indonesia sekarang ini.

Pendekatan kebijakan berbasis rasionalitas memiliki pijakan ontologis bahwa realitas bisa dicerna secara objektif. Artinya, pendekatan ini membayangkan ada sebuah kebenaran umum yang bisa diuji. Dengan pijakan tersebut, maka secara epistemologis pendekatan ini membayangkan bahwa kebenaran atas sebuah realitas bisa diperoleh dengan mengikuti sebuah prosedur pengujian yang telah disepakati sebagai perangkat baku. Oleh karenanya, pendekatan ini lebih fokus pada perdebatan tentang prosedur-prosedur terbaik dalam membuat kebijakan. Sukses tidaknya sebuah kebijakan dilihat dari seberapa jauh prosedur-prosedur

yang ditetapkan sebelumnya bisa dipenuhi. Dengan kata lain, jika tidak ada penyelewengan terhadap prosedur yang dibakukan, maka suatu kebijakan pasti akan berlangsung dengan baik-baik saja.

Dasar asumsi di atas jelas berbeda dengan pendekatan konstruktivis. Secara ontologis, pendekatan konstruktivis meletakkan realitas dalam posisi yang subjektif. Artinya, pendekatan ini memahami realitas sebagai sesuatu yang subjektif menurut konstruksi yang disematkan padanya. Hal ini bukan berarti tidak ada kebenaran atas sebuah realitas, tetapi secara epistemologis kebenaran atas sebuah realitas bisa diperoleh dengan melihat kesepakatan-kesepakatan intersubjektif yang membentuk konstruksi makna tersebut. Karena itu, pendekatan ini lebih berfokus pada jalinan makna yang mengonstruksi kebijakan dibanding dengan rangkaian prosedur yang ditetapkan.

Perbedaan lain yang mencolok adalah pemberlakuan terhadap konteks. Pendekatan berbasis rasionalitas memosisikan konteks spesifik sebagai sesuatu yang tidak memiliki pengaruh terlalu signifikan dalam kebijakan, sebab perangkat baku yang telah disepakati diposisikan dapat menguji segala persoalan. Prosedur-prosedur yang dibakukan dianggap sebagai hukum deduktif yang bisa dipakai dalam mencerna semua hal, termasuk konteks-konteks spesifik sekali pun. Sebaliknya, pendekatan konstruktivis memperlakukan ruang dan waktu sebagai konteks spesifik yang harus diamati secara tepat dalam proses kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan konstruktivis menjadikan konteks yang menentukan bagaimana sebuah

jalinan makna dapat membentuk realitas dalam kebijakan. Kedua pembedaan ini kemudian menyebabkan perbedaan cara pandang dalam menentukan posisi-posisi dalam dinamika kebijakan.

Bagi pendekatan rasionalitas, pengampu kebijakan hanyalah negara, melalui perangkat birokrasi yang mengoperasikan seluruh prosedur yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dye (2005) yang menyatakan "kebijakan adalah apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah". Negara diposisikan sebagi pihak sentral yang dibebani dalam usaha menerjemahkan seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam membuat kebijakan. Inilah alasan mengapa pendekatan rasionalitas menyepakati adanya pemilahan antara pembuat kebijakan (*policy maker*) dengan penerima manfaat (*benefeciaries*) dalam kebijakan. Pemilahan ini dilakukan karena kepentingan masyarakat sangat beragam sehingga negara harus mengambil alih keputusan yang dianggap paling baik. Untuk mencapai keadaan itu, maka negara diposisikan sebagai pihak yang netral, apolitis dan tidak memiliki kepentingan pada kelompok tertentu. Jika pun harus melibatkan pihak lain, maka negara wajib menggandeng pihak yang juga netral, apolitis dan nir-kepentingan. Artinya, para teknokrat yang digandeng dalam kebijakan merupakan ahli-ahli yang independen dan netral.

Pendekatan rasionalitas ini berkebalikan dengan pendekatan konstruktivis yang berpandangan bahwa pengampu kebijakan tidak disematkan pada aktor negara saja, tetapi juga keseluruhan aktor yang berkepentingan

atau terkait dengan kebijakan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Brock, Cornwall, dan Gaventa (2001: iii) bahwa "kebijakan meliputi sebuah konfigurasi kepentingan yang kompleks, dengan berbagai aktor yang berbeda posisi, dan interaksi yang terbentuk di dalamnya adalah relasi kekuasaan". Pendefinisian ini memungkinkan penempatan aktor-aktor dalam pengambilan kebijakan dalam posisi yang berpihak, politis, bahkan menjadi bagian integral dari praktik pemaknaan yang hendak dibentuknya. Dengan kata lain, aktor dalam kebijakan diposisikan menurut jalinan makna yang menjadi identitas dari pertarungan makna tersebut. Sederhananya, dalam dinamika kebijakan tidak ada aktor yang netral.

Tabel 11

Perbandingan Asumsi Dasar Antara Pendekatan Rasionalitas dengan Konstruktivis

Asumsi Pokok	Rasionalitas	Konstruksi Makna
Dasar ontologis	Realitas bisa dicerna secara objektif.	Realitas diposisikan secara subjektif .
Dasar epistemologis	Adanya perangkat baku yang secara objektif bisa digunakan untuk memahami realitas.	Memahami realitas harus melihat medan konstruksi makna.

Asumsi Pokok	Rasionalitas	Konstruksi Makna
Misi kebijakan	Menaati seluruh ketentuan dalam perangkat yang dibakukan/ disepakati.	Memperoleh substansi makna dari kebijakan.
Kunci sukses	Terpenuhinya seluruh ketentuan yang diatur dalam perangkat kerja.	Terwujudnya konsensus tanpa menegasikan perbedaan pandangan.
Perlakuan terhadap konteks	Tidak relevan, karena perangkat yang dibakukan bisa menguji semua hal.	Konteks dalam ruang dan waktu menentukan pembacaan bagaimana makna diperlakukan.
Aktor	Negara (dengan birokrasinya).	Semua aktor yang terlibat dalam pertarungan makna.
Posisi aktor	Netral, apolitis, dan tidak berkepentingan.	Berpihak, politis, dan terkonstruksi dalam perebutan makna.

Konsekuensi logis dari perbedaan dasar asumsi di atas menyebabkan penempatan yang berbeda bagi mereka yang melakukan analisis kebijakan. Para analis kebijakan dengan pendekatan rasional akan cenderung memosisikan dirinya berjarak (di luar) dengan realitas yang di analisis. "Objektif

dan netral" merupakan kata kunci para analis kebijakan yang menggunakan pendekatan rasional. Artinya, mereka mendaku dirinya tidak terlibat dalam kepentingan, dan hasil analisisnya sebagai kenyataan objektif yang terjadi di lapangan. Hal ini berbeda dengan mereka yang menganalisis menggunakan pendekatan konstruktivis sebagaimana penelitian yang saya uraikan melalui buku ini. Analisis kebijakan yang memakai pendekatan konstruktivis cenderung menganggap dirinya bagian dari realitas yang ditelitinya sendiri. Tidak ada jarak antara dia sebagai analis dengan objek yang dianalisis.

Dengan adanya perbedaan posisi dalam kebijakan, maka terjadi kecenderunan umum bagi para analis untuk mengadopsi model-model kebijakan tertentu. Pendekatan kebijakan berwatak rasional seringkali ditemukan dalam model kebijakan teknokratis, proseduralis, maupun yuridis. Dalam model teknokratis, proseduralis maupun yuridis, dibayangkan bahwa para teknokrat, birokrat, atau pengambil keputusan merupakan pihak profesional yang netral, bisa berpikir rasional, dan berkerja mengandalkan instrumen yang bisa diuji. Dalam model teknokratis, pengambilan keputusan berangkat dari prosedur uji ilmiah, sedang dalam model proseduralis keputusan diambil berdasar ketaatan pada prosedur baku yang disepakati (regulasi). Kecenderungan serupa juga terjadi dalam model yuridis yang memperlakukan hukum sebagai titik pijak pengambilan keputusan. Sementara itu, model politis dan sosiologis mendasarkan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan pada konteks-konteks politis dan sosiologis yang berkembang dalam subjek kebijakan.

Meski demikian, pembedaan model ini sifatnya hanya kecenderungan saja, bukan kategorisasi final bahwa model teknokratis pasti menggunakan pendekatan rasional, sedang model politis pasti pendekatan konstruktivis. Bisa jadi, model politis memakai pendekatan rasionalitas jika dasar-dasar asumsi pendekatan rasional lebih kuat daripada pendekatan konstruktivis, begitu pun sebaliknya. Ini artinya, model sama sekali tidak menentukan pendekatan. Sebaliknya, pendekatanlah yang menentukan model kebijakan.

Berkaca pada Kasus Rembang: Tawaran Model Analisis Agonistik

Berkaca dari temuan-temuan yang ada dalam penelitian, saya hendak mengajukan sebuah model analisis kebijakan alternatif. Dalam hal ini, saya menyebutnya dengan model analisis agonistik. Model ini memiliki kesamaan dengan tradisi berpikir konstruktivis sebagaimana disinggung dalam perbandingan sebelumnya. Sebelum jauh menjelaskan seperti apa model yang saya maksud, perlu kiranya diuraikan apa yang dimaksud dengan agonistik. Istilah agonistik berasal dari bahasa Yunani *Agon* yang berarti pertandingan/kontes. Sedangkan dalam konteks sosial, agonistik berarti relasi konfliktual antara berbagai identitas politik sekaligus syarat dasar bagi penguatan demokrasi (demokrasi masyarakat Yunani - *pen.*) (Juru 2013: 98-99). Konsepsi agonistik sendiri bisa digolongkan

sebagai gagasan yang melekat dalam tradisi pemikiran post-fondasionalis. Para pemikir post-fondasionalisme memandang bahwa dunia sosial tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang solid dan permanen, sebaliknya bersifat kontingen dan tidak stabil (Torfing 1999).

Karena berada dalam rumpun post-fondasionalisme, maka sebuah analisis kebijakan tidak diletakkan sebagai wilayah yang bisa dipahami secara objektif tanpa ada ruang untuk mengalkulasikan berbagai kontestasi yang ada di dalamnya. Artinya, fakta dalam kebijakan dipahami sebagai konsensus dalam sebuah konteks dan periode waktu yang sangat spesifik. Berangkat dari landasan itu, kebijakan mesti dipahami sebagai persoalan yang sangat subjektif dan ditentukan atas konsensus berbagai kepentingan yang melingkupinya. Untuk mengikuti cara berpikir ini, seorang analis kebijakan mesti melihat sebuah kebijakan dengan cara mencermati berbagai intersubjektivitas yang hadir dalam kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dimaksudkan jelas memiliki sikap terhadap konteks yang sangat spesifik dan unik, dan tidak bisa disamaratakan begitu saja bahkan terhadap kebijakan yang serupa sekali pun.

Adapun rujukan yang saya gunakan untuk penyebutan model analisis kebijakan agonistik berasal dari pemikiran intelektual Chantal Mouffe. Konsepsi agonistik juga pernah dikembangkan oleh pemikir lain seperti Hannah Arendt, Bonnie Honing dan William Connolly (dalam

Mouffe 2013).[143] Pemilihan penggunaan konsep agonistik Mouffian—tidak memilih dari pemikir lainnya—bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya, Fortis (2014) telah membuka jalan awal sebuah ruang diskusi sejenis dalam disertasinya yang berjudul *Bringing Politics and Administration Together: For an Agonistic Policy Model*. Oleh karena itu, dasar asumsi yang saya kembangkan dalam model analisis kebijakan agonistik mengikuti kaidah-kaidah yang telah didudukkan terlebih dahulu oleh Mouffe dalam karya-karyanya.

Untuk menjelaskan model analisis kebijakan agonistik ini, beberapa dasar asumsi yang digunakan perlu dijelaskan. Setidaknya, ada tiga dasar asumsi yang perlu dipahami dalam mendeskripsikan apa itu model analisis kebijakan agonistik. *Pertama*, analisis kebijakan harus melihat posisi subjek (*subject position*) terhadap formasi wacana. Pemahaman posisi subjek yang dimaksudkan Mouffe memiliki perbedaan dengan pemahaman posisi subjek dari pemikir lainnya. Baginya, posisi subjek tidak pernah solid, tetapi bergantung pada formasi wacana apa ia ditempatkan. Maksudnya, subjek dipahami bukan secara apriori (seperti jenis pekerjaan, laki-laki dan perempuan, negara-warga). Sebaliknya, posisi subjek selalu dikonstruksi oleh wacana yang spesifik dan sering kali bersifat rapuh dan temporal terhadap persilangan berbagai posisi subjek yang lain (Mouffe 1992: 10). Ini yang menjelaskan mengapa di masyarakat yang sama, katakanlah sama-sama petani,

143 Demi alasan kepraktisan, perbedaan konsep agonistik antar-pemikir tidak akan dikupas di sini.

terdapat kelompok pendukung dan penolak pertambangan. Posisi subjek semacam itu bisa dipahami dengan melihat formasi wacana yang hadir di dalamnya.

Konsekuensi dari asumsi pertama ini adalah perlunya memberikan penghormatan pada konteks yang spesifik dalam melakukan analisis kebijakan. Seorang analis kebijakan mesti memiliki pengetahuan atau sensitivitas terhadap berbagai konteks yang terjadi di lapangan. Analis kebijakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan dalil-dalil deduktif yang bersifat normatif, tetapi harus mencermati dinamika persoalan yang ada di masyarakat guna memahami formasi wacana yang ada. Dalam kasus di Rembang, tampak jelas bagaimana keengganan negara untuk memahami konteks kehidupan warga yang sebagian besar hidup secara bertani. Kenyataan ini menjadikan misi "mewujudkan kesejahteraan" malah berpeluang menghancurkan sisi kesejahteraan yang dimiliki warga sendiri (*baca* Bagian 6). Hal seperti itu bisa terjadi akibat—dalam istilah Flyvbjerg—kecenderungan kebijakan yang "memusuhi metode-metode yang didasarkan pada suatu penghormatan terhadap konteks" (*dalam* Johnson 2013). Jadi, analisis kebijakan agonistik perlu memiliki kecermatan dalam memahami formasi wacana tempat berbagai gejala (induktif) melekat dalam struktur dan dinamika sosial sehari-hari.

Dasar asumsi kedua adalah mengembalikan logika "political" dalam mengerjakan analisis kebijakan. Untuk itu, perlu saya bedakan antara logika "politics" dan "political" terlebih dulu. Dalam karyanya *On The Political* (2005),

Mouffe memberikan pembedaan atas dua konsep di atas. *Politics* dimengerti sebagai seperangkat tatanan empiris yang dibentuk oleh praktik dan institusi dari sebuah sistem, sedangkan *political* adalah dimensi antagonisme yang hadir secara konfliktual antar-berbagai identitas.[144] Mari saya sederhanakan: jika seorang analis kebijakan hanya mengamati terjadinya konsensus dalam sebuah tatanan empiris, maka dia sesungguhnya memakai logika *politics*. Dalam hal ini, si analis kebijakan membayangkan bahwa konsensus yang diperoleh dari sebuah dinamika (konflik) kebijakan adalah hasil final dari rasionalitas warga negara yang bebas dan setara.[145] Adapun segala perbedaan (antagonisme) terpaksa dibuang dari unit analisis karena dianggap sebagai penyelewengan terhadap konsensus yang dihasilkan. Contohnya, jika analis melihat hasil pengadilan PTUN keluar dengan putusan tertentu, maka dianggapnya itulah konsensus final yang terbaik, kemudian analisisnya diarahkan untuk mengakomodasi hasil dari putusan tersebut. Cara berpikir semacam ini sesungguhnya mematikan dimensi *political* dalam analisis.

Analisis yang hanya berdasarkan logika *politics* persis sama dengan perspektif rasional yang berambisi menjadikan analisisnya "netral dan apolitis". Analisis ini mengasumsikan bahwa tatanan/nalar publik adalah

144 Mouffe (2005: 8-9) menyebutkan bahwa *political* berada pada dimensi ontologis, sedangkan *politics* merupakan dimensi *ontic* (empiris) dari aktivitas politik.

145 Cara pandang ini dipengaruhi oleh gagasan-gagasan liberal (Rawlsian) dan deliberatif (Habermasian). *Lihat* Juru (2013: 57).

sesuatu yang solid, yang dibentuk atas dasar konsensus bersama. Adapun konsensus itu bisa hadir dari rasionalitas (universal) warga negara sebagaimana doktrin liberalisme atau rasionalitas hasil komunikasi seperti doktrin deliberatif. Karena pembayangan bahwa rasionalitas mampu menghadirkan konsensus yang bulat, maka diasumsikan analisis kebijakan adalah sesuatu yang "netral dan apolitis".

Sebenarnya, jika dilacak sedikit ke belakang, gagasan dari analisis yang netral dan apolitis lebih banyak muncul dalam teori-teori sosial-politik tradisi Amerika. Misalkan saja pengaruh 'Teori Sistem Politik' yang dikemukakan David Easton yang asumsi pokoknya mengunci dinamika politik hanya pada persoalan saluran dan prosedur politik yang legal semata, sedangkan proses politik dalam kebijakan tidak pernah disentuh (Heinelt 2007: 109). Akibatnya, para ilmuwan studi kebijakan pun membuat analisis-analisis yang netralistik dan apolitis. Sebagaimana diungkapkan oleh Jenkins-Smith (1990: 43), terdapat kecenderungan umum untuk "merumuskan kebijakan dengan teknik penelitian, prosedur, dan pengorganisasian, yang secara bersamaan juga mereduksi dimensi kuasa dan peran politik". Padahal analisis yang demikian sesungguhnya mengaburkan dinamika politik dan pertarungan kepentingan yang terjadi dan eksis dalam kebijakan. Selain itu, analisis demikian juga mengerdilkan "nilai penting sebuah ideologi, dan mereduksi politik sekadar sebagai proses untuk mencari cara terbaik menerapkan kebijakan" (Adams 2004: 460).

Dalam analisis kebijakan agonistik, titik tekannya adalah bagaimana dimensi *political* dijelaskan. Mouffe

(2005: 10) menjelaskan bahwa *political* bukanlah masalah teknis belaka yang harus diselesaikan para ahli (*expert*), melainkan suatu persoalan yang melibatkan keputusan yang mengharuskan kita membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang bertentangan. Artinya, logika *political* memandu seorang analis kebijakan untuk mencermati berbagai relasi konfliktual yang bertarung dalam medan wacana, dan mengarahkan analisisinya terhadap sebuah pilihan tertentu. Mari kita elaborasi dari proses agenda seting dalam kebijakan pertambangan di Rembang.

Tabel 12

Proses Agenda Seting Kebijakan Tambang di Rembang

ISU	SEBAB	KEBIJAKAN
Kemiskinan	Sumber daya yang tersedia tidak termanfaatkan dengan baik	Eksploitasi pertambangan skala besar

Jika seorang analis kebijakan menggunakan logika *politics*, maka penentuan agenda yang dibuat negara/pemerintah di atas tidak ada yang bermasalah. Apabila ada masyarakat miskin, kemudian wilayahnya kaya akan bahan tambang, maka sudah logis pula jika eksploitasi pertambangan diberlakukan sebagai solusi. Namun, jika analis kebijakan tersebut menggunakan logika *political*, maka akan ada kecenderungan mempertanyakan dalam relasi konfliktual seperti apakah penentuan agenda yang demikian itu muncul.

Jika dirunut, proses penentuan agenda ini berawal dari pilihan isu berupa kemiskinan. Untuk menegaskan kehadiran isu ini, negara (pemerintah daerah) dan korporasi menyematkan berbagai penanda seperti statistik orang miskin, jumlah pengangguran, status daerah miskin, desa-desa tertinggal, topografi kawasan yang kering, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada unit sebab, secara sepihak negara melihat faktor pemicu kemiskinan adalah karena sumber daya yang ada tidak terkelola dengan maksimal. Dengan begitu solusi yang harus ditempuh adalah pertambangan skala besar yang mampu memaksimalkan dengan baik sumber daya yang tersedia (*baca* Bagian 2). Cara pembacaan itu hanya menakar dimensi *politics* saja, tetapi mengaburkan berbagai dimensi *political*.

Sebaliknya, dengan nalar *political* akan muncul penjelasan yang lebih dinamis. Hal pertama yang harus dicermati adalah formasi wacana yang hendak dibangun negara, dalam hal ini tentunya adalah pembangunan berbasis pertambangan. Dengan membaca penarikan kesimpulan bahwa penyebab kemiskinan akibat sumber daya tidak terkelola, terlebih solusi yang diperlukan adalah pertambangan skala besar, tampak jelas posisi subjek para aktor negara berada dalam relasi penyokong industrialisasi pertambangan. Dengan pembacaan semacam itu, kita bisa menjadi paham bahwa segala jenis pelanggaran terhadap aturan/regulasi, bukan serta-merta dibaca sebagai penyimpangan (*deviant*) dalam kebijakan—sebagaimana logika *politics*—, tetapi lebih merupakan aktivitas politik negara dan korporasi untuk menyelaraskan kepentingannya.

Adapun kepentingan aktor negara ini adalah kepentingan terselenggaranya investasi pertambangan skala besar.

Di sinilah letak perbedaan cara analisis menggunakan logika *politics* dan logika *political*. Dalam logika *political*, bukan saja warga yang menolak pertambangan yang melakukan perjuangan politik, tetapi juga negara dan korporasi ikut melakukan perjuangan politik serupa. Inilah yang menjelaskan mengapa berulang kali pelanggaran atas regulasi diikuti oleh praktik artikulasi dari aktor negara melalui pernyataan pejabat bahwa "semua rencana telah sesuai prosedur" atau "semua telah melalui kajian ahli". Sebab dengan cara itulah pelanggaran regulasi yang dilakukan sendiri oleh negara bisa ditutupi.

Untuk meyakinkan bahwa birokrat sejatinya merupakan aktor yang terlibat dalam kepentingan, perlu saya mengutip uraian Chambers (1983: 274-275) berikut ini:

> Pada kebanyakan negara, kebanyakan dari departemen berkiblat ke dalam dan ke atas, jauh dari kelompok rakyat desa yang harus dilayani. Struktur organisasi dan gaya manajemennya sering dilandasi kekuasaan, hirarkis, dan bersifat menghakimi. Dari atas dan dari pusat, datang komando, target, peringatan dan kadang-kadang ancaman. Dari bawah dan pinggiran, naik arus informasi dan laporan yang sudah disaring, namun menyesatkan. Dalam rapat-rapat, bawahan dicela, dimarahi, dibujuk, dan diberi pesan-pesan. Mereka diminta laporan pencapaian target atau melakukan prakarsa yang tidak tercantum dalam buku pedoman...

> Pimpinan tidak mau belajar dari bawahan, dan petugas pelaksana tidak mau belajar dari kelompok layanan.[146]

Dari ilustrasi di atas sangat terlihat bahwa posisi birokrat terkontekstualisasi dalam suatu relasi spesifik. Sebuah relasi tertentu menciptakan tindakan yang tertentu pula. Artinya, siapa yang paling berpengaruh dalam kontestasi kepentingan, maka pihaknya yang akan memperoleh manfaat paling besar dari kebijakan. Dalam kasus di Rembang terlihat jelas mengapa para elite daerah (eksekutif dan legislatif) nyaris secara keseluruhan mendukung rencana pertambangan semen skala besar. Dalam pandangan elit daerah, kehadiran korporasi besar di daerahnya akan membuka peluang hadirnya ladang rente yang bisa mereka mainkan bersama korporasi.

Dasar asumsi ketiga dari model analisis agonistik adalah visi untuk mengubah antagonisme menuju agonisme. Asumsi terakhir ini sekaligus mengunci asumsi-asumsi yang ada sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan "dari antagonis ke agonis"? Kalau kebijakan kita definisikan sebagai medan pertarungan makna, itu berarti kebijakan merupakan ruang bagi berlangsungnya antagonisme. Namun, analisis kebijakan agonistik bukan semata-mata merayakan ekspresi beragam antagonisme, tetapi mengarahkan transformasi dari antagonisme menuju agonisme. Untuk itu, perlu ada pembedaan antara dua istilah ini. Mouffe (2000: 102-103) memberikan ilustrasi sederhana, bahwa antagonisme adalah perjuangan di antara musuh (*between*

146 Garis bawah dari saya.

enemies), sedangkan agonisme adalah perjuangan di antara lawan (*between adversaries*). Ini artinya, agonisme meyakini bahwa dalam suatu konflik selalu ada relasi antagonistik, tetapi bukan untuk meniadakannya. Karena itu, istilah yang dipakai adalah 'lawan', bukan 'musuh'. Dalam suatu konflik, terdapat beberapa jenis ikatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi harus diperlakukan sebagai lawan, bukan musuh yang harus dibasmi jika terdapat tuntutan yang mendelegitimasinya, sebagaimana dalam relasi antagonistik kawan/musuh (*friend-enemy*) (Mouffe 2005: 20). Konsepsi demikian dibuat sekaligus sebagai kritik dari pendekatan rasionalitas yang mengedepankan soliditas konsensus tetapi konsensus yang dihasilkan berasal dari usaha mengeliminir keberadaan antagonisme. Dengan kata lain, tidak ada ruang bagi penjabaran antagonisme dalam analisis kebijakan yang menggunakan pendekatan rasionalitas.

Dalam konteks model analisis agonistik, seorang analis kebijakan tidak bisa memperlakukan partisipasi sebagai prasyarat atau syarat yang harus ada dalam kebijakan, sebab partisipasi seharusnya menjadi inti dari analisis kebijakan. Karenanya, partisipasi harus dipahami bukan sebagai prosedur, melainkan sebagai inti dasar dalam memahami dinamika kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan agonistik harus melihat partisipasi bukan seperti ruang-ruang dialogis semacam sosialisasi, pengumpulan dukungan (tanda tangan), audiensi dengan pejabat dan sejenisnya. Partisipasi harus dilihat sebagai ekspresi antagonisme dari berbagai posisi subjek yang

terlibat dalam kebijakan. Sebagaimana hasil penelitian yang saya kemukakan dalam buku ini, setiap aksi protes (tindakan, lisan, tulisan) dari warga penolak tambang, juga aktivitas CSR PT Semen Indonesia yang membagi-bagikan dana kepada warga, termasuk pernyataan Ganjar Pranowo bahwa PT Semen Indonesia telah sesuai prosedur adalah bentuk partisipasi dari setiap posisi subjek yang bertujuan untuk mempengaruhi formasi wacana yang ada.

Berpijak pada gagasan partisipasi yang demikian, maka konsekuensinya adalah analis kebijakan agonistik harus membuang pemilahan antara pembuat kebijakan (*policy maker*) dan penerima manfaat (*benefeciaries*). Pemilahan semacam itu hanya akan menjadikan warga di posisi pasif dan apatis.[147] Mengeliminasi pemilahan antara *policy maker* dan *beneficiaries* dalam analisis kebijakan perlu dilakukan, selain tidak relevan karena ditentukan secara pra-konsepsi, juga karena terdapat hubungan dominatif di dalamnya. Pada kenyataannya, *policy maker* akan selalu menempati posisi yang lebih dominan daripada *beneficiaries*. Sebagai

147 Pemilahan semacam ini hanya akan mengakibatkan warga diletakkan sebagai pihak yang pasif dan apatis. Sebagaimana diungkapkan oleh Abrahamsen (2004), kecenderungan analisis dalam teori-teori politik Amerika seringkali menempatkan "apatisme warga sebagai petunjuk bagi tingginya derajat kepercayaan terhadap pemimpin politik (Almond dan Verba 1963), serta pertanda dari kepuasan dasar dari warga dan cerminan dari sehatnya demokrasi (Lipset 1960: 32)". Selain itu, "tingginya partisipasi dianggap sebagai pertanda menurunnya konsensus, meningkatnya ketegangan sosial dan ekstremisme, padahal sesungguhnya warga yang pasif itu sebenarnya menguntungkan bagi pluralisme politik (Barelson dkk. 1954; Barelson 1956; Lipset 1960)". (*dalam* Abrahamsen 2004: 115).

contoh, dalam proses penelitian, ditemukan kenyataan bahwa pada awalnya rencana pertambangan semen di Rembang hanya melibatkan para pejabat lokal seperti camat dan kepala desa. Sebaliknya, warga biasa malah dihambat untuk sekadar mengetahui informasi tentang rencana pertambangan yang akan digalakkan PT Semen Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa aturan main (*rule of the game)* tentang bagaimana partisipasi, ditentukan sepihak oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, warga yang harusnya menjadi *beneficiaries* sesungguhnya adalah korban (*victim*). Untuk itu, dalam analisis kebijakan agonistik, syarat utamanya adalah harus memupus cara pandang pemilahan ini.

Dengan memakai nalar agonistik, sesungguhnya analisis kebijakan secara aksiologis bisa diarahkan pada keberpihakan terhadap kelompok marjinal. Selama ini, analisis-analisis kebijakan (rasional) cenderung mengejar klaim "objektivitas" meski sesungguhnya mengabaikan dampak analisisnya terhadap kelompok yang lemah. Analisis kebijakan yang diklaim "netral dan objektif" ini, dalam banyak hal pula, seringkali hanya melayani kepentingan tertentu yang kadang malah memakan korban. Sebagai contoh, perilaku polisi yang selalu mengklaim "objektif" atas nama hukum, ternyata telah banyak memakan korban. Sejak PT Semen Indonesia merencanakan pembangunan pabrik baru, dari Pati (2005-2009) kemudian ke Rembang (20010-sekarang), hingga berdampak di Kendal (2015-sekarang), pihak kepolisian telah menyeret beberapa petani sebagai kriminal atas nama penegakan "hukum"

yang dianggap "netral dan objektif". Apa yang dilakukan kepolisian ini sesungguhnya dikerangkai dari cara pandang *friend-enemy,* yakni meniadakan antagonisme tertentu jika mendelegitimasi makna yang mapan. Hal-hal seperti inilah yang harus kritis dicermati jika menggunakan analisis kebijakan agonistik.

Catatan Penutup

Secara umum, pembahasan di bagian ini menunjukkan bahwa setiap analisis kebijakan pasti memiliki kecenderungan khas yang dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan tertentu. Model-model analisis kebijakan yang mengagungkan azas "objektif, netral, nir-kepentingan" bisa dipastikan mengikuti kaidah pendekatan rasional. Pendekatan ini menempatkan kebijakan sebagai sebuah perangkat baku yang berisi prosedur-prosedur yang harus dipenuhi baik berupa regulasi maupun pengujian ilmiah. Sebaliknya, model analisis yang mengedepankan "subjektivitas aktor, keberpihakan terhadap subjek, dan keterlibatan dalam kontestasi kepentingan" adalah ciri-ciri model analisis yang memakai pendekatan konstruktivis karena lebih menitikberatkan pembentukan kontruksi makna dalam kebijakan.

Dari kedua pendekatan itu, pendekatan rasional merupakan pendekatan arus-utama yang dipakai oleh hampir seluruh sarjana atau peminat studi kebijakan di Indonesia. Pendekatan rasional lebih banyak dipakai, selain karena berlimpahnya referensi, juga karena tidak banyak upaya para ilmuwan sosial untuk menawarkan

alternatif penjelasan lain. Karena hal itu pula, bagian ini menyuguhkan sebuah ulasan yang bisa menjadi alternatif dalam melakukan analisis kebijakan. Kebijakan agonistik merupakan terminologi yang saya gunakan untuk menjelaskan model analisis alternatif tersebut. Disebut agonistik karena model ini melihat bahwa konsensus yang dibentuk tetap memberikan legitimasi atas ide dan hasrat dari berbagai antagonisme yang ada dalam kebijakan. Hal ini berbeda dengan pendekatan rasional semacam proseduralis dan teknokratis, yang menempatkan konsensus sebagai hasil permanen dari rasionalitas semua pihak, tetapi secara bersamaan menegasikan adanya perbedaan (antagonisme).

BAGIAN 8

POST-SKRIPTUM: PEKERJAAN RUMAH STUDI KEBIJAKAN KE DEPAN

Secara garis besar, buku ini memaparkan cerita tentang berlangsungnya sebuah kebijakan berlabel "janji kesejahteraan" yang malah menghabisi kesejahteraan warganya sendiri. Namun buku ini tidak sedang menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan mengalami kegagalan dalam memenuhi janjinya sebagaimana ditulis para analis yang cenderung berpikir teknokratis-proseduralis. Sebaliknya, saya memberi titik tekan secara serius pada bagaimana "janji kesejahteraan" bukan sesuatu yang tulus, netral, dan tanpa kepentingan. Sebab, "janji kesejahteraan" adalah bagian dari artikulasi yang sangat politis dan penuh tautan kepentingan yang rumit dan saling berkelindan.

Kebijakan yang menjadi unit analisis saya adalah serangkaian kebijakan yang menyokong rencana pertambangan semen di Kabupaten Rembang. Kesejahteraan dari pisau

bedah yang saya pakai di sini merupakan makna dari suatu formasi wacana yang saling diperebutkan oleh dua posisi berseberangan, yakni antara negara dan korporasi—dalam hal ini Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang serta PT Semen Indonesia—berhadapan dengan warga terutama kalangan petani di Rembang. Negara menggunakan wacana kesejahteraan untuk menciptakan hegemoni pembangunan berbasis pertambangan. Dalam pengertian ini, negara menempatkan pembangunan berbasis tambang sebagai satu-satunya pilihan atas jalan kesejahteraan yang mampu mengentaskan kemiskinan yang dihadapi warganya.

Untuk membangun hegemoni pembangunan berbasis tambang, negara menciptakan mitos "tambang untuk kesejahteraan". Terminologi mitos ini bukan dimengerti sebagai sesuatu yang palsu (dalam nalar mitologis konvensional), melainkan ditempatkan sebagai sebuah konstruksi yang memang "harus" dihadirkan untuk memperkokoh formasi wacana yang dikehendaki. Mitos dihadirkan melalui penafsiran aktor-aktor politik dalam negara yang menerjemahkan sebuah kondisi krisis berupa kemiskinan. Kondisi krisis berupa kemiskinan yang dinarasikan negara ditempatkan sebagai akibat dari tidak termanfaatkannya secara maksimal potensi-potensi yang ada di daerah. Dalam penempatan makna semacam inilah negara menjadikan rencana pertambangan sebagai solusi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Berbekal mitos "tambang untuk kesejahteraan", negara berusaha mewujudkan rencana pertambangan dengan menjahit

jalinan makna agar mitos yang dibangun mampu bertransformasi secara simbolis menjadi imaji sosial yang bisa diterima secara luas.

Agar terjadi transformasi tersebut, negara dan korporasi mulai merapikan makna-makna mengambang dengan melakukan praktik artikulasi—baik dalam praktik pertambangan, praktik kebijakan, maupun praktik mobilisasi kesepakatan—agar makna yang terbentuk tetap seirama dengan jalinan kesamaan dalam wacana kesejahteraan. Negara menekankan bahwa sumber daya hanya bisa termanfaatkan melalui praktik pertambangan yang baik. Negara juga menjadikan kebijakan yang sesuai prosedur dan kajian ilmiah sebagai ukuran "kebenaran". Selain itu, mobilisasi dukungan dari beberapa pihak terhadap rencana pertambangan dijadikan justifikasi sebagai keputusan yang harus ditempuh. Melalui cara-cara demikian, kebijakan yang memuluskan rencana pertambangan bisa memperoleh konsensus sepenuhnya. Inilah proses pembentukan hegemoni pembangunan berbasis pertambangan dengan kesejahteraan sebagai formasi wacana yang hendak ditetapkan.

Meskipun pembangunan berbasis tambang berusaha menempati posisi hegemoni, titik nodal kesejahteraan tetap saja mengalami subversi makna yang terus menerus dilakukan oleh para petani (warga). Tidak adanya imaji sosial di kalangan petani untuk menempuh jalan kesejahteraan melalui pertambangan, menyebabkan mitos "tambang untuk kesejahteraan" yang diusung negara kehilangan pijakan sekaligus tidak mampu menciptakan dukungan secara luas di akar rumput. Akibatnya, hegemoni

pembangunan berbasis tambang mengalami berbagai dislokasi sosial dan memicu antagonisme yang pada gilirannya melahirkan gerakan penolakan terhadap rencana pertambangan. Dislokasi sosial ini terjadi persis dalam jahitan berbagai penanda mengambang yang dilakukan negara sehingga memicu adanya reaksi dekonstruksi dan reproduksi makna baru yang sama sekali berbeda sebagaimana hendak dibangun negara.

Dalam kasus kebijakan pertambangan semen di Rembang, dislokasi muncul manakala *green industry* yang disebutkan ramah lingkungan ternyata melahirkan ancaman berupa berbagai kerusakan, baik kerusakan alam maupun kerusakan relasi sosio-kultural yang telah terjalin lama dalam kehidupan warga. Selain itu, dislokasi juga hadir ketika kebijakan proseduralis-teknokratis yang diklaim "pasti benar" oleh negara ternyata menyimpan jejak-jejak manipulatif dan koruptif, baik yang dilakukan para birokrat maupun kalangan teknokrat yang terlibat dalam kebijakan pertambangan di Rembang.

Terbukanya celah dislokasi yang semula ditutupi negara tersebut kemudian memicu munculnya antagonisme warga yang tidak saja menggerogoti bangunan makna kesejahteraan melalui jalan pertambangan, tetapi juga membangun ulang makna kesejahteraan yang sama sekali berbeda dari narasi negara. Warga yang sebagian besar merupakan petani berusaha membangun hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) berupa jalan kesejahteraan dengan hidup melalui pertanian. Hal ini terekspresikan dalam perlawanan mempertahankan tanah dan air yang

menjadi penopang hidup para petani selama ini. Dari sini kita bisa menarik sebuah refleksi bahwa pertambangan semen di Rembang pada dasarnya hanya membuat petani sebagai *victim*, bukan *beneficiaries*. Janji kesejahteraan yang disodorkan negara sesungguhnya adalah upaya paksa untuk menghancurkan kesejahteraan petani itu sendiri.

Dari penyimpulan ini, kita bisa melihat secara berbeda bagaimana sebuah kebijakan berlangsung. Kebijakan bukanlah ruang netral yang jauh dari dinamika kekuasaan yang sejatinya penuh dengan berbagai kepentingan, bahkan menjadi arena tempat kepentingan saling bertarung di dalamnya. *Pun* dengan kesejahteraan, sebagai sebuah wacana, kesejahteraan tidaklah terdefinisikan begitu saja (*given*), tetapi terbentuk dari konsensus-disensus berbagai antagonisme sosial. Cara analisis semacam ini seharusnya bisa digunakan untuk menganalisis kasus-kasus kebijakan sejenis, terutama kebijakan pertambangan yang penuh dengan sengkarut permainan dan kontestasi kepentingan di tingkat lokal. Ketidakcermatan dalam memahami pertarungan kepentingan hanya akan menjadikan suatu analisis kebijakan gagal mengungkap dinamika politik yang berlangsung dalam kebijakan.

Relevansi secara teoretis yang paling signifikan dalam studi ini tentunya adalah sumbangsihnya terhadap cara analisis kebijakan. Studi kebijakan ini tidak berangkat dari pengamatan pada prosedur, yakni apakah prosedur yang ada telah terlaksana/terpenuhi atau tidak. Alih-alih terpaku pada prosedur, studi ini lebih memberikan porsi pengamatan pada bagaimana kebijakan menjadi arena pertarungan dan

kontestasi makna. Fokus analisis kebijakan yang melulu terkonsentrasi pada pengamatan prosedur akan berpotensi jatuh dan gagal memahami kepentingan-kepentingan yang berkelidan dalam kebijakan. Jika kepentingan gagal dipetakan, maka pengambilan kesimpulan dan saran pun hanya akan menjadi pengulangan atas pengetahuan-pengetahuan normatif yang telah ada sebelumnya. Pada level praktis, hasil kajian tersebut tidak akan memberikan dampak spesifik terhadap subjek yang digeluti.

Sebagai pembanding, sebenarnya penelitian yang saya lakukan tentang kasus konflik kebijakan di Rembang bukanlah penelitian yang pertama. Launa Qisti (2015) lebih dulu melakukan studi kebijakan terhadap kasus yang sama. Meski sama-sama mengamati berbagai kejanggalan dalam kebijakan, studi kebijakan yang ia dikerjakan lebih berfokus pada pengamatan pada ketidaksinkronan berbagai prosedur (regulasi) yang ada. Akibatnya, meski kesimpulannya menunjukkan berbagai kesalahan dalam kebijakan, tetapi studi Launa Qisti (2015) tidak mampu menjangkau pembacaan atas dinamika politik yang terjadi dalam kebijakan. Konsekuensi logis dari kegagalan pembacaan itu adalah anggapan bahwa munculnya ketidaksinkronan antar-regulasi hadir begitu saja (*given*). Hal itu ditunjukkan dengan kesimpulan akhir yang menyarankan kepada negara agar memperbaiki kebijakan yang telah dibuat. Dengan saran meminta negara memperbaiki kebijakannya sendiri, ia mengasumsikan negara adalah pihak yang netral dan tidak terlibat dalam berbagai kepentingan dalam kebijakan. Tampak jelas kalau studi ini merupakan pengulangan atas

kesimpulan-kesimpulan normatif dalam studi kebijakan berbasis pengamatan terhadap prosedur.[148]

Hal ini sangat berbeda dengan hasil penelitian sebagaimana dibahas dalam buku ini. Andaikan saya dipaksa untuk memberikan saran untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap "bermasalah", maka saran itu adalah: rebut formasi wacana yang ada. Artinya, gerakan sosial perlu terus dikembangkan untuk mempengaruhi formasi wacana yang berlangsung dalam kebijakan. Bahkan jika mampu, sampai menyeret negara/pemerintah menjadi bagian dari batas politik (*political frontier*) yang sama dengan warga, yaitu menjadikan negara berpihak pada kalangan petani.

Berkaca pada uraian panjang di atas, maka studi ini membuka banyak ruang baru yang bisa diperdalam. Oleh karena itu, saya merasa perlu membuat beberapa provokasi untuk memberikan tantangan baru dalam studi kebijakan ke depan. *Pertama*, perlu adanya penelitian-penelitian lain yang menggunakan paradigma konstruktivis dalam studi kebijakan. Minimnya referensi dengan pendekatan kontruktivis menjadikan wilayah studi kebijakan hanya

148 Bukti bahwa keseimpulan semacam ini adalah pengulangan atas studi-studi kebijakan sebelumnya sama persis ditunjukkan oleh studi Hidayatullah (2016) terhadap kasus yang sama. Pada bagian Kesimpuan dan Saran, dituliskan, "Perlunya kajian dari berbagai disiplin ilmu terkait dengan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem yang dilakukan pemerintah, sehingga dalam proses pembangunan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan." Kalimat yang saya garis bawahi menunjukkan bahwa lagi-lagi negara/pemerintah di anggap netral, padahal sebagaimana saya uraikan, negara sesungguhnya terlibat dalam kepentingan.

menjadi area "hafalan" yang sedikit mengundang perdebatan. Kuatnya pengagungan pada rasionalitas dalam studi kebijakan menjadikan teks satu dengan teks lain hanya melengkapi kekurangan atas perangkat-perangkat analisis yang ada sebelumnya. Adapun perdebatan hanya berputar-putar soal metode/cara kerja, tetapi secara umum tidak ada cara pandang menarik yang benar-benar baru. Dengan penelitian yang memakai paradigma konstruktivis, diharapkan ada banyak redefinisi baru atas kesepakatan-kesepakatan yang selama ini tidak dipertanyakan ulang oleh para pengkaji kebijakan.

Kedua, saatnya untuk merobohkan tembok yang memisahkan antara studi kebijakan dengan studi politik (misalnya studi gerakan). Pemisahan ini menyebabkan studi kebijakan selalu berjarak dengan warga dan menempatkan warga hanya sebagai objek dari kebijakan. Jika pun kajian gerakan memiliki ruang dalam studi kebijakan, biasanya hanya dijadikan salah satu faktor pelengkap dalam kebijakan, tanpa pernah diletakkan bahwa kebijakan dan gerakan merupakan bagian yang sama, yang dipertemukan oleh kontestasi kekuasaan. Merobohkan pagar yang memisahkan studi kebijakan dengan studi gerakan sama artinya dengan usaha menjadikan studi kebijakan lebih sensitif dengan relasi kekuasaan; sesuatu yang tidak pernah dimiliki model analisis teknokratis maupun proseduralis.

Ketiga, berangkat dari dua tantangan sebelumnya, maka tantangan terbesar studi kebijakan ke depan yang perlu digarap serius adalah bagaimana menampilkan analisis-analisis yang secara aksiologis memberikan pembelaan

terhadap kaum yang lemah. Kuatnya cengkeraman cara pandang "netral dan apolitis" menjadikan studi kebijakan kehilangan kakinya atau tidak pernah membumi secara sosial, bahkan cenderung menjadi perangkat bagi tegaknya dominasi dan hegemoni kelompok yang kuat. Apakah terdapat jalan untuk membuat analisis yang memiliki titik aksiologi seperti itu? Tentu saja kita perlu memulainya saat ini!

DAFTAR PUSTAKA

Abrahamsen, R. (2004). *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan* (terj. Heru Prasetia). Yogyakarta: Lafadl.

Adams, Ian. (2004). *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya*. Yogyakarta: Qalam.

Andersen, Niels Åkerstrøm. (2003). *Discursive Analytical Strategies: Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann*. Beristol: the Policy Press.

Anderson, James E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Ashton, P. J., Love, D., Mahachi, H., & Dirks, P. H. G. M. (2001). *An overview of the impact of mining and mineral processing operations on water resources and water quality in the Zambezi, Limpopo and Olifants Catchments in Southern Africa*. Contract Report to the Mining, Minerals and Sustainable Development (Southern Africa) Project, oleh CSIR-Environmentek, Pretoria and Geology Department, University of Zimbabwe-Harare. Report No. ENV-PC, 42.

Ardianto, H. T. (2015a). "Mengapa Pertambangan, Bukan Pertanian?", dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto (ed.). *#Rembang Melawan Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta: Literasi Press & Ladang Kata.

_____. (2015b). "Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan?", dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto (ed.). *#Rembang Melawan Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta: Literasi Press & Ladang Kata.

_____. (2015c). "Tambang dan Lingkungan: Sebuah Perdebatan yang (Di)hilang(kan)". 20 April 2015. Diakses dari http://islambergerak.com/2015/04/tambang-dan-lingkungan-sebuah-perdebatan-yang-dihilangkan/.

Araghi, Farshad. (1995). "Global Depeasantization, 1945-1990". Sociological Quarterly 36: 227-368.

Auty, Richard M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. London: Routledge.

Batubara, B. (2015).). "Benarkah Batu di Rembang Tidak Ada Sumber Air", dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto (ed). *#Rembang Melawan Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta: Literasi Press & Ladang Kata.

Bell, F. G., & Donnelly, L. J. (2006). *Mining and Its Impact on the Environment*. CRC Press.

Biglieri dan Perello. (2011). "The Names of the Real in Laclau's Theory: Antagonism, Dislocation, and Heterogeneity". Filozofski vestnik. Volume XXXII Number 2 -2011, 47–64.

Bolay, Jean-Claude. (2011). "What sustainable development for the cities of the South? Urban issues for a third millennium", International Journal of Urban Sustainable Development, First, 2011, 1–18.

Brock, K., Cornwall, A., & Gaventa, J. (2001). *Power, knowledge and political spaces in the framing of poverty policy*. Brighton: Institute of Development Studies.

Bryceson, D. F. (1996). "De-Agrarianization and Rural Employment in Sub-Saharan Africa: A Sectoral Perspective". World Development 4(1), 97-111.

Buana, Arlian. (2015). "Orang-Orang Tegaldowo", dalam *Merry Christmas Felix Siauw!*. Yogyakarta: EA Books.

Budiman, Arief (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chambers, Robert. (1983). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.

Dahlan, Muhamad Arif. (2011). "Kebijakan Pendidikan Gratis di Tingkat Regional: Konsep dan Pelaksanaan di Kabupaten Rembang". Politika, Jurnal Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Vol 2, No 2 (Oktober 2011).

Dasgupta, P. (2008). "Nature in economics. Environmental and Resource Economics", 39(1), 1-7.

Davis & Tilton, Graham A. dan John E. (2002). "Should Developing Countries Renounce Mining? A Perspective

on The Debate". Versi 12 Desember. Diunduh dari http://inside.mines.edu/~gdavis/Papers/Davis_and_Tilton_2002.pdf (20/6/2014).

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi 2)*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Dye, Thomas R. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc.

Edwards III & Sharkansky, George C. dan Ira. (1978). *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*. San Francisco: W.H. Freeman and Company.

Falah, A. B., Rahmadi, C. (2015). "Telaah Semen Rembang: Antara Ramah Lingkungan Dan Kenyataan Sebenarnya". 27 April 2015. Diakses dari http://www.mongabay.co.id/2015/04/27/telaah-semen-rembang-antara-ramah-lingkungan-dan-kenyataan-sebenarnya/.

Fortis, M. F. D. A. (2014). *Bringing Politics and Administration Together: For an Agonistic Policy Model*. Disertasi, University of Westminster.

Gramsci, Antonio. (1986). *Selections from Prison Notebooks* (Eds. Quintin Hoare dan Geoffrey. N. Smith). London: Lawrence and Wishart.

Goreux, Louis. 2001. "Conflict Diamonds". Washington D.C :World Bank, Africa Region Working Paper Series No. 13 (Maret).

Gustommy, R. (2012). "Menjinakkan Negara, Menundukkan Masyarakat: Menelusuri Jejak Strategi

Kuasa PT Lapindo Brantas Inc. dalam Kasus Lumpur Panas Sidoarjo". dalam Heru Prasetya (ed.). *Bencana Industri Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo*. Jakarta: Yayasan Desantara.

Hanif, Hasrul. (2007). "Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik". Jurnal Sosial dan Politik. Vol. 11, No. 1, Juli (119-136).

Hasanbeigi, A., dkk. (2012). *Quantifying the Co-benefits of Energy-Efficiency Programs: A Case Study of the Cement Industry in Shandong Province, China*. Berkeley: Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory.

Heinelt, Hubert. (2007). "Do Policies Determine Politics?". Dalam Fischer, Frank, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Boca Raton: CRC Press.

Hettne, B. (1995). *Development Theory and The Three Worlds: Towards an International Political Economy of Development*. New York: Longman.

Hewitt, Sally. (2009). "Discourse Analysis and Public Policy Research". Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 24, Oktober 2009.

Hidayatullah, Umar. (2016). *Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik PT Semen Indonesia Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang*. Skripsi, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Howarth & Stavrakakis, David dan Yannis. (2000). "Introducing Discourse Theory and Political Analysis", dalam David Horath, Aletta J. Norval, dan Yannis Stavrakakis, *Discourse Theory and Political Analysis Identities, Hegemonies, and Social Change*. Manchester: Manchester University Press.

Huda, M. Nurul. (2011). *Penetrasi Kapitalisme dan Transformasi Sosial di Bojonegoro: Studi Kasus Proyek Migas Blok Cepu*. Tesis Program Magister Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia.

Hutagalung, Daniel. (2008). "Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Prural: Membaca Laclau dan Mouffe", dalam Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis Postmarxisme + Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist.

Jamison, A. (2004). *The Making of Green Knowledge Environmental Politics and Cultural Transformation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jenkins-Smith, H. (1990). *Democracy Politics and Policy Analysis*. California: Brook/Cole Publishing.

Johnson, Craig. (2013). *Pembangunan Tanpa Teori Kuasa Pengetahuan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.

Jones, Harry. (2009). "Policy-making as discourse: a review of recent knowledge-to-policy literature". IKM Working Papers, No.5, Agustus 2009.

Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor.

Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2010). *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Juru, Ignasius J. (2013). *Dislokasi Wacana Kewarganegaraan Melampaui Liberalisme menuju Wacana Agonistik*. Yogyakarta: Polgov.

Kill, J. (2014). *Economic Valuation of Nature: The Price to Pay for Conservation? A Critical Exploration*. Rosa-luxemburg-stiftung Brussels office, No financialization of nature network.

Koalisi Responsi Bank Indonesia. (2015). *Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang*. Jakarta: Prakarsa.

Knutsson, Baniamin. (2009). "The Intelectual History of Development Toward a Widening Potential Repertoire". Perspektive 13, April. Göteborg University.

Laclau, E. dan Mouffe, C. (2008). *Hegemoni dan Strategi Sosialis Postmarxisme + Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.

Laclau, E. (1990). *New Reflections on the Revolution of Our Time*. London & New York: Verso.

Manalu, Dimpos. (2009). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatra Utara*. Yogyakarta: UGM Press.

Meadowcroft, James. (1999). "The Politics of Sustainable Development Emergent Arenas and Challenges for Political Science", International Political Science Review 1999, Vol.20, 219-237.

Mochtar, Hilmy. (2006). *Politik Mobilisasi Dukungan Pembangunan Industri Semen Tuban (1989-1998)*. Disertasi Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Mouffe, C. (1992). "Preface: democratic politics today", in C. Mouffe (ed.) *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship and Community*. London: Verso.

_____. (2000). *The Democratic Paradox*. London: Verso.

_____.(2005). *On the Political*. Psychology Press.

_____.(2013). *Agonistics: Thinking the World Politically*. London: Verso.

Nietzsche, F. (1968). *The Will to Power*. terj. W. Kaufmann and R.J. Hollingdale, ed. W. Kaufmann, New York: Vintage.

Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

_____. (2009). *Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pedro, A. M. (2006). "Mainstreaming mineral wealth in growth and poverty reduction strategies". Minerals & Energy-Raw Materials Report, 21(1), 2-16.

Qisti, Launa. (2015). *Harmonisasi Hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Robertson, James. (2005). "The New Economics of Sustainable Development, A Briefing for Policy Makers, A Report for the European Commission", European Commission 1999, Kogan Page.

Rostow, W. (1961). *The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.

Roy, Arundhati. (2015). *Capitalism: A Ghost Story*. Verso Books.

Sachs, J. D. & Warner, A. M. (2001). "Natural Resources and Economic Development The Curse of Natural Resources". European Economic Review 45. h.827-838.

_____. (1997). "Natural Resource Abundance and Economic Growth". Center for International Development and Harvard Institute for International Development (November). Cambridge: Harvard University.

Salim, E. (2003). "Striking a Better Balance: the World Bank Group and Extractive Industries". *The final report of the Extractive Industry Review*.

Santoso, P. dan Hanif, H., Gustomy, R. (ed.). (2004). *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Santoso, Purwo. (1999). *The Politics of Enviromental Policy Making in Indonesia: A Study of State Capacity, 1967-1994*. Disertasi, London School of Economic and Political Science.

_____. (2008). "Mengungkap Demokratisasi dari Keseharian Masyarakat", dalam *Mengembalikan Daulat Warga Pesisir Partisipasi, Representasi dan Demokratisasi di Aras Lokal*. Hasrul Hanif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saragih, R. & Aziz, KN. (2016). "Perlawanan Petani Kendal: Kronologi Konflik Lahan Antara Warga Surokonto Wetan dan PT Perhutani Kab. Kendal, Jawa Tengah". 7 April. Diakses dari http://www.daulathijau.org/?p=751.

Savirani, Amalinda. (2003). "Ilmu Pemerintahan Masa Depan: Mengadvokasi Politik Pinggiran", dalam Jurnal Transformasi Vol.1, No.1, September 2003. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

Sugiono, Muhadi. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. (2003). *Modal Sosial dan Reorientasi Kebijakan Publik: Studi Utilisasi Modal Sosial dalam Proses Reorientasi Kebijakan Agraria Lokal pada Kasus Sengketa Properti Tanah Petani Melawan PTPN XII di Kawasan Malang Selatan*. Tesis Pasca Sarjana Ilmu

Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada. (tidak dipublikasikan)

Sulistijo, B. (2014). "Kawasan Karst dan Penambangan". Suara Merdeka, 14 Juli 2014. http://www.suara-merdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/14/267265/10/Kawasan-Karst-dan-Penambangan.

Thomafy, N. F. (2012). "Potret Usaha Perizinan Kabupaten Rembang". http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/penyederhanaan-perijinan?sobi2 Task=sobi2 Details&sobi2Id=89.

Torfing, J. (1999). *New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, Žižek*. Oxford: Blackwell Publishers.

_____. (2005). "Poststructuralist discourse theory: Foucault, Laclau, Mouffe and Zizek". dalam Thomas Janoski dkk (ed.), *The Handbook of Political Sociology State, Civil Societies, and Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.

UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Akses di www.unep.org/greeneconomy.

Vermeulen, H. (1996). "The Concept of Emancipation in Ethnic Studies". Studia Rosenthaliana, Vol. 30, No. 1, Proceedings of the Seventh International. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/41482704 (1/8/2015).

Wacana, P., dkk. (2015). "Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah". Dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto (ed). *#Rembang Melawan*

Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng. Yogyakarta: Literasi Press & Ladang Kata.

Wall & Pelon, Elizabeth dan Remi. (2011). "Sharing Mining Benefits in Developing Countries: The Experience with Foundations, Trusts, and Funds". The World Bank, Extractive Industries for Development Series No. 21, Juni.

Weber-Fahr, M., Strongman, J., Kunanayagam, R., McMahon, G., & Sheldon, C. (2001). *Mining and poverty reduction*. Washington, DC: The World Bank.

Wright, Gavin. (1999). "Can a Nation Learn? American Technology as a Network Phenomenon" dalam Naomi R. Lamoureaux, Daniel M. G. Raff, dan Peter Tennin, eds., *Learning by Doing in Markets, Firms and Countries*. Chicago: University of Chicago Press.

Regulasi

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010.

Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2011-2030

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015.

Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Permen Kehutanan RI no. P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen, Surat, dan Laporan

Acintyacunyata Speleological Club (ASC). (2013). Peta Cekungan Air Tanah Watuputih Beserta Sebaran Goa, Mata Air, Sumur, Ponor, dan Batas Izin Usaha PT Semen Gresik Tbk.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang. (2014). "Rembang Dalam Angka 2012".

Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. (tanpa tahun). "Peta Tumpang Tindih Izin Lokasi PT Semen Gresik dengan Izin Eksplorasi PT Gunung Mas Mineral".

Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. (2011). "Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Atas Nama PT Semen Gresik Tbk No: 02/PTP-IL.33.17.400.9/XI/2011".

Kementrian Lingkungan Hidup. (2015). "Laporan Gas Rumah Kaca 2014", diakses dari http://www.menlh.go.id/wp-content/uploads/downloads/2014/12/Laporan-Inventarisasi-GRK-Tahun-2014.pdf.

Keputusan Bupati Rembang No.545/68/2010 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

Komnas HAM. (2014). "Surat Komnas HAM No.2/K/PMT/X/2014 tentang Rekomendasi atas Pengaduan Penolakan Pendirian Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang". 14 Agustus 2014.

Mahkamah Agung. (2010). "Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2010 Tahun 2010 Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) vs Kepala Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dkk". diakses dari http://putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (2007). "Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008".

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Badan Lingkungan Hidup (BLH). (2013). "Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pabrik Semen Jawa PT Gunung Mas Mineral di Desa Kajar dan Desa Tegaldowo (Kecamatan Gunem) serta Desa Kadiwono (Kecamatan Bulu) Kabupaten Rembang Nomor 660.1/487/2013".

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. (2015). "Salinan Putusan Resmi Nomor: 064/6/PTUN Smg". 23 April 2015.

PT Semen Gresik Tbk. (2012). "Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah".

Surat Keputusan (SK) Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

UN Document. (tanpa Tahun). "Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development". http://www.un-documents.net/ocf-02.htm#Iv

Wiharto, Agung. (2015). "Presentasi Seminar Semen Indonesia: Model Pengelolaan Industri Smen Yang

Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Terkait Ekosistem", 28 Mei 2015, dii Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Koran

Kompas. (2014). "Karst Rembang Punya Fungsi Lindung". 22 Oktober 2014.

_____. (2014). "Dirut Semen Indonesia: Kami akan Berjalan Sesuai Aspek Legal". 31 Agustus 2014.

_____. (2014). "Didesak Cabut Izin Amdal Pabrik Semen, Ini Jawaban Ganjar Pranowo". 21 Juni 2014

_____. (2014). "Dirut Semen Indonesia: Kami akan Berjalan Sesuai Aspek Legal". 31 Agustus 2014.

Republika. (2014). "Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Sudah Penuhi Syarat". 25 September 2014.

_____. (2014). "Pabrik Semen di Rembang Diminta Segera Dibangun". 26 September 2014.

Suara Merdeka. (2005). "Ketua DPRD H Djoemali SSos: Rembang Punya Harta Karun". 19 April 2005.

_____. (2005) "Ajak Putra Rembang Ubah Status Miskin'' . 7 November 2005.

_____. (2005). "Tambang di Rembang: Banyak Potensi, Sedikit Dimanfaatkan". 16 Desember.

_____. (2009). "Rembang Siap Bantu PT Semen Gresik". 13 Juni 2009.

_____. (2009). "Ribuan Desa di Jawa Tengah Masih Masuk Katagori Miskin". 11 Juli 2009.

_____. (2009a). "Bibit Enggan Cari Lokasi Baru". 27 Juli 2009.

_____. (2009b). "Hari Jadi Ke-268 Rembang Bebaskan Predikat sebagai Daerah Tertinggal". 27 Juli 2009.

_____. (2010). "Tiga Investor Baru Minati Tambang Rembang". 1 November 2010.

_____. (2010). "Februari Pelabuhan Nasional di Rembang Beroperasi". 29 Desember 2010.

_____. (2013). "Pembangunan Pabrik Semen Diminta Tak Dihalang-halangi". 18 Januari 2013.

_____. (2013). "Bibit Akui Gagal Turunkan Angka Kemiskinan". 31 Maret 2013.

_____. (2014). "Pabrik Semen di Rembang Dianggap Tak Langgar Perda". 21 Februari 2014.

_____. (2014). "Enam-LSM-Dukung-Pendirian-Pabrik-Semen". 3 Juli 2014.

_____. (2015). "Mahasiswa Diminta Tidak Provokasi Warga Rembang". 1 April 2015.

_____. (2015). "PT Semen Indonesia Targetkan CSR Rp 13,5 Miliar untuk Rembang". 26 September 2015.

Suara Pembaruan. (2013). "Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo: Melanjutkan Gerakan *Bali Ndeso Mbangun Deso*". 11 Mei 2013.

Tribun Jateng. (2015). "UGM Beri Sanksi Dua Akademisinya Terkait Kasus Rembang". 15 April 2015.

_____. (2015). "*Sedulur Sikep* Nyatakan Tak Bermasalah dengan Pabrik Semen Pati". 16 November 2015.

Situs Online

antarajateng.com. (2013). "Pabrik Semen Senilai Rp 37 Triliun Masuk Rembang". 18 Februari 2013. Diakses dari http://www.antarajateng.com/detail/pabrik-semen-senilai-rp37-triliun-masuk-rembang.html.

_____. (2015). "Warga Rembang Buktikan Pabrik Semen Indonesia Bermanfaat". 5 September 2015. Diakses dari http://jateng.antaranews.com/detail/warga-rembang-buktikan-pabrik-semen-indonesia-bermanfaat.html

bareksa.com. (2015). "Pabrik Semen Indonesia di Rembang dan Demonstran Tenda Biru". 16 Maret 2015. Diakses dari http://www.bareksa.com/id/text/2015/03/16/pabrik-semen-indonesia-di-rembang-dan-demonstran-tenda-biru/9741/ analysis

beritaloka.com. (2015). "Karst Pegunungan Sewu Rentan Pencemaran". 5 Februari 2015. Diakses dari http://www.beritaloka.com/2015/02/karst-pegunungan-sewu-rentan-pencemaran.

bumn.go.id. (2015). "Pakar Ushul Fiqh: Pabrik Semen di Rembang Mengurangi Pengangguran". 24 Maret 2015. Diakses dari http://bumn.go.id/semenindonesia/berita/0-Pakar-Ushul-Fiqh-Pabrik-Semen-di-Rembang-Mengurangi-Pengangguran.

detakjateng.com. (2014). "Pabrik Semen di Rembang Jalan Terus, Rekomendasi Komnas HAM Ditolak". 15 Nop 2014. Diakses dari http://detakjateng.com/berita/

pabrik-semen-di-rembang-jalan-terus-rekomendasi-komnas-ham-ditolak.html

www.economist.com. "Cement manufacturers: Cracks in the surface". 27 Agustus 2016. Diakses dari http://www.economist.com/news/business/21705861-why-grey-firms-will-have-go-green-cracks-surface?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/cracksinthesurface.

hijauku.com. (2014). "Warga Rembang Tolak Pabrik Semen". 16 Juni 2014. Diakses dari http://www.hijauku.com/2014/06/16/warga-rembang-tolak-pabrik-semen/.

portalkbr.com. (2014). "PT Semen Indonesia Tuding LSM Provokasi Warga Rembang". 17 Juni 2014. Diakses dari http://portalkbr.com/novaeny_wulandari/06-2014/pt__semen_indonesia_tuding_lsm_provokasi_warga_rembang/27805.html

kabartuban.com. (2012). "Warga Tuding PTSG Penjahat Lingkungan". 26 April 2012. Diakses dari http://kabartuban.com/warga-tuding-pt-sg-penjahat-lingkungan/796.

lensaindonesia.com. (2013). "Komisi C tuding PT Semen Indonesia tak populis". 13 Juli 2013. Diakses dari http://www.lensaindonesia.com/2013/07/13/komisi-c-tuding-pt-semen-indonesia-tak-populis.html

liputan6.com. (2014). Kalau Semen Indonesia Punya Amdal, Pembangunan Pabrik Bisa Lanjut". 19 Jun 2014. Diakses dari http://bisnis.liputan6.com/

read/2065771/kalau-semen-indonesia-punya-amdal-pembangunan-pabrik-bisa-lanjut.

mataairradio.com. (2013). "Pemkab Tetap Kukuh, Izin Pabrik Semen Sesuai RTRW". 20 September 2013. Diakses dari http://mataairradio.com/berita-rembang/izin-pabrik-semen

omahkendeng.org. (2014). "Gunretno: Ilmu itu Lelaku". 25 Agustus 2014. Diakses dari http://omahkendeng.org/2014-08/2187/gunretno-ilmu-itu-lelaku/.

realita.co. (2015). "Dinsosnaker Tuding Semen Indonesia Hanya Peduli Promosi". 19 Maret 2015. Diakses dari http://realita.co/index.php?news=Dinsosnaker-Tuding-Semen-Indonesia-Hanya-Peduli--Promosi~3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298 29623112599f2ddc9239b7d86f14c8ca744c

semenindonesia.com. (2014). "Semen Indonesia Serius Tangani Lingkungan". 3 September 2014. Diakses dari http://www.semenindonesia.com/page/read/semen-indonesia-serius-tangani-lingkungan-2602.

_____. (2014). "Gubernur Ganjar Pranowo Pastikan Izin Sesuai Prosedur". 22 Januari 2015. Diakses dari http://www.semenindonesia.com/page/read/gubernur-ganjar-pranowo-pastikan-izin-sesuai-prosedur-2720.

_____. (2014). Laporan Pelaksanaan Paparan Publik (Public Exspose) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada Acara Investor Summit 2014. Diakses dari http://www.semenindonesia.com/assets/files/files/investor/

Public%20Expose/2014/Laporan%20 Public%20 Expose_25.08.2014%20Final.pdf

_____. (2015). "Mbah Maimun Doakan SMI untuk Bangsa". 12 Februari 2015. Diakses dari http://www.semenindonesia.com/page/read/mbah-maimun-doakan-smi-untuk-bangsa-2735.

youtube.com. (2014). "Rembang Cement Plant 3D". 21 Juli 2014. Diunggah Biro Humas. https://www.youtube.com/watch?v=QNb3D8bBl1Q.

_____. (2014). "Kondisi pasca penambangan Pabrik Semen Gresik di Tuban". 22 Juli 2014. Diunggah Semen Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=geLwWG2fU0s

_____. (2015). "Samin vs Semen (Full Movie)". Diunggah Watch Dog. 3 Maret 2015. https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q

_____. (2014). "Sikep Samin Semen". 26 Juli 2015. Diunggah Mkz Picture. https://www.youtube.com/watch?v=LrjRARvV3uU.

_____. (2014). "Metro Realitas: Perempuan-Perempuan Penjaga Karst", Kredit video milik Metro TV. Diunggah ulang pada 21 Juli 2014. https://www.youtube.com/watch?v=P4AU3fldEhY.

Indeks

A

agonis 214
agonistik 205, 206, 207, 208, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 219
air
- air bawah tanah 88
- air permukaan 132, 133
- bank air 136
- cekungan air tanah 97, 136, 145
- kawasan imbuhan air 134, 147, 148, 149
- mata air 87, 135, 136, 137, 147, 158, 159, 161, 169
- pencemaran air 42
- sumber air 91, 132, 142, 160, 161, 193, 194

akademik vi, ix, 10, 13, 22, 87, 97, 161
analisis
- analisis hegemoni 31, 33
- metode analisis 29
- model analisis xiv, xv, 1, 2, 3, 10, 35, 198, 205, 206, 207, 214, 215, 218, 219, 228
- strategi analisis 29, 31, 33

Andersen 29, 30, 32, 231
antagonis 214
antagonisme 8, 9, 23, 24, 25, 26, 35, 79, 122, 164, 166, 167, 182, 187, 188, 195, 196, 198, 209, 214, 215, 218, 219, 224, 225
antagonistik 195, 215
apolitis vi, 1, 2, 3, 35, 157, 201, 203, 209, 210, 229
Arundhati Roy 40

B

Bank Dunia 37, 40, 46, 47
batas politik 21, 117, 227
birokrasi v, 1, 10, 63, 110, 111, 143, 146, 150, 151, 152, 156, 201
birokrat 2, 10, 174, 199, 204,

213, 214, 224
Brundtland Commision 43

C

CSR xxvii, xxxii, 47, 91, 137, 138, 139, 140, 171, 194, 216, 247

D

David McClelland 38
deagrarianization 184, 185
depeasantization 184, 185
desa
Bali Deso Mbangun Deso 55
Bitingan 93
Dowan 93
Jatisari 93
Kadiwono 93, 102, 153, 245
Kajar 93, 94, 153, 245
Pasucen 93, 153
Sembungrejo 95
Suntri 93, 94
Surokonto Wetan 154, 156, 174, 240
Tegaldowo 3, 66, 67, 76, 77, 93, 123, 124, 125, 141, 152, 166, 168, 169, 173, 179, 188, 189, 190, 233, 245
Temandang 95
Timbrangan 4, 77, 93, 124, 141, 152, 169, 179, 188, 189, 190
Tobo 96
Dimpos Manalu x, 13
disensus 8, 16, 32, 225
dislokasi 19, 23, 24, 25, 34, 35, 122, 125, 152, 164, 167, 196, 224

E

efek kerusakan 82, 176
efek menetes ke bawah 40
efek semburan ke atas 40
ekologi xvii, 45, 81, 183, 185
ekologis 44, 193
ekonomi
ekonomi hijau 48, 49
ekonomistik 38, 42, 43
perekonomian 59, 60
pertumbuhan ekonomi ii, 41, 42, 47, 51, 71, 74
ekspansi 85, 118, 131, 184
Emil Salim 48

G

gas rumah kaca 89, 126, 127, 128, 129
GATT 37
geologi 134, 136, 147, 148, 149, 159, 160, 162
gerakan sosial vii, xviii, xxi, 9, 13, 227
ghost town 42
globalisasi 64, 69
goa 87, 136, 158, 160, 161
goa basah 136
good governance 46, 49, 83

good mining practices 83, 120

H

Harrod-Domar 38
hegemoni
hegemoni negara 7, 19, 35, 167
hegemoni pembangunan berbasis tambang 9, 24, 25, 34, 124, 196, 222, 223
intervensi hegemoni 19, 20, 21
perjuangan hegemoni 23, 25, 196
Hidayatullah 165, 169, 227, 235
hidrologi 109, 134, 137, 160
Hilmy Mochtar 13

I

ibu pertiwi 185, 186, 187, 188
ijon 182
imaji sosial 24, 25, 78, 79, 121, 122, 124, 163, 166, 223
IMF 37, 40, 46
industri
green industry 51, 85, 126, 164, 224
industri pertambangan i, 94, 167, 182
industri semen ii, 14, 60, 70, 73, 74, 96, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134
intersubjektif 195, 200
investasi xxi, 39, 50, 59, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 99, 100, 114, 213
investor 63, 69, 70, 71, 73, 75, 250
istilah lokal
buwoh 190
paceklik 176, 177
sambatan 141, 190, 191
sedekah bumi 94, 142
izin
IUP xxvii, 99, 150, 161
perizinan 31, 70, 98, 99, 100, 102, 110, 144, 150, 151, 152, 174
WIUP xxviii, 77, 99, 244

J

jalinan kesamaan 19, 20, 114, 115, 117, 119, 120, 223

K

Kabupaten
Banjarnegara 55
Banyumas 61
Batang 59
Blora 55, 61, 63, 115, 146
Grobogan 55, 63
Kebumen 55
Pati x, xi, 55, 60, 61, 63, 71, 76, 99, 114, 115, 116, 117, 156, 166,

174, 175, 178, 183, 217, 245, 247
Rembang i, ii, x, xi, xvi, xviii, xxi, xxv, xxix, xxx, xxxi, xxxii, 3, 4, 8, 17, 20, 33, 36, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 124, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 174, 185, 193, 194, 205, 208, 211, 214, 217, 222, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251
Tuban xii, 14, 67, 95, 96, 125, 132, 140, 184, 238, 251, 267
Wonogiri 55, 61

karst 87, 97, 131, 134, 135, 137, 144, 147, 148, 248

kawasan
kawasan imbuhan air 134, 147, 148, 149
kawasan lindung geologi 134, 147, 148, 149, 159

kebijakan
analisis kebijakan v, vi, vii, viii, xiii, xiv, xv, xvi, xix, xxi, 1, 2, 4, 28, 35, 36, 197, 198, 199, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 225, 226
dinamika kebijakan 3, 14, 22, 29, 98, 201, 202, 215
instrumen kebijakan 3
konflik kebijakan 3, 17, 226
pembuat kebijakan 5, 10, 11, 110, 201, 216, 217
studi kebijakan vii, xiii, xv, xvi, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 35, 197, 198, 199, 210, 218, 226, 227, 228, 229

kecamatan
Bulu 67, 92, 153, 245
Gunem 4, 66, 67, 92, 93, 94, 96, 103, 132, 133,

137, 149, 153, 170, 227, 235, 245
Pageruyung 154
Sluke 67, 68, 70, 96, 149
Sukolilo 60, 99, 114, 175
kekerasan 16, 62, 156
kemiskinan ii, xx, xxi, 4, 25, 41, 42, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 71, 72, 77, 78, 82, 113, 212, 222
keterbelakangan 4, 38
Komisi Pemberantasan Korupsi xxviii, 156
konsensus 16, 21, 28, 32, 82, 119, 203, 206, 209, 210, 215, 216, 219, 225
kontingensi 22
korupsi 41, 156

L

Laclau ix, xxix, 6, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 32, 119, 231, 233, 236, 237, 241
Launa Qisti 226
lingkungan
kerusakan lingkungan 4, 87
penyelamatan lingkungan 62, 185
ramah lingkungan 47, 50, 51, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 126, 129, 224
logika kesamaan 18
logika perbedaan 19, 115

M

mitos 24, 25, 34, 54, 72, 78, 79, 82, 86, 121, 122, 163, 222, 223
modernisme 38, 40, 42
Mouffe ix, 6, 16, 17, 18, 22, 23, 119, 206, 207, 209, 210, 214, 215, 236, 237, 238, 241
multiplier effect 72

N

nama aktor
Abdul Hafidz 102
Abimanyu 87, 109
Adi Purwoto 102
Agung Wiharto 94, 96, 97, 100, 109, 132, 133
Bibit Waluyo 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 74, 75, 100, 247
Bosman Batubara ix, 160
Budi Sulistijo 97, 102
Chafid Fandeli 104
Damae Wardani 86
Dhandy Laksono 114, 115
Djoemali 58, 246
Dwi Soetjipto 81, 86, 91, 107
Eko Haryono 104, 160, 161, 163
Ganjar Pranowo 61, 62, 102, 216, 246, 250

Gunretno x, 165, 166, 188, 250
Gus Wahyu NH Aly. 113
Hamzah Fathoni 71
Hari Subagyo 118
Haryadi 118
Heru Hendrayana 160, 161, 163
Husaini Rahman 103, 104
Javar x, 123, 124
Joko Prianto 165
M. Salim 56, 57, 74, 75, 101
Oetnil Moeda 108
Sugiarto 101
Sukinah x
Teguh Dwi Paryono 100
Zaenuddin Ja'far 65

Negara
Amerika Serikat 38, 42, 45
Angola 42
Australia 38, 42, 45
China 127, 235
Kanada 42, 45
Kongo 42
Sierra Leone 42
Uni-Eropa 45

netral vi, viii, 1, 2, 3, 4, 6, 28, 35, 110, 111, 143, 150, 156, 201, 202, 204, 209, 210, 217, 218, 221, 225, 226, 227, 229

Nietsczhe 6

nir-kepentingan vi, 1, 2, 3, 35, 201, 218

NU xxviii, 85, 112

O

objektif 6, 17, 21, 22, 23, 28, 111, 121, 143, 157, 161, 199, 202, 204, 206, 217, 218

orientasi
society-actor oriented 12, 15
state-actor oriented 12

P

pabrik semen i, 59, 60, 61, 62, 64, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 92, 95, 96, 103, 113, 114, 119, 125, 128, 130, 131, 132, 140, 150, 155, 156, 166, 174, 177, 181

pelabuhan niaga 69, 70

pembangunan
pembangunan berkelanjutan 43, 50, 83
pembangunan ekonomi 38, 40, 41, 42, 43, 59

pemerintah ii, vi, vii, 3, 4, 39, 47, 78, 100, 101, 127, 136, 140, 144, 147, 152, 153, 165, 183, 201, 211, 212, 227
Kabupaten Rembang xvi, xxix, 3, 4, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 90, 99,

100, 101, 102, 146, 149, 150, 151, 153, 174, 221, 222, 233, 235, 241, 242, 243, 244, 245
Provinsi Jawa Tengah 3, 4, 55, 77, 90, 100, 134, 148, 149, 150, 154, 222, 243, 245
penanda kosong 20
penanda mengambang 20, 21, 34, 35, 119, 120, 224
penerima manfaat vii, 201, 216
perampasan lahan 183
perdagangan bebas 64, 69
pertambangan semen 3, 6, 21, 54, 59, 60, 62, 70, 73, 86, 96, 98, 101, 102, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 127, 131, 132, 137, 140, 143, 150, 151, 154, 157, 177, 192, 214, 217, 221, 224, 225
perusahaan 61, 63, 73, 74, 83, 84, 85, 91, 103, 104, 115, 119, 127, 155, 162, 181
PT Cemindo Gemilang 63
PT Gunung Mas Mineral 151, 244, 245
PT Imasco Tambang Raya 63
PT Indocement 63
PT Kuala Biru Utama Baru 103, 104
PT Sahabat Mulia Sakti 63
PT Semen Gresik 60, 61, 71, 73, 90, 99, 174, 239, 244, 245, 246
PT Semen Indonesia xxiv, xxix, xxxi, xxxii, 3, 4, 60, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 117, 118, 125, 126, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 171, 174, 175, 176, 177, 180, 183, 184, 185, 187, 192, 193, 194, 216, 217, 222, 227, 235, 244, 247, 249, 250
PT Sumurpitu Wringinsari 154, 155, 156
PT Vanda Prima Listri 63
peta 158, 159, 160

political 21, 117, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 227, 233
politics 208, 209, 211, 212, 213, 238
ponor 136, 147, 159, 160, 161
posisi subjek 57, 207, 212, 215, 216
praktik artikulasi 7, 8, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 78, 82, 83, 98, 110, 115, 117, 119, 120, 167, 195, 213, 223
prosedur
proseduralis 2, 3, 4, 5, 10, 11, 28, 120, 143, 204, 219, 221, 224, 228
proseduralisme 10, 11, 98, 100, 110, 111, 156, 157, 164
PTUN x, xxviii, 31, 116, 118, 140, 160, 183, 209, 245
Purwo Santoso ix, xiii, 12

R

rasionalitas 2, 5, 111, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 209, 210, 215, 219, 228
reklamasi 83, 90
revegetasi 90
Richard M. Auty 41
Rostow 38, 42, 239
RPJMD xxviii, 55, 60, 64, 65, 69, 242, 243

S

Sachs & Warner 41
sawah 95, 169, 179, 186
subjektif 28, 78, 200, 202, 206
sumber daya ii, xxi, 38, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 78, 82, 83, 121, 144, 164, 212, 223
kutukan sumber daya 41, 46
sustainability 34, 44, 45, 51

T

tambang
aktivitas tambang 86, 87, 91, 126
bisnis pertambangan 86, 154
pendukung tambang 139, 140, 157, 192
penolak tambang 6, 9, 61, 86, 109, 113, 130, 136, 139, 141, 175, 176, 185, 187, 216
pertambangan semen 3, 6, 21, 54, 59, 60, 62, 70, 73, 86, 96, 98, 101, 102, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 127, 131, 132, 137, 140, 143, 150, 151, 154, 157, 177, 192, 214, 217, 221, 224, 225

pertambangan skala besar 39, 72, 75, 78, 100, 164, 176, 181, 184, 211, 212, 213
pertambangan skala kecil 66, 152, 176
rencana pertambangan 6, 8, 21, 54, 76, 78, 82, 86, 87, 88, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 137, 139, 140, 143, 146, 149, 150, 151, 157, 159, 164, 166, 173, 175, 176, 177, 182, 187, 192, 214, 217, 221, 222, 223, 224
tambang untuk kesejahteraan 25, 34, 54, 72, 73, 78, 82, 86, 163, 182, 222, 223

tanah
letter-C 175
perampasan tanah 174
sertifikat tanah 170
tanah bengkok 170, 175
tanah persil 170

tani
bertani 167, 178, 181, 182, 184, 185, 195, 208
pertanian 8, 62, 63, 95, 96, 97, 123, 124, 125, 142, 156, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 182, 183, 189, 191, 193, 224
petani ii, xv, xvi, 3, 7, 8, 17, 21, 61, 62, 79, 95, 97, 110, 123, 124, 136, 142, 156, 163, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 207, 217, 222, 223, 224, 225, 227
teknokratis 2, 3, 4, 5, 10, 11, 28, 120, 125, 143, 204, 205, 219, 221, 224, 228

tegalan 169, 171, 173, 179
teknokrat 103, 111, 143, 187, 199, 201, 204, 224
teknokratisme 10, 11, 98, 108, 109, 110, 111, 157, 164
teknologi 39, 88, 90, 126, 129, 133

ternak
beternak 169, 178, 181
kambing 169, 178, 181
sapi 169, 178, 179, 180,

181
Thomafy 70, 71, 241
titik nodal 20, 34, 35, 120, 195, 223

U

UU Minerba 83, 99

W

wacana
analisis wacana 15, 26, 27, 29, 31, 33
formasi wacana 17, 18, 19, 25, 26, 31, 98, 111, 124, 166, 207, 208, 212, 216, 222, 223, 227
wacana kesejahteraan 3, 7, 8, 9, 17, 19, 24, 25, 34, 54, 55, 82, 86, 111, 121, 124, 125, 163, 164, 166, 167, 222, 223
wacana pembangunan 33, 37, 44, 46, 50, 98
WGI xxviii, 85, 86
win-win solution vii
WTO 37

TENTANG PENULIS



Hendra Try Ardianto, lahir di Tuban, Jawa Timur 1988. Menempuh pendidikan dasar sampai menengah di kota asal, Tuban. Hijrah ke Yogyakarta untuk belajar Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada hingga jenjang Pascasarjana. Sejauh ini telah terlibat baik sebagai penulis, editor, maupun penulis antologi tulisan. Selain tulisan-tulisan di jurnal, media cetak maupun elektronik, beberapa karya yang telah diterbitkan di antaranya: *Memutus Interaksi Patron Klien di Lingkungan Perkebunan* (JIP, 2009), *#RembangMelawan Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng* (Literasi Press, 2015), *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal* (PCD Press, 2015). Penulis bisa dihubungi di *hendratrya@gmail.com*.